



**PEMERINTAH KOTA  
LHOKSEUMAWA**



**Audited BPK RI**

# **Laporan Keuangan**

**Tahun Anggaran 2023**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil' alamin, atas rahmat dan karunia Allah S.W.T Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melaksanakan program kerja Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dengan maksimal.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perwal Kota Lhokseumawe Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pergeseran Ke empat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe TA 2023, serta berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe TA 2023 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 5), maka dengan ini Pemerintah Kota Lhokseumawe menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menilai kondisi Kas, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dan disampaikan sebagai media pertanggungjawaban anggaran serta telah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 ini, diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran, memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja tahun 2023.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun 2023 yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
3. Neraca, menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023.
4. Laporan Operasional, menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2023 yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Kota Lhokseumawe.
5. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir 2023.
6. Laporan Arus Kas, memberikan informasi arus kas bersih dari aktivitas operasional, arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan, arus kas bersih dari aktivitas non anggaran, sehingga di ketahui kenaikan/penurunan kas selama periode pelaporan, ditambah saldo kas pada bendahara.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan, dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, disertai penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Demikian laporan keuangan ini disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kota Lhokseumawe terus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan yang benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah S.W.T senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah.

Lhokseumawe, 17 Mei 2024

**Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE**



**A. HANAN, SP, MM**



**WALI KOTA LHKSEUMAWE**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe (LKPD) *audited* yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir merupakan tanggungjawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Posisi Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe secara layak sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan.

Lhokseumawe, 17 Mei 2024

**Pj. WALI KOTA LHKSEUMAWE**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a long, thin vertical stroke extending downwards.

**A. HANAN, SP, MM**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	1
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH .....	3
C. NERACA.....	4
D. LAPORAN OPERASIONAL.....	6
E. LAPORAN ARUS KAS.....	8
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	10
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	11
BAB I PENDAHULUAN .....	11
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	13
1.3 Informasi Umum Tentang Kota Lhokseumawe .....	15
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBK.....	21
2.1 Potensi Pengembangan Wilayah.....	21
2.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.3 Ketenagakerjaan .....	22
2.4 Kemiskinan .....	23
2.5 Indeks Pembangunan Manusia .....	23
2.6 <i>Gini Ratio</i> .....	24
2.7 PDRB Per Kapita.....	25
2.8 Laju Inflasi .....	26
2.9 Kebijakan Keuangan.....	27
2.10 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2019 s.d. 2023 .....	32
2.11 Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe .....	38
2.12 Pencapaian Target Kinerja .....	38

2.13	<i>Mandatory Spending</i> dalam Postur APBD.....	40
BAB III	KINERJA KEUANGAN DAERAH .....	46
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	46
3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.....	50
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	51
4.1	Entitas Pelaporan .....	51
BAB V	PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN.....	82
5.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	82
5.2	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)....	120
5.3	Penjelasan atas Akun dalam Neraca .....	123
5.4	Penjelasan atas Akun dalam Laporan Operasional (LO) .....	166
5.5	Penjelasan atas Akun dalam Laporan Arus Kas .....	205
5.6	Penjelasan atas Akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	209
5.7	Penjelasan atas Baitul Mal Kota Lhokseumawe.....	213
BAB VI	PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	217
5.1	VISI.....	217
5.2	MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI.....	217
BAB VII	PENUTUP .....	222
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1	Perkiraan Jumlah Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe Selama Kurun Waktu 2019-2023 ..... 23
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk dan Indikator Kemiskinan di Kota Lhokseumawe, Selama Kurun Waktu 2019-2023..... 23
Tabel 2.3	Patokan Nilai <i>Gini Ratio</i> ..... 24
Tabel 2.4	Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah ..... 27
Tabel 2.5	Rekapitulasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Kota Lhokseumawe ..... 30
Tabel 2.6	Alokasi <i>Mandatory Spending</i> Bidang Kesehatan..... 40
Tabel 2.7	Alokasi <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan ..... 43
Tabel 2.8	Alokasi <i>Mandatory Spending</i> Bidang Infrastruktur ..... 44
Tabel 2.9	Alokasi <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pengawasan..... 45
Tabel 2.10	Alokasi <i>Mandatory Spending</i> Fungsi ADD ..... 45
Tabel 3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ..... 46
Tabel 4.1	Besarnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ..... 64
Tabel 4.2	Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang ..... 65
Tabel 4.3	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap..... 75
Tabel 4.4	Penambahan Masa Manfaat ..... 76
Tabel 4.5	Masa Manfaat untuk Menghitung Tarif Penyusutan ..... 78
Tabel 5.1	Realisasi Pendapatan Per Kelompok Pendapatan TA 2023 dan 2022 ..... 82
Tabel 5.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022 ..... 84
Tabel 5.3	Rincian Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 ..... 85
Tabel 5.4	Rincian Realisasi Pajak Hotel TA 2023 dan 2022 ..... 85
Tabel 5.5	Rincian Realisasi Pajak Restoran TA 2023 dan 2022 ..... 86
Tabel 5.6	Rincian Realisasi Pajak Reklame TA 2023 dan 2022 ..... 87
Tabel 5.7	Rincian Realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2023 dan 2022 ..... 87
Tabel 5.8	Rincian Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C TA 2023 dan 2022..... 88
Tabel 5.9	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022 ..... 89
Tabel 5.10	Rincian Retribusi Jasa Umum TA 2023 dan 2022 ..... 90

Tabel 5.11	Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu TA 2023 dan 2022 .....	92
Tabel 5.12	Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022 .....	92
Tabel 5.13	Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022 .....	93
Tabel 5.14	Rincian Dana Kapitasi JKN TA 2023 dan 2022 .....	95
Tabel 5.15	Rincian Pendapatan Zakat, dan Infaq / Shadaqah TA 2023 dan 2022 .....	96
Tabel 5.16	Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022 .....	96
Tabel 5.17	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022.....	97
Tabel 5.18	Dana Bagi Hasil TA 2023 dan 2022.....	98
Tabel 5.19	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - SDA TA 2023 dan 2022 .....	98
Tabel 5.20	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– DAK TA 2023 dan 2022 .....	99
Tabel 5.21	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– DAK Fisik TA 2023 dan 2022.....	100
Tabel 5.22	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–DAK Non Fisik TA 2023 dan 2022.....	101
Tabel 5.23	Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan 2022 ..	102
Tabel 5.24	Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah dari DBH Provinsi untuk Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2023 dan 2022 .....	103
Tabel 5.25	Rincian Belanja dan Transfer Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2023 dan 2022.....	104
Tabel 5.26	Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2023 dan 2022 .....	105
Tabel 5.27	Rincian Belanja Pegawai Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2023 dan 2022.....	105
Tabel 5.28	Rincian Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2023 dan 2022.....	106
Tabel 5.29	Rincian Belanja Subsidi Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2023 dan 2022 .....	108
Tabel 5.30	Rincian Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 .....	108
Tabel 5.31	Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2023 dan 2022 .....	109
Tabel 5.32	Rincian Belanja Modal TA 2023 dan 2022 .....	111
Tabel 5.33	Rincian Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022.....	112
Tabel 5.34	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 .....	112



Tabel 5.35	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 .	114
Tabel 5.36	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022.....	115
Tabel 5.37	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 .....	115
Tabel 5.38	Rincian Belanja Tidak Terduga TA 2023 dan 2022.....	116
Tabel 5.39	Rincian Transfer TA 2023 dan 2022.....	117
Tabel 5.40	Rincian Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa TA 2023 dan 2022.	117
Tabel 5.41	Rincian Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022.....	117
Tabel 5.42	Rincian Pembiayaan Daerah TA 2023 dan 2022 .....	118
Tabel 5.43	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2023 dan 2022 .....	119
Tabel 5.44	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022.....	120
Tabel 5.45	Rincian Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2022.....	123
Tabel 5.46	Rincian Aset Lancar Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2022 .....	124
Tabel 5.47	Rincian Jumlah Kas dan Setara Kas Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2022.....	124
Tabel 5.48	Rekening di Kas Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2022.....	125
Tabel 5.49	Rincian Sisa Dana BOS Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2022.....	126
Tabel 5.50	Rincian Kas di Bendahara JKN Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2022 .....	126
Tabel 5.51	Rincian Rekonsiliasi Kas di Bendahara JKN Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023.....	127
Tabel 5.52	Rincian Piutang Tahun 2023 dan 2022.....	128
Tabel 5.53	Rincian Piutang Pendapatan Tahun 2023 dan 2022 .....	128
Tabel 5.54	Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Tahun 2023.....	129
Tabel 5.55	Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2023.....	129
Tabel 5.56	Rincian Mutasi Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023 .....	131
Tabel 5.57	Rincian Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil dari Pusat Tahun 2023.....	132
Tabel 5.58	Rincian Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi Tahun 2023	132
Tabel 5.59	Rincian Piutang Lainnya Tahun 2023 dan 2022 .....	133
Tabel 5.60	Nilai Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 .....	133
Tabel 5.61	Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023 .....	135
Tabel 5.62	Rincian Persediaan Per Jenis Persediaan Tahun 2023 dan 2022.....	135

Tabel 5.63	Rincian Investasi Jangka Panjang Tahun 2023 dan 2022.....	137
Tabel 5.64	Rincian Investasi Non Permanen Tahun 2023 dan 2022.....	137
Tabel 5.65	Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2022.....	137
Tabel 5.66	Rincian Penyertaan Modal PT Bank Aceh .....	138
Tabel 5.67	Nilai Investasi PDAM Ie Beusaree Rata Tahun 2023 .....	138
Tabel 5.68	Rincian Perubahan Ekuitas PTPL Tahun 2023 .....	139
Tabel 5.69	Nilai Investasi PTPL Tahun 2023 .....	139
Tabel 5.70	Aset Tetap Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2022.	140
Tabel 5.71	Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 .....	140
Tabel 5.72	Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023.....	141
Tabel 5.73	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 .....	143
Tabel 5.74	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 .....	151
Tabel 5.75	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 .....	152
Tabel 5.76	Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023.....	153
Tabel 5.77	Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 .....	154
Tabel 5.78	Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 dan 2022 .....	155
Tabel 5.79	Rincian Mutasi Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022 .....	156
Tabel 5.80	Rincian Aset Tidak Berwujud.....	156
Tabel 5.81	Rincian Aset Tidak Berwujud - <i>Software</i> Tahun 2023.....	157
Tabel 5.82	Rincian Perhitungan Aset Tidak Berwujud Per SKPK – <i>Software</i> Tahun 2023 .....	157
Tabel 5.83	Rincian Aset Tidak Berwujud – Kajian Tahun 2023.....	158
Tabel 5.84	Rincian Mutasi Aset Kajian Tahun 2023.....	158
Tabel 5.85	Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2023.....	159
Tabel 5.86	Aset yang Dihilangkan Masih Tercatat di BMD Tahun 2023.....	159
Tabel 5.87	Aset Pemerintah Kota yang Dipinjam Pakaian Masih Tercatat di BMD Tahun 2023.....	160
Tabel 5.88	Rincian Akumulasi Amortisasi Tahun 2023 .....	160
Tabel 5.89	Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi ATB - <i>Software</i> Tahun 2023 .....	161
Tabel 5.90	Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023 dan 2022 .....	162
Tabel 5.91	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 dan 2022 .....	163
Tabel 5.92	Rincian Utang Belanja Tahun 2023 .....	164
Tabel 5.93	Utang Asuransi Kesehatan Tahun 2023.....	165

Tabel 5.94	Realisasi Pendapatan Per Kelompok Pendapatan – LO Tahun 2023 dan 2022 .....	166
Tabel 5.95	Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	168
Tabel 5.96	Perbedaan Pajak Daerah– LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 .....	168
Tabel 5.97	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2023.....	170
Tabel 5.98	Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2023 dan 2022.....	171
Tabel 5.99	Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO dan LRA Tahun 2023 dan 2022.....	172
Tabel 5.100	Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022 .....	173
Tabel 5.101	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2023 dan 2022 .....	174
Tabel 5.102	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2023 dan 2022 .....	176
Tabel 5.103	Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2023 .....	176
Tabel 5.104	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2023.....	176
Tabel 5.105	Pendapatan Bantuan Keuangan-LO Tahun 2023 .....	178
Tabel 5.106	Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun 2023 dan 2022.....	178
Tabel 5.107	Rincian Pendapatan Hibah – LO Tahun 2023 dan 2022.....	178
Tabel 5.108	Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO Tahun 2023 dan 2022.....	179
Tabel 5.109	Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO Tahun 2023 dan 2022 .....	180
Tabel 5.110	Beban Daerah Tahun 2023 dan 2022 .....	182
Tabel 5.111	Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022.....	182
Tabel 5.112	Rincian Beban Pegawai - LO Tahun 2023 dan 2022 .....	183
Tabel 5.113	Rekapitulasi Beban Pegawai – LO Per SKPK Tahun 2023 dan 2022.....	183
Tabel 5.114	Rincian Beban Barang Tahun 2023 dan 2022.....	184
Tabel 5.115	Rekapitulasi Beban Barang Per SKPK Tahun 2023 dan 2022.....	186
Tabel 5.116	Rincian Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022 .....	189
Tabel 5.117	Rekapitulasi Beban Jasa Per SKPK Tahun 2023 dan 2022 .....	189
Tabel 5.118	Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022.....	192
Tabel 5.119	Rekapitulasi Beban Pemeliharaan Per SKPK Tahun 2023 dan 2022	192

Tabel 5.120	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022.....	194
Tabel 5.121	Rekapitulasi Beban Perjalanan Dinas Per SKPK Tahun 2023 dan 2022.....	194
Tabel 5.122	Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO Tahun 2023 dan 2022.....	196
Tabel 5.123	Beban Barang dan Jasa BOS – LO Tahun 2023 dan 2022 .....	196
Tabel 5.124	Rincian Beban Subsidi Tahun 2023 dan 2022 .....	196
Tabel 5.125	Rincian Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 .....	197
Tabel 5.126	Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022.....	198
Tabel 5.127	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 .....	199
Tabel 5.128	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022...	200
Tabel 5.129	Rekapitulasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 .....	200
Tabel 5.130	Rekapitulasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022.....	201
Tabel 5.131	Rekapitulasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022.....	201
Tabel 5.132	Rekapitulasi Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 dan 2022 .....	202
Tabel 5.133	Rekapitulasi Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022.....	202
Tabel 5.134	Rincian Beban Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022 .....	202
Tabel 5.135	Rincian Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 .....	203
Tabel 5.136	Rincian Beban Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 .....	204
Tabel 5.137	Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022 .....	204
Tabel 5.138	Rincian Arus Kas Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	205
Tabel 5.139	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	206
Tabel 5.140	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	206
Tabel 5.141	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	207
Tabel 5.142	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	208
Tabel 5.143	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	208

Tabel 5.144	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	209
Tabel 5.145	Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 dan 2022.....	209
Tabel 5.146	Daftar Koreksi Ekuitas Per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	210
Tabel 5.147	Penerimaan Zakat dan Infaq TA 2023.....	215
Tabel 5.148	Data Penyaluran Zakat dan Infaq Kota Lhokseumawe TA 2023.....	215

## DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Tahun 2019 s.d. 2023.. 22
Gambar 2.2	Perkembangan IPM Kota Lhokseumawe 2019-2023 ..... 24
Gambar 2.3	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Kota Lhokseumawe 2018-2022..... 25
Gambar 2.4	PDRB Per Kapita ADHB Lhokseumawe dari Tahun 2019 s.d. 2023 26
Gambar 2.5	PDRB Per Kapita ADHK Lhokseumawe dari Tahun 2019 s.d. 2023 ..... 26
Gambar 2.6	Laju Inflasi Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018 s.d. 2022 ..... 27
Gambar 2.7	Target dan Realisasi Pendapatan dari Tahun 2019 s.d. 2023..... 39
Gambar 2.8	Anggaran Belanja dan Realisasi dari Tahun 2019 s.d. 2023..... 39
Gambar 3.1	Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 ..... 49
Gambar 3.2	Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023..... 49
Gambar 5.1	Realisasi Pendapatan Tahun 2023 ..... 83
Gambar 5.2	Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..... 84
Gambar 5.3	Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023..... 104
Gambar 5.4	Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023..... 111
Gambar 5.5	Perbandingan Komposisi Aset Per 31 Desember 2023 ..... 123
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Pendapatan – LO Kota Lhokseumawe Tahun 2023 ..... 167
Gambar 5.7	Perbandingan Realisasi Pendapatan – LO dan Realisasi Pendapatan – LRA Kota Lhokseumawe Tahun 2023 ..... 167
Gambar 5.8	Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2023 ..... 168

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Pengeluaran Zakat dan Infaq Tahun Anggaran 2023
- Lampiran 2 Laporan Realisasi Dana Bos Pemerintah Kota Lhokseumawe
- Lampiran 3 Piutang Transfer Provinsi 2023 Pemerintah Kota Lhokseumawe
- Lampiran 4 Daftar Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe
- Lampiran 5 Rekapitulasi Sewa Dibayar Dimuka
- Lampiran 6 Rekap Persediaan Pemerintah Kota Lhokseumawe
- Lampiran 7 Penerima Dana Bergulir Program PEM
- Lampiran 8 Perhitungan Tambah/Kurang Penyertaan Modal PDAM Ie Beusaree Rata
- Lampiran 9 Mutasi KIB A - Aset Tetap Tanah Pemerintah Kota Lhokseumawe
- Lampiran 10 Mutasi KIB B – Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Lhokseumawe
- Lampiran 11 Rincian Koreksi Kurang Aset Tetap – Peralatan dan Mesin akibat double catat
- Lampiran 12 Mutasi KIB C – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Lhokseumawe
- Lampiran 13 Mutasi KIB D - Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Lhokseumawe
- Lampiran 14 Mutasi KIB E - Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Lhokseumawe
- Lampiran 15 Mutasi KIB F - Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Lhokseumawe
- Lampiran 16 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Lhokseumawe
- Lampiran 17 Daftar Mutasi Aset Lain-Lain Pemerintah Kota Lhokseumawe
- Lampiran 18 Rekap Pajak Diterima Dimuka Pemko Lhokseumawe
- Lampiran 19 Rekap Kewajiban Pemerintah Kota Lhokseumawe
- Lampiran 20 Penjelasan Selisih Beban Pegawai dan Belanja Pegawai
- Lampiran 21 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Belanja Barang
- Lampiran 22 Penjelasan Selisih Beban Jasa dan Belanja Jasa
- Lampiran 23 Penjelasan Selisih Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan
- Lampiran 24 Penjelasan Selisih Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas
- Lampiran 25 Penjelasan Selisih Beban Hibah dengan Belanja Hibah
- Lampiran 26 Penjelasan Selisih Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial
- Lampiran 27 Penjelasan Selisih Beban Bantuan Keuangan dan Belanja Bantuan Keuangan

Lampiran      Laporan Keuangan PT Pembangunan Lhokseumawe  
Lampiran      Laporan Keuangan PDAM Ie Beusaree Rata





## LAPORAN KEUANGAN POKOK

## A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

NO URUT	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.1.1</b>	<b>768.471.407.647,00</b>	<b>755.949.798.672,00</b>	<b>98,37</b>	<b>789.566.096.079,52</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>75.120.033.625,00</b>	<b>67.901.946.334,00</b>	<b>90,39</b>	<b>68.212.506.871,28</b>
4.1.1	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	34.060.750.000,00	39.586.915.813,00	116,22	40.032.463.309,91
4.1.2	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	4.087.500.000,00	3.733.420.512,40	91,34	3.022.508.323,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	5.200.000.000,00	3.236.124.545,00	62,23	4.350.084.432,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	31.771.783.625,00	21.345.485.463,60	67,18	20.807.450.806,37
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>692.811.374.022,00</b>	<b>687.825.852.338,00</b>	<b>99,28</b>	<b>721.353.589.208,24</b>
4.2.1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>5.1.1.2.1</b>	<b>631.695.343.383,00</b>	<b>630.906.590.568,00</b>	<b>99,88</b>	<b>622.773.568.549,00</b>
	Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	14.970.371.095,00	14.951.657.125,00	99,87	19.666.583.345,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	10.297.693.288,00	10.297.693.288,00	100,00	5.842.230.812,00
	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	433.613.526.000,00	436.369.459.000,00	100,64	415.683.229.737,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.4	105.256.051.000,00	102.155.961.900,00	97,05	93.236.323.753,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.5	5.730.566.000,00	5.730.566.000,00	100,00	34.445.081.000,00
	Dana Desa	5.1.1.2.1.6	61.827.136.000,00	61.401.253.255,00	99,31	53.900.119.902,00
4.2.2	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>5.1.1.2.2</b>	<b>61.116.030.639,00</b>	<b>56.919.261.770,00</b>	<b>93,13</b>	<b>98.580.020.659,24</b>
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.2.1	31.220.106.455,00	34.250.277.597,00	109,71	29.261.429.715,29
	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	29.895.924.184,00	22.668.984.173,00	75,83	69.318.590.943,95
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>540.000.000,00</b>	<b>222.000.000,00</b>	<b>41,11</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah		540.000.000,00	222.000.000,00	41,11	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.1.2</b>	<b>798.260.907.647,00</b>	<b>728.461.011.932,00</b>	<b>91,26</b>	<b>825.509.672.418,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1</b>	<b>595.256.623.128,00</b>	<b>548.509.273.989,00</b>	<b>92,15</b>	<b>576.374.939.708,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	333.590.854.673,00	316.584.344.048,00	94,90	304.916.122.038,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	198.420.544.061,00	177.812.072.024,00	89,61	185.425.254.292,00
	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	470.000.000,00	470.000.000,00	100,00	200.000.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	29.753.421.564,00	22.501.686.262,00	75,63	36.702.542.385,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	33.021.802.830,00	31.141.171.655,00	94,30	49.131.020.993,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2</b>	<b>82.331.873.436,00</b>	<b>60.336.467.761,00</b>	<b>73,28</b>	<b>142.251.751.256,00</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	523.400.000,00	0,00	0,00	13.713.809.182,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	16.744.311.095,00	15.627.696.279,00	93,33	21.363.441.916,00



NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	36.586.560.395,00	21.923.145.455,00	59,92	40.945.930.770,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	24.463.735.146,00	18.771.759.227,00	76,73	62.614.371.138,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	4.013.866.800,00	4.013.866.800,00	100,00	3.614.198.250,00
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>52.650.368,00</b>	<b>52.650.368,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.134.850.082,00</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	52.650.368,00	52.650.368,00	100,00	2.134.850.082,00
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>5.1.2.4</b>	<b>120.619.760.715,00</b>	<b>119.562.619.814,00</b>	<b>99,12</b>	<b>104.748.131.372,00</b>
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	3.814.825.000,00	3.183.566.844,00	83,45	1.820.631.270,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	116.804.935.715,00	116.379.052.970,00	99,64	102.927.500.102,00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>		<b>(29.789.500.000,00)</b>	<b>27.488.786.740,00</b>	<b>(92,28)</b>	<b>(35.943.576.338,48)</b>
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>31.789.500.000,00</b>	<b>10.541.034.674,37</b>	<b>33,16</b>	<b>48.484.611.012,85</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1	31.789.500.000,00	10.541.034.674,37	33,16	48.484.611.012,85
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	2.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>29.789.500.000,00</b>	<b>9.541.034.674,37</b>	<b>32,03</b>	<b>46.484.611.012,85</b>
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>5.1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>37.029.821.414,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.541.034.674,37</b>

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE

A. HANAN, SP, MM

**B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH****PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
Per 31 Desember 2023 dan 2022***(Dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	REFF	REALISASI 2023	REALISASI 2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	10.541.034.674,37	48.484.611.012,85
2	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	10.541.034.674,37	48.484.611.012,85
3	Sub Total		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	37.029.821.414,37	10.541.034.674,37
5	Sub Total		37.029.821.414,37	10.541.034.674,37
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	37.029.821.414,37	10.541.034.674,37

**Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE**  
**A. HANAN, SP, MM**

**C. NERACA**

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 2023 dan 2022**

<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	REF	2023	2022
<b>ASET</b>	<b>5.3.1</b>		
<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1</b>		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	33.408.590.754,69	10.334.150.946,69
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	42.113,00	2.650.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	567.776.147,00	26.900,00
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.4	4.227.000,00	4.587.180,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.5	1.720.331.153,68	204.216.827,68
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.6	1.328.854.246,00	
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	58.239.967,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1.1	29.821.469.331,00	27.614.851.292,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.1.2	4.456.647.851,00	4.278.923.084,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.1.3	22.509.388.107,00	676.358,48
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.1.4	7.758.384.383,00	7.763.074.737,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.2	1.366.106.463,00	1.366.106.463,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.2.3	(27.241.974.117,50)	(24.785.654.357,75)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.3	218.201.653,87	376.496.187,83
Persediaan	5.3.1.1.4	43.244.906.326,79	56.015.157.515,35
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>119.221.191.379,53</b>	<b>83.175.263.134,28</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>			
Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1	124.500.000,00	124.500.000,00
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>		<b>124.500.000,00</b>	<b>124.500.000,00</b>
<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>			
Penyertaan Modal	5.3.1.2.2	23.846.136.984,00	24.384.016.280,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>		<b>23.846.136.984,00</b>	<b>24.384.016.280,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>23.970.636.984,00</b>	<b>24.508.516.280,00</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3</b>		
Tanah	5.3.1.3.1	775.155.473.039,24	769.004.582.939,24
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	335.705.052.210,58	322.182.283.002,91
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	732.100.853.803,09	701.845.960.348,09
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	1.230.910.841.509,73	1.211.372.189.882,73
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	16.468.602.833,00	15.458.801.449,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	11.876.358.050,00	18.686.213.050,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.088.983.491.094,31)	(997.185.512.556,01)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>2.013.233.690.351,33</b>	<b>2.041.364.518.115,96</b>



(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan		0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.3.1.4</b>		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	0,00	2.788.757.383,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	4.161.072.491,00	4.161.072.491,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	37.594.726.995,00	37.462.517.588,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.4	(2.225.079.900,00)	(2.125.152.900,00)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)		4.549.615.000,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>44.080.334.586,00</b>	<b>42.287.194.562,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.200.505.853.300,86</b>	<b>2.191.335.492.092,24</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.3.2.1</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	4.210.967,00	4.597.180,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	994.895.840,06	365.104.768,82
Utang Belanja	5.3.2.1.3	31.526.194.189,23	39.806.720.922,76
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	14.927.644.376,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>47.452.945.372,29</b>	<b>40.176.422.871,58</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>47.452.945.372,29</b>	<b>40.176.422.871,58</b>
<b>EKUITAS</b>			
EKUITAS	5.3.3	2.153.052.907.928,57	2.151.159.069.220,66
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>2.200.505.853.300,86</b>	<b>2.191.335.492.092,24</b>

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE

A. HANAN, SP, MM

**D. LAPORAN OPERASIONAL**

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	REFF	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>						
<b>7</b>	<b>PENDAPATAN – LO</b>	<b>5.4.1</b>	<b>737.743.143.111,08</b>	<b>746.815.477.503,81</b>	<b>(9.072.334.392,73)</b>	<b>(1,21)</b>
<b>7.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>69.800.576.794,28</b>	<b>69.830.333.900,29</b>	<b>(29.757.106,01)</b>	<b>(0,04)</b>
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	41.202.037.631,76	41.222.848.671,92	(20.811.040,16)	(0,05)
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	5.4.1.1.2	3.992.605.512,40	3.499.949.990,00	492.655.522,40	14,08
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	5.4.1.1.3	3.236.124.545,00	4.350.084.432,00	(1.113.959.887,00)	(25,61)
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	21.369.809.105,12	20.757.450.806,37	612.358.298,75	2,95
<b>7.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>5.4.1.2</b>	<b>654.851.643.929,00</b>	<b>673.146.947.716,72</b>	<b>(18.295.303.787,72)</b>	<b>(2,72)</b>
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	5.4.1.2.1	597.924.688.037,00	571.662.882.388,48	26.261.805.648,52	4,59
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.4.1.2.3	56.926.955.892,00	101.484.065.328,24	(44.557.109.436,24)	(43,91)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	5.4.1.2.3.1	34.257.971.719,00	32.165.474.384,29	2.092.497.334,71	6,51
	Bantuan Keuangan-LO	5.4.1.2.3.2	22.668.984.173,00	69.318.590.943,95	(46.649.606.770,95)	(67,30)
<b>7.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO</b>	<b>5.4.1.3</b>	<b>13.090.922.387,80</b>	<b>3.838.195.886,80</b>	<b>9.252.726.501,00</b>	<b>241,07</b>
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	13.090.922.387,80	3.838.195.886,80	9.252.726.501,00	241,07
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>5.4.2</b>	<b>720.187.933.349,26</b>	<b>739.412.852.926,88</b>	<b>(19.224.919.577,62)</b>	<b>(2,60)</b>
	<b>BEBAN OPERASI</b>		<b>557.065.139.103,12</b>	<b>575.808.905.464,88</b>	<b>(18.743.766.361,76)</b>	<b>(3,26)</b>
8.1.1	Beban Pegawai – LO	5.4.2.1.1	316.232.129.315,00	307.398.707.189,00	8.833.422.126,00	2,87
8.1.2a	Beban Barang	5.4.2.1.2	41.756.147.395,36	41.048.620.645,92	707.526.749,44	1,72
8.1.2b	Beban Jasa	5.4.2.1.3	89.280.015.850,96	108.188.858.437,48	(18.908.842.586,52)	(17,48)
8.1.2c	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	8.197.639.280,00	12.019.913.144,50	(3.822.273.864,50)	(31,80)
8.1.2d	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	26.224.373.459,00	25.221.117.808,00	1.003.255.651,00	3,98
8.1.2e	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.2.1.6	862.040.500,00	0,00	862.040.500,00	0,00
8.1.2f	Beban Barang dan Jasa BOS	5.4.2.1.7	16.180.875.800,00	0,00	16.180.875.800,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	5.4.2.1.8	470.000.000,00	200.000.000,00	270.000.000,00	135,00
8.1.5	Beban Hibah	5.4.2.1.9	23.473.953.742,00	34.226.957.487,00	(10.753.003.745,00)	(31,42)
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.10	31.003.721.155,00	40.463.863.030,53	(9.460.141.875,53)	(23,38)
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.11	3.384.242.605,80	384.855.623,45	2.999.386.982,35	779,35
	Beban Lain-lain		0,00	6.656.012.099,00	(6.656.012.099,00)	(100,00)
	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>5.4.2.2</b>	<b>114.838.448.734,14</b>	<b>117.755.935.992,00</b>	<b>(2.917.487.257,86)</b>	<b>(2,48)</b>
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.1	20.881.534.295,45	24.810.868.713,00	(3.929.334.417,55)	(15,84)



NO. URUT	URAIAN	REFF	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.2	14.098.342.179,18	13.485.621.024,00	612.721.155,18	4,54
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.2.3	79.758.645.259,51	79.324.595.671,00	434.049.588,51	0,55
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.2.4	99.927.000,00	134.850.584,00	(34.923.584,00)	(25,90)
	<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>5.4.2.3</b>	<b>48.231.695.144,00</b>	<b>45.848.011.470,00</b>	<b>2.383.683.674,00</b>	<b>5,20</b>
8.3.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.4.2.3.1	3.183.566.844,00	1.857.425.770,00	1.326.141.074,00	71,40
8.3.2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.3.2	45.048.128.300,00	43.990.585.700,00	1.057.542.600,00	2,40
	<b>BEBAN TIDAK TERDUGA</b>		<b>52.650.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.650.368,00</b>	<b>0,00</b>
	Beban Tidak Terduga	5.4.3	52.650.368,00	0,00	52.650.368,00	0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>5.4.4</b>	<b>17.555.209.761,82</b>	<b>7.402.624.576,93</b>	<b>10.152.585.184,89</b>	<b>137,15</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.5</b>	<b>(6.719.548.166,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.719.548.166,33)</b>	<b>0,00</b>
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL LO</b>		<b>6.716.330.666,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716.330.666,33</b>	<b>0,00</b>
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		6.716.330.666,33	0,00	6.716.330.666,33	0,00
	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		34.431.000,00	0,00	34.431.000,00	0,00
	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		6.681.899.666,33	0,00	6.681.899.666,33	0,00
	<b>SURPLUS DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>10.838.879.095,49</b>	<b>7.402.624.576,93</b>	<b>3.436.254.518,56</b>	<b>46,42</b>
	<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>5.4.6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.4.1	Beban Luar Biasa	5.4.6.1.1	0,00	488.213.432,00	(488.213.432,00)	(100,00)
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>0,00</b>	<b>(488.213.432,00)</b>	<b>(488.213.432,00)</b>	<b>(100,00)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>5.4.7</b>	<b>10.838.879.095,49</b>	<b>6.914.411.144,93</b>	<b>3.924.467.950,56</b>	<b>56,76</b>

Pj. WALI KOTA LHOESEUMAWA

A. HANAN, SP, MM

**E. LAPORAN ARUS KAS**

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Pajak Daerah - LRA		39.586.915.813,00	40.032.463.309,91
Penerimaan Retribusi Daerah - LRA		3.733.420.512,40	3.022.508.323,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA		3.236.124.545,00	4.350.084.432,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		21.342.485.463,60	20.501.458.006,37
Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		630.906.590.568,00	622.773.568.549,00
Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah		56.919.261.770,00	98.580.020.659,24
Penerimaan Hibah		222.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>755.946.798.672,00</b>	<b>789.260.103.279,52</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pegawai		316.584.344.048,00	304.916.122.038,00
Pembayaran Barang dan Jasa		177.812.072.024,00	185.425.254.292,00
Pembayaran Subsidi		470.000.000,00	200.000.000,00
Pembayaran Belanja Hibah		22.501.686.262,00	36.702.542.385,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		31.141.171.655,00	49.131.020.993,00
Pembayaran Tak Terduga		52.650.368,00	2.134.850.082,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		3.183.566.844,00	1.820.631.270,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		116.379.052.970,00	102.927.500.102,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>5.5.1.2</b>	<b>668.124.544.171,00</b>	<b>683.257.921.162,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>	<b>87.822.254.501,00</b>	<b>106.002.182.117,52</b>
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penjualan Peralatan dan Mesin		0,00	297.992.800,00
Penjualan Aset Lainnya		3.000.000,00	8.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>5.5.2.1</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>305.992.800,00</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>			
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Perolehan Tanah		0,00	13.713.809.182,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		15.627.696.279,00	21.363.441.916,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		21.923.145.455,00	40.945.930.770,00
Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		18.771.759.227,00	62.614.371.138,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.013.866.800,00	3.614.198.250,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>5.5.2.2</b>	<b>61.336.467.761,00</b>	<b>144.251.751.256,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2</b>	<b>(61.333.467.761,00)</b>	<b>(143.945.758.456,00)</b>





URAIAN	REF	2023	2022
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		47.712.427.360,40	67.765.363.254,00
Saldo Sisa Uang Transitoris TA 20X0		0,00	315.282.285,84
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>47.712.427.360,40</b>	<b>68.080.645.539,84</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		47.712.330.573,40	67.789.492.061,00
Saldo Sisa Uang Transitoris TA 20X1		0,00	208.804.007,68
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>5.5.3.2</b>	<b>47.712.330.573,40</b>	<b>67.998.296.068,68</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.5.3</b>	<b>96.787,00</b>	<b>82.349.471,16</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>		<b>26.488.883.527,00</b>	<b>(37.861.226.867,32)</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b>		<b>10.545.631.854,37</b>	<b>48.198.054.714,01</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b>		<b>37.034.515.381,37</b>	<b>10.336.827.846,69</b>
Kas Dana BOS		0,00	4.587.180,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	204.216.827,68
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>5.5.4</b>	<b>37.034.515.381,37</b>	<b>10.545.631.854,37</b>

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE

A. HANAN, SP, MM

**F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWÉ**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	2023	2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>2.151.159.069.220,66</b>	<b>2.047.597.067.411,11</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT – LO</b>	<b>10.838.879.095,49</b>	<b>6.914.411.144,93</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:</b>	<b>(8.945.040.387,58)</b>	<b>96.647.590.664,62</b>
<b>KOREKSI NILAI PERSEDIAAN</b>		
BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN	(237.084.200,00)	0,00
PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	(11.313.593.260,00)	0,00
PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	(406.400.000,00)	0,00
<b>KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP</b>		
KOREKSI NILAI ASET TETAP	(237.131.614,00)	0,00
KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	22.940.543.195,84	0,00
<b>LAIN-LAIN</b>		
KOREKSI ASET LANCAR	783.772.397,05	(6.037.744.708,24)
KOREKSI INVESTASI JANGKA PANJANG	(1.537.879.296,00)	0,00
KOREKSI NILAI ASET TETAP	0,00	103.143.734.076,86
KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	0,00	(2.332.439.393,00)
KOREKSI AKUMULASI AMORTISASI	0,00	(9.680.000,00)
KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	(440.547.440,00)	(2.070.651.907,00)
KOREKSI UTANG PFK	483.000,00	0,00
KOREKSI PDD	(9.728.611,00)	1.930.643.240,00
KOREKSI NILAI UTANG	(18.487.474.559,47)	2.023.729.356,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>2.153.052.907.928,57</b>	<b>2.151.159.069.220,66</b>

**Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWÉ**

**A. HANAN, SP, MM**



## G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terukur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan:

##### a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

##### b. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

##### c. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

##### d. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.



Tujuan spesifik Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam nilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan yang harus disampaikan terdiri dari:

**a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

**b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**c. Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

**d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



**e. Neraca**

Neraca Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

**f. Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan selama suatu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

**g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)**

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Dan Laporan Arus Kas.

**1.2**

**Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dinyatakan berlaku secara efektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - m. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  - o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - p. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  - q. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
  - r. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);



- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 173);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- z. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Tahun 2022 Nomor 5);
- aa. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- bb. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- cc. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- dd. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe; dan
- ee. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023.

### 1.3 Informasi Umum Tentang Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara dan terletak di pesisir timur Pulau Sumatera. Posisi Kota Lhokseumawe berada dalam jalur Lhokseumawe dan Medan, menjadikan kota ini sangat strategis sebagai jalur distribusi



dan perdagangan di Provinsi Aceh. Pada saat awal terbentuk pada tahun 2001, Kota Lhokseumawe terdiri atas tiga kecamatan. Sedangkan saat ini Kota Lhokseumawe terdiri atas empat kecamatan dan 68 gampong. Hal ini terjadi karena terdapat pemekaran kecamatan. Hasil pemekaran adalah Kecamatan Muara Satu yang merupakan pecahan dari Kecamatan Muara Dua.

Kota Lhokseumawe merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 24 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 04°54' Lintang Utara dan 05°18' Lintang Selatan, serta 96°20' dan 97°21' bujur Timur. Luas wilayah Kota Lhokseumawe, adalah berupa daratan seluas 181,06 km<sup>2</sup>. Per 31 Desember 2023, wilayah administrasi Kota Lhokseumawe terdiri dari empat wilayah kecamatan, dengan masing-masing luas wilayah sebagai berikut:

a. Blang Mangat	: 56,12 Km <sup>2</sup>
b. Muara Dua	: 57,80 Km <sup>2</sup>
c. Muara Satu	: 55,90 Km <sup>2</sup>
d. Banda Sakti	: 11,24 Km <sup>2</sup>

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Lhokseumawe berada pada posisi 04° 54'- 05°18' Lintang Utara dan 96°20'- 97°21' Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Selat Malaka.
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara.

Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 196.067 jiwa mengalami kenaikan sebesar 2,44 persen dari Tahun sebelumnya yang berjumlah 191.396 jiwa, jumlah penduduk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Blang Mangat	: 28.146 jiwa
b. Muara Dua	: 53.068 jiwa
c. Muara Satu	: 35.003 jiwa
d. Banda Sakti	: 79.850 jiwa

Secara organisatoris, pada tahun 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe dengan total anggota sebanyak 25 orang terdiri dari dua fase yaitu fase Januari sampai dengan 10 September 2019 dan fase 10 September sampai dengan Desember 2024.

Fase Januari s.d. 10 September 2024 DPRK Lhokseumawe terdiri dari tiga fraksi, yaitu:

- Fraksi Partai Aceh sebanyak 12 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;
- Fraksi Koalisi sebanyak 8 orang yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan tidak ada perempuan; dan





- Fraksi Demokrat sebanyak 5 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Pada fase ini DPRK Lhokseumawe dalam menjalankan fungsinya dibentuk 4 Komisi yaitu:

- a. Komisi A sebanyak 6 orang;
- b. Komisi B sebanyak 5 orang;
- c. Komisi C sebanyak 5 orang; dan
- d. Komisi D sebanyak 6 orang.

Sedangkan unsur Pimpinan/Koordinator sebanyak 3 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil-I dan Wakil-II.

Fase 10 September s.d. 31 Desember 2024 DPRK Lhokseumawe terdiri dari empat fraksi, yaitu:

- a. Fraksi Partai Aceh sebanyak 10 orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;
- b. Fraksi Gerindra sebanyak 7 orang yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;
- c. Fraksi Demokrat Bersatu sebanyak 4 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan; dan
- d. Fraksi Golongan Amanat Bersatu sebanyak 4 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki tidak ada perempuan.

Pada fase ini DPRK Lhokseumawe dalam menjalankan fungsinya dibentuk 4 Komisi yaitu:

- a. Komisi A sebanyak 6 orang;
- b. Komisi B sebanyak 5 orang;
- c. Komisi C sebanyak 5 orang; dan
- d. Komisi D sebanyak 6 orang.

Sedangkan unsur Pimpinan/Koordinator sebanyak 3 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil-I dan Wakil-II.

Pemerintah Kota Lhokseumawe menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe mencakup urusan:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum;
- d. Perencanaan pembangunan;
- e. Perhubungan;



- f. Lingkungan hidup;
- g. Kependudukan dan catatan sipil;
- h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- j. Sosial;
- k. Ketenagakerjaan;
- l. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- m. Penanaman modal;
- n. Kebudayaan;
- o. Kepemudaan dan Olahraga;
- p. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- q. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi;
- r. Keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- s. Ketahanan pangan;
- t. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- u. Kearsipan;
- v. Komunikasi dan informatika; dan
- w. Perpustakaan.

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kota Lhokseumawe juga melaksanakan urusan yang mencakup:

- a. Pertanian;
- b. Pariwisata;
- c. Kelautan dan perikanan;
- d. Perdagangan; dan
- e. Industri;

Setiap Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPK selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dibentuk berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yaitu sebagai berikut:

- a. Penunjang Urusan Pemerintahan:
  - 1) Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
  - 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Lhokseumawe;



- 3) Inspektorat Kota Lhokseumawe;
  - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 6) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - 7) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 2) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
  - 3) Dinas Kesehatan;
  - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 6) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe; dan
  - 7) Dinas Sosial.
- c. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar:
- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 2) Dinas Pertanahan;
  - 3) Dinas Lingkungan Hidup;
  - 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
  - 6) Dinas Perhubungan;
  - 7) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
  - 8) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
  - 9) Sekretaris Majelis Adat Aceh;
  - 10) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; dan
  - 11) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- d. Urusan Pemerintahan Wajib Lainnya yang bersifat Keistimewaan dan Kekhususan:
- 1) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
  - 2) Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama; dan
  - 3) Sekretariat Baitul Mal.
- e. Urusan Pilihan:
- 1) Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan; dan
  - 2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.



f. Kecamatan:

- 1) Kecamatan Banda Sakti;
- 2) Kecamatan Blang Mangat;
- 3) Kecamatan Muara Satu; dan
- 4) Kecamatan Muara Dua

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe selaku pelaksana Entitas Pelaporan Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan, hal ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Lhokseumawe.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBK**

Perkembangan perekonomian dan pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

#### **2.1 Potensi Pengembangan Wilayah**

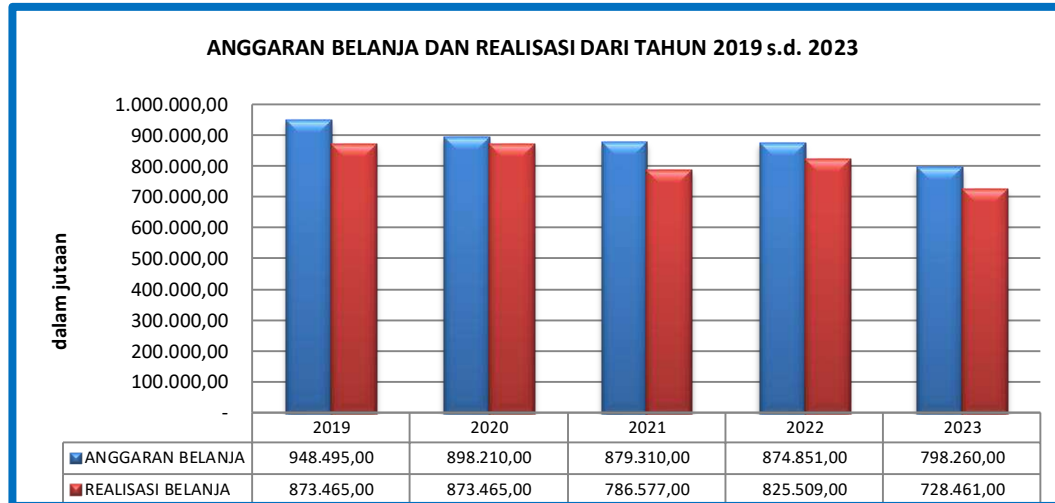
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 merupakan dokumen arah pengembangan kawasan Kota Lhokseumawe yang berguna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) zona pengembangan wilayah, yaitu:

- a. Zona pesisir, merupakan daerah pinggiran pantai dan memiliki kondisi wilayah relatif datar, zona pesisir mencakup:
  - 1) Zona Pesisir di Kecamatan Muara Satu dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor industri besar, industri menengah dan pariwisata;
  - 2) Zona Pesisir di Kecamatan Banda Sakti dengan kegiatan utamanya untuk pelayanan kota seperti: pendidikan, pemerintahan, kesehatan, pemukiman dan pariwisata, perdagangan dan jasa; dan
  - 3) Zona Pesisir di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perikanan laut dan sektor perikanan darat.
- b. Zona Tengah merupakan daerah sekitar Jalan Lhokseumawe-Medan, memiliki kondisi wilayah relatif datar dan berbukit, wilayah ini mencakup Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi perdagangan dan permukiman.
- c. Zona Dalam merupakan daerah daratan tinggi sekitar Jalan Elak memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan utama pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering), peternakan, pariwisata, dan sebagian permukiman.

#### **2.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi di Lhokseumawe dibagi dua yaitu dengan migas dan tanpa migas. Pertumbuhan ekonomi dengan migas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2023 mengalami perlambatan sebesar minus 100 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan sebesar minus 1,31 persen.



**Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Tahun 2019 s.d. 2023**

Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2023 (Januari s.d. Desember 2023) untuk Kota Lhokseumawe sebesar 1,56%. Inflasi *year on year* atau lebih rendah rentang sasaran inflasi Pemerintah tahun 2023 sebesar 3,81% dibanding pada tahun 2022.

Inflasi Kota Lhokseumawe berada pada 1,56 persen, secara umum inflasi yang terjadi di kota Lhokseumawe pada tahun 2023 disebabkan karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Dari semua kelompok pengeluaran yang paling besar memberi andil terhadap inflasi adalah kelompok pengeluaran Makanan dan minuman jadi sebesar 37,68 persen, Padi-padian sebesar 12,12 persen, ikan/udangcumi sebesar 6,86 persen, daging 0,35 persen, buah-buahan sebesar 12,25 persen, Konsumsi lainnya sebesar 14,43 persen, telur dan susu sebesar 12,59 persen selain itu angka inflasi disumbang oleh kenaikan indeks pada bidang pangan yaitu kenaikan harga rokok dan tembakau sebesar 48,74 persen dan ada juga kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi seperti Umbi-umbian sebesar 19,17, Minyak dan kelapa sebesar 14,05 persen, Bahan minuman sebesar 1,94 persen dan Bumbu-bumbuan sebesar 4,17 persen. Sementara itu pada kelompok non makanan mengalami kenaikan sebesar 14,43 persen, Perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 11,93 persen, Aneka barang dan jasa sebesar 26,51 persen, Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala sebesar 15,94 persen dan Pajak, pungutan, dan asuransi sebesar 5,07, keperluan pesta dan upacara sebesar 18,45 persen dan Barang tahan lama 17,20 persen mengalami deflasi. Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan beberapa upaya untuk pengendalian inflasi antara lain melalui rapat koordinasi bersama tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan satgas pangan untuk mengidentifikasi perkembangan harga, pasokan dan upaya pengendalian inflasi untuk pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

## 2.3

### **Ketenagakerjaan**

Perkembangan angka ketenagakerjaan suatu wilayah/daerah dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduknya, karena semakin rendah angka pengangguran maka akan berbanding terbalik dengan tingkat pendapatan penduduknya atau semakin banyak penduduk yang memperoleh pendapatan. Konsekuensi selanjutnya perputaran ekonomi suatu wilayah/daerah akan semakin bergairah dan pada gilirannya pasar juga akan

bergairah yang ujung-ujungnya akan berefek kepada pendapatan suatu wilayah/daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe yang dirilis tahun 2023 perkembangan angka ketenagakerjaan di Wilayah Kota Lhokseumawe selama periode 2019 s.d. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Perkiraan Jumlah Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe**  
**Selama Kurun Waktu 2019-2023**

Tahun	Angkatan Kerja		
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah
2019	80.463	9.881	90.344
2020	82.696	11.262	93.958
2021	86.031	10.804	96.835
2022	89.894	9.059	98.953
2023	85.373	8.221	93.594

## 2.4 Kemiskinan

Tingkat angka kemiskinan di wilayah Kota Lhokseumawe berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe yang dirilis tahun 2023 selama periode 2019 s.d. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

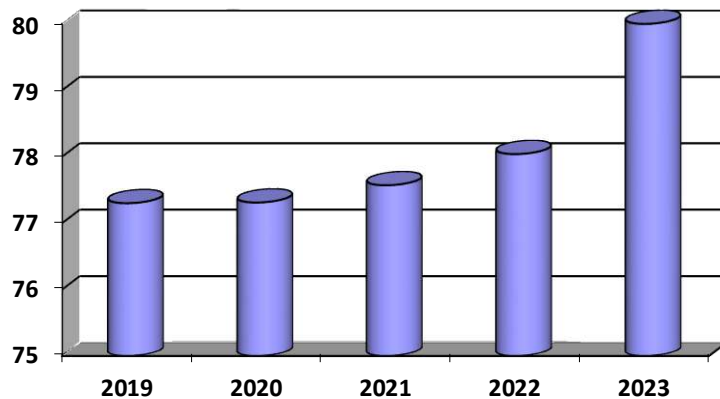
**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk dan Indikator Kemiskinan di Kota Lhokseumawe,**  
**Selama Kurun Waktu 2019-2023**

Tahun	Jumlah Penduduk	Indikator Kemiskinan			
		Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2019	207.202	23.05	11.18	1.51	0.30
2020	181.713	22.69	10.80	1.56	0.29
2021	210.177	23.38	11.16	1.87	0.54
2022	191.396	23.03	10.84	1.33	0.26
2023	196.067	23.10	10.73	2.23	0.70

## 2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup yang layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Perkembangan IPM Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019 s.d 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



**Gambar 2.2**  
**Perkembangan IPM Kota Lhokseumawe 2019-2023**

Grafik di atas menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kota Lhokseumawe mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2019 s.d 2023, peningkatan IPM terbesar terjadi selama kurun waktu 2023 yakni mengalami peningkatan 2,00 poin dan terendah selama kurun waktu 2019 s.d 2020 yakni 0,01 poin, maka status IPM Kota Lhokseumawe berada pada tingkat tinggi pada tahun 2023.

## 2.6

### *Gini Ratio*

Keberhasilan pembangunan ekonomi ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita penduduk dan penurunan kesenjangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi (*high income group*) dan berpendapatan rendah (*low income group*).

*Gini Ratio* adalah suatu cara untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Secara teoritis *Gini Ratio* dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai *Gini Ratio* mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai *Gini Ratio* makin mendekati satu (1), berikut patokan nilai *Gini Ratio*:

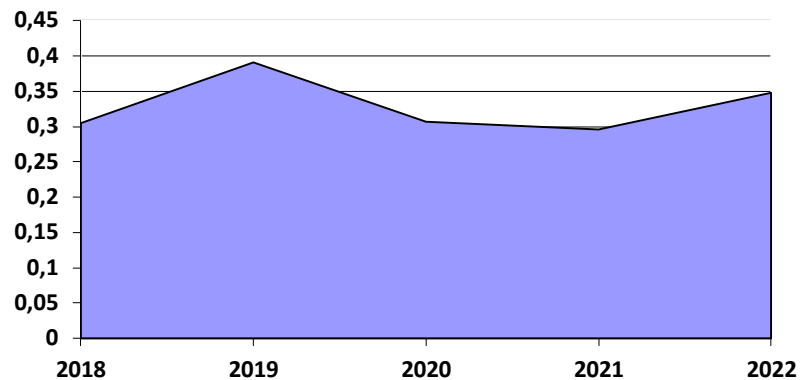
**Tabel 2.3**  
**Patokan Nilai *Gini Ratio***

Nilai <i>Gini Ratio</i>	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,4 – 0,5	Tingkat Ketimpangan Sedang
> 0,5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

*Gini Ratio* untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan dan pengeluaran di Kota Lhokseumawe. Dari hasil perhitungan Koefisien *Gini* untuk pendapatan keluarga, ditemukan bahwa hanya Kecamatan Muara Satu yang memiliki ketimpangan rendah dengan nilai GR=0,29 sedangkan tiga kecamatan lainnya yaitu Banda Sakti (GR=0,33), Muara Dua (GR=0,36), dan Blang Mangat (GR=0,30) termasuk kedalam kategori ketimpangan sedang. Untuk perhitungan Koefisien *Gini* pengeluaran juga menempatkan



Kecamatan Muara Satu pada kategori ketimpangan rendah dengan nilai GR=0,28 dan tiga kecamatan lainnya Banda Sakti (GR=0,32), Muara Dua (GR=0,32), dan Blang Mangat (GR=0,30) berada pada kategori ketimpangan sedang. Nilai ketimpangan yang rendah untuk Kecamatan Muara Satu tidak serta merta menjamin kondisi masyarakat di kecamatan ini sejahtera. Nilai pendapatan rata-rata yang lebih rendah dari pengeluaran rata-rata mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat di kecamatan ini tergolong ke dalam masyarakat miskin. Kata Kunci: Pendapatan Keluarga, Pengeluaran Keluarga, *Gini Ratio* (GR). Perkembangan *Gini Ratio* Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2018 – 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2.3  
Perkembangan *Gini Ratio* Kota Lhokseumawe 2018-2022

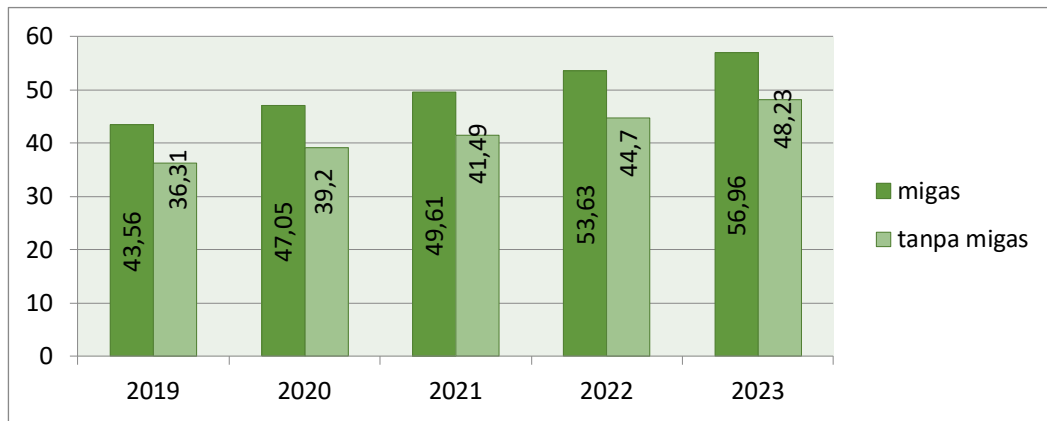
Dari grafik di atas, terlihat bahwa tingkat kesenjangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di wilayah Kota Lhokseumawe kurun waktu tahun 2018 s.d 2022 rata-rata sebesar  $< 0,3$  atau mendekati nol (0) dengan kata lain masih berada pada tingkat ketimpangan rendah.

## 2.7

### PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah/daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

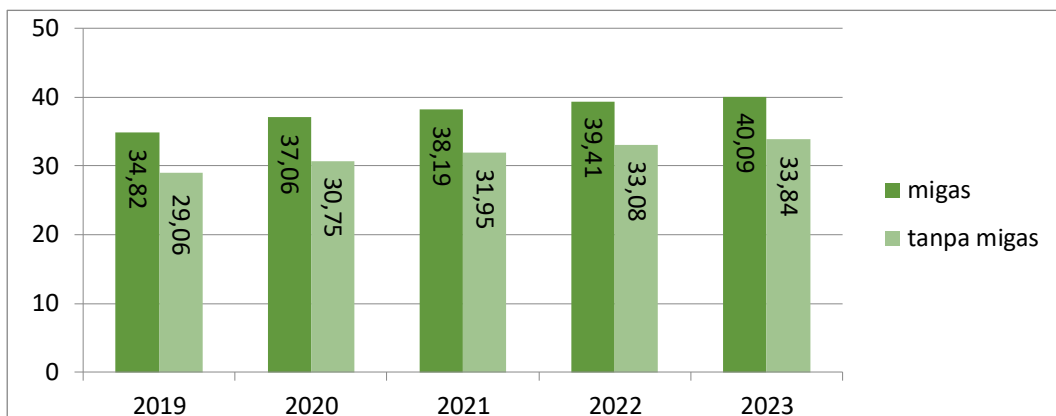
Pada tahun 2023 PDRB per kapita Lhokseumawe adalah sebesar 56,96 juta rupiah setahun kenaikan sebesar 3,33 juta rupiah dari tahun 2022 yang sebesar 53,63 juta rupiah setahun. Dengan mengeluarkan migas, selama lima tahun terakhir terlihat bahwa PDRB per kapita terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita Lhokseumawe tanpa migas pada tahun 2023 sebesar 48,23 juta rupiah setahun atau mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang sebesar 44,70 juta rupiah setahun.



**Gambar 2.4**  
**PDRB Per Kapita ADHB Lhokseumawe dari Tahun 2019 s.d. 2023**

Untuk nilai PDRB per kapita harga konstan dengan migas mengalami kenaikan pada 2023 ke 2022 sedangkan untuk PDRB per kapita harga konstan tanpa migas nilai tumbuh positif namun sangat kecil. Pada tahun 2022 PDRB per kapita ADHK dengan migas sebesar 39,41 juta rupiah setahun dan terus meningkat mencapai angka 40,09 juta rupiah di tahun 2023.

Kemudian jika PDRB per kapita ADHK ditinjau tanpa migas, nilai PDRB per kapita tahun 2019 sebesar 29,06 juta rupiah dan berturut-turut tahun 2020 s.d 2021 sebesar 30,75 juta rupiah setahun dan 31,95 juta rupiah setahun. Pada tahun 2022 PDRB per kapita ADHK mencapai sebesar 33,08 juta rupiah setahun dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 33,84 juta rupiah setahun.



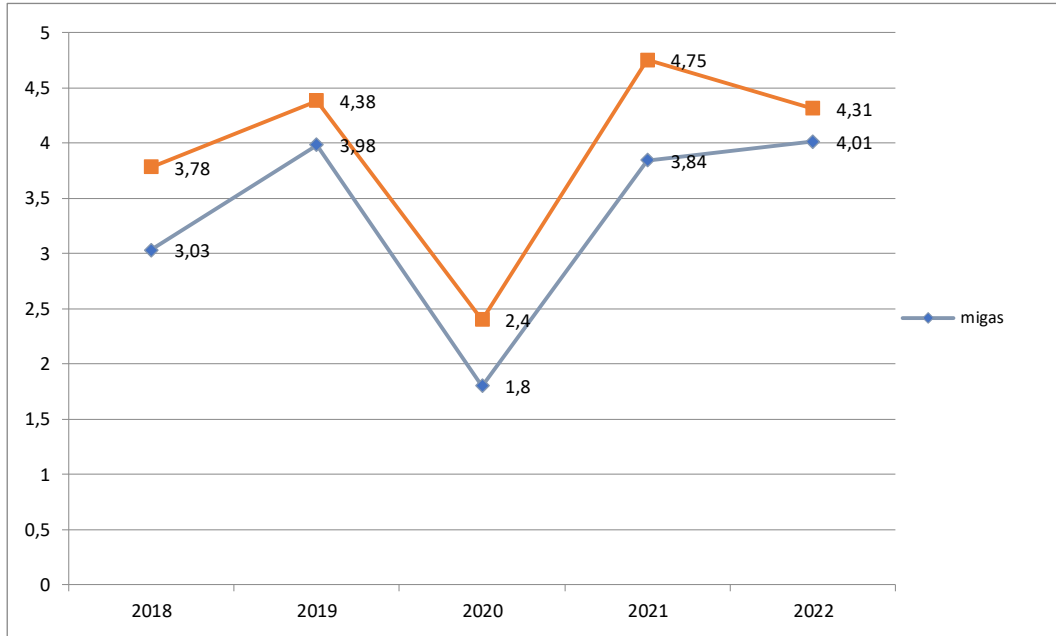
**Gambar 2.5**  
**PDRB Per Kapita ADHK Lhokseumawe dari Tahun 2019 s.d. 2023**

## 2.8 Laju Inflasi

Salah satu indikator yang penting dalam menggambarkan stabilitas perekonomian suatu daerah adalah indeks inflasi. Indeks ini mencakup semua jenis harga seperti harga konsumen, harga produsen, harga perdagangan besar, harga eceran dan harga lainnya yang sesuai. Perubahan pada indeks inflasi mampu mengukur tingkat perubahan harga atau inflasi dari sisi produsen atas agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Periode tahun 2017 sampai 2021 tren laju indeks inflasi terlihat fluktuatif. Laju inflasi

dengan migas 2,18 persen di 2017. Pada tahun 2018 hingga 2021, laju indeks inflasi meningkat masing-masing sebesar 1,20 persen dan 1,97 persen.

Perkembangan laju indeks inflasi Kota Lhokseumawe selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun dasar 2018 s.d. 2022 secara grafis dapat dilihat seperti berikut:



**Gambar 2.6**  
Laju Inflasi Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018 s.d. 2022

## 2.9

### Kebijakan Keuangan

Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lhokseumawe tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Perbandingan TA 2022 dengan TA 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Pendapatan	755.949.798.672,00	789.566.096.079,52
Belanja	728.461.011.932,00	825.509.672.418,00
Pembiayaan Penerimaan	10.541.034.674,37	48.484.611.012,85
Pembiayaan Pengeluaran	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa posisi pendapatan TA 2023 terjadi penurunan dibandingkan pendapatan TA 2022 yaitu turun dari sebesar Rp789.566.096.079,52 menjadi Rp755.949.798.672,00 atau turun sebesar Rp33.616.297.407,52.

Sedangkan belanja terjadi penurunan dari TA 2023 sebesar Rp825.509.672.418,00 menjadi sebesar Rp728.461.011.932,00 atau turun sebesar Rp97.048.660.486,00. Pembiayaan penerimaan terjadi penurunan TA 2023 sebesar Rp48.484.611.012,85 menjadi Rp10.541.034.674,37 atau turun sebesar Rp37.943.576.338,48. Pembiayaan

Pengeluaran terjadi penurunan dari TA 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp1.000.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2023 atau turun sebesar Rp1.000.000.000,00. Sehingga pada Tahun Anggaran 2023 perolehan SILPA sebesar Rp37.029.821.414,37.

### 2.9.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe sebagian besar masih tergantung pada dana perimbangan. Untuk mengurangi ketergantungan akan dana perimbangan, Pemerintah Kota Lhokseumawe berusaha meningkatkan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah. Jumlah Pendapatan yang ditargetkan Pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp768.471.407.647,00 masih relatif kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan pengeluaran belanja daerah. Target pendapatan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut secara totalitas harus tercapai 100% atau lebih karena jika target yang ditetapkan tidak tercapai maka berakibat terjadinya kekurangan penerimaan pendapatan yang berimplikasi pada tidak dapat dilaksanakannya sebagian kegiatan yang telah direncanakan, sehingga diperlukan upaya dan kerja keras aparat pengelola pendapatan daerah agar target pendapatan yang telah ditetapkan itu dapat terealisasi yaitu melalui:

- a. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi dengan memberikan pengertian tentang pentingnya pajak/retribusi bagi pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi sehingga mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak;
- c. Mengoptimalkan nilai manfaat uang yang ada pada kas daerah melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan serta didepositokan untuk jangka waktu tertentu. Upaya tersebut dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah;
- d. Memonitor dan mengawasi pemungutan pajak/retribusi oleh SKPK terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pencapaian target; dan
- e. Melakukan pendataan terhadap objek pajak/retribusi yang baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak/retribusi yang telah ada sehingga penerimaan daerah dapat dipungut secara optimal.

### 2.9.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer, salah satunya adalah Dana Otonomi Khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Aceh termasuk dalam membentuk perangkat dan lembaga daerah yang menjadi ciri keistimewaan Aceh, dan menjadi dasar hukum pemberian tambahan pendanaan pembangunan dalam bentuk Dana Otonomi Khusus. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, antara lain menyebutkan Dana Otonomi Khusus ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 tersebut, pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintahan Aceh diberikan selama 20 tahun, yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2027. Dana Otonomi Khusus tahun pertama sampai dengan ke-15 (2008 s.d. 2023) ditetapkan sebesar 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, sedangkan Dana Otonomi Khusus tahun ke-16 sampai dengan ke-20 (2023 s.d. 2027) ditetapkan

sebesar 1% dari plafon DAU Nasional. Transfer dari rekening Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh dilaksanakan setelah diterbitkan keputusan tentang besaran alokasi Dana Otonomi Khusus oleh Kementerian Keuangan ditetapkan setiap tahun anggaran.

Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kebijakan yang dinamis. Sejak tahun 2008, telah terjadi beberapa kali perubahan porsi alokasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Qanun Pemerintah Aceh, yaitu Qanun Nomor 2 Tahun 2008, Qanun Nomor 2 Tahun 2013, Qanun Nomor 10 Tahun 2016, dan Qanun Nomor 1 Tahun 2018. Selain alokasi, sistem pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh pun sejak diberikan pertama kali pada tahun 2008 hingga tahun 2023, telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Periode tahun 2008 s.d. 2009 Dana Otonomi Khusus sepenuhnya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), termasuk alokasi untuk Kabupaten/Kota, dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berada pada SKPA;
- b. Periode tahun 2010 s.d. 2013 Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk pelaksanaan anggaran, dengan KPA dan PPTK berada pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota (SKPK);
- c. Periode tahun 2014 s.d. 2017, model tata kelola Dana Otonomi Khusus memberikan kewenangan penuh kepada Kabupaten/Kota melalui mekanisme transfer khusus langsung. Meskipun demikian, proses perencanaan program/kegiatan Kabupaten/Kota yang akan dibiayai dari Dana Otonomi Khusus tetap melalui mekanisme musrenbang dan disepakati bersama dengan DPRK;
- d. Tahun 2018, pengelolaan Dana Otonomi Khusus kembali ke Pemerintah Aceh dan semua program/kegiatan yang akan didanai adalah yang sudah diusulkan dalam musrenbang;
- e. Tahun 2019, kebijakan pengelolaan Dana Otonomi Khusus mengacu Qanun Nomor 1 Tahun 2018 yaitu untuk program dan kegiatan bersama Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota dikelola oleh Pemerintah Aceh, selanjutnya sisanya untuk Pemerintah Aceh paling sedikit 60% (termasuk 1% untuk ibukota Aceh) dan untuk Kabupaten/kota paling banyak 40% dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. Tahun 2020, kebijakan pengelolaan Dana Otonomi Khusus masih mengacu Qanun Nomor 1 Tahun 2018;
- g. Tahun 2021, kebijakan pembagian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021;
- h. Tahun 2022, kebijakan pembagian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 903/1429/2022 tentang Penetapan Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten /Kota Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2022;
- i. Tahun 2023, kebijakan pembagian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 900/1453/2023 tentang Penetapan Pembagian



dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023.

Rekapitulasi Dana Otonomi Khusus yang dikelola Pemerintah Kota Lhokseumawe, sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Kota Lhokseumawe**

Tahun	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
2008	8.937.900.000,00	8.937.900.000,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2009	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2010	3.923.389.582,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2011	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2012	34.133.708.000,00	34.157.064.164,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2013	47.024.090.212,00	44.979.106.000,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2014	73.732.980.017,00	73.852.980.017,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2015	73.902.055.739,00	73.902.055.739,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2016	73.902.055.739,00	73.736.159.755,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2017	87.941.476.679,00	87.941.476.679,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2018	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2019	79.412.072.351,00	79.402.072.351,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2020	77.796.396.799,40	72.678.056.143,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2021	74.560.843.857,00	71.693.169.795,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2022	78.493.551.332,00	71.266.611.321,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2023	29.841.924.184,00	22.614.984.173,0	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
<b>Jumlah</b>	<b>743.602.444.491,40</b>	<b>715.161.636.137,00</b>	

### 2.9.3 Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota) mengalami perubahan dari kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Kelompok Belanja Operasi dan Belanja Modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, (c) Belanja Bunga, (d) Belanja Subsidi, (e) Belanja Subsidi, (f) Belanja Hibah dan (h) Belanja Bantuan Sosial.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang dikelompokkan pada Jenis (a) Belanja Tanah, (b) Belanja Peralatan dan Mesin, (c)



Belanja Gedung dan Bangunan, (d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (e) Belanja Aset Tetap Lainnya dan (f) Belanja Aset Lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dengan memenuhi kriteria status darurat sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa, untuk itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 s.d 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Penyusunan RKP Tahun 2023 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan

yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintahan daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

#### 2.9.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan juga merupakan pengurangan antara perkiraan pendapatan dengan belanja. Tahun Anggaran 2023 penerimaan pembiayaan Kota Lhokseumawe sebesar Rp31.789.500.000,00 pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00.

#### 2.10 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2019 s.d. 2023

Arah dan Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2019 s.d. 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2019 Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini berfokus pembangunan SDM pemerintah serta perangkat daerah yang menggunakan data terpadu dan penerapan *e-government* yang terintegrasi bagi perangkat daerah. Selanjutnya perencanaan pembangunan disusun berdasarkan data (*evidence based planning*). Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi penting untuk mempersiapkan SDM yang handal. Masyarakat yang berkarakter Islami terus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta nilai-nilai budaya ke Aceh yang Islami. Penguatan kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan yang akuntabel terus diupayakan guna mencapai dan mempertahankan opini pelaporan keuangan. Tema pembangunan pada tahun ini yaitu **“Membangun Pemerintahan Yang Berintegritas Serta Penguatan Kinerja Keuangan Yang Akuntabel”**.
- b. Tahun 2020 Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini berfokus pada pembangunan masyarakat yang berdaya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan menjadi sangat penting. Penerapan *e-government* yang terintegrasi bagi perangkat daerah sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan. Sentra Industri Kecil dan Menengah terus dibina untuk mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi hijau (*green economic growth*). Tema pembangunan pada tahun ini yaitu **“Membangun Masyarakat Yang Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi”**.
- c. Tahun 2021 Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan. Upaya terus dilakukan untuk mempersiapkan SDM yang handal sebagai tenaga kerja profesional serta akses lapangan kerja akan terus meningkat mengingat telah beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus Arun. Keberadaan beberapa Universitas baik negeri maupun swasta dapat mendukung peningkatan SDM dan memperkuat posisi Kota Lhokseumawe



sebagai sentra pelayanan pendidikan regional. Tema pembangunan pada tahun ini yaitu **“Memperkuat Kerja sama Pembangunan Untuk Menciptakan Kesempatan Kerja Yang Didukung Oleh Peningkatan Daya Saing SDM”**.

- d. Tahun 2022 Arah kebijakan pembangunan pada tahun ini difokuskan untuk terus menjaga dan menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan masih sangat penting. Peningkatan daya saing pendidikan dengan indikator APM, APK dan Angka Harapan Lama Sekolah diharapkan sudah memenuhi target SDG's. Arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dilakukan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik (guru) yang terdistribusi secara merata. Demikian juga dengan pengarusutamaan Syariat Islam menjadi fokus pembangunan untuk meningkatkan aqidah, akhlak dan syariat agar menjadi masyarakat yang berkarakter Islami. Di samping itu menurunnya kasus NAPZA dan pornografi. Tema pembangunan pada tahun ini yaitu **“Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Dengan Penerapan Nilai-Nilai Syariat Islam”**.
- e. Tahun 2023 Arah Kebijakan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan yang terintegrasi;
  - 2) Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
  - 3) Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
  - 4) Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien;
  - 5) Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
  - 6) Meningkatkan manajemen pelayanan publik;
  - 7) Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparan (*open government*);
  - 8) Peningkatan kapasitas instansi dan lembaga terkait dalam mendukung pengumpulan ZIS; dan
  - 9) Peningkatan kuantitas dan kualitas mutu sarana prasarana pendidikan dasar 9 tahun sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.

Arah dan kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana tersebut di atas adalah untuk jangka menengah yang merupakan acuan bagi SKPK guna mencapai kinerja sesuai dengan tupoksinya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Ada 3 (tiga) jenis program yang dilaksanakan oleh SKPK/Unit kerja yang berwenang sesuai dengan tupoksinya, yaitu:

- a. Program SKPK adalah merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPK.
- b. Program lintas SKPK adalah merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPK untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan.



- c. Program kewilayahan adalah merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan berkelanjutan pembangunan/antar kawasan dalam kecamatan di wilayah Kota Lhokseumawe.

Untuk tahun 2023 Program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe yang tersebar di masing-masing SKPK adalah seperti berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh;
3. Program Pengelolaan Pendidikan;
4. Program Pengembangan Kurikulum;
5. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
6. Program Pengelolaan Perizinan Pendidikan;
7. Program Pengembangan Kebudayaan;
8. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
9. Program Pembinaan Daerah;
10. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
11. Program Pengelolaan Permuseuman;
12. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
14. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
15. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
16. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
17. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah;
19. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
20. Program Pengembangan Pemukiman;
21. Program Penataan Bangunan Gedung;
22. Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
23. Program Penyelenggaraan Jalan;
24. Program Penyelenggaraan Penata Ruang;
25. Program Kawasan Pemukiman;
26. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
27. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Rutinitas Umum;
28. Program Penanggulangan Bencana;



29. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
30. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
31. Program Pemberdayaan Sosial;
32. Program Rehabilitasi Sosial;
33. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
34. Program Penanganan Bencana;
35. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
36. Program Perlindungan Perempuan;
37. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
38. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
39. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
40. Program Perlindungan Khusus Anak;
41. Program Pengendalian Penduduk;
42. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
43. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
44. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
45. Program Penatagunaan Tanah;
46. Program Pengurusan Hak Atas Tanah;
47. Program Survei, Pengukuran dan Pendataan;
48. Program Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pertanahan;
49. Program Pengaturan Pertanahan di wilayah Pesisir Laut dan Pulau;
50. Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan;
51. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
52. Program Pengendalian Pencemaran dari/atau Kerusakan Lingkungan;
53. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
54. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
55. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
56. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
57. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
58. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
59. Program Pengelolaan Persampahan;



60. Program Pendaftaran Penduduk;
61. Program Pencatatan Sipil;
62. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
63. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
64. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
65. Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat;
66. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
67. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
68. Program Aplikasi Informatika;
69. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
70. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
71. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
72. Program Penempatan Tenaga Kerja;
73. Program Hubungan Industrial;
74. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
75. Program Promosi Penanaman Modal;
76. Program Pelayanan Penanaman Modal;
77. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
78. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
79. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Kepemudaan;
80. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Olahraga;
81. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
82. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
83. Program Pemasaran Pariwisata;
84. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
85. Program Majelis Adat Aceh (MAA);
86. Program Pembinaan Perpustakaan;
87. Program Pengelolaan Arsip;
88. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
89. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
90. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
91. Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya;
92. Program Pengawasan Sumber Daya Lautan dan Perikanan;



93. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
94. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
95. Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian;
96. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
97. Program Penyuluhan Pertanian;
98. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
99. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
100. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
101. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
102. Program Pengembangan UMKM;
103. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
104. Program Stabilitas Harga Distribusi Perdagangan;
105. Program Pengembangan Ekspor;
106. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
107. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
108. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
109. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
110. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
111. Program Perekonomian dan Pembangunan;
112. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
113. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
114. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
115. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
116. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
117. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
118. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
119. Program Kepegawaian Daerah;
120. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
121. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
122. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Asistensi;
123. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
124. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
125. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;



126. Program Pembinaan dan Kepengawasan Pemerintahan Desa;
127. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
128. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
129. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
130. Program Pembinaan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya;
131. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
132. Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh;
133. Program Baitul Mal;
134. Program Pendidikan Dayah; dan
135. Program Syariat Islam Aceh.

### **2.11 Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe**

Tema Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023 diarahkan pada 6 (enam) prioritas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
- b. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum;
- c. Penataan kawasan kota;
- d. Menciptakan kota yang aman dan nyaman;
- e. Mengembangkan kreativitas masyarakat; dan
- f. Mendorong pertumbuhan inovasi demi mewujudkan kota Lhokseumawe yang beriman kreatif dan inovatif.

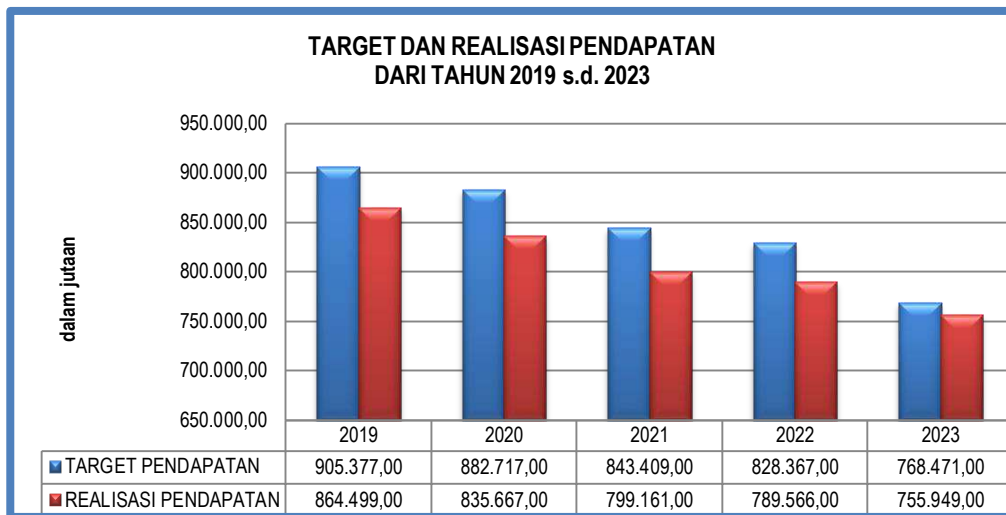
### **2.12 Pencapaian Target Kinerja**

Indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengemban visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe telah direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah diagendakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2018 s.d 2023 Pemerintah Kota Lhokseumawe.

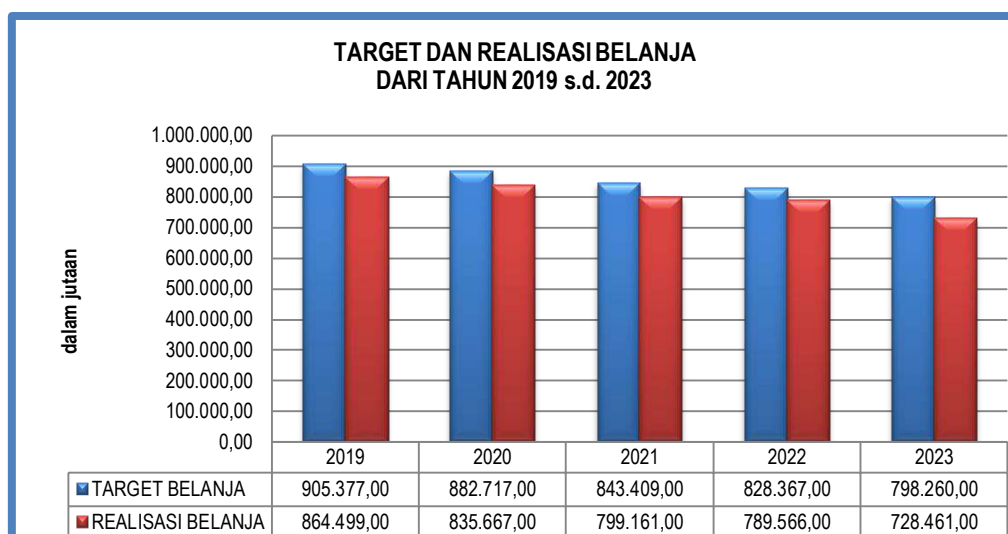
Pemerintah Kota Lhokseumawe telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai semua target dari sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2023.

Pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan selain telah direpresentasikan dalam RPJM dan juga dapat dilihat dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap SKPK Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2023 sehingga memungkinkan kinerja SKPK menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada TA 2023, Pemerintah Kota Lhokseumawe mencapai realisasi pendapatan sebesar 98,37%, sedangkan realisasi anggaran belanja sebesar 91,26% ini menunjukkan bahwa persentase pencapaian realisasi pendapatan masih di atas persentase realisasi belanja. Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja dalam lima tahun terakhir secara rinci dapat dilihat seperti berikut ini:

- a. Realisasi pendapatan mencapai sebesar TA 2019 menjadi Rp864.499.598.943,55, pada TA 2020 menjadi Rp835.667.970.983,15, pada TA 2021 Rp799.161.561.536,07, pada TA 2022 menjadi Rp789.566.096.079,52, pada TA 2023 menjadi Rp755.949.798.672,00 sehingga terjadi penurunan realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp33.616.297.407,52 yang disebabkan karena Pendapatan Transfer berkurang dan masih kurang maksimalnya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah. Secara grafis perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat seperti dalam gambar berikut (**Gambar 2.7**).
- b. Realisasi Belanja Daerah dari sebesar TA 2019 menjadi Rp873.465.604.518,45, pada TA 2020 Rp809.115.344.069,07 pada TA 2021 Rp786.577.977.856,19 dan pada TA 2022 Rp825.509.672.418,00, pada TA 2023 sebesar Rp728.461.011.932,00 sehingga terjadi penurunan realisasi belanja daerah pada TA 2023 sebesar Rp97.048.660.486,00 dari realisasi TA 2022. Perkembangan belanja daerah dari tahun ke tahun secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut (**Gambar 2.8**).



**Gambar 2.7**  
Target dan Realisasi Pendapatan dari Tahun 2019 s.d. 2023



**Gambar 2.8**  
Anggaran Belanja dan Realisasi dari Tahun 2019 s.d. 2023

## 2.13 **Mandatory Spending dalam Postur APBD**

*Mandatory spending* merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023, Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus yang merupakan amanat dari UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, yaitu *mandatory spending* antara lain:

### 2.13.1 **Mandatory Spending Bidang Kesehatan**

Alokasi anggaran kesehatan disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun, besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN, Pemerintah Kota Lhokseumawe mengalokasikan anggaran bidang kesehatan sebesar Rp118.623.173.132,00 atau 19,24% pada TA 2023.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kota Lhokseumawe.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan TA 2023 di wilayah Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Alokasi Mandatory Spending Bidang Kesehatan**

No	Komponen Perhitungan	APBK 2023	
		Anggaran	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Urusan bidang Kesehatan:</b>	<b>118.623.173.132,00</b>	<b>97.976.587.257,00</b>
1)	<b>Belanja Operasi:</b>	<b>99.310.097.193,00</b>	<b>90.016.169.921,00</b>
a.	belanja pegawai;	61.837.709.900,00	61.408.516.834,00
b.	belanja barang dan jasa;	37.292.387.293,00	28.427.653.087,00
c.	belanja hibah;	180.000.000,00	180.000.000,00
d.	belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
2)	<b>Belanja Modal;</b>	<b>19.313.075.939,00</b>	<b>7.960.417.336,00</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	Belanja Transfer:	0,00	0,00
2)	Sub Kegiatan pada SKPK	0,00	0,00
	<b>Total (A+B)</b>	<b>118.623.173.132,00</b>	<b>97.976.587.257,00</b>
	Total Anggaran Belanja Daerah (C)		798.260.907.647,00
	Gaji ASN (D)		181.556.260.622,00
	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (E=C-D)		616.704.647.025,00
	Persentase Anggaran Bidang Kesehatan (((Total A + B): E) x 100)		19,24%





Sesuai arahan dari Pemerintah Pusat dalam hal meningkatkan standar kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Lhokseumawe melaksanakan program dan kegiatan untuk mengatasi masalah *stunting* yang diampu oleh Dinas Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB (Dinas Sosial, PPPA, PP dan KB) Kota Lhokseumawe.

Adapun tujuan dari program *stunting* tersebut adalah menurunkan prevalensi *stunting*, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga.

Strategi dan Rencana aksi yang dilakukan yaitu dengan Intervensi spesifik (Penyebab Langsung), pemberian TTD pada Remaja Putri dan Ibu hamil, pemberian PMT pada ibu hamil KEK, ASI Eksklusif pada bayi < 6 bulan, pemberian MPASI pada balita usia 6-23 bulan, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian Imunisasi Dasar Lengkap.

Rencana aksi dilaksanakan sesuai dengan Perpres No 72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan *stunting* yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan, Perpres ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi. Sasaran dari program *stunting* adalah Remaja Putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-59 bulan.

Alokasi anggaran *stunting* tahun 2023 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.163.474.000,00 yang bersumber dari anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp3.105.753.000,00 terealisasi sebesar Rp2.167.007.303,00; DAK Fisik sebesar Rp2.256.521.000,00 terealisasi sebesar Rp2.234.958.850,00; Dana DOKA sebesar Rp500.000.000,00 terealisasi Rp498.552.600,00 dan Dana DID sebesar Rp301.200.000,00 terealisasi sebesar Rp299.642.404,00. Jumlah total realisasi untuk kegiatan *stunting* pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.200.161.157,00. Anggaran *stunting* pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB (Dinas Sosial, PPPA, PP dan KB) Kota Lhokseumawe bersumber dari anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp1.321.100.000,00 terealisasi sebesar Rp1.040.941.000,00.

Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan intervensi spesifik, kegiatan AKSi bergizi di sekolah-sekolah, pemberian TTD pada remaja putri (Rematri), Pengaturan Pemeriksaan *antenatal care* 6 (enam) kali sesuai standar pada ibu selama hamil, Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di fasyankes dan posyandu, Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), pemberian Vitamin A dan obat cacing pada balita, pemberian edukasi pada remaja, ibu hamil, dan keluarga termasuk kegiatan penghentian buang air besar sembarangan (BABS).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program *stunting* adalah alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas kader dan tenaga kesehatan terkait program *stunting* tidak mencukupi, buang air besar sembarangan (BABS), pengoperasional antropometri kit digital belum dipahami sepenuhnya oleh kader sehingga pada saat pengukuran masih terdapat kesalahan hasil ukurnya, petugas lapangan memiliki tugas ganda sehingga penginputan data ke dalam aplikasi e PPGBM tidak dapat langsung segera dilakukan serta ada beberapa tempat sinyal internet tidak memadai, dan balita yang mengakses posyandu masih rendah termasuk ibu hamil dan balita yang baru pindah tidak dapat segera dideteksi secara dini, keterlibatan lintas sektor di program *stunting* masih belum

bersinergi sehingga tidak terfokus pada upaya kerjasama dalam upaya penurunan balita *stunting*.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala adalah:

- 1) Terkait alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas kader dan tenaga kesehatan terkait program *stunting* tidak mencukupi, dilakukan advokasi untuk kegiatan peningkatan kader dan petugas
- 2) Buang air besar sembarangan (BABS), dengan pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat di Gampong -Gampong.
- 3) Pengoperasional antropometri kit digital belum dipahami sepenuhnya oleh kader sehingga pada saat pengukuran masih ada yang kesalahan hasil ukurnya, dengan menurunkan tim perusahaan antropometri untuk memeriksa alat tersebut untuk mengatasi permasalahan.
- 4) Petugas lapangan *double job* sehingga penginputan data ke dalam aplikasi e-PPGBM tidak dapat langsung segera dilakukan, ini dengan penambahan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan program *stunting*
- 5) Sinyal internet tidak memadai dengan penambahan jaringan internet di Puskesmas.
- 6) Balita yang mengakses posyandu masih rendah termasuk dengan *home visite*
- 7) Ibu hamil dan balita yang baru pindah tidak dapat segera dideteksi secara dini dengan berkoordinasi dengan pemerintah Gampong terkait perpindahan penduduk.
- 8) keterlibatan lintas sektor di program *stunting* masih belum bersinergi sehingga tidak terfokus pada upaya kerjasama dalam upaya penurunan balita *stunting* dengan cara melakukan advokasi pada setiap pertemuan Tim Konvergensi *Stunting* Kota Lhokseumawe.

Capaian program pada Tahun 2023 adalah:

1. TTD ibu hamil: 85%
2. IMD: 63%
3. Asi eksklusif: 54%
4. Vitamin A Balita: 94%
5. Vitamin A ibu Nifas: 84%
6. D/S: 86%
7. Gizi Kurang: 6,7%
8. Gizi Buruk mendapat perawatan: 100%
9. Ibu Hamil KEK mendapat PMT: 100%
10. Balita Gizi Kurang dapat PMT: 100%
11. Rematri mendapat TTD: 48%
12. Ibu Hamil KEK: 5; dan
13. Anemia Bumil: 6,6%

### **2.13.2 Mandatory Spending Bidang Pendidikan**

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kota Lhokseumawe.



Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan TA 2023 di wilayah Kota Lhokseumawe adalah sebesar 23,98% diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.7 Alokasi *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan**

No	Komponen Perhitungan	APBK 2023	
		Anggaran	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Urusan Bidang Pendidikan:</b>	<b>177.628.068.026,00</b>	<b>171.754.900.076,00</b>
	<b>1) Belanja Operasi:</b>	<b>155.960.482.013,00</b>	<b>150.712.355.060,00</b>
	a. belanja pegawai;	117.586.500.352,00	114.630.901.468,00
	b. belanja barang dan jasa;	30.166.955.714,00	28.501.556.292,00
	c. belanja hibah;	7.927.025.947,00	7.579.897.300,00
	d. belanja bantuan sosial.	280.000.000,00	0,00
	<b>2) Belanja Modal;</b>	<b>21.667.586.013,00</b>	<b>21.042.545.016,00</b>
<b>B.</b>	<b>Urusan Bidang Kebudayaan:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1) Belanja Operasi:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a. belanja pegawai;	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	0,00	0,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	<b>2) Belanja Modal;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Urusan Bidang Perpustakaan:</b>	<b>3.102.528.729,00</b>	<b>2.910.441.276,00</b>
	<b>1) Belanja Operasi:</b>	<b>2.878.261.129,00</b>	<b>2.688.794.736,00</b>
	a. belanja pegawai;	2.106.507.592,00	1.985.925.797,00
	b. belanja barang dan jasa;	771.753.537,00	702.868.939,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	<b>2) Belanja Modal;</b>	<b>224.267.600,00</b>	<b>221.646.540,00</b>
<b>D.</b>	<b>Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:</b>	<b>5.218.030.015,00</b>	<b>4.862.048.150,00</b>
	<b>1) Belanja Operasi:</b>	<b>5.008.112.515,00</b>	<b>4.653.673.150,00</b>
	a. belanja pegawai;	2.687.633.775,00	2.589.705.904,00
	b. belanja barang dan jasa;	1.197.878.740,00	1.006.767.246,00
	c. belanja hibah;	1.122.600.000,00	1.057.200.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
	<b>2) Belanja Modal;</b>	<b>209.917.500,00</b>	<b>208.375.000,00</b>
<b>E.</b>	<b>Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:</b>	<b>5.500.080.000,00</b>	<b>1.925.630.040,00</b>
	1) Belanja Transfer	0,00	0,00
	2) Sub Kegiatan pada SKPK	5.349.380.000,00	1.925.630.040,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	150.700.000,00	0,00
	Pengadaan Kitab /Buku Pendidikan Dayah	0,00	0,00
	<b>Total (A+B+C+D+E)</b>	<b>191.448.706.770,00</b>	<b>181.453.019.542,00</b>
<b>F</b>	Total Anggaran Belanja Daerah		798.260.907.647,00
<b>G</b>	Persentase Anggaran (((Total A+B+C+D+E) : F) x 100)		23,98

### 2.13.3 *Mandatory Spending Bidang Infrastruktur*

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang infrastruktur, alokasi anggaran bidang infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kota Lhokseumawe.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur TA 2023 di wilayah Kota Lhokseumawe adalah sebesar 38,65%, uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.8 Alokasi *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur**

No	Komponen Perhitungan	APBK 2023	
		Anggaran	Realisasi
1	<b>Belanja Modal</b>	<b>82.331.873.436,00</b>	<b>60.149.705.161,00</b>
	Tanah	523.400.000,00	0,00
	Peralatan dan Mesin	16.744.311.095,00	15.440.933.679,00
	Bangunan dan Gedung	36.586.560.395,00	21.923.145.455,00
	Jalan, jaringan dan irigasi	24.463.735.146,00	18.771.759.227,00
	Aset tetap lainnya	4.013.866.800,00	4.013.866.800,00
	Aset lainnya	0,00	0,00
2	<b>Belanja pemeliharaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Belanja Hibah</b>	<b>29.753.421.564,00</b>	<b>22.501.686.262,00</b>
4	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>33.021.802.830,00</b>	<b>31.141.171.655,00</b>
5	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>116.804.935.715,00</b>	<b>116.379.052.970,00</b>
	<b>Total (1+2+3+4+5)</b>	<b>261.912.033.545,00</b>	<b>230.171.616.048,00</b>
A.	<b>Total Anggaran Belanja Daerah</b>		<b>798.260.907.647,00</b>
B.	<b>Anggaran Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer</b>		<b>120.619.760.715,00</b>
	Belanja Bagi Hasil		3.814.825.000,00
	Bantuan Keuangan		116.804.935.715,00
	Selisih (C=A-B)		677.641.146.932,00
	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih) (D)		271.056.458.772,80
	Persentase pemenuhan <i>mandatory spending</i> infrastruktur (((Total 1+2+3+4+5) : C) x 100)		38,65%

### 2.13.4 *Mandatory Spending Bidang Pengawasan*

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai pagu anggaran mencapai Rp1.000.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,75% dari total belanja.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin,



pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Kota Lhokseumawe adalah diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.9 Alokasi *Mandatory Spending* Bidang Pengawasan**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>Total Belanja pada Inspektorat Daerah</b>	<b>8.586.717.142,00</b>	<b>8.429.472.216,00</b>	<b>98,17</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>8.527.834.242,00</b>	<b>8.370.632.216,00</b>	<b>98,16</b>
Belanja Pegawai	5.965.052.900,00	5.860.179.258,00	98,24
Belanja Barang dan Jasa	2.562.781.342,00	2.510.452.958,00	97,96
<b>Belanja Modal</b>	<b>58.882.900,00</b>	<b>58.840.000,00</b>	<b>99,93</b>
<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>798.260.907.647,00</b>	<b>728.461.011.932,00</b>	<b>91,26</b>
<b>Persentase</b>	<b>1,08%</b>	<b>1,16%</b>	

### 2.13.5 *Mandatory Spending* Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi ADD di wilayah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.10 Alokasi *Mandatory Spending* Fungsi ADD**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>Total Belanja ADD (A)</b>	<b>61.827.136.000,00</b>	<b>61.401.253.255,00</b>	<b>99,31</b>
<b>Dana Perimbangan (B)</b>	<b>564.137.641.383,00</b>	<b>563.774.771.313,00</b>	<b>99,94</b>
<b>DAK (C)</b>	<b>105.256.051.000,00</b>	<b>102.155.961.900,00</b>	<b>97,05</b>
DAK Fisik	23.192.612.000,00	22.632.985.556,00	97,59
DAK Non Fisik	82.063.439.000,00	79.522.976.344,00	96,90
<b>Total Dana Perimbangan dikurangi DAK (D=B-C)</b>	<b>458.881.590.383,00</b>	<b>461.618.809.413,00</b>	<b>100,6</b>
<b>Persentase (A/D x 100)</b>	<b>13,47</b>	<b>13,30</b>	

### BAB III KINERJA KEUANGAN DAERAH

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBK disusun dalam rangka pencapaian sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Agar program dan kegiatan APBK lebih fokus dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, disusunlah indikator kinerja kegiatan, yaitu indikator yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Selama tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melakukan pergeseran anggaran sebanyak 4 (empat) kali melalui Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023, Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2022, Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2022 dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023. Pada tahun 2023 ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak melakukan perubahan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanjanya.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe terdiri dari pendapatan sebesar Rp755.949.798.672,00, belanja sebesar Rp728.461.011.932,00, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp10.541.034.674,37 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp1.000.000.000,00, sehingga anggaran SILPA Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp37.029.821.414,37. Secara garis besar ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang tertuang dalam APBK Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
1	2	3	4=3/2	5	6=(3-5)/5
<b>PENDAPATAN</b>	<b>768.471.407.647,00</b>	<b>755.949.798.672,00</b>	<b>98,37</b>	<b>789.566.096.079,52</b>	<b>(4,26)</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>75.120.033.625,00</b>	<b>67.901.946.334,00</b>	<b>90,39</b>	<b>68.212.506.871,28</b>	<b>(0,46)</b>
Pendapatan Pajak Daerah	34.060.750.000,00	39.586.915.813,00	116,22	40.032.463.309,91	(1,11)
Pendapatan Retribusi Daerah	4.087.500.000,00	3.733.420.512,40	91,34	3.022.508.323,00	23,52
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.000.000,00	3.236.124.545,00	62,23	4.350.084.432,00	(25,61)
Zakat dan Infaq/Sadaqah	8.900.000.000,00	6.726.500.196,23	75,58	7.004.195.235,00	(3,96)
Lain-lain PAD yang Sah	22.871.783.625,00	14.618.985.267,37	63,92	13.803.255.571,37	5,91



URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
1	2	3	4=3/2	5	6=(3-5)/5
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>692.811.374.022,00</b>	<b>687.825.852.338,00</b>	<b>99,28</b>	<b>721.353.589.208,24</b>	<b>(4,65)</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN</b>	<b>631.695.343.383,00</b>	<b>630.906.590.568,00</b>	<b>99,88</b>	<b>622.773.568.549,00</b>	<b>1,31</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	14.970.371.095,00	14.951.657.125,00	99,87	19.666.583.345,00	(23,97)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	10.297.693.288,00	10.297.693.288,00	100,00	5.842.230.812,00	76,26
Dana Alokasi Umum	433.613.526.000	436.369.459.000,00	100,64	415.683.229.737,00	4,98
Dana Alokasi Khusus	105.256.051.000,00	102.155.961.900,00	97,05	93.236.323.753,00	9,57
Dana Insentif Daerah	5.730.566.000	5.730.566.000,00	100,00	34.445.081.000,00	(83,36)
Dana Desa	61.827.136.000	61.401.253.255,00	99,31	53.900.119.902,00	13,92
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>61.116.030.639,00</b>	<b>56.919.261.770,00</b>	<b>93,13</b>	<b>98.580.020.659,24</b>	<b>(42,26)</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	31.220.106.455	34.250.277.597,00	109,71	29.261.429.715,29	17,05
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	29.895.924.184	22.668.984.173,00	<b>75,83</b>	69.318.590.943,95	(67,30)
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>540.000.000,00</b>	<b>222.000.000,00</b>	<b>41,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pendapatan Hibah	540.000.000,00	222.000.000,00	41,11	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA</b>	<b>798.260.907.647,00</b>	<b>728.461.011.932,00</b>	<b>91,26</b>	<b>825.509.672.418,00</b>	<b>(11,76)</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>595.256.623.128,00</b>	<b>548.509.273.989,00</b>	<b>92,15</b>	<b>576.374.939.708,00</b>	<b>(4,83)</b>
Belanja Pegawai	333.590.854.673,00	316.584.344.048,00	94,90	304.916.122.038,00	3,83
Belanja Barang dan Jasa	198.420.544.061,00	177.812.072.024,00	89,61	185.425.254.292,00	(4,11)
Belanja Subsidi	470.000.000,00	470.000.000,00	100,00	200.000.000,00	135,00
Belanja Hibah	29.753.421.564,00	22.501.686.262,00	75,63	36.702.542.385,00	(38,69)
Belanja Bantuan Sosial	33.021.802.830,00	31.141.171.655,00	94,30	49.131.020.993,00	(36,62)
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>82.331.873.436,00</b>	<b>60.336.467.761,00</b>	<b>73,28</b>	<b>142.251.751.256,00</b>	<b>(57,58)</b>
Belanja Tanah	523.400.000,00	0,00	0,00	13.713.809.182,00	(100,00)
Belanja Peralatan dan Mesin	16.744.311.095,00	15.627.696.279,00	93,33	21.363.441.916,00	(26,85)
Belanja Gedung dan Bangunan	36.586.560.395,00	21.923.145.455,00	59,92	40.945.930.770,00	(46,46)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.463.735.146,00	18.771.759.227,00	76,73	62.614.371.138,00	(70,02)
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.013.866.800,00	4.013.866.800,00	100,00	3.614.198.250,00	11,06
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>52.650.368,00</b>	<b>52.650.368,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.134.850.082,00</b>	<b>(97,53)</b>
Belanja Tidak Terduga	52.650.368,00	52.650.368,00	100,00	2.134.850.082,00	(97,53)
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>120.619.760.715,00</b>	<b>119.562.619.814,00</b>	<b>99,12</b>	<b>104.748.131.372,00</b>	<b>14,14</b>
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	3.814.825.000,00	3.183.566.844,00	83,45	1.820.631.270,00	74,86



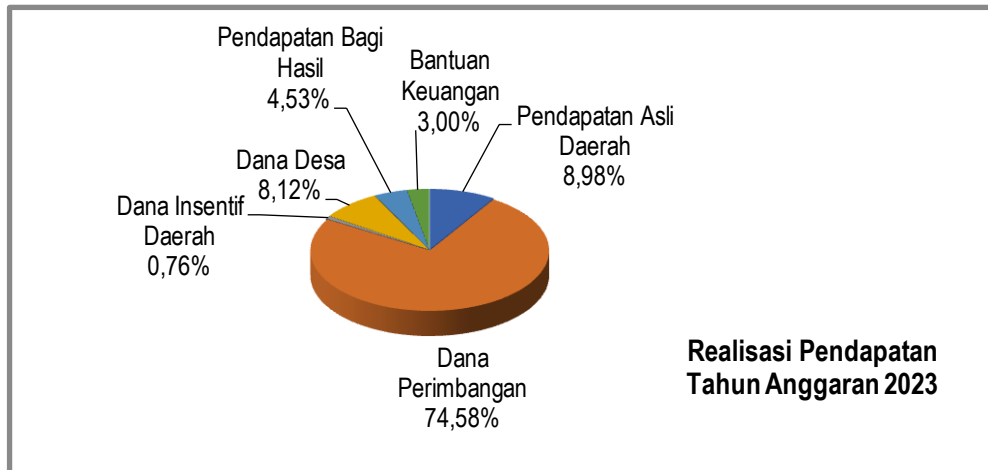
URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%
1	2	3	4=3/2	5	6=(3-5)/5
Bantuan Keuangan	116.804.935.715,00	116.379.052.970,00	99,64	102.927.500.102,00	13,07
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(29.789.500.000,00)</b>	<b>27.488.786.740,00</b>	<b>(92,28)</b>	<b>(35.943.576.338,48)</b>	<b>(176,48)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>29.789.500.000,00</b>	<b>9.541.034.674,37</b>	<b>32,03</b>	<b>46.484.611.012,85</b>	<b>(79,47)</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>31.789.500.000,00</b>	<b>10.541.034.674,37</b>	<b>33,16</b>	<b>48.484.611.012,85</b>	<b>(78,26)</b>
Penggunaan SiLPA	31.789.500.000,00	10.541.034.674,37	33,16	48.484.611.012,85	(78,26)
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>(50,00)</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	2.000.000.000,00	(50,00)
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>37.029.821.414,37</b>		<b>10.541.034.674,37</b>	<b>251,29%</b>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp67.901.946.334,00 berarti kontribusi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah sebesar 8,98%. Dengan demikian ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat dan Provinsi dirasakan masih cukup besar yaitu sebesar 91,02%. Realisasi PAD tersebut apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp68.212.506.871,28 atau mengalami penurunan sebesar 0,46%.

Komposisi PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Zakat, Infaq dan Sadaqah dan Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana yang tertera dalam **Tabel 3.1** di atas. Dari penerimaan PAD ini yang paling besar penerimaannya adalah dari Pajak Daerah sebesar Rp39.586.915.813,00 atau 5,24% dari keseluruhan Pendapatan, sedangkan Retribusi Daerah sebesar Rp3.733.420.512,40 atau 0,49%, Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp3.236.124.545,00 atau sebesar 0,43%, lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp14.618.985.267,37 atau 1,93%, Zakat dan Infaq sebesar Rp6.726.500.196,23 atau sebesar 0,89%.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan Tahun 2023 realisasinya sebesar Rp630.906.590.568,00 terdiri dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp14.951.657.125,00 dan Bukan Pajak sebesar Rp10.297.693.288,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp436.369.459.000,00. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp102.155.961.900,00, Dana Insentif Daerah Rp5.730.566.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp61.401.253.255,00, dengan demikian kontribusi total dana perimbangan terhadap total realisasi pendapatan sebesar 83,46%. Dana DAU sebesar 57,72% dialokasikan untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil yang dialokasikan untuk Belanja Aparatur, Pelayanan Publik dan lainnya. Hal ini menggambarkan alasan Pemerintah Kota Lhokseumawe belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena kebutuhan untuk pembayaran gaji dan belanja aparatur tidak mungkin dikurangi. Persentase sumber pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



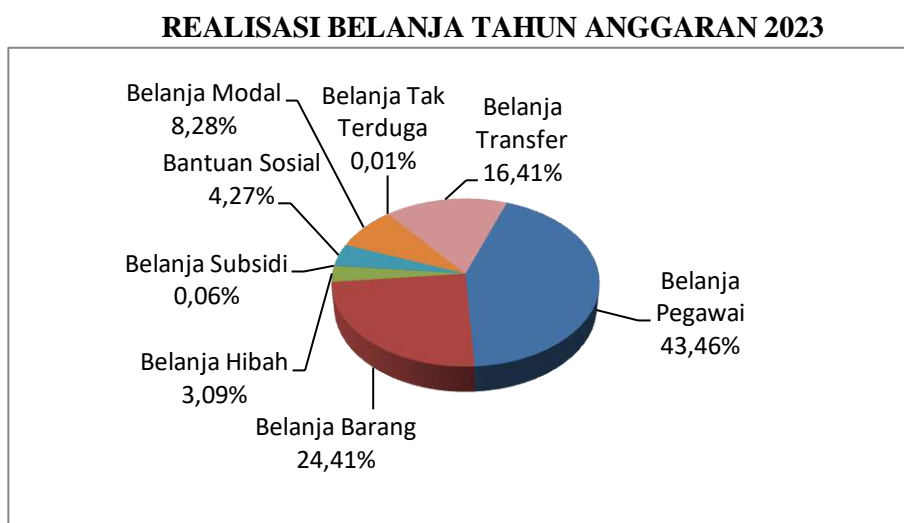


**Gambar 3.1**  
**Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023**

Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan keuangan daerah dengan menyempurnakan manajemen keuangan, melakukan efisiensi dan penghematan, mempertajam prioritas dan berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan meningkatkan penerimaan keuangan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik.

Berkaitan dengan belanja daerah, realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp728.461.011.932,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp798.260.907.647,00 atau 91,26%. Dibandingkan Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp97.048.660.486,00 atau 11,76% yaitu realisasi belanja Tahun 2022 sebesar Rp825.509.672.418,00. Dari jumlah realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp728.461.011.932,00, untuk belanja modal sebesar Rp60.336.467.761,00 atau 8,28% diantaranya merupakan belanja untuk menambah aset Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Persentase realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



**Gambar 3.2**  
**Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023**

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, aparatur pengelolaan keuangan SKPK khususnya bidang akuntansi yang ada pada Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah menyusun sendiri Laporan Keuangannya walaupun masih perlu banyak pembinaan. Selain itu sistem pengelolaan keuangan daerah yang memadai diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat diandalkan bagi proses pengambilan keputusan manajemen puncak dalam membuat kebijakan atas pelaksanaan pembangunan daerah.

### **3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe diantaranya yaitu:

- a. Masih kurangnya tingkat kecermatan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan SKPK yang telah direncanakan, sehingga di akhir tahun anggaran berjalan tidak seluruhnya dapat direalisasikan; dan Masih kurangnya tingkat kecermatan;
- b. Masih terdapat data wajib pajak dan wajib retribusi yang belum valid, sehingga ketika dilakukan penagihan WP/WR belum bisa melunasinya karena data yang tertera dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) sudah tidak sesuai. Untuk itu perlu dilakukan validasi data kembali;
- c. Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi dalam membayar pajak/retribusi;
- d. Tanggung jawab aparatur dalam hal memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan;
- e. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pencapaian target pendapatan seperti komputer dan mobil operasional untuk pendataan dan penagihan objek pajak dan objek retribusi baru;
- f. Masih perlu penataan secara terus menerus yang berkaitan dengan sistem administrasi, mekanisme perpajakan/pungutan daerah yang telah mengakomodir berbagai ketentuan baru yang berlaku; dan
- g. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur baik dari kualitas maupun kuantitas dalam menangani pemungutan pajak dan retribusi daerah.



## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **4.1 Entitas Pelaporan**

Pemerintah Kota Lhokseumawe memberikan wewenang kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe sebagai Bendaharawan Umum Daerah untuk mengelola administrasi keuangan daerah beserta pelaporan keuangannya.

Bendaharawan Umum Daerah selaku entitas pelaporan melakukan fungsi penganggaran, fungsi verifikasi, fungsi perbendaharaan dan fungsi akuntansi.

Laporan Keuangan yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **4.1.1 Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam perhitungan realisasi anggaran dan basis Akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca Daerah, Pendapatan dan Beban Operasional dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual mulai diterapkan sepenuhnya pada TA 2015 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak Kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis Akrual disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.1.2 Pengakuan dan Pengukuran**

##### **4.1.2.1 Pendapatan**

Pendapatan dibagi menjadi 2 (dua) yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua Penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya dalam tiga kelompok Pendapatan Daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan  
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Pendapatan-LO diakui



pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan; dan

b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *Official Assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) di mana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO pada PPKD

Pendapatan-LO pada PPKD diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah, tidak diakui yang berdasarkan Perpres/Permenkeu/Pergub yang telah diterbitkan, sehingga apabila terdapat kurang salur dari jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan Perpres/Permenkeu/Pergub tidak diakui sebagai piutang.

3) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu.

Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Umum Kas Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPK.

Pengakuan Pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LO diukur berdasarkan Azas Bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### 4.1.2.2 Pengakuan Belanja dan Beban

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah dan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran berdasarkan jumlah nominal yang terdapat pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan posnya

masing-masing. Sedangkan pengakuan beban dapat diakui dengan tiga kondisi yaitu (i) Beban diakui sebelum pengeluaran kas; (ii) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan (iii) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

#### 4.1.2.3 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat. Alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau Peraturan Perundang-Undangan.

##### a. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1) Transaksi dengan Pertukaran (*Exchange Transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

2) Transaksi Tanpa Pertukaran (*Non-Exchange Transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintahan (*Government-Related Events*)

Dalam kewajiban yang berkaitan dengan Pemerintahan Kota, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Kota dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Kota.

4) Kejadian yang diakui pemerintah (*Government-Acknowledge Events*)

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kota memutuskan untuk merespons suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintahan daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Kota, misal Pemerintah Kota memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

##### b. Pengukuran

Kewajiban Pemerintah Kota dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Penggunaan



nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Kota berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek sebagai berikut:

1) Pengukuran Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Apabila rekanan menyediakan barang/jasa sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2) Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan Perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5) Pengukuran bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

6) Pengukuran Kewajiban Lancar lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, antara lain: biaya yang masih harus dibayar pada saat Laporan Keuangan disusun, penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain.

7) Pengukuran Uang Muka dari Kas Umum Daerah

Nilai yang dicantumkan di Neraca sebesar saldo uang muka yang belum disetorkan/dipertanggungjawabkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal Neraca.

8) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kota kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Neraca.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Kota diukur berdasarkan karakteristik utang, yaitu:



1) Utang yang tidak diperjualbelikan; dan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *world bank*.

2) Utang yang diperjualbelikan.

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk Sekuritas Utang Pemerintah Kota. Sekuritas Utang Pemerintah Kota dinilai sebesar nilai pari (*Original Face Value*) dengan memperhitungkan diskon atau sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar parinya.

Jika sekuritas utang Pemerintah Kota dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

**c. Penyajian dan Pengungkapan**

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Kota disajikan dalam Neraca di sisi *passiva*. Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- 5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
  - a) Pengurangan pinjaman;
  - b) Modifikasi persyaratan utang;
  - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
  - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
    - (1) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
    - (2) Biaya Pinjaman:
      - (a) Perlakuan biaya pinjaman;
      - (b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
      - (c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

#### 4.1.2.4 Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti Bunga, Dividen dan Royalti, atau Manfaat Sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi meliputi:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek berbeda dengan kas dan setara kas. Suatu investasi masuk klasifikasi kas dan setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

a) Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Memungkinkan Pemerintah Kota memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*Reliable*).





b) Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya, berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis:

(1) Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

(a) Investasi dalam bentuk surat berharga:

- (i) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya; dan
- (ii) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

(b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.

(2) Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

(a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

(b) Investasi Non Permanen:

- (i) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
- (ii) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
- (iii) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(3) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai Investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.



(4) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(5) Penilaian Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

(a) Metode Biaya

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehannya. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(b) Metode Ekuitas

Investasi Pemerintah Daerah yang nilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai Investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan Investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

(i) Kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya;

(ii) Kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

(iii) Kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas; dan

(iv) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah

tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- (i) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- (ii) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- (iii) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investasi; dan
- (iv) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah bersifat Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sebagaimana diterapkan dalam menghitung NRV piutang. Pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

- (6) Pelepasan Investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Daerah dan hal lainnya. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

#### (7) Penyajian dan Pengungkapan

Investasi Jangka Pendek disajikan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi non permanen dan investasi permanen.

Penyajian dana bergulir di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana

bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Akun Lawan (*Contra Account*) dari dana bergulir diragukan tertagih adalah diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Kebijakan Akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- (b) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
- (c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- (d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- (e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- (f) Perubahan pos investasi.

#### 4.1.2.5 Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Transfer keluar LRA adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Kota.

##### a. Pengakuan

- 1) Transfer masuk diakui pada saat terjadinya penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah; dan
- 3) Dana transfer diakui sesuai hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

##### b. Pengukuran

- 1) Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah; dan
- 3) Dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

##### c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk meliputi:



- a) Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;
  - b) Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah; dan
  - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 2) Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait dengan transfer keluar meliputi:
- a) Rincian transfer keluar;
  - b) Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam Laporan Keuangan lembar muka;
  - c) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar; dan
  - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.1.2.6 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA bersangkutan maupun TA berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kota.

##### a. Pengakuan

- 1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi Perusahaan Daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan; dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

##### b. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

##### c. Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan meliputi:



- 1) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah; dan
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.1.2.7 Kas dan Setara Kas**

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam Neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

##### **a. Pengakuan**

Kas dan setara kas yang diakui mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab BUD dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- 1) Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
- 2) Setara Kas, dapat berupa Surat Utang Negara (SUN)/Obligasi dan Deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

##### **b. Pengukuran**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK.

##### **c. Penyajian dan Pengungkapan**

Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan

bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada laporan arus kas.

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kas dan setara kas meliputi:

- 1) Rincian kas dan setara kas;
- 2) Kebijakan manajemen setara kas; dan
- 3) Informasi lainnya yang dianggap penting.

#### 4.1.2.8 Piutang

Piutang adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini, diantaranya:

- a. Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi kepada Pemerintah Daerah atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak atau retribusi daerah yang tercantum besarnya dalam surat; dan
- b. Piutang Transfer adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang belum dibayarkan sampai akhir periode laporan tahun berjalan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi sesuai dengan jumlah/nilai definitif menurut Keputusan Menteri atau Kepala Daerah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

##### a. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- 1) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- 3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

##### b. Pengukuran

Setelah diterbitkan surat tagihan maka piutang pendapatan diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh



karena setiap tagihan oleh Pemerintah Daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Piutang dan perhitungan nilai penyisihannya disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan; dan
- 4) Kualitas Piutang Macet;

Penggolongan piutang dipilih menjadi:

- 1) Piutang lancar, dengan kriteria:
  - a) Dalam masa/jangka waktu SKPD/SKRD, sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
  - b) Dalam masa/jangka waktu akad kredit perikatan.
- 2) Piutang kurang lancar, dengan kriteria:

Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun setelah SKPD/SKRD/ akad kredit perikatan jatuh tempo.
- 3) Piutang diragukan, dengan kriteria:

Umur piutang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah SKPD/SKRD/ akad kredit perikatan jatuh tempo.
- 4) Piutang macet, dengan kriteria:

Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun setelah SKPD/SKRD/akad kredit perikatan jatuh tempo.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Besarnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

No	Kualitas piutang	Taksiran piutang tak tertagih
1	Lancar	5%
2	Kurang lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%



Penyisihan piutang tidak tertagih, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas lancar sebesar 5% (lima perseratus);
- 2) Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, sesuai **Tabel 4.2** berikut:

**Tabel 4.2**  
**Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang**

No.	Jenis	Umur Piutang			
	Piutang	≤ 1 Tahun	>1 s.d. 2 Tahun	>2 s.d. 3 Tahun	>3 Tahun
1	Piutang Pajak	5%	10%	50%	100%
2	Piutang Retribusi	5%	10%	50%	100%
3	Piutang Lain-lainnya	5%	10%	50%	100%

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian, cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal.

#### 4.1.2.9 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategi/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku,



barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan untuk tujuan strategi/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

a. Pengakuan

Persediaan dicatat berdasarkan:

- 1) Pendekatan persediaan berdasarkan beban, metode perpetual dimana fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir; dan
- 2) Proses pencatatan dan penatausahaan persediaan menggunakan Aplikasi Persediaan Kementerian Keuangan, dan dilakukan rekonsiliasi saldo persediaan dengan *E-Finance*.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*, apabila disebabkan karena persediaan usang, kedaluwarsa, atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban. Sedangkan selisih persediaan karena persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan kerugian daerah.

b. Pengukuran

Persediaan diukur dengan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*Arm Length Transaction*). Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Pada setiap mutasi dan pada akhir tahun persediaan dinilai dengan menggunakan harga perolehannya.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota mengungkapkan:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;



- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
- 4) Pada akhir periode, persediaan yang disajikan dalam Neraca terdiri dari:
  - a) Persediaan alat tulis kantor;
  - b) Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, *battery* kering);
  - c) Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya;
  - d) Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
  - e) Persediaan bahan bakar minyak/gas;
  - f) Dokumentasi kegiatan;
  - g) Hadiah dan sertifikat;
  - h) Belanja pembuatan cendera mata (Plat dan *Vandel*);
  - i) Pengadaan bendera;
  - j) Barang pecah belah/dapur;
  - k) Tas;
  - l) Dekorasi;
  - m) Bahan perbekalan kesehatan;
  - n) Bahan baku bangunan;
  - o) Persediaan bahan /bibit tanaman;
  - p) Persediaan bahan obat-obatan;
  - q) Persediaan bahan kimia;
  - r) Persediaan bahan makanan pokok;
  - s) Bahan publikasi (baliho, spanduk, *billboard* dan umbul-umbul);
  - t) Bahan perlengkapan;
  - u) Alat praktek/peraga dan simulasi;
  - v) Bahan pangan/pertanian;
  - w) Bahan/bibit perikanan;
  - x) Persediaan makanan tambahan;
  - y) Bahan *specimen*;
  - z) Cetak;
  - aa) Penggandaan; dan
  - bb) Barang yang akan diserahkan ke masyarakat.



#### **4.1.2.10 Aset Tetap**

##### **4.1.2.10.1 Tanah**

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

###### **a. Pengakuan**

Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

###### **b. Pengukuran**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

###### **c. Pengungkapan**

Tanah disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus diungkapkan pula:

Dasar penilaian yang digunakan Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan:

- 1) Penambahan;
- 2) Pelepasan; dan
- 3) Mutasi Tanah lainnya.

##### **4.1.2.10.2 Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah Barang Milik Daerah (BMD) yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

###### **a. Pengakuan**

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah Belanja Modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi



pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai gedung dan bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan gedung dan bangunan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai gedung dan bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai gedung dan bangunan karena berkurangnya kuantitas aset tersebut.

b. Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

c. Pengungkapan

Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a) Penambahan
  - b) Pengembangan; dan
  - c) Penghapusan.
- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.

#### **4.1.2.10.3 Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.



a. Pengakuan

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah Belanja Modal yang diakui untuk aset tersebut.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat peralatan dan mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai peralatan dan mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan peralatan dan mesin tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai peralatan dan mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai peralatan dan mesin karena berkurangnya kuantitas aset tersebut.

b. Pengukuran

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

c. Pengungkapan

Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a) Penambahan;
  - b) Pengembangan; dan
  - c) Penghapusan.

Penghapusan aset-aset pemerintah dalam hal ini mengacu pada ketentuan dan peraturan daerah yang telah di atur dalam Surat Keputusan berdasarkan hasil Penelitian Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris Milik Daerah yang



dinyatakan hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dan pelaksanaan penghapusan dilakukan dengan cara:

- (1) Untuk barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan dengan cara penjualan/pelelangan atau disumbangkan kepada pihak lain; dan
  - (2) Untuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan dengan cara pemusnahan.
- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

#### **4.1.2.10.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

##### **a. Pengakuan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah Belanja Modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan karena peningkatan manfaat yang berkaitan pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan karena berkurangnya kuantitas Aset tersebut.

##### **b. Pengukuran**

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.



c. Pengungkapan

Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a) Penambahan;
  - b) Pengembangan; dan
  - c) Penghapusan.
- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

**4.1.2.10.5 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, Hewan, Ikan dan Tanaman.

a. Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika Aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah Belanja Modal yang diakui untuk Aset tersebut. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap lainnya tersebut. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya karena berkurangnya kuantitas Aset tersebut.

b. Pengukuran

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

c. Pengungkapan

Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:





- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan; dan
- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

#### **4.1.2.10.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal Laporan Keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

##### **a. Pengakuan**

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan Laporan Keuangan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Kota atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu konstruksi dalam pengertian dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; Aset Tetap Lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

##### **b. Pengukuran**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana; peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; dan
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan



dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; dan
- 2) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

c. Pengungkapan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- 5) Retensi.

#### 4.1.2.10.7 Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

#### 4.1.2.10.8 Aset Bersejarah

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*) tidak disajikan di Neraca namun Aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai Aset Bersejarah karena kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari Aset Bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen. Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu Aset Bersejarah:

- a. Nilai Kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset Bersejarah biasanya diharapkan untuk mempertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset Bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah mungkin mempunyai banyak Aset Bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset Bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi, harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan Aset Bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa Aset Bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya.

#### 4.1.2.10.9 Kapitalisasi Aset tetap

Nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Nilai satuan minimum pengakuan Aset Tetap dalam Neraca adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap**

No	Jenis Aset	Nilai (Rp)
1	Tanah	$\geq 1$
2	Peralatan dan Mesin	300.000,00
3	Gedung dan Bangunan	30.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman dan Aset Tetap Lainnya	200.000,00
6	KDP Bangunan/Gedung	$\geq 1$

Kapitalisasi Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi tidak menambah umur ekonomis Aset Tetap tersebut. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap diperlakukan sebagai belanja/beban. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah dan tidak memenuhi definisi Aset Tetap disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah.

Masa manfaat:

Masa manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan dikecualikan untuk beberapa hal berikut:

- a. Terjadi perubahan karakteristik fisik/ penggunaan aset tetap;



- b. Terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat;
- c. Terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat Aset Tetap yang baru diketahui dikemudian hari; dan
- d. Kesesuaian antara sisa masa manfaat Aset Tetap dengan kondisi aset tetap.

Perubahan masa manfaat dilakukan dalam hal terjadi sebab yang secara normal atau wajar dan ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah

Perbaikan terhadap Aset Tetap:

Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas manfaat yang dimaksud pada poin (b), adalah mengubah masa manfaat Aset Tetap yang bersangkutan sebagai berikut:

- a. Renovasi, yaitu kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau pergantian bagian aset tetap;
- b. Restorasi, yaitu kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya; dan
- c. *Overhaul*, yaitu kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau pergantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Penambahan masa manfaat Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap Aset Tetap berupa Renovasi disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Penambahan Masa Manfaat**

No	Uraian	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
B .	Gedung dan Bangunan	
B.1	Bangunan Gedung	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10
2	Bangunan Gedung Tempat tinggal	10
3	Bangunan Menara	8
B.2	Monumen	
1	Bangunan Bersejarah	10
2	Tugu Peringatan	10
3	Candi	10
4	Monumen / Bangunan Bersejarah	10
5	Tugu Peringatan Lain	10
6	Tugu Titik Kontrol / Pasti	10
7	Rambu-Rambu	10
8	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
C.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.1	Jalan dan Jembatan	
1	Jalan	2



No	Uraian	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
2	Jembatan	10
3	Penerangan Jalan dan Jembatan	
C.2	Bangunan Air /Irigasi	
1	Bangunan Air Irigasi	10
2	Bangunan Air Irigasi Pasang Surut	10
3	Bangunan Air Rawa	5
4	Bangunan Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	2
5	Bangunan Pengamanan Sumber Air dan Air Tanah	6
6	Bangunan Air Bersih / Baku	8
7	Bangunan Air Kotor	8
8	Bangunan Air	8
C.3	Instalasi	
1	Instalasi Air Minum / Air Bersih	6
2	Instalasi Air Kotor	6
3	Instalasi Pengamanan Sampah Non Organik	2
4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	2
5	Instalasi Pembangkit Listrik	8
6	Instalasi Gardu Listrik	8
7	Instalasi Pertahanan	6
8	Instalasi Gas	6
9	Instalasi Pengaman	6
C.4	Jaringan	
1	Jaringan Air Minum	6
2	Jaringan Listrik	6
3	Jaringan Telepon	6
4	Jaringan Gas	6

#### 4.1.2.10.10 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*Straight Line Method*).

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok Aset Tetap adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.5**  
**Masa Manfaat untuk Menghitung Tarif Penyusutan**

No	Uraian	Kota Lhokseumawe
A.	Peralatan dan Mesin	
A.1	Alat-alat Besar	
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	8
3	Alat-alat Bantu	7
A.2	Alat-alat Angkutan	
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
A.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	Alat Bengkel Bermesin	10
2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
3	Alat Ukur	5
A.4	Alat Pertanian	
1	Alat Pengolahan	4
2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
A.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	Alat Kantor	5
2	Alat Rumah Tangga	5
3	Peralatan Komputer	4
4	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
A.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
1	Alat Studio	5
2	Alat Komunikasi	5
3	Peralatan Pemancar	10
A.7	Alat-alat Kedokteran	
1	Alat Kedokteran	5
2	Alat Kesehatan	5
A.8	Alat Laboratorium	
1	Unit-Unit Laboratorium	8
2	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
3	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10



No	Uraian	Kota Lhokseumawe
6	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> (BATAM)	10
7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
A.9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
1	Senjata Api	10
2	Persenjataan Non Senjata Api	3
3	Amunisi	5
4	Senjata Sinar	5
5	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
B.	Gedung dan Bangunan	
B.1	Bangunan Gedung	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
3	Bangunan Menara	40
B.2	Monumen	
1	Bangunan Bersejarah	50
2	Tugu Peringatan	50
3	Candi	50
4	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
5	Tugu Peringatan Lain	50
6	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
7	Rambu-Rambu	50
8	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
C.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.1	Jalan dan Jembatan	
1	Jalan	10
2	Jembatan	50
3	Penerangan Jalan dan Jembatan	
C.2	Bangunan Air/Irigasi	
1	Bangunan Air Irigasi	50
2	Bangunan Air Pasang Surut	50
3	Bangunan Air Rawa	25
4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
6	Bangunan Air Bersih/Baku	40
7	Bangunan Air Kotor	40
8	Bangunan Air	40



No	Uraian	Kota Lhokseumawe
C.3	Instalasi	
1	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
2	Instalasi Air Kotor	30
3	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
6	Instalasi Gardu Listrik	40
7	Instalasi Pertahanan	30
8	Instalasi Gas	30
9	Instalasi Pengaman	30
C.4	Jaringan	
1	Jaringan Air Minum	30
2	Jaringan Listrik	30
3	Jaringan Telepon	30
4	Jaringan Gas	30
D.	Aset Tetap Lainnya	
D.1	Barang Bercorak Kebudayaan	
1	Barang Bercorak Kebudayaan	Tidak disusutkan
2	Alat Olahraga Lainnya	Tidak disusutkan
D.2	Hewan dan tanaman	Tidak disusutkan
D.3	Buku Perpustakaan	Tidak disusutkan

Untuk perhitungan penyusutan, dihitung dengan pendekatan secara semesteran (satu hari pencatatan nilai perolehan pada semester tersebut dianggap penyusutannya satu semester), dengan menggunakan perhitungan secara manual.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai Aset Tetap yang dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam aset tetap.

Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*Carrying Amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) Penambahan;
  - 2) Pelepasan;
  - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan





- 4) Mutasi Aset Tetap Lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  - 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
  - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
  - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - 3) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
  - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Aset bersejarah tidak disajikan dalam Neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

#### **4.1.2.10.11 Penyusutan Aset Tidak Berwujud (Amortisasi)**

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Sedangkan untuk aset tidak berwujud berupa piranti lunak (*software*) jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus.

#### **4.1.2.10.12 Penyajian dan Pengungkapan**

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT, BTO);
- c. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud; dan
- d. Informasi lainnya yang penting.



## BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

### 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan gabungan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebanyak 34 (tiga puluh empat) SKPK. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah disajikan di bagian awal laporan ini. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut:

#### 5.1.1 Pendapatan

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp755.949.798.672,00**      **Rp789.566.096.079,52**

Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp755.949.798.672,00 atau 98,37% dari anggaran yang berjumlah sebesar Rp768.471.407.647,00 sebagaimana tertuang dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023. Nilai Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp33.616.297.407,52 atau 4,26% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1  
Realisasi Pendapatan Per Kelompok Pendapatan TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	% Naik/ Turun
1	Pendapatan Asli Daerah	75.120.033.625,00	67.901.946.334,00	90,39	68.212.506.871,28	(0,46)
2	Pendapatan Transfer	692.811.374.022,00	687.825.852.338,00	99,28	721.353.589.208,24	(4,65)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	540.000.000,00	222.000.000,00	41,11	0,00	0,00
	Jumlah	768.471.407.647,00	755.949.798.672,00	98,37	789.566.096.079,52	(4,26)

Realisasi Pendapatan menurut kelompoknya dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 sebesar Rp67.901.946.334,00 dari target sebesar Rp75.120.033.625,00 yang berarti bahwa PAD hampir mencapai target yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 90,39%, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp310.560.537,38 atau 0,46% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

- b. Pendapatan Transfer TA 2023 terealisasi sebesar Rp687.825.852.338,00 dari target sebesar Rp692.811.374.022,00 yang berarti juga hampir mencapai target secara keseluruhan yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 99,28%, namun nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp33.527.736.870,24 atau 4,65% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.
- c. Untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah ditetapkan target pada tahun 2023 sebesar Rp540.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp222.000.000,00 atau 41,11%, Pendapatan dari kelompok ini tidak ditargetkan pada TA 2022.



**Gambar 5.1**  
**Realisasi Pendapatan Tahun 2023**

Dari grafik di atas, jelas terlihat bahwa Pendapatan Kota Lhokseumawe TA 2023 masih memiliki ketergantungan yang besar dari Pendapatan Transfer yaitu sebesar Rp687.825.852.338,00 atau 90,99% dari realisasi seluruh pendapatan TA 2023 sebesar Rp755.949.798.672,00 atau sebesar 89,51% dari anggaran keseluruhan pendapatan Kota Lhokseumawe sebesar Rp768.471.407.647,00.

#### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	<b>Rp67.901.946.334,00</b>	<b>Rp68.212.506.871,28</b>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp67.901.946.334,00 atau 90,39% dari anggaran sebesar Rp75.120.033.625,00 merupakan pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Nilai realisasi tersebut secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp310.560.537,28 atau 0,46% dibandingkan realisasi TA 2022.

Berikut realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2023.

**Tabel 5.2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	Pendapatan Pajak Daerah	34.060.750.000,00	39.586.915.813,00	116,22	40.032.463.309,91	(1,11)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.087.500.000,00	3.733.420.512,40	91,34	3.022.508.323,00	23,52
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.000.000,00	3.236.124.545,00	62,23	4.350.084.432,00	(25,61)
4	Lain-lain PAD yang Sah	31.771.783.625,00	21.345.485.463,60	67,18	20.807.450.806,37	2,59
	Jumlah	75.120.033.625,00	67.901.946.334,00	90,39	68.212.506.871,28	(0,46)

Komposisi masing-masing jenis pendapatan dan kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 5.2**  
**Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dari rincian data di atas, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022, namun diharapkan akan meningkat pada tahun berikutnya seiring dengan dimasukinya masa pemulihan ekonomi dan mental sosial masyarakat.

**5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah** Tahun 2023 Tahun 2022  
**Rp39.586.915.813,00** **Rp40.032.463.309,91**

Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dari Bangunan.



Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp34.060.750.000,00 terealisasi sebesar Rp39.586.915.813,00 atau 116,22%, namun demikian angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar Rp445.547.496,91 atau 1,11% dibandingkan realisasi TA 2022, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Rincian Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	Pajak Hotel	450.000.000,00	744.194.756,00	165,38	534.054.623,00	39,35
2	Pajak Restoran	3.755.000.000,00	6.139.818.064,00	163,51	5.563.411.570,91	10,36
3	Pajak Hiburan	170.000.000,00	348.147.200,00	204,79	218.205.800,00	59,55
4	Pajak Reklame	686.250.000,00	707.298.992,00	103,07	812.722.786,00	(12,97)
5	Pajak Penerangan Jalan	17.005.000.000,00	17.869.554.495,00	105,08	16.966.472.464,00	5,32
6	Pajak Parkir	40.000.000,00	41.827.000,00	104,57	36.825.000,00	13,58
7	Pajak Air Tanah	67.000.000,00	75.070.521,00	112,05	58.095.336,00	29,22
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.012.500.000,00	183.405.503,00	18,11	399.218.193,00	(54,06)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.500.000.000,00	6.468.194.291,00	117,60	6.118.917.274,00	5,71
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.375.000.000,00	7.009.404.991,00	130,41	9.324.540.263,00	(24,83)
	Jumlah	34.060.750.000,00	39.586.915.813,00	116,22	40.032.463.309,91	(1,11)

#### 5.1.1.1.1 Pajak Hotel

**Tahun 2023**  
**Rp744.194.756,00**

**Tahun 2022**  
**Rp534.054.623,00**

Pajak Hotel adalah pajak atas fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, rumah penginapan dan sejenisnya. Realisasi Pajak Hotel tahun 2023 sebesar Rp744.194.756,00 dari target sebesar Rp450.000.000,00 yang berarti bahwa Pajak Hotel melebihi pencapaian target yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 165,38%, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp210.140.133,00 atau 39,35% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

**Tabel 5.4**  
**Rincian Realisasi Pajak Hotel TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	Pajak Hotel	400.000.000,00	609.746.765,00	152,44	411.385.976,00	48,22
2	Pajak Losmen	50.000.000,00	134.447.991,00	268,90	122.668.647,00	9,60
	Jumlah	450.000.000,00	744.194.756,00	165,38	534.054.623,00	39,35

Berdasarkan tabel di atas Pajak Hotel mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena beberapa objek Pajak Hotel yang melunasi piutang disamping itu



peningkatan realisasi Pajak Hotel karena pemasangan *Tapping Box* pada beberapa hotel dan losmen, meskipun pemasangan belum merata pada semua objek pajak hotel namun sudah bisa terlihat hasil yang cukup memuaskan.

#### 5.1.1.1.1.2 Pajak Restoran

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp6.139.818.064,00**                      **Rp5.563.411.570,91**

Pajak Restoran adalah pajak atas fasilitas penyedia makanan dan juga minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, *cafeteria*, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

Pajak Restoran terealisasi sebesar Rp6.139.818.064,00 dari target sebesar Rp3.755.000.000,00 yang berarti melebihi target yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 163,51%, nilai tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp576.406.493,09 atau 10,36% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

**Tabel 5.5**  
**Rincian Realisasi Pajak Restoran TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	Restoran	3.500.000.000,00	5.952.079.364,00	170,06	5.381.067.486,91	10,61
2	Rumah Makan	255.000.000,00	187.738.700,00	73,62	182.344.084,00	2,96
	Jumlah	3.755.000.000,00	6.139.818.064,00	163,51	5.563.411.570,91	10,36

Berdasarkan tabel di atas Pajak Restoran mengalami peningkatan yang disebabkan keberhasilan pemasangan *Tapping Box* pada restoran dan rumah makan yang mampu mencegah kecurangan nilai perolehan pajak. Meski pemasangan *Tapping Box* belum 100% pada objek pajak restoran namun sudah terlihat hasil yang patut diberikan apresiasi.

#### 5.1.1.1.1.3 Pajak Hiburan

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp348.147.200,00**                      **Rp218.205.800,00**

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, termasuk segala jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak Hiburan juga melebihi target yang ditetapkan yaitu terealisasi sebesar Rp348.147.200,00 dari target sebesar Rp170.000.000,00 atau tercapai sebesar 204,79%, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp129.941.400,00 atau 59,55% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan karena di Kota Lhokseumawe objek hiburan sudah mulai ramai kembali dikunjungi oleh masyarakat Kota Lhokseumawe.

#### 5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp707.298.992,00**                      **Rp812.722.786,00**

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame, termasuk berupa benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.



Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp707.298.992,00 dari target sebesar Rp686.250.000,00 yang berarti melebihi target yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 103,07%, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp105.423.794,00 atau 12,97% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

**Tabel 5.6**  
**Rincian Realisasi Pajak Reklame TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	Reklame Papan	450.000.000,00	500.982.763,00	111,33	618.404.374,00	(18,99)
2	Reklame Kain	140.000.000,00	87.616.575,00	62,58	106.379.494,00	(17,64)
3	Reklame Melekat/Stiker	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reklame Selebaran	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Reklame Berjalan	15.000.000,00	40.582.629,00	270,55	15.585.165,00	160,39
6	Reklame Film/Slide	70.000.000,00	78.117.025,00	111,60	72.353.753,00	7,97
	Jumlah	686.250.000,00	707.298.992,00	103,07	812.722.786,00	(12,97)

Realisasi Pajak Reklame melebihi target atau anggaran disebabkan karena beberapa perusahaan melakukan peningkatan intensitas promosi melalui reklame di Lhokseumawe.

#### 5.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp17.869.554.495,00**                      **Rp16.966.472.464,00**

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp17.869.554.495,00 dari target sebesar Rp17.005.000.000,00 yang berarti melebihi target yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 105,08%. Angka realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yang mengalami peningkatan sebesar Rp903.082.031,00 atau 5,32% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Naik turun penerimaan Pajak Penerangan Jalan sangat tergantung dari pembayaran listrik oleh pengguna listrik di Kota Lhokseumawe baik rumah tangga, perkantoran dan industri.

**Tabel 5.7**  
**Rincian Realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sendiri - PLN	16.130.000.000,00	16.995.087.495,00	105,36	16.092.005.464,00	5,61
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya - Non PLN	875.000.000,00	874.467.000,00	99,94	874.467.000,00	0,00
	Jumlah	17.005.000.000,00	17.869.554.495,00	105,08	16.966.472.464,00	5,32

**5.1.1.1.1.6 Pajak Parkir****Tahun 2023**  
**Rp41.827.000,00****Tahun 2022**  
**Rp36.825.000,00**

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Realisasi Pajak Parkir tahun 2023 sebesar Rp41.827.000,00 dari target sebesar Rp40.000.000,00 atau terealisasi sebesar 104,57%, dan mengalami peningkatan sebesar Rp5.002.000,00 atau 13,58% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan karena ramainya pengunjung pada titik parkir seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat khususnya pada tempat perbelanjaan dan hiburan.

**5.1.1.1.1.7 Pajak Air Bawah Tanah****Tahun 2023**  
**Rp75.070.521,00****Tahun 2022**  
**Rp58.095.336,00**

Pajak Air Bawah Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Air Bawah Tanah terealisasi sebesar Rp75.070.521,00 dari target sebesar Rp67.000.000,00 atau tercapai sebesar 112,05%. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp16.975.185,00 atau 29,22% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

**5.1.1.1.1.8 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C****Tahun 2023**  
**Rp183.405.503,00****Tahun 2022**  
**Rp399.218.193,00**

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu terealisasi sebesar Rp183.405.503,00 dari target sebesar Rp1.012.500.000,00 atau tercapai sebesar 18,11%, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp215.812.690,00 atau 54,06% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Pajak ini sangat tergantung kepada kegiatan proyek yang diluncurkan, jadi apabila proyek meningkat secara otomatis realisasinya juga meningkat begitu juga sebaliknya bila kegiatan proyek menurun maka secara otomatis pula realisasinya akan menurun.

**Tabel 5.8**  
**Rincian Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	Pajak Batu Kapur	22.500.000,00	12.243.264,00	54,41	53.470.858,00	(77,10)
2	Pajak Pasir dan Kerikil	660.000.000,00	102.985.022,00	15,60	202.934.836,00	(49,25)
3	Pajak Tanah Liat	307.500.000,00	55.909.761,00	18,18	116.266.205,00	(51,91)
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	22.500.000,00	12.267.456,00	54,52	26.546.294,00	(53,79)
	Jumlah	1.012.500.000,00	183.405.503,00	18,11	399.218.193,00	(54,06)





<b>5.1.1.1.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</b>	<b><u>Tahun 2023</u></b>	<b><u>Tahun 2022</u></b>
	<b>Rp6.468.194.291,00</b>	<b>Rp6.118.917.274,00</b>

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp6.468.194.291,00 dari target sebesar Rp5.500.000.000,00 yang berarti sudah memenuhi target yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 117,6%. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp349.277.017,00 atau 5,71% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan karena peningkatan intensitas penagihan serta kebijakan administrasi yang mewajibkan masyarakat memiliki tanda bukti lunas PBB.

<b>5.1.1.1.1.10 BPHTB</b>	<b><u>Tahun 2023</u></b>	<b><u>Tahun 2022</u></b>
	<b>Rp7.009.404.991,00</b>	<b>Rp9.324.540.263,00</b>

BPHTB adalah pungutan atas peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau badan.

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2023 sebesar Rp7.009.404.991,00 dari target sebesar Rp5.375.000.000,00 atau terealisasi sebesar 130,41%. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.315.135.272,00 atau 24,83% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

Dari rincian pajak daerah tersebut di atas terlihat bahwa, dari 10 (sepuluh) komponen ada 7 (tujuh) jenis pajak yang realisasinya meningkat dan 3 (tiga) jenis pajak yang realisasinya menurun dimana nilai keseluruhannya berada di bawah realisasi TA 2022. Namun demikian kondisi insidental pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah dapat menutupi penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan.

<b>5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b><u>Tahun 2023</u></b>	<b><u>Tahun 2022</u></b>
	<b>Rp3.733.420.512,40</b>	<b>Rp3.022.508.323,00</b>

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa objek retribusi meliputi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 adalah Rp3.733.420.512,40 atau 91,34% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4.087.500.000,00 nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp710.912.189,40 atau 23,52% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.9**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
1	Retribusi Jasa Umum	3.601.000.000,00	3.025.068.012,40	84,01	2.540.668.823,00	19,07
2	Retribusi Jasa Usaha	86.500.000,00	87.165.000,00	100,77	66.152.000,00	31,76



3	Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000,00	621.187.500,00	155,30	415.687.500,00	49,44
	Jumlah	4.087.500.000,00	3.733.420.512,40	91,34	3.022.508.323,00	23,52

Dari **Tabel 5.9** di atas terlihat dari 3 (tiga) komponen retribusi semua komponen mengalami peningkatan yaitu kelompok Retribusi Jasa Umum, kelompok Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu mengalami peningkatan sehingga secara keseluruhan pendapatan retribusi meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

#### 5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

**Tahun 2023**  
**Rp3.025.068.012,40**

**Tahun 2022**  
**Rp2.540.668.823,00**

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp3.025.068.012,40 atau 84,01% dari target sebesar Rp3.601.000.000,00 yang berarti belum mencapai target dan meningkat sebesar Rp484.399.189,40 atau 19,07% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Rincian realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.10**  
**Rincian Retribusi Jasa Umum TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	403.229.106,40	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000,00	370.105.000,00	37,01	464.260.000,00	(20,28)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	835.000.000,00	764.948.000,00	91,61	723.300.000,00	5,76
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.156.000.000,00	922.465.000,00	79,80	708.311.000,00	30,23
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	180.000.000,00	90.665.000,00	50,37	181.703.000,00	(50,10)
6	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	10.000.000,00	12.535.000,00	125,35	11.323.000,00	10,70
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	420.000.000,00	461.120.906,00	109,79	451.771.823,00	2,07
	Jumlah	3.601.000.000,00	3.025.068.012,40	84,01	2.540.668.823,00	19,07

**Tabel 5.10** di atas menggambarkan bahwa dari 7 (tujuh) jenis pendapatan Retribusi Jasa Umum hanya 2 (dua) jenis yang mencapai target, yaitu:

- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terealisasi sebesar Rp12.535.000,00 atau 125,35%, dari target Rp10.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.212.000,00 atau 10,70% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.
- Retribusi Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi terealisasi sebesar Rp461.120.906,00 atau 109,79%, nilai tersebut mencapai target yang ditetapkan



sebesar Rp420.000.000,00 dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 nilai tersebut naik sebesar Rp9.349.083,00 atau 2,07%.

Sementara 5 (lima) retribusi lagi belum mencapai target yaitu:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp370.105.000,00 atau 37,01%, dari target Rp1.000.000.000,00 dan nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp94.155.000,00 atau 20,28% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.
- b. Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak mencapai target yaitu terealisasi sebesar Rp764.948.000,00 dari target Rp835.000.000,00 atau 91,61% , namun apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp41.648.000,00 atau 5,76% hal ini karena peningkatan intensitas penagihan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- c. Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp922,465.000.00 atau 79,80% dari target sebesar Rp1.156.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp214.154.000,00 atau 30,23% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp90.665.000,00 atau 50,37% dari target yang ditetapkan sebesar Rp180.000.000,00 dan nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp91.038.000,00 atau 50,10% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

Selain itu, terdapat Retribusi Pelayanan Kesehatan yang tidak dianggarkan namun terealisasi pada TA 2023 sebesar Rp403.229.106,40. Dari data di atas terlihat bahwa komponen Retribusi Jasa Umum tahun 2023 realisasinya meningkat disebabkan karena peningkatan dua kelompok retribusi yang dapat menutupi lima kelompok retribusi yang tidak mencapai target realisasi pada TA 2023.

<b>5.1.1.1.2.2</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b><u>Tahun 2023</u></b> <b>Rp87.165.000,00</b>	<b><u>Tahun 2022</u></b> <b>Rp66.152.000,00</b>
--------------------	-----------------------------	--	--

Retribusi Jasa Usaha adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada Badan atau orang pribadi yang menikmati pelayanan jasa usaha.

Pada Tahun Anggaran 2023 Retribusi Jasa Usaha di Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya satu jenis yaitu Retribusi Terminal mencapai target dengan terealisasi sebesar Rp87.165.000,00 atau 100,77% dari target Rp86.500.000,00, nilai ini meningkat sebesar Rp21.013.000,00 atau 31,76% dibandingkan realisasi pada tahun 2022.

<b>5.1.1.1.2.3</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b><u>Tahun 2023</u></b> <b>Rp621.187.500,00</b>	<b><u>Tahun 2022</u></b> <b>Rp415.687.500,00</b>
--------------------	-------------------------------------	---	---

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan Retribusi Terminal. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.11**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu**  
**TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00	621.187.500,00	155,30	415.687.500,00	49,44
	Jumlah	400.000.000,00	621.187.500,00	155,30	415.687.500,00	49,44

Dari **Tabel 5.11** di atas menggambarkan bahwa hanya ada satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang terealisasi yaitu Persetujuan Bangunan Gedung yang terealisasi sebesar Rp621.187.500,00 dari target sebesar Rp400.000.000,00 atau mencapai 155,30%. Nilai tersebut melebihi target dan mengalami peningkatan sebesar Rp205.500.000,00 atau 49,44% dari nilai realisasi TA 2022.

**5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** **Tahun 2023** **Tahun 2022**  
**Rp3.236.124.545,00** **Rp4.350.084.432,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu komponen dari PAD. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 mencapai Rp3.236.124.545,00 atau 62,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.200.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.113.959.887,00 atau 25,61% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Realisasi masing-masing Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 5.12**  
**Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah**  
**yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	PT Bank Aceh	4.200.000.000,00	3.236.124.545,00	77,05	4.350.084.432,00	(25,61)
2	PT Pembangunan Lhokseumawe	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.200.000.000,00	3.236.124.545,00	62,23	4.350.084.432,00	(25,61)

Dari **Tabel 5.12** di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan dividen sebesar Rp3.236.124.545,00 adalah merupakan Bagian Laba atas penyertaan modal pada Bank Aceh yang dianggarkan sebesar Rp4.200.000.000,00 atau terealisasi sebesar 77,05%, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.113.959.887,00 atau 25,61% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Sedangkan dari PT. Pembangunan Lhokseumawe tidak terdapat nilai realisasinya di TA 2023.

Dari uraian data di atas jelas terlihat bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan unsur yang signifikan diperoleh dari penerimaan dividen pada Bank Aceh. Dengan demikian bila penerimaan dividen menurun maka akan mempengaruhi



kepada total realisasi Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara kesimpulan naik turunnya realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tergantung kepada hasil perhitungan RUPS dari Bank Aceh, secara teoritis dividen yang akan diperoleh perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{DIVIDEN UNTUK} \\ \text{PEMERINTAH ACEH} \\ \text{DALAM TAHUN 2022} \end{array} = \frac{\begin{array}{c} \text{[MODAL RATA-RATA PEMEGANG SAHAM PEMERINTAH ACEH} \\ \text{TAHUN 2022]} \\ \text{[JUMLAH SELURUH MODAL PEMEGANG SAHAM S.D. AKHIR} \\ \text{TAHUN 2022 + RATA-RATA TAMBAHAN SETORAN MODAL} \\ \text{SELURUH PEMEGANG SAHAM DALAM TAHUN 2023]} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{DIVIDEN YANG} \\ \text{DIBAGIKAN DALAM} \\ \text{TAHUN 2023} \end{array}}$$

**5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** **Tahun 2023**  
**Rp21.345.485.463,60** **Tahun 2022**  
**Rp20.807.450.806,37**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp31.771.783.625,00 dapat dicapai sebesar Rp21.345.485.463,60 atau 67,18% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.13**  
**Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**  
**TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	3.000.000,00	0,00	305.992.800,00	(99,02)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	400.000.000,00	33.312.891,21	8,33	49.618.442,62	(32,86)
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.100.000.000,00	625.392.946,99	15,25	2.571.044.396,92	(75,68)
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	93.556.555,19	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	4.202.400,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak	110.000.000,00	296.772.798,00	269,79	216.373.036,00	37,16
8	Pendapatan dari Pengembalian	2.211.242.617,00	2.315.647.790,98	104,72	0,00	0,00
9	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	2.999.931.461,00	116.445.000,00	3,88	1.261.646.070,83	(90,77)
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	13.050.609.547,00	11.105.654.885,00	85,10	9.398.580.825,00	18,16
11	Zakat, Infaq	8.900.000.000,00	6.726.500.196,23	75,58	7.004.195.235,00	(3,96)
	Jumlah	31.771.783.625,00	21.345.485.463,60	67,18	20.807.450.806,37	2,59



- a. Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan hasil pendapatan yang berasal dari hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) baik berupa peralatan dan mesin atau hasil penjualan aset lainnya. Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tidak dianggarkan pada tahun 2023, namun terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 yang merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin dan hasil penjualan aset lainnya. Nilai tersebut menurun sebesar Rp302.992.800,00 atau 99,02% dari realisasi TA 2022.
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan yang berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan juga tidak dianggarkan pada TA 2023 namun demikian ada realisasi sebesar Rp25.000.000,00 yang merupakan hasil sewa Galeri ATM milik Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- c. Penerimaan Jasa Giro merupakan imbalan yang diberikan kepada giro atas nama yang disimpan di Bank dimana perhitungannya menggunakan persentase yang telah ditetapkan oleh Bank. Penerimaan Jasa Giro dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.312.891,21 atau 8,33% yang merupakan jasa giro dari Rekening Kas Umum Daerah dan Jasa Giro dari Rekening Dana Kapitasi pada FKTP.
- d. Pendapatan Bunga Deposito merupakan produk simpanan di Bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Anggaran Pendapatan Bunga Deposito Kota Lhokseumawe tahun 2023 sebesar Rp4.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp625.392.946,99 atau 15,25%, terdiri atas pendapatan bunga deposito dari Bank Aceh sebesar Rp556.853.937,99 dan pendapatan bunga deposito dari remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH sebesar Rp68.539.009,00.
- e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain tidak dianggarkan pada tahun 2023 namun terealisasi sebesar Rp93.556.555,19.
- f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan yang diperoleh dari pihak ketiga atas keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak dianggarkan pada tahun 2023 namun terealisasi sebesar Rp4.202.400,00.
- g. Pendapatan Denda Pajak merupakan denda atas keterlambatan dalam membayar pajak. Pendapatan Denda Pajak terealisasi Rp296.772.798,00 atau 269,79% dari target sebesar Rp110.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp80.399.762,00 atau 37,16% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022, hal ini disebabkan peningkatan pembayaran piutang bersamaan dengan pembayaran denda yang melekat pada ketetapan Piutang.



- h. Pada TA 2023 realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp2.315.647.790,98 atau 104,72% dari target Rp2.211.242.617,00. Pendapatan dari pengembalian diperoleh dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja, Pengembalian honorarium kegiatan sebagai tindak lanjut LHP BPK RI TA 2022.
- i. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda merupakan sanksi yang diberikan karena pelanggaran terhadap peraturan daerah, terealisasi sebesar Rp116,445,000.00 atau 3,88%, dari yang dianggarkan sebesar Rp2.999.931.461,00. Nilai tersebut mengalami penurunan yang drastis jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.145.201.070,83 atau sebesar 90,77%. Bila kita telusuri penurunan ini disebabkan pada tahun 2023 yang dicatat hanya penerimaan denda atas pelanggaran perda yang dipungut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- j. Dana Kapitasi JKN dianggarkan sebesar Rp13.050.609.547,00 dan terealisasi sebesar Rp11.105.654.885,00 atau 85,10%, realisasi pendapatan dari Dana Kapitasi JKN TA 2023 meningkat sebesar Rp1.707.074.060,00 atau 18,16% dibandingkan TA 2022. Rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 5.14**  
**Rincian Dana Kapitasi JKN TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Mon Geudong	1.674.430.062,00	1.276.527.160,00	76,24	1.169.801.100,00	9,12
2	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Banda Sakti	3.060.400.027,00	2.696.872.970,00	88,12	2.374.469.400,00	13,58
3	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Muara Dua	2.311.069.710,00	2.215.283.406,00	95,86	1.694.312.400,00	30,75
4	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Muara Satu	2.631.536.940,00	2.140.917.620,00	81,36	1.887.673.125,00	13,42
5	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Blang Mangat	1.470.124.329,00	1.307.912.101,00	88,97	1.028.007.600,00	27,23
6	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Kandang	1.087.677.718,00	882.574.255,00	81,41	735.136.500,00	20,06
7	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Blang Cut	815.370.761,00	585.567.373,00	71,82	509.180.700,00	15,00
	Jumlah	13.050.609.547,00	11.105.654.885,00	85,10	9.398.580.825,00	18,16

- k. Pendapatan Zakat dan Infaq dianggarkan sebesar Rp8.900.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.726.500.196,23 atau 75,58%, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp277.695.038,77 atau 3,96% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022. Hal ini disebabkan penurunan pembayaran Zakat dan Infaq dari masyarakat di samping ASN juga pengusaha dan pegawai swasta yang mempercayakan infaqnya disetorkan melalui Pemerintah Kota Lhokseumawe. Tabel rincian Pendapatan Zakat dan Infaq dapat dilihat sebagai berikut:



**Tabel 5.15**  
**Rincian Pendapatan Zakat, dan Infaq / Shadaqah**  
**TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	Zakat	7.000.000.000,00	5.617.168.562,12	80,25	5.571.203.482,00	0,83
2	Infaq	1.900.000.000,00	1.109.331.634,11	58,39	1.432.991.753,00	(22,59)
	Jumlah	8.900.000.000,00	6.726.500.196,23	75,58	7.004.195.235,00	(3,96)

Dalam pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, dan infaq sebagai potensi ekonomi umat Islam, Baitul Mal Kota Lhokseumawe sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang kedudukan organisasi, fungsi dan tata kerja Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe telah menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk melakukan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah berdasarkan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Sumber zakat, infaq dan sedekah yang dikumpulkan pada tahun 2023 berasal dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk pada setiap Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) di Pemerintah Kota Lhokseumawe, Perusahaan serta infaq pribadi. Semua penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah dikelola oleh Sekretariat Baitul Mal. Masing-masing SKPK menyetor langsung ke rekening zakat atau infaq, kemudian menyerahkan tanda setor yang telah divalidasi oleh pihak bank kepada Bendahara Penerima Pembantu (zakat dan infaq) di Sekretariat Baitul Mal sebagai bentuk konfirmasi. Kemudian Bendahara Penerima Pembantu Sekretariat Baitul Mal melakukan proses pembukuan dan penginputan ke SIPD.

Demi penambahan jumlah penerimaan infaq, Pemerintah Kota Lhokseumawe juga melakukan upaya pemungutan infaq perusahaan melalui pemotongan langsung dan SP2D, selanjutnya dana tersebut dicairkan dalam bentuk dana bantuan sosial yang dialokasikan dalam APBK. Penjelasan atas penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan Sedekah pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

#### 5.1.1.2 Pendapatan Transfer

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp687.825.852.338,00**      **Rp721.353.589.208,24**

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) maupun Pemerintah Provinsi Aceh yang terdiri dari: (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 sebesar Rp687.825.852.338,00 dari anggaran sebesar Rp692.811.374.022,00 atau 99,28%, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp33.527.736.870,24 atau 4,65% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022. Rincian Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.16**  
**Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	Transfer Pemerintah Pusat	631.695.343.383,00	630.906.590.568,00	99,88	622.773.568.549,00	1,31
2	Transfer Antar Daerah	61.116.030.639,00	56.919.261.770,00	93,13	98.580.020.659,24	(42,26)
	Jumlah	692.811.374.022,00	687.825.852.338,00	99,28	721.353.589.208,24	(4,65)





Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2023 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, namun naik turunnya pendapatan transfer sangat tergantung kepada kebijakan dan regulasi baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

**5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** **Tahun 2023**  
**Rp630.906.590.568,00** **Tahun 2022**  
**Rp622.773.568.549,00**

Transfer Pemerintahan Pusat adalah penerimaan uang dari pemerintah pusat kepada daerah. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah selain itu transfer bertujuan untuk mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat/daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian daerah.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp630.906.590.568,00 dan Rp622.773.568.549,00. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.17**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	14.970.371.095,00	14.951.657.125,00	99,87	19.666.583.345,00	(23,97)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	10.297.693.288,00	10.297.693.288,00	100,00	5.842.230.812,00	176,26
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	433.613.526.000,00	436.369.459.000,00	100,64	415.683.229.737,00	4,98
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	23.192.612.000,00	22.632.985.556,00	97,59	33.292.658.226,00	(32,02)
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	82.063.439.000,00	79.522.976.344,00	96,90	59.943.665.527,00	32,66
6	Dana Insentif Daerah (DID)	5.730.566.000,00	5.730.566.000,00	100,00	34.445.081.000,00	(83,36)
7	Dana Desa	61.827.136.000,00	61.401.253.255,00	99,31	53.900.119.902,00	13,92
	Jumlah	631.695.343.383,00	630.906.590.568,00	99,88	622.773.568.549,00	1,31

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penurunan dari realisasi tahun 2022, namun demikian dapat ditutupi oleh kelompok pendapatan transfer lain sehingga dapat terealisasi sebesar 99,88% dari anggaran Rp631.695.343.383,00.

**5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak** **Tahun 2023**  
**Rp14.951.657.125,00** **Tahun 2022**  
**Rp19.666.583.345,00**

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran



2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp14.951.657.125,00 Rp19.666.583.345,00. Rincian realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.18**  
**Dana Bagi Hasil TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.336.892.465,00	4.336.892.465,00	100,00	10.074.254.921,00	(56,95)
2	DBH PPh Pasal 21	10.177.214.464,00	9.996.400.464,00	98,22	9.216.469.000,00	8,46
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	17.386.642,00	198.200.642,00	1.139,96	140.555.000,00	41,01
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	438.877.524,00	420.163.554,00	95,74	235.304.424,00	78,56
	Jumlah	14.970.371.095,00	14.951.657.125,00	99,87	19.666.583.345,00	(23,97)

**5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam**

**Tahun 2023**  
**Rp10.297.693.288,00**

**Tahun 2022**  
**Rp5.842.230.812,00**

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak di sektor Sumber Daya Alam (SDA) Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Iuran Tetap (*Land-rent*), dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalti*), Pungutan Hasil Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Iuran Hasil Sumber Daya Alam Mineral, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi. Prinsip Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berdasarkan daerah penghasil (*by origin*) dimana daerah penghasil mendapat porsi lebih besar dari pada daerah lain (dalam Provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu. Kemudian proses penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp10.297.693.288,00 dan Rp5.842.230.812,00. Rincian realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.19**  
**Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - SDA TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 20223 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	703.973.965,00	388.815.965,00	55,23	401.045.196,00	(3,05)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	33.144.170,00	348.302.170,00	1.050,87	377.533.157,00	(7,74)
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	10.393.913,00	10.393.913,00	100,00	22.868.119,00	(54,55)
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.779.200.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	2.779.200.351,00	0,00	3.063.068.444,00	(9,27)



No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
	DBH Sumber Daya Alam (SDA)					
6	Kehutanan-Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	16.153.678,00	0,00	0,00	0,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA)					
7	Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	16.153.678,00	0,00	0,00	19.404.896,00	(100,00)
	DBH Sumber Daya Alam (SDA)					
8	Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.195.684.000,00	5.195.684.000,00	100,00	0,00	0,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA)					
9	Perikanan	1.559.143.211,00	1.559.143.211,00	100,00	1.958.311.000,00	(20,38)
	Jumlah	10.297.693.288,00	10.297.693.288,00	100,00	5.842.230.812,00	76,26

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp10.297.693.288,00 dari anggaran sebesar Rp10.297.693.288,00 atau terealisasi sebesar 100%. Penerimaan Dana Bagi Hasil secara keseluruhan mencapai target walaupun terdapat 2 (dua) penerimaan DBH yang tidak ditargetkan pada TA 2023 dan 2 (dua) penerimaan DBH yang tidak terealisasi sama sekali pada TA 2023.

#### 5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp436.369.459.000,00**      **Rp415.683.229.737,00**

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 Pasal 29 proporsi DAU antar daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp436.369.459.000,00 dari anggaran sebesar Rp433.613.526.000,00 atau terealisasi 100,64%.

#### 5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp102.155.961.900,00**      **Rp93.236.323.753,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari APBN kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp102.155.961.900,00 dari anggaran sebesar Rp105.256.051.000,00 atau terealisasi sebesar 97,05%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.20**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– DAK TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	DAK Fisik	23.192.612.000,00	22.632.985.556,00	97,59	33.292.658.226,00	(32,02)
2	DAK Non Fisik	82.063.439.000,00	79.522.976.344,00	96,90	59.943.665.527,00	32,66
	Jumlah	105.256.051.000,00	102.155.961.900,00	97,05	93.236.323.753,00	9,57



**5.1.1.2.1.4.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

**Tahun 2023**  
**Rp22.632.985.556,00**

**Tahun 2022**  
**Rp33.292.658.226,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari APBN kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Realisasi DAK – Fisik sebesar Rp22.632.985.556,00 dari anggaran sebesar Rp23.192.612.000,00 atau terealisasi sebesar 97,59%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.21**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– DAK Fisik**  
**TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	453.293.000,00	450.092.030,00	99,29	0,00	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.891.631.000,00	2.779.219.618,00	96,11	6.995.685.150,00	(60,27)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.742.808.000,00	6.429.059.422,00	95,35	4.783.851.651,00	34,39
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	2.237.622.728,00	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	1.748.860.750,00	(100,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi <i>Stunting</i>	2.256.521.000,00	2.234.956.850,00	99,04	0,00	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	1.334.869.000,00	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.884.372.827,00	(100,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.916.784.400,00	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.084.008.000,00	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	8.686.083.000,00	2.600.114.900,00	29,93	5.078.897.000,00	(48,81)
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan		6.080.258.100,00	0,00	0,00	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-Reguler	0,00	0,00	0,00	289.768.249,00	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	322.499.000,00	301.137.000,00	93,38	0,00	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penguatan Penurunan Angka Kematian	0,00	0,00	0,00	1.115.381.326,00	(100,00)



No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
	Ibu dan Bayi-Reguler					
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-					
16	Penguatan Percepatan Penurunan Stunting-Reguler	0,00	0,00	0,00	276.224.050,00	(100,00)
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengendalian Penyakit-Reguler	301.799.000,00	299.850.000,00	99,35	546.333.095,00	(45,12)
18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1.537.978.000,00	1.458.297.636,00	94,82	0,00	0,00
	Jumlah	23.192.612.000,00	22.632.985.556,00	97,59	33.292.658.226,00	(32,02)

#### 5.1.1.2.1.4.2 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

**Tahun 2023**  
**Rp79.522.976.344,00**

**Tahun 2022**  
**Rp59.943.665.527,00**

Realisasi Pendapatan Transfer DAK Non Fisik sebesar Rp79.522.976.344,00 dari anggaran sebesar Rp82.063.439.000,00 atau 96,90%. Nilai tersebut mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp19.579.310.817,00 atau 32,66%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Rincian komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DAK Non Fisik sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.22**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-DAK Non Fisik TA 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	24.986.400.000,00	24.975.926.000,00	99,96	20.976.485.683,00	19,07
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.135.000.000,00	1.135.000.000,00	100,00	0,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	35.629.788.000,00	34.707.045.035,00	97,41	31.057.300.180,00	11,75
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.053.000.000,00	1.028.132.891,00	97,64	684.499.250,00	50,20
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.862.950.000,00	2.854.062.300,00	99,69	0,00	0,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	474.540.000,00	474.540.000,00	100,00	0,00	0,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	610.510.000,00	14,66
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.206.909.000,00	4.429.955.740,00	85,08	3.112.931.500,00	42,31
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	6.104.723.000,00	6.104.723.000,00	100,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.217.484.000,00	1.608.916.228,00	72,56	1.685.101.124,00	(4,52)
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	471.370.000,00	453.272.200,00	96,16	388.645.180,00	16,63
12	DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Penanaman Modal	438.200.000,00	370.477.000,00	84,55	352.095.010,00	5,22
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	510.275.350,00	85,33	451.800.000,00	12,94



No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	185.075.000,00	170.650.600,00	92,21	624.297.600,00	(72,67)
	Jumlah	82.063.439.000,00	79.522.976.344,00	96,90	59.943.665.527,00	32,66

**5.1.1.2.1.5 Dana Insentif Daerah (DID)** **Tahun 2023**  
**Rp5.730.566.000,00** **Tahun 2022**  
**Rp34.445.081.000,00**

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana dari APBN kepada daerah berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan memberi penghargaan atas perbaikan atau capaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe terealisasi 100% sebesar Rp5.730.566.000,00 dari anggaran yang ditetapkan. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp28.714.515.000,00 atau 83,36%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

**5.1.1.2.1.6 Dana Desa** **Tahun 2023**  
**Rp61.401.253.255,00** **Tahun 2022**  
**Rp53.900.119.902,00**

Realisasi Dana Desa untuk tahun 2023 sebesar Rp61.401.253.255,00 atau 99,31% dari anggaran sebesar Rp61.827.136.000,00 jika dibandingkan TA 2022 dana tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp7.501.133.353,00 atau 13,92% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

**5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah** **Tahun 2023**  
**Rp56.919.261.770,00** **Tahun 2022**  
**Rp98.580.020.659,24**

Transfer Antar Daerah merupakan penerimaan antar daerah diantaranya penerimaan dari DBH Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Dana OTSUS, realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp56.919.261.770,00 dan Rp98.580.020.659,24. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.23**  
**Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Kelompok Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/Turun
1	Pendapatan Transfer Antar Daerah - DBH	31.220.106.455,00	34.250.277.597,00	109,71	29.261.429.715,29	17,05
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan	29.895.924.184,00	22.668.984.173,00	75,83	69.318.590.943,95	(67,30)
	Jumlah	61.116.030.639,00	56.919.261.770,00	93,13	98.580.020.659,24	(42,26)

**5.1.1.2.2.1 Pendapatan Transfer Antar Daerah- DBH** **Tahun 2023**  
**Rp34.250.277.597,00** **Tahun 2022**  
**Rp29.261.429.715,29**

Realisasi Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi adalah penerimaan uang dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp34.250.277.597,00 dari anggaran sebesar Rp31.220.106.455,00 atau



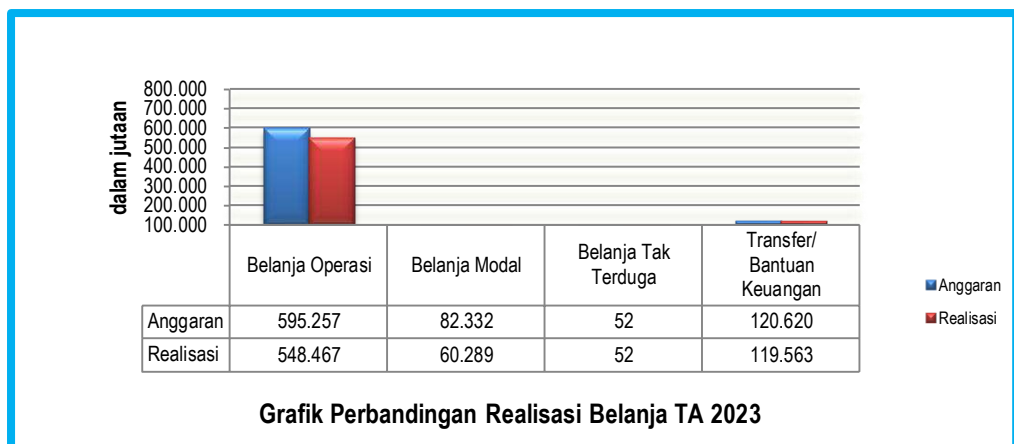
adalah Pengeluaran Uang oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Realisasi Belanja dan Transfer pada Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat pada Tahun 2023 mencapai sebesar Rp728.461.011.932,00 dari anggaran sebesar Rp798.260.907.647,00 atau 91,26%. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp97.048.660.486,00 atau 11,76% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022. Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenisnya menurut Standar Akuntansi Pemerintah.

**Tabel 5.25**  
**Rincian Belanja dan Transfer Daerah Pemerintah**  
**Kota Lhokseumawe TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	% Naik /Turun
1	Belanja Operasi	595.256.623.128,00	548.509.273.989,00	92,15	576.374.939.708,00	(4,83)
2	Belanja Modal	82.331.873.436,00	60.336.467.761,00	73,28	142.251.751.256,00	(57,58)
3	Belanja Tak Terduga	52.650.368,00	52.650.368,00	100,00	2.134.850.082,00	(97,53)
4	Transfer	120.619.760.715,00	119.562.619.814,00	99,12	104.748.131.372,00	14,14
	Jumlah	798.260.907.647,00	728.461.011.932,00	91,26	825.509.672.418,00	(11,76)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa semua belanja terserap di bawah alokasi anggaran sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp69.799.895.715,00 atau adanya penghematan pemakaian dana dari berbagai kegiatan dan non kegiatan sebesar 8,74%. Belanja terbesar dialokasikan untuk Belanja Operasi yaitu sebesar Rp595.256.623.128,00 atau 74,57% dari total belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe secara keseluruhan. Berikut perbandingan rincian realisasi belanja Tahun 2023 terhadap total belanja.



**Gambar 5.3**  
**Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023**



**5.1.2.1 Belanja Operasi**

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp548.509.273.989,00**      **Rp576.374.939.708,00**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Operasi mencapai sebesar Rp548.509.273.989,00 atau 92,15% dari anggaran, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp46.747.349.139,00 atau 7,85% dari anggaran sebesar Rp595.256.623.128,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, terjadi penurunan sebesar Rp27.865.665.719,00 atau 4,83%. Rincian realisasi Belanja Operasi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.26**  
**Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Lhokseumawe**  
**TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	% Naik /Turun
1	Belanja Pegawai	333.590.854.673,00	316.584.344.048,00	94,90	304.916.122.038,00	3,83
2	Belanja Barang dan Jasa	198.420.544.061,00	177.812.072.024,00	89,61	185.425.254.292,00	(4,11)
3	Belanja Subsidi	470.000.000,00	470.000.000,00	100,00	200.000.000,00	135,00
4	Belanja Hibah	29.753.421.564,00	22.501.686.262,00	75,63	36.702.542.385,00	(38,69)
5	Bantuan Sosial	33.021.802.830,00	31.141.171.655,00	94,30	49.131.020.993,00	(36,62)
	Jumlah	595.256.623.128,00	548.509.273.989,00	92,15	576.374.939.708,00	(4,83)

**5.1.2.1.1 Belanja Pegawai**

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp316.584.344.048,00**      **Rp304.916.122.038,00**

Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pegawai honorer sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Realisasi Belanja Pegawai mencapai sebesar Rp316.584.344.048,00 atau 94,90% dari anggaran, sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp17.006.510.625,00 atau 5,10% dari anggaran sebesar Rp333.590.854.673,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, terjadi kenaikan sebesar Rp11.668.222.010,00 atau 3,83%, kenaikan terjadi karena ada penambahan belanja gaji tunjangan ASN dan PPPK. Rincian realisasi Belanja Pegawai disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5.27**  
**Rincian Belanja Pegawai Pemerintah Kota Lhokseumawe**  
**TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	% Naik /Turun
1	Gaji Dan Tunjangan ASN	242.391.791.063,00	230.967.239.418,00	95,29	222.258.123.419,00	3,92
2	Tambahan Penghasilan ASN	37.437.196.972,00	36.150.532.070,00	96,56	30.145.700.746,00	19,92
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan	42.975.005.638,00	39.522.522.729,00	91,97	43.101.866.254,00	(8,30)



No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	% Naik /Turun
	Objektif Lainnya ASN					
4	Gaji Dan Tunjangan DPRK	10.006.473.000,00	9.433.238.631,00	94,27	8.773.361.485,00	7,52
5	Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH	178.788.000,00	3.931.200,00	2,20	130.190.134,00	(96,98)
	Penerimaan Lainnya					
6	Pimpinan DPRD Serta KDH /WKDH	601.600.000,00	506.880.000,00	84,26	506.880.000,00	0,00
	Jumlah	333.590.854.673,00	316.584.344.048,00	94,90	304.916.122.038,00	3,83

Terdapat penurunan realisasi Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 karena Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH telah dicairkan dari anggaran pusat, pada TA 2023 hanya dilakukan penarikan pada bulan Januari 2023.

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp177.812.072.024,00**      **Rp185.425.254.292,00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2023 mencapai sebesar Rp177.812.072.024,00 dari anggaran sebesar Rp198.420.544.061,00 atau sebesar 89,61% sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp20.608.472.037,00 atau 10,39%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, terjadi penurunan sebesar Rp7.613.182.268,00 atau 4,11% dimana penurunan terbesar terlihat pada beberapa Belanja Barang dan Jasa seperti Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang mengalami penurunan sebesar Rp2.041.989.500,00 atau 77,59%, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp2.621.049.973,00 atau 49,97% dan juga Belanja Pemeliharaan sebesar Rp5.886.556.801,00 atau 38,49%. Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 5.28**  
**Rincian Belanja Barang dan Jasa Pemerintah**  
**Kota Lhokseumawe TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	% Naik /Turun
1	Belanja Barang Pakai Habis	43.934.204.536,00	38.018.628.219,00	86,54	39.212.767.217,00	(3,05)
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	58.809.000,00	(100,00)
3	Belanja Jasa Kantor	86.100.716.033,00	77.228.679.759,00	89,70	75.387.140.692,00	2,44
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.544.031.935,00	1.208.083.938,00	78,24	1.248.883.572,00	(3,27)
5	Belanja Sewa Tanah	271.625.000,00	270.450.000,00	99,57	150.625.000,00	79,55
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.374.125.000,00	2.326.487.500,00	97,99	1.075.450.000,00	116,33
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.142.236.000,00	1.505.577.500,00	70,28	1.948.320.000,00	(22,72)
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	9.081.819,00	(100,00)
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	6.000.000,00	383,33



No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	% Naik /Turun
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.189.730.034,00	2.624.041.550,00	82,27	5.245.091.523,00	(49,97)
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	625.291.000,00	317.561.500,00	50,79	229.799.400,00	38,19
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.678.947.800,00	1.608.727.328,00	95,82	1.522.153.400,00	5,69
13	Belanja Pemeliharaan	10.353.883.280,00	9.407.544.971,00	90,86	15.294.101.772,00	(38,49)
14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.983.433.743,00	26.224.373.459,00	90,48	25.358.258.908,00	3,42
15	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	733.170.500,00	589.820.500,00	80,45	2.631.810.000,00	(77,59)
16	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	275.046.400,00	272.220.000,00	98,97	270.220.000,00	0,74
17	Belanja Barang Dana BOS	16.185.102.800,00	16.180.875.800,00	99,97	15.776.741.989,00	2,56
	Jumlah	198.420.544.061,00	177.812.072.024,00	89,61	185.425.254.292,00	(4,11)

Belanja sewa peralatan dan mesin terjadi kenaikan karena adanya belanja sewa kendaraan untuk operasional dinas, operasional yang digunakan untuk kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh ke-8 TA 2023, sewa alat laboratorium untuk pengujian kualitas air Kota Lhokseumawe, sewa alat untuk pelatihan pengelasan dan menjahit bagi masyarakat putus sekolah, sewa *excavator* untuk pembersihan lahan dan removal, dan adanya sewa kursi, meja dan tenda untuk kegiatan acara yang dilaksanakan dalam pemerintah atau SKPK. Belanja sewa aset tetap lainnya terjadi kenaikan karena adanya kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya Pekan Kebudayaan Aceh ke-8 Tahun 2023.

#### 5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

**Tahun 2023**  
**Rp470.000.000,00**

**Tahun 2022**  
**Rp200.000.000,00**

Belanja Subsidi merupakan belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan subsidi dari Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu selaku penerima subsidi dengan tujuan agar harga produk atau jasa pelayanan umum masyarakat yang dihasilkan penerima belanja subsidi dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Subsidi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe diberikan untuk subsidi harga kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka pelaksanaan pasar murah kepada Badan Usaha Milik Swasta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Rincian Realisasi Belanja Subsidi adalah sebagai berikut ini:



**Tabel 5.29**  
**Rincian Belanja Subsidi Pemerintah Kota**  
**Lhokseumawe TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
1	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	470.000.000,00	470.000.000,00	100,00	200.000.000,00	135,00
	Jumlah	470.000.000,00	470.000.000,00	100,00	200.000.000,00	135,00

Belanja subsidi terjadi kenaikan karena pelaksanaan kegiatan pasar murah kepada Badan Usaha Milik Swasta pada kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

#### 5.1.2.1.4 Belanja Hibah

**Tahun 2023**  
**Rp22.501.686.262,00**

**Tahun 2022**  
**Rp36.702.542.385,00**

Belanja Hibah merupakan belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam bentuk transfer uang/barang kepada lembaga/organisasi yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang atau jasa. Belanja Hibah merupakan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.

Realisasi Belanja Hibah kepada lembaga/organisasi pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp22.501.686.262,00 atau 75,63% dari anggaran sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp7.251.735.302,00 atau 24,37% dari anggaran sebesar Rp29.753.421.564,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, terjadi penurunan sebesar Rp14.200.856.123,00 atau 38,69%. Rincian realisasi kepada lembaga/organisasi disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.30**  
**Rincian Belanja Hibah TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
1	Dinas PK	7.927.025.947,00	7.579.897.300,00	95,62	1.677.128.300,00	351,96
2	Dinas PU	2.030.000.000,00	1.823.139.500,00	89,81	7.622.941.127,00	(76,08)
3	Dinas Sosial	27.270.000,00	0,00	0,00	229.465.000,00	(100,00)
4	DKPPP	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	148.376.000,00	(83,15)
5	DLH	0,00	0,00	0,00	633.700.000,00	(100,00)
6	Disporapar	1.122.600.000,00	1.057.200.000,00	94,17	2.307.632.700,00	(54,19)
7	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	(100,00)
8	BPBD	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	120.000.000,00	(58,75)
9	Dinas Syariat Islam	9.090.723.600,00	4.275.647.445,00	47,03	21.354.420.990,00	(79,98)
10	Dinas Kesehatan	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	1.223.576.251,00	(85,29)
11	Badan Kesbangpol	9.301.302.017,00	7.511.302.017,00	80,76	1.314.302.017,00	471,51
12	Disperindagkop	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	(100,00)
	Jumlah	29.753.421.564,00	22.501.686.262,00	75,63	36.702.542.385,00	(38,69)



Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diberikan kepada PAUD, TK, SDS dan SMPS dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Belanja hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terjadi kenaikan karena adanya hibah ke sekolah swasta tahun 2023 sedangkan tahun-tahun lalu tidak dilakukan pencatatan dan baru dilakukan pencatatan pada tahun 2023 untuk belanja hibah tahun 2023

Dinas PUPR memberikan Bantuan Hibah diantaranya untuk Pengaspalan Halaman Makorem 011/Lilawangsa Lhokseumawe dan Pembangunan Gedung Tahanan BNN Kota Lhokseumawe. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan memberikan Bantuan Hibah untuk Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memberikan Bantuan Hibah diantaranya kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan kepada PRAMUKA Kwarcab Kota Lhokseumawe. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyalurkan Belanja Hibah kepada Search and Rescue (SAR). Pada Dinas Syariat Islam Belanja Hibah diberikan untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid dan Dayah. Dinas Kesehatan memberikan Belanja Hibah Uang diantaranya kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPAK) Kota Lhokseumawe dan Belanja Hibah Uang kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Lhokseumawe.

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya diperuntukkan kepada Komisi Pemilihan Independen (KIP) dan Belanja Hibah kepada Partai Politik untuk Ketua DPW Partai Aceh Kota Lhokseumawe. Belanja hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terjadi kenaikan karena adanya hibah kepada Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kota Lhokseumawe tahun 2023 sedangkan tahun 2022 tidak ada belanja hibah untuk KIP Kota Lhokseumawe.

#### 5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp31.141.171.655,00**            **Rp49.131.020.993,00**

Belanja Bantuan Sosial merupakan bantuan uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan sosial kepada lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp31.141.171.655,00 atau 94,30% dari anggaran sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp1.880.631.175,00 atau 5,70% dari anggaran sebesar Rp33.021.802.830,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, nilai realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp17.989.849.338,00 atau 36,62%, dengan rincian realisasi sebagai berikut ini.

**Tabel 5.31**  
**Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
1	Dinas PU	19.465.812.330,00	19.154.266.955,00	98,40	23.231.317.183,00	(17,55)
2	Dinsos	2.651.845.500,00	2.525.554.028,00	95,24	5.964.681.550,00	(57,66)
3	DKPP	2.658.328.000,00	1.898.986.672,00	71,44	9.398.020.825,00	(79,79)



No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
4	DLH	0,00	0,00	0,00	169.698.000,00	(100,00)
5	Disperindagkop	1.029.785.000,00	799.124.000,00	77,60	683.304.960,00	16,95
6	Dinas PP	0,00	0,00	0,00	507.210.500,00	(100,00)
7	Setdako	70.932.000,00	49.140.000,00	69,28	75.762.000,00	(35,14)
8	BPBD	0,00	0,00	0,00	648.877.000,00	(100,00)
9	Baitul Mal	6.862.100.000,00	6.714.100.000,00	97,84	8.449.648.975,00	(20,54)
10	Dinkes	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	(100,00)
11	Badan Kesbangpol	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sekretariat MPD	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	33.021.802.830,00	31.141.171.655,00	94,30	49.131.020.993,00	(36,62)

Belanja Bantuan Sosial pada Dinas PUPR diberikan diantaranya untuk Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan dan Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni. Pada Dinas Sosial, Bantuan Sosial diantaranya diberikan Pengadaan Becak Mesin Barang Jumbo untuk Masyarakat Miskin/Pra Sejahtera dalam Wilayah Kota Lhokseumawe dan Penyediaan Permakanan. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan memberikan Bantuan Sosial diantaranya Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 3GT beserta Mesin/Alat Tangkap/Alat Bantu Penangkapan dan Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Cantang untuk Pokdakan Beusare Rasa Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM disalurkan sebagai Bantuan Gerobak Dorong untuk pelaku UMKM Kecamatan Banda Sakti. Belanja Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah diberikan untuk pengadaan kain sarung untuk kegiatan Penyerahan Remisi oleh Wali Kota pada Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kota Lhokseumawe. Lalu pada Sekretariat Baitul Mal menyalurkan Belanja Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir pada Kegiatan Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF.

#### 5.1.2.2

#### Belanja Modal

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp60.336.467.761,00**            **Rp142.251.751.256,00**

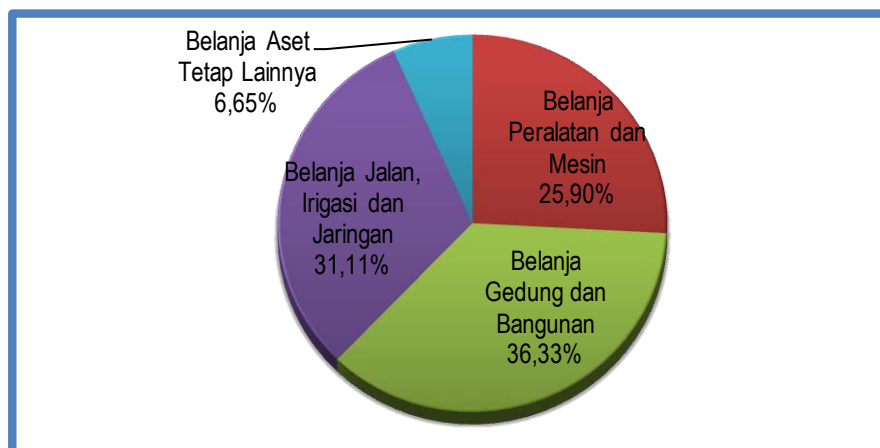
Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan Aset Tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas (12) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp60.336.467.761,00 atau 73,28% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp82.331.873.436,00. Dengan demikian terjadi efisiensi sebesar Rp21.995.405.675,00,00 atau 26,72%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, nilai realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp81.915.283.495,00 atau 57,58%. Rincian Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.32**  
**Rincian Belanja Modal TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
1	Belanja Tanah	523.400.000,00	0,00	0,00	13.713.809.182,00	(100,00)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	16.744.311.095,00	15.627.696.279,00	93,33	21.363.441.916,00	(26,85)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	36.586.560.395,00	21.923.145.455,00	59,92	40.945.930.770,00	(46,46)
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.463.735.146,00	18.771.759.227,00	76,73	62.614.371.138,00	(70,02)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.013.866.800,00	4.013.866.800,00	100,00	3.614.198.250,00	11,06
	Jumlah	82.331.873.436,00	60.336.467.761,00	73,28	142.251.751.256,00	(57,58)

Berikut ini disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal untuk Tahun 2023.



**Gambar 5.4**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023**

#### 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

**Tahun 2023**

**Rp0,00**

**Tahun 2022**

**Rp13.713.809.182,00**

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang dipergunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dari anggaran sebesar Rp523.400.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah disajikan pada tabel berikut ini.







No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
3	Belanja Modal Alat Ukur	3.744.000,00	3.744.000,00	100,00	45.000.000,00	(91,68)
4	Belanja Modal Alat Pengolahan	16.583.017,00	10.421.000,00	62,84	217.685.000,00	(95,21)
5	Belanja Modal Alat Kantor	1.246.422.675,00	1.200.487.500,00	96,31	422.666.000,00	184,03
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.549.972.226,00	3.481.389.513,00	98,07	2.051.152.355,00	69,73
7	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	156.379.000,00	140.403.500,00	89,78	1.404.901.800,00	(90,01)
8	Belanja Modal Alat Studio	1.031.759.328,00	870.275.200,00	84,35	733.636.300,00	18,62
9	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.196.270.950,00	3.993.106.486,00	95,16	1.697.008.943,00	135,30
10	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	(100,00)
11	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	226.939.701,00	(100,00)
12	Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	283.300.000,00	203.152.000,00	71,71	0,00	0,00
13	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	(100,00)
14	Belanja Modal Komputer Unit	1.655.691.780,00	1.614.757.430,00	97,53	1.094.533.200,00	47,53
15	Belanja Modal Peralatan Komputer	963.033.250,00	632.619.940,00	65,69	5.871.075.956,00	(89,22)
16	Belanja Modal Sumur	35.000.000,00	34.864.000,00	99,61	226.960.500,00	(84,64)
17	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	(100,00)
18	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	107.974.900,00	(100,00)
19	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	206.944.680,00	65.750.000,00	31,77	830.500.000,00	(92,08)
20	Belanja Modal Peralatan Olahraga	219.872.500,00	219.869.310,00	100,00	306.731.250,00	(28,32)
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.912.835.400,00	1.912.835.400,00	100,00	2.169.845.911,00	(11,84)
	Jumlah	16.744.311.095,00	15.627.696.279,00	93,33	21.363.441.916,00	(26,85)

Belanja modal alat kantor terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2022 disebabkan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana mendukung operasional kegiatan pemerintahan. Belanja Modal Alat Kedokteran terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2022 disebabkan pengadaan alat kesehatan atau alat penunjang medis fasilitas kesehatan.

**5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan** **Tahun 2023** **Tahun 2022**  
**Rp21.923.145.455,00** **Rp40.945.930.770,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap



digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak (Kontraktual).

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 sebesar Rp21.923.145.455,00 atau 59,92% dari anggaran sebesar Rp36.586.560.395,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp19.022.785.315,00 atau 46,46% dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.35**  
**Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.813.404.695,00	19.838.430.675,00	60,46	33.117.958.434,00	(40,10)
2	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	109.509.920,00	0,00	0,00	19.956.000,00	(100,00)
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.663.645.780,00	2.084.714.780,00	56,90	7.808.016.336,00	(73,30)
	Jumlah	36.586.560.395,00	21.923.145.455,00	59,92	40.945.930.770,00	(46,46)

Anggaran atas belanja modal candi/tugu berupa penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar kecamatan dan gampong. Pada tahun 2023 tidak ada realisasi untuk belanja modal gedung bangunan karena terdapat Desa yang tidak setuju dengan batas wilayah desanya, sehubungan belum selesainya Peraturan Wali Kota tentang Batas Desa yang masih menunggu rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

**5.1.2.2.4 Belanja Modal Tahun 2023 Tahun 2022**  
**Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp18.771.759.227,00 Rp62.614.371.138,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp18.771.759.227,00 atau 76,73% dari anggaran sebesar Rp24.463.735.146,00. Dengan demikian, anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak direalisasikan Rp5.691.975.919,00 atau 23,27%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, nilai realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp43.842.611.911,00 atau 70,02%. Terjadinya penurunan pada realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Tahun 2023 diantaranya pengadaan modal bangunan pengamanan sungai/pantai, dan juga pengadaan modal instalasi pengolahan bahan bangunan, yaitu masing-masing sebesar Rp10.121.855.600,00 atau 94,88% dan Rp95.314.000,00 atau 82,72% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada tabel berikut ini.



**Tabel 5.36**  
**Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
1	Belanja Modal Jalan	20.465.735.146,00	14.934.333.300,00	72,97	39.123.535.538,00	(61,83)
2	Belanja Modal Jembatan	280.000.000,00	181.153.000,00	64,70	247.684.000,00	(26,86)
3	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	50.000.000,00	49.720.827,00	99,44	169.800.000,00	(70,72)
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	550.000.000,00	545.824.100,00	99,24	10.667.679.700,00	(94,88)
5	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.900.000.000,00	2.842.927.000,00	98,03	6.876.919.000,00	(58,66)
6	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	198.000.000,00	197.886.000,00	99,94	263.542.000,00	(24,91)
7	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	20.000.000,00	19.915.000,00	99,58	115.229.000,00	(82,72)
8	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	690.000,00	(100,00)
9	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	7.280.000,00	(100,00)
10	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	87.168.400,00	(100,00)
11	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	5.054.843.500,00	(100,00)
	Jumlah	24.463.735.146,00	18.771.759.227,00	76,73	62.614.371.138,00	(70,02)

**5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** **Tahun 2023**  
**Rp4.013.866.800,00** **Tahun 2022**  
**Rp3.614.198.250,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (jaringan, irigasi, dan lain-lain). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yaitu: Pengadaan Buku, Pengadaan Barang-barang Perpustakaan, Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan, Pengadaan Alat Olahraga lainnya, dan Pengadaan Tanaman.

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.013.866.800,00 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.013.866.800,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp399.668.550,00 atau 11,06%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.37**  
**Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
1	Belanja Modal Bahan	0,00	0,00	0,00	375.855.150,00	(100,00)



No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
	Perpustakaan Tercetak					
2	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	125.525.000,00	(100,00)
3	Belanja Modal Tanda Penghargaan	7.475.000,00	7.475.000,00	100,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.006.391.800,00	4.006.391.800,00	100,00	3.112.818.100,00	28,71
	Jumlah	4.013.866.800,00	4.013.866.800,00	100,00	3.614.198.250,00	11,06

**5.1.2.3 Belanja Tak Terduga****Tahun 2023**  
**Rp52.650.368,00****Tahun 2022**  
**Rp2.134.850.082,00**

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Anggaran Belanja Tak Terduga tahun 2023 sebesar Rp52.650.368,00 dan terealisasi sebesar Rp52.650.368,00. Rincian realisasi Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut ini.

**Tabel 5.38**  
**Rincian Belanja Tidak Terduga TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
1	Dinas PUPR	0,00	0,00	0,00	192.900.000,00	(100,00)
2	BPBD	0,00	0,00	0,00	829.517.250,00	(100,00)
3	Satpol PP	0,00	0,00	0,00	999.000.000,00	(100,00)
4	BPKD	52.650.368,00	52.650.368,00	100	73.432.832,00	(28,30)
5	Kesbangpol	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	(100,00)
	Jumlah	52.650.368,00	52.650.368,00	100,00	2.134.850.082,00	(97,53)

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp52.650.368,00. Di dalam Belanja Tak Terduga tersebut terdapat Belanja yang diperuntukkan penggunaannya untuk Pengembalian Dana Lebih Bayar Pajak PBB Tahun 2022 sebesar Rp583.081,00, Pengembalian Sisa Dana Hibah BPBD Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.133.000,00 dan juga Pengembalian Kelebihan Transfer Dana Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp1.934.287,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

**5.1.2.4 Transfer****Tahun 2023**  
**Rp119.562.619.814,00****Tahun 2022**  
**Rp104.748.131.372,00**

Realisasi Transfer pada Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp119.562.619.814,00 dari anggaran sebesar Rp120.619.760.715,00 atau 99,12%. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp14.814.488.442,00 atau 14,14% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun



2022. Transfer terdiri dari dua bagian yaitu Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa dan Transfer Bantuan Keuangan.

**Tabel 5.39**  
**Rincian Transfer TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
1	Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	3.814.825.000,00	3.183.566.844,00	83,45	1.820.631.270,00	74,86
2	Transfer Bantuan Keuangan	116.804.935.715,00	116.379.052.970,00	99,64	102.927.500.102,00	13,07
	Jumlah	120.619.760.715,00	119.562.619.814,00	99,12	104.748.131.372,00	14,14

**5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa**

**Tahun 2023**  
**Rp3.183.566.844,00**

**Tahun 2022**  
**Rp1.820.631.270,00**

Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa yang dianggarkan sebesar Rp3.814.825.000,00 pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.183.566.844,00 seperti terlihat di tabel berikut.

**Tabel 5.40**  
**Rincian Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.406.075.000,00	2.843.458.400,00	83,48	1.622.236.500,00	75,28
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	408.750.000,00	340.108.444,00	83,21	198.394.770,00	71,43
	Jumlah	3.814.825.000,00	3.183.566.844,00	83,45	1.820.631.270,00	74,86

**5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan**

**Tahun 2023**  
**Rp116.379.052.970,00**

**Tahun 2022**  
**Rp102.927.500.102,00**

Transfer Bantuan Keuangan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp116.379.052.970,00 atau 99,64% dari anggaran sebesar Rp116.804.935.715,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, nilai realisasi Transfer Bantuan Keuangan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp13.451.552.868,00 atau 13,07%. Sejak tahun 2020 terjadi pengalihan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Dana Desa) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5.41**  
**Rincian Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	9.929.671.415,00	9.929.671.415,00	100,00	5.000.000.000,00	98,59
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	45.048.128.300,00	45.048.128.300,00	100,00	97.927.500.102,00	(54,00)



No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	61.827.136.000,00	61.401.253.255,00	99,31	0,00	100,00
	Jumlah	116.804.935.715,00	116.379.052.970,00	99,64	102.927.500.102,00	13,07

Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan di tahun 2023 sebesar Rp116.379.052.970,00, yang terbagi menjadi Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp9.929.671.415,00 merupakan Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan Surat Perjanjian Peralihan Nomor 18/MoU/2022 antara Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan rincian: Tahap (V) sebesar Rp3.000.000.000,00; Tahap (VI) sebesar Rp3.000.000.000,00; dan Tahap (VII) sebesar Rp3.929.671.415,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp45.048.128.300,00 digunakan untuk Alokasi Dana Gampong dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp61.401.253.255,00 merupakan Dana Transfer – Dana Desa yang melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

### 5.1.3 Pembiayaan

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp9.541.034.674,37**                      **Rp46.484.611.012,85**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah dalam hal ini merupakan transaksi keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Realisasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.541.034.674,37 dan Rp46.484.611.012,85. Realisasi Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5.42**  
**Rincian Pembiayaan Daerah TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	31.789.500.000,00	10.541.034.674,37	33,16	48.484.611.012,85	(78,26)
	Jumlah	31.789.500.000,00	10.541.034.674,37	33,16	48.484.611.012,85	(78,26)



No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
1	Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	2.000.000.000,00	(50,00)
	Jumlah	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	2.000.000.000,00	(50,00)
	Pembiayaan Netto	29.789.500.000,00	9.541.034.674,37	32,03	46.484.611.012,85	(79,47)

**5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan** **Tahun 2023**  
**Rp10.541.034.674,37** **Tahun 2022**  
**Rp48.484.611.012,85**

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan, penjualan obligasi pemerintah, hasil *privatisasi* perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan mencakup SiLPA, Pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp10.541.034.674,37 atau 33,16% dari anggaran sebesar Rp31.789.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp37.943.576.338,48 atau 78,26%. Rincian penerimaan daerah sebagai berikut.

**Tabel 5.43**  
**Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%Naik/ Turun
	Sisa Lebih Perhitungan					
1	Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	31.789.500.000,00	10.541.034.674,37	33,16	48.484.611.012,85	(78,26)
	Jumlah	31.789.500.000,00	10.541.034.674,37	33,16	48.484.611.012,85	(78,26)

**5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan** **Tahun 2023**  
**Rp1.000.000.000,00** **Tahun 2022**  
**Rp2.000.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan merupakan komponen pos pembiayaan dalam struktur APBD yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal misalnya penambahan modal pada BUMD, Pembelian Surat Berharga, Pelunasan utang, dan pemberian pinjaman. Pengeluaran Pembiayaan ini meskipun menggunakan uang kas daerah tidak dapat dikategorikan sebagai belanja, sebab tujuan dan mekanisme pengeluaran kasnya dari rekening kas umum daerah berbeda. Pengeluaran Pembiayaan merupakan suatu bentuk pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang pada suatu saat akan diterima kembali, sedangkan Belanja adalah Pengeluaran Uang dari rekening kas umum daerah yang tidak akan diterima kembali.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 50% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagai berikut ini.







- Surplus/(Defisit) Anggaran Rp 27.488.786.740,00
  - Pembiayaan Netto Rp 9.541.034.674,37
- SiLPA Tahun Berjalan Rp 37.029.821.414,37

Adapun rincian SiLPA Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada rincian berikut:

No	Uraian	SILPA 2023	SILPA 2022
<b>A</b>	<b>LABELLING</b>	<b>36.461.980.654,37</b>	<b>10.538.381.774,37</b>
<b>I</b>	<b>DAK FISIK</b>	<b>12.726.980,00</b>	<b>515.687.959,00</b>
<b>II</b>	<b>DAK NON FISIK</b>	<b>10.921.866.246,00</b>	<b>1.929.839.727,00</b>
1	Dana Bagi Hasil Sawit	5.195.684.000,00	0,00
2	DAU Tambahan (50% THR dan Gaji 13 Guru Sertifikasi)	2.755.933.000,00	0,00
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	1.592.245.000,00	294.916.365,00
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	49.150.000,00	74.500.000,00
5	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	0,00	0,00
6	Bantuan Operasional Kesehatan	1.328.854.246,00	776.953.260,00
7	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0,00	608.567.772,00
8	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	0,00	87.724.650,00
9	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (CAPIL)	0,00	0,00
10	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00
11	BOP Meseum	0,00	0,00
12	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	0,00	18.097.800,00
13	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	67.723.000,00
14	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	1.356.880,00
<b>III</b>	<b>DBH - CHT</b>	<b>0,00</b>	<b>61.773.622,00</b>
<b>IV</b>	<b>DBH - PR (50%)</b>	<b>14.071.770.667,46</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>OTSUS</b>	<b>2.726.742.201,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>DID</b>	<b>0,00</b>	<b>724.556.588,69</b>
<b>VII</b>	<b>BANTUAN KEUANGAN UNTUK COVID-19 DARI PROVINSI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>DANA HIBAH REHAB REKON (BPBD)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.133.000,00</b>
<b>IX</b>	<b>Zakat</b>	<b>5.924.719.181,12</b>	<b>5.582.008.119,00</b>
<b>X</b>	<b>Infak</b>	<b>1.079.597.225,11</b>	<b>1.470.151.931,00</b>
<b>XI</b>	<b>JKN</b>	<b>1.720.331.153,68</b>	<b>204.216.827,68</b>
<b>XII</b>	<b>BOS</b>	<b>4.227.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>B</b>	<b>NON LABELLING</b>	<b>567.840.760,00</b>	<b>2.652.900,00</b>
<b>I</b>	<b>DANA ZAKAT (KESALAHAN SETOR OLEH BANK)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN</b>	<b>567.818.260,00</b>	<b>2.652.900,00</b>
<b>Total</b>		<b>37.029.821.414,37</b>	<b>10.541.034.674,37</b>

Berikut ini rincian kas yang dibatasi penggunaannya yang telah digunakan untuk pengeluaran APBK pada tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Dana Earmark yang Seharusnya Terdapat di RKUD	Dana Earmark yang Masih Tersedia di RKUD per 31 Desember 2023	Dana Earmark yang terpakai selama TA 2023
1	2	3	4	5=3-4
1	<b>DAK Fisik s.d. Tahun 2020</b>	1.698.001.320,00	0,00	1.698.001.320,00
2	<b>DAK Fisik Tahun 2021</b>	532.557.369,00	0,00	532.557.369,00
3	<b>DAK Non Fisik</b>			
	• Tunjangan Profesi Guru	1.592.245.000,00	1.592.245.000,00	0,00
	• Tambahan Penghasilan Guru	49.150.000,00	49.150.000,00	0,00



No	Uraian	Dana Earmark yang Seharusnya Terdapat di RKUD	Dana Earmark yang Masih Tersedia di RKUD per 31 Desember 2023	Dana Earmark yang terpakai selama TA 2023
	• BOP Museum	311.719,00	0,00	311.719,00
	• BOK	1.770.633.381,00	0,00	1.770.633.381,00
	• BOKB	750.519.550,00	0,00	750.519.550,00
	• PPA	267.655.750,00	0,00	267.655.750,00
	• PK2UMK	51.889.241,00	0,00	51.889.241,00
	• FPM	20.885.200,00	0,00	20.885.200,00
	• KPP	2.276.160,00	0,00	2.276.160,00
	• DAK Fisik Penugasan TA. 2023	12.726.980,00	12.726.980,00	0,00
4	<b>DAK Fisik Tahun 2022</b>	515.687.959,00	0,00	515.687.959,00
5	<b>Dana Otonomi Khusus</b>	2.726.742.201,00	2.726.742.201,00	0,00
6	<b>Dana Insentif Daerah</b>			
	Dana Insentif Fiskal TA 2023	553.157.181,00	0,00	553.157.181,00
	Dana Insentif Daerah TA 2022	1.134.152.777,00	0,00	1.134.152.777,00
7	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Rokok</b>	15.865.522.272,00	14.071.770.667,46	1.793.751.604,54
8	<b>Dana Bagi Hasil CHT</b>	69.658.921,00	0,00	69.658.921,00
9	<b>Bantuan Keuangan Khusus</b>	53.006.348,00	0,00	53.006.348,00
10	<b>Dana Bagi Hasil Sawit</b>	5.195.684.000,00	5.195.684.000,00	0,00
11	<b>DAU Tambahan</b>	2.755.933.000,00	2.755.933.000,00	0,00
12	<b>Zakat</b>	5.924.741.681,12	5.924.741.681,12	0,00
13	<b>Infaq dan Shadaqah</b>	1.079.597.225,11	1.079.597.225,11	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>42.622.735.235,23</b>	<b>33.408.590.754,69</b>	<b>9.214.144.480,54</b>

**5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**

**Tahun 2023**  
**Rp0,00**

**Tahun 2022**  
**Rp0,00**

Tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Sebelumnya untuk Tahun Anggaran 2023.

**5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir**

**Tahun 2023**  
**Rp37.029.821.414,37**

**Tahun 2022**  
**Rp10.541.034.674,37**

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp37.029.821.414,37 adalah SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang terdapat pada:

Kas di Kas Daerah	Rp 26.404.251.848,46
Infaq	Rp 1.079.597.225,11
Zakat	Rp 5.924.719.181,12
Kas di Bend. SKPK	Rp 567.818.260,00
Kas BOS	Rp 4.227.000,00
Kas JKN	Rp 1.720.331.153,68
Kas Dana BOK Puskesmas	Rp 1.328.854.246,00
Dana Zakat (Kesalahan Setor oleh Bank)	Rp 22.500,00
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp37.029.821.414,37</u></b>

### 5.3 Penjelasan atas Akun dalam Neraca

Penjelasan pos-pos Neraca ini menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan gabungan dari Neraca SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.3.1 Aset Per 31 Desember 2023    Per 31 Desember 2022 Rp2.200.505.853.300,86    Rp2.191.335.492.092,24

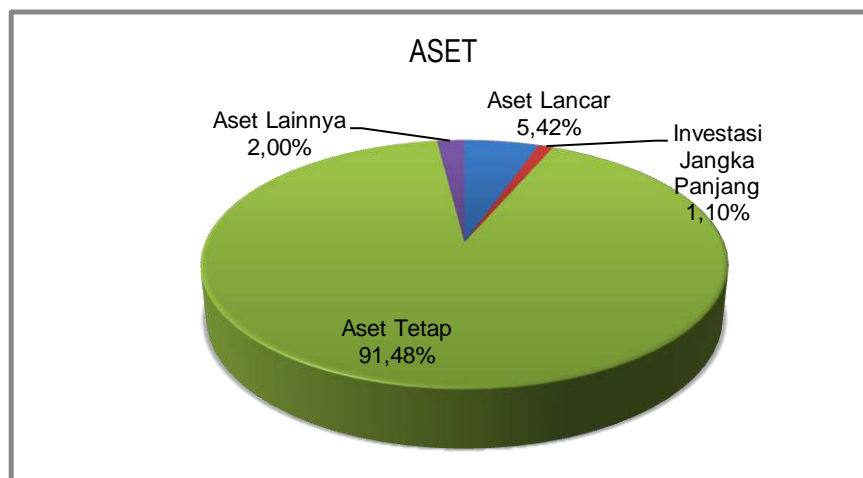
Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp2.200.505.853.300,86 dan Rp2.191.335.492.092,24 sebagai berikut:

**Tabel 5.45**  
**Rincian Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1	Aset Lancar	119.221.191.379,53	83.175.263.134,28	36.045.928.245,25	43,34
2	Investasi Jangka Panjang	23.970.636.984,00	24.508.516.280,00	(537.879.296,00)	(2,19)
3	Aset Tetap	2.013.233.690.351,33	2.041.364.518.115,96	(28.130.827.764,63)	(1,38)
4	Aset Lainnya	44.080.334.586,00	42.287.194.562,00	1.793.140.024,00	4,24
	Jumlah	2.200.505.853.300,86	2.191.335.492.092,24	9.170.361.208,61	0,42

Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp9.170.361.208,61 atau 0,42%. Berikut gambar perbandingan komposisi Aset Kota Lhokseumawe.



**Gambar 5.5**  
**Perbandingan Komposisi Aset Per 31 Desember 2023**



**5.3.1.1 Aset Lancar** **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**  
**Rp119.221.191.379,53** **Rp83.175.263.134,28**

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo aset lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp119.221.191.379,53 dan Rp83.175.263.134,28. Komposisi Aset Lancar dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.46**  
**Rincian Aset Lancar Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Kas dan Setara Kas	37.088.061.381,37	10.545.631.854,37	26.542.429.527,00	251,69
2	Piutang	38.670.022.017,50	16.237.977.576,73	22.432.044.440,77	138,15
3	Persediaan	43.244.906.326,79	56.015.157.515,35	(12.770.251.188,56)	(22,80)
4	Beban Dibayar Dimuka	218.201.653,87	376.496.187,83	(158.294.533,96)	(42,04)
	Jumlah	119.221.191.379,53	83.175.263.134,28	36.045.928.245,25	43,34

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Aset Lancar per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan dibandingkan Aset Lancar pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp36.045.928.245,25 atau 43,34% dari tahun 2022. Rincian Aset Lancar menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas** **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**  
**Rp37.088.061.381,37** **Rp10.545.631.854,37**

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp37.088.061.381,37 dan Rp10.545.631.854,37. Rincian lebih lanjut disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.47**  
**Rincian Jumlah Kas dan Setara Kas Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	33.408.590.754,69	10.334.150.946,69
2	Kas di Bendahara Penerimaan	42.113,00	2.650.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	567.776.147,00	26.900,00
4	Kas di Bendahara Dana BOS	4.227.000,00	4.587.180,00
5	Kas di Bendahara FKTP	1.720.331.153,68	204.216.827,68
6	Kas Dana BOK Puskesmas	1.328.854.246,00	0,00
7	Kas Lainnya	58.239.967,00	0,00
	Jumlah	37.088.061.381,37	10.545.631.854,37



**5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah** **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**  
**Rp33.408.590.754,69** **Rp10.334.150.946,69**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp33.408.590.754,69 dan Rp10.334.150.946,69 merupakan saldo rekening kas umum daerah Kota Lhokseumawe yang disimpan di Bank Aceh cabang Lhokseumawe dengan nomor Rek.030 01 02 580022-5 atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Lhokseumawe dan rekening pembantu yaitu terdiri dari Rekening zakat dan infaq, dan terjadi selisih antar Rekening zakat dengan sistem sebesar Rp22.500,00 karena kesalahan bank, seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 5.48**  
**Rekening di Kas Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2023 dan 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Per 31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Per 31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
Rekening Kas Umum Daerah Nomor Rekening 030 01 02 580022-5	26.404.251.848,46	3.281.990.896,69
Rekening Zakat Nomor Rekening 030.01.88.002960-6	5.924.719.181,12	5.582.008.119,00
Rekening Infaq Nomor Rekening 030.01.88.002961-0	1.079.597.225,11	1.470.151.931,00
Kesalahan Bank Rekening Zakat Nomor Rekening 030.01.88.002960-6	22.500,00	0,00
<b>Kas di Kas Daerah Setelah Rekonsiliasi</b>	<b>33.408.590.754,69</b>	<b>10.334.150.946,69</b>

**5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan** **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**  
**Rp42.113,00** **Rp2.650.000,00**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas daerah walaupun belum dikuasai oleh BUD atau pendapatan yang belum disetor oleh bendahara penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintah.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp42.113,00 dan Rp2.650.000,00. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp42.113,00 merupakan pajak PBB yang belum disetorkan ke RKUD Kota Lhokseumawe, uang tersebut masih berada di Rekening penampung PBB.

**5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran** **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**  
**Rp567.776.147,00** **Rp26.900,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas (mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang merupakan uang persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas daerah per tanggal Neraca.



Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp567.776.147,00 dan Rp26.900,00. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp567.776.147,00 merupakan sisa kas bantuan BLT belanja Covid-19 pada Dinas Sosial tahun lalu sebesar Rp2.900,00 dan sisa UP pada Sekretariat DPRK dan Sekretariat Daerah masing-masing sebesar Rp558.796.247,00 dan Rp8.977.000,00 yang belum disetorkan per 31 Desember 2023. Sisa UP pada Sekretariat DPRK sebesar Rp558.796.247,00 disetor ke RKUD pada tanggal 17 Januari 2024 dan sisa UP pada Sekretariat Daerah sebesar Rp8.977.000,00 disetor ke RKUD pada tanggal 19 Februari 2024.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.900,00 merupakan utang pajak daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp24.000,00 telah disetorkan ke kas daerah tanggal 09 Februari 2023 dan kas bantuan BLT belanja Covid-19 sebesar Rp2.900,00 pada rekening *escrow* BRI yang sudah disetorkan pada tanggal 17 Februari 2024.

**5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara Dana BOS**      **Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**Rp4.227.000,00**      **Rp4.587.180,00**

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp4.227.000,00 dan Rp4.587.180,00. Rincian sisa dana BOS per sekolah disajikan pada **Lampiran 2**.

**Tabel 5.49**  
**Rincian Sisa Dana BOS Pemerintah Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	SD	4.227.000,00	14.000,00
2	SMP	0,00	0,00
3	Pajak di Sekolah	0,00	4.573.180,00
	Jumlah	4.227.000,00	4.587.180,00

**5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP**      **Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**Rp1.720.331.153,68**      **Rp204.216.827,68**

Kas di Bendahara FKTP terdapat pada Kas di Bendahara JKN Puskesmas pada Dinas Kesehatan. Saldo kas di bendahara FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp1.720.331.153,68 dan Rp204.216.827,68 yang terdapat pada 7 (Tujuh) Puskesmas. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.50**  
**Rincian Kas di Bendahara JKN Pemerintah Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Puskesmas Muara Satu	355.204.468,32	30.991.947,32
2	Puskesmas Muara Dua	442.091.472,97	6.814.273,97
3	Puskesmas Banda Sakti	413.541.666,57	67.031.592,57



No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
4	Puskesmas Blang Mangat	236.498.017,43	432.177,43
5	Puskesmas Blang Cut	29.430.219,00	19.582,00
6	Puskesmas Mon Geudong	215.114.132,28	98.842.851,28
7	Puskesmas Kandang	28.451.177,11	84.403,11
	Jumlah	1.720.331.153,68	204.216.827,68

Kas di bendahara JKN tersebut merupakan saldo yang terdapat pada rekening di Bank BSI setelah rekonsiliasi. Dana JKN per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.720.331.153,68, sesuai pada rekening koran. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.51**  
**Rincian Rekonsiliasi Kas di Bendahara JKN Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023**

No	Uraian	Rekonsiliasi (Rp)	Rekonsiliasi (Tambah)	Rekonsiliasi (Kurang)	Rek. Koran JKN (Rp)
1	Puskesmas Muara Satu	30.991.947,32	2.140.917.620,00	1.816.705.099,00	355.204.468,32
2	Puskesmas Muara Dua	6.814.273,97	2.215.283.406,00	1.780.006.207,00	442.091.472,97
3	Puskesmas Banda Sakti	67.031.592,57	2.696.872.970,00	2.350.362.896,00	413.541.666,57
4	Puskesmas Blang Mangat	432.177,43	1.307.912.101,00	1.071.846.261,00	236.498.017,43
5	Puskesmas Blang Cut	19.582,00	585.567.373,00	556.156.736,00	29.430.219,00
6	Puskesmas Mon Geudong	98.842.851,28	1.276.527.160,00	1.160.255.879,00	215.114.132,28
7	Puskesmas Kandang	84.403,11	882.574.255,00	854.207.481,00	28.451.177,11
	Jumlah	204.216.827,68	11.105.654.885,00	9.589.540.559,00	1.720.331.153,68

Kas di bendahara JKN pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan rekening di Bank BSI setelah dilakukan rekonsiliasi terdapat selisih sebesar Rp90.000.000,00. Pada tanggal 29 Desember 2023 semua pembayaran sudah dilakukan pembayaran kepada rekanan melalui sistem ibc Bank Aceh, namun karena batas limit transfer tidak mencukupi, bank melakukan debit pada 1 Januari 2023 secara otomatis.

Selain itu, terjadi kelebihan transfer pembayaran terhadap pajak PPh 21 sebesar Rp1,00 sehingga sisa rekening koran JKN sebesar Rp1.720.331.152,68.

#### 5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

**Per 31 Desember 2023**  
**Rp1.328.854.246,00**

**Per 31 Desember 2022**  
**Rp0,00**

Kas dana BOK Puskesmas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat.

Saldo Kas dan BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp1.328.854.246,00 dan Rp0,00. Kas dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.328.854.246,00 merupakan sisa BOK pada Rekening Puskesmas di Dinas Kesehatan.

**5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya****Per 31 Desember 2023**  
**Rp58.239.967,00****Per 31 Desember 2022**  
**Rp0,00**

Kas lainnya merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa pajak yang belum disetor dan uang pihak ketiga lainnya yang belum diserahkan.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp58.239.967,00 dan Rp0,00. Saldo Kas lainnya per 31 Desember 2023 terdiri atas pajak pusat dan daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum disetor ke RKUN dan RKUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.954.467,00 dan koreksi atas Belanja Barang dan Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum disalurkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.285.500,00.

**5.3.1.1.2 Piutang****Per 31 Desember 2023**  
**Rp38.670.022.017,50****Per 31 Desember 2022**  
**Rp16.237.977.576,73**

Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp38.670.022.017,50 dan Rp16.237.977.576,73. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.52**  
**Rincian Piutang Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Piutang Pendapatan	64.545.889.672,00	39.657.525.471,48	24.888.364.200,52	62,76
2	Piutang Lainnya	1.366.106.463,00	1.366.106.463,00	0,00	0,00
3	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(27.241.974.117,50)	(24.785.654.357,75)	(2.456.319.759,75)	9,91
	Jumlah	38.670.022.017,50	16.237.977.576,73	22.432.044.440,77	138,15

**5.3.1.1.2.1 Piutang Pendapatan****Per 31 Desember 2023**  
**Rp64.545.889.672,00****Per 31 Desember 2022**  
**Rp39.657.525.471,48**

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp64.545.889.672,00 dan Rp39.657.525.471,48. Rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.53**  
**Rincian Piutang Pendapatan Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1	Piutang Pajak Daerah	29.821.469.331,00	27.614.851.292,00	2.206.618.039,00	7,99
2	Piutang Retribusi Daerah	4.456.647.851,00	4.278.923.084,00	177.724.767,00	4,15
3	Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Transfer Pusat	22.509.388.107,00	676.358,48	22.508.711.748,52	3.327.926,30
5	Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi	7.758.384.383,00	7.763.074.737,00	(4.690.354,00)	(0,06)
	Jumlah	64.545.889.672,00	39.657.525.471,48	24.888.364.200,52	62,76





Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.588.951.872,00 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp24.888.364.200,52 atau 62,76%. Rincian perhitungan mutasi piutang pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.54**  
**Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Tahun 2023**

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi		Per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Pajak Daerah	27.614.851.292,00	3.291.998.128,00	1.085.380.089,00	29.821.469.331,00
2	Piutang Retribusi Daerah	4.278.923.084,00	516.250.000,00	338.525.233,00	4.456.647.851,00
3	Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Transfer Pusat	676.358,48	22.509.388.107,00	676.358,48	22.509.388.107,00
5	Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi	7.763.074.737,00	7.758.384.383,00	7.763.074.737,00	7.758.384.383,00
	Jumlah	39.657.525.471,48	34.076.020.618,00	9.187.656.417,48	64.545.889.672,00

#### 5.3.1.1.2.1.1 Piutang Pajak Daerah

**Per 31 Desember 2023**  
**Rp29.821.469.331,00**

**Per 31 Desember 2022**  
**Rp27.614.851.292,00**

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp29.821.469.331,00 dan Rp27.614.851.292,00, terdapat peningkatan sebesar Rp2.206.618.039,00 atau 7,99%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.55**  
**Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2023**

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi		Per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Pajak Hotel	467.594.000,00	0,00	33.367.000,00	434.227.000,00
2	Piutang Pajak Losmen	9.469.193,00	9.430.228,00	6.501.193,00	12.398.228,00
3	Piutang Pajak Restoran	4.103.300,00	7.222.694,00	4.103.300,00	7.222.694,00
4	Piutang Pajak Rumah Makan	128.789.300,00	7.715.000,00	20.039.100,00	116.465.200,00
5	Piutang Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang PPJ Non PLN	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Pajak Parkir	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
8	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	2.070.192,00	3.834.936,00	2.070.192,00	3.834.936,00
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	27.002.825.307,00	3.263.655.270,00	1.019.299.304,00	29.247.181.273,00
	Jumlah	27.614.851.292,00	3.291.998.128,00	1.085.380.089,00	29.821.469.331,00

Berdasarkan tabel di atas piutang pajak daerah Per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Piutang pajak hotel sebesar Rp434.227.000,00 karena ada pembayaran piutang pajak hotel tahun 2012 sampai dengan 2020 sebesar Rp31.100.000,00, koreksi piutang 2017 sebesar Rp2.267.000,00 sesuai dengan surat kepala BPKD Kota Lhokseumawe



- Nomor: 973/213 tentang Penerimaan Piutang yang belum tervalidasi dalam Laporan Keuangan dan tidak adanya penambahan piutang hotel tahun 2023;
- b. Piutang pajak losmen sebesar Rp12.398.228,00 karena ada pembayaran piutang pajak losmen tahun 2016 sampai dengan 2022 sebesar Rp4.031.193,00, penghapusan piutang pajak losmen tahun 2013 sampai dengan 2014 sesuai dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 292 Tahun 2023 sebesar Rp250.000,00, koreksi piutang 2020 sebesar Rp2.220.000,00 sesuai dengan surat kepala BPKD Kota Lhokseumawe Nomor: 973/213 tentang Penerimaan Piutang yang belum tervalidasi dalam Laporan Keuangan dan adanya penambah piutang pajak losmen tahun 2023 sebesar Rp9.430.228,00;
  - c. Piutang pajak restoran sebesar Rp7.222.694,00 karena ada pembayaran piutang pajak restoran tahun 2022 sebesar Rp4.103.300,00, dan adanya penambahan piutang pajak restoran tahun 2023 sebesar Rp7.222.694,00;
  - d. Piutang pajak rumah makan sebesar Rp116.465.200,00 karena ada pembayaran piutang pajak rumah makan tahun 2016 sampai dengan 2022 sebesar Rp5.857.100,00, penghapusan piutang pajak rumah makan tahun 2013-2018 sesuai Keputusan Wali Kota Lhokseumawe No.212 Tahun 2023 sebesar Rp14.182.000,00, dan adanya penambahan piutang pajak rumah makan tahun 2023 sebesar Rp7.512.100,00;
  - e. Piutang pajak hiburan sebesar Rp0,00 karena tidak ada pembayaran piutang dan tidak adanya penambahan piutang pajak hiburan tahun 2023;
  - f. Piutang PPJ Non PLN sebesar Rp0,00 karena tidak ada pembayaran piutang dan tidak adanya penambahan piutang pajak ppj non pln tahun 2023;
  - g. Piutang pajak parkir sebesar Rp140.000,00 karena tidak ada pembayaran piutang parkir dan adanya penambahan piutang pajak parkir tahun 2023 sebesar Rp140.000,00;
  - h. Piutang pajak air bawah tanah sebesar Rp3.834.936,00 karena ada pembayaran piutang air bawah tanah tahun 2022 sebesar Rp2.070.192,00, dan adanya penambahan piutang pajak air bawah tanah tahun 2023 sebesar Rp3.834.936,00; dan
  - i. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp29.247.181.273,00 karena ada pembayaran piutang pajak bumi dan bangunan tahun 2002 sampai dengan 2022 sebesar Rp985.052.064,00, penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan tahun 2002-2014 sesuai dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe No. 522 Tahun 2023 sebesar Rp34.247.240,00 dan adanya penambahan piutang pajak bumi dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp3.263.655.270,00.

**5.3.1.1.2.1.2 Piutang Retribusi Daerah**

**Per 31 Desember 2023**

**Per 31 Desember 2022**

**Rp4.456.647.851,00**

**Rp4.278.923.084,00**

Piutang retribusi daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp4.456.647.851,00 dan Rp4.278.923.084,00, terdapat peningkatan sebesar Rp177.724.767,00 atau 4,15%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 5.56**  
**Rincian Mutasi Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023**

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi		Per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Retribusi Los	1.955.941.000,00	294.720.000,00	136.305.000,00	2.114.356.000,00
2	Piutang Retribusi Kios	802.500.000,00	150.000.000,00	55.000.000,00	897.500.000,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	742.266.500,00	20.150.000,00	21.000.000,00	741.416.500,00
4	Piutang Retribusi Parkir Piutang Pelayanan	438.545.000,00	38.600.000,00	37.500.000,00	439.645.000,00
5	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	18.600.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	21.600.000,00
6	Izin Gangguan (HO) (KP2T)	3.211.200,00	0,00	3.211.200,00	0,00
7	Piutang Retribusi Sampah	76.041.500,00	6.780.000,00	3.860.000,00	78.961.500,00
8	Piutang Retribusi Menara	241.817.884,00	0,00	78.649.033,00	163.168.851,00
	Jumlah	4.278.923.084,00	516.250.000,00	338.525.233,00	4.456.647.851,00

Berdasarkan tabel di atas piutang retribusi daerah Per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Piutang retribusi los sebesar Rp2.114.356.000,00 karena ada pembayaran piutang retribusi los tahun 2015 sampai dengan 2022 sebesar Rp136.305.000,00, dan adanya penambahan piutang retribusi los tahun 2023 sebesar Rp294.720.000,00;
- Piutang retribusi kios sebesar Rp897.500.000,00 karena ada pembayaran piutang retribusi kios tahun 2020 sampai dengan 2022 sebesar Rp55.000.000,00, dan adanya penambahan piutang retribusi kios tahun 2023 sebesar Rp150.000.000,00;
- Piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp741.416.500,00 karena ada pembayaran piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2022 sebesar Rp21.000.000,00 dan adanya penambahan piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2023 sebesar Rp20.150.000,00;
- Piutang retribusi parkir sebesar Rp439.645.000,00 karena ada pembayaran piutang retribusi parkir tahun 2022 sebesar Rp37.500.000,00 dan adanya penambahan piutang retribusi parkir tahun 2023 sebesar Rp38.600.000,00;
- Piutang pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sebesar Rp21.600.000,00 karena ada pembayaran piutang retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha tahun 2022 sebesar Rp3.000.000,00 dan adanya penambahan piutang pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha tahun 2023 sebesar Rp6.000.000,00;
- Piutang retribusi izin gangguan (HO) sebesar R0,00, adanya penghapusan piutang retribusi izin gangguan (HO) sesuai dengan surat Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSPTK Nomor: 900/251 Perihal Kronologis timbulnya piutang tanggal 21 Maret 2024 sebesar Rp3.211.200,00;
- Piutang retribusi sampah sebesar Rp78.961.500,00 karena ada pembayaran piutang retribusi sampah tahun 2022 sebesar Rp3.860.000,00, dan adanya penambahan piutang retribusi sampah tahun 2023 sebesar Rp6.780.000,00; dan



- h. Piutang retribusi menara sebesar Rp163.168.851,00, adanya penghapusan piutang retribusi menara yang kedaluwarsa sebesar Rp35.586.833,00 sesuai Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 523 Tahun 2023 tentang Penetapan Penghapusan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang Kedaluwarsa dalam wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan koreksi kurang piutang berdasarkan pengecekan RKUD dan LHP audited Provinsi Aceh sebesar Rp43.062.200,00.

**5.3.1.1.2.1.3 Piutang Transfer Dana Bagi Hasil dari Pusat** **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**  
**Rp22.509.388.107,00** **Rp676.358,48**

Piutang dana bagi hasil dari pusat per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp22.509.388.107,00 dan Rp676.358,48. Mutasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.57**  
**Rincian Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil dari Pusat Tahun 2023**

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi		Per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Dana Bagi Hasil dari Pusat	676.358,48	22.509.388.107,00	676.358,48	22.509.388.107,00
	Jumlah	676.358,48	22.509.388.107,00	676.358,48	22.509.388.107,00

Berdasarkan tabel di atas Piutang Transfer Pusat Per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 karena adanya pengurang piutang remunerasi TDF-DBH sebesar Rp676.358,48 ada adanya penambahan piutang transfer DBH Pusat tahun 2023 sebesar Rp22.509.388.107,00 berdasarkan PMK Nomor 90 Tahun 2023, PMK 159 Tahun 2023, dan KMK 38/KM.7/2023.

**5.3.1.1.2.1.4 Piutang Transfer Dana Bagi Hasil dari Provinsi** **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**  
**Rp7.758.384.383,00** **Rp7.763.074.737,00**

Piutang dana bagi hasil dari Provinsi per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp7.758.384.383,00 dan Rp7.763.074.737,00, terdapat penurunan sebesar Rp4.690.354,00 atau 0,06%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.58**  
**Rincian Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi Tahun 2023**

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi		Per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi	7.763.074.737,00	7.758.384.383,00	7.763.074.737,00	7.758.384.383,00
	Jumlah	7.763.074.737,00	7.758.384.383,00	7.763.074.737,00	7.758.384.383,00

Piutang dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp7.758.384.383,00 karena pembayaran piutang tahun 2022 sebesar Rp7.750.690.261,00, koreksi piutang bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp12.384.476,00 dan timbulnya piutang dana bagi hasil pajak provinsi per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.758.384.383,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 900.1.14.3/163/2024 dan 900.1.14.3/173.2024. Rincian piutang bagi hasil dari Provinsi dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

**5.3.1.1.2.2 Piutang Lainnya****Per 31 Desember 2023**  
**Rp1.366.106.463,00****Per 31 Desember 2022**  
**Rp1.366.106.463,00**

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp1.366.106.463,00 dan Rp1.366.106.463,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.59**  
**Rincian Piutang Lainnya Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1	Piutang dari jaminan uang muka rekanan pada Dinas Pekerjaan Umum	45.523.637,00	45.523.637,00	0,00	0,00
2	BPR Sabee Meusampe	780.158.243,00	780.158.243,00	0,00	0,00
3	Piutang Potongan Pajak Pusat Atas Proyek Pantai Meuraksa Cunda	540.424.583,00	540.424.583,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.366.106.463,00	1.366.106.463,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Piutang dari jaminan uang muka rekanan pada Dinas Pekerjaan Umum kepada Pihak Ketiga merupakan piutang yang timbul dari tambahan uang muka pada tahun 2012, dimana pihak rekanan CV M belum mengembalikan dana sebesar Rp45.523.637,00 akibat pemotongan pajak PPN dan PPH Pusat.
- Piutang pada BPR Sabee Meusampe yang timbul pada 2020 sebesar Rp780.158.243,00. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aceh Utara Bab IV Pasal 6 terjadi perubahan nama dari BPR Sabee Meusampe menjadi BPRS Aceh Utara; dan
- Piutang pajak pusat atas proyek Pantai Meuraksa Cunda tahun 2020 sebesar Rp540.424.583,00, dimana pihak rekanan PT. PPA sebesar Rp532.418.183,00 berupa Pajak Penghasilan Ps 4 (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (Rp88.736.364,00 dan Rp443.681.819,00), serta pihak rekanan CV. AC sebesar Rp8.006.400,00 berupa Pajak Penghasilan Ps 4 (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (Rp1.334.400,00 dan Rp6.672.000,00).

**5.3.1.1.2.3 Penyisihan Piutang****Per 31 Desember 2023**  
**(Rp27.241.974.117,50)****Per 31 Desember 2022**  
**(Rp24.785.654.357,75)**

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar (Rp27.241.974.117,50) dan (Rp24.785.654.357,75). Untuk melihat perhitungan Penyisihan Piutang pada **Lampiran 4** serta tabel berikut:

**Tabel 5.60**  
**Nilai Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	PAJAK DAERAH	22.918.251.595,00	21.067.658.985,45
1	Pajak Hotel	434.227.000,00	445.944.000,00



No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
2	Pajak Losmen	3.439.511,40	6.694.989,65
3	Pajak Restoran	361.134,70	205.165,00
4	Pajak Rumah Makan	104.061.950,00	108.923.805,00
5	Pajak Hiburan	0,00	0,00
6	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	0,00	0,00
7	Pajak Parkir	7.000,00	0,00
8	Pajak Air Tanah	191.746,80	103.509,60
9	Pajak Bumi Bangunan	22.375.963.252,10	20.505.787.516,20
	RETRIBUSI DAERAH	3.227.828.351,00	2.838.271.034,00
1	Los	1.474.650.500,00	1.285.480.700,00
2	Kios	473.750.000,00	356.000.000,00
3	Pasar	649.124.000,00	500.746.500,00
4	Parkir	402.475.000,00	396.870.000,00
5	Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1.860.000,00	930.000,00
6	Izin Gangguan (HO)	0,00	3.211.200,00
7	Retribusi Sampah	62.800.000,00	53.214.750,00
8	Menara	163.168.851,00	241.817.884,00
	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YG SAH	0,00	0,00
1	Lain- lain PAD yang Sah	0,00	0,00
	PIUTANG LAINNYA	1.095.894.171,50	879.724.338,30
1	Piutang Jaminan Uang Muka	45.523.637,00	45.523.637,00
2	BPR Sabee Meusampe	780.158.243,00	780.158.243,00
3	Piutang PPN Pusat	270.212.291,50	54.042.458,30
	Jumlah	27.241.974.117,50	24.785.654.357,75

**5.3.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka** **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**  
**Rp218.201.653,87** **Rp376.496.187,83**

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya per 31 Desember 2023 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode per 31 Desember 2023 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp218.201.653,87 dan Rp376.496.187,83. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 5.61**  
**Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
<u>Sewa Kantor/Gudang:</u>			
1	Sekretariat Daerah	26.666.666,67	76.630.136,99
2	Inspektorat	9.342.465,75	9.342.465,75
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	127.643.698,14	262.465.878,24
	Jumlah Sewa Kantor/Gudang	163.652.830,56	348.438.480,98
<u>Sewa Kendaraan:</u>			
1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	14.597.560,98	0,00
	Jumlah Sewa Kendaraan	14.597.560,98	0,00
<u>Asuransi Kendaraan:</u>			
1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	39.951.262,33	28.057.706,85
	Jumlah Asuransi Kendaraan	39.951.262,33	28.057.706,85
	Jumlah	218.201.653,87	376.496.187,83

Beban Dibayar Dimuka ini timbul karena pembayaran yang masa asuransinya/sewanya dan/atau manfaatnya melebihi tahun akuntansi, sehingga adanya hak yang sudah dibayar tetapi belum habis masa penggunaannya ketika tahun akuntansi berakhir. Adapun rincian perhitungan beban dibayar dimuka untuk masing-masing SKPK disajikan pada **Lampiran 5**.

#### 5.3.1.1.4 Persediaan

**Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**Rp43.244.906.326,79**      **Rp56.015.157.515,35**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) merupakan aset lancar yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurung waktu dua belas bulan dari tanggal pelaporan.

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp43.244.906.326,79 dan Rp56.015.157.515,35, mengalami penurunan sebesar Rp12.770.251.188,56 atau 22,80%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.62**  
**Rincian Persediaan Per Jenis Persediaan Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	719.515.800,00	956.600.000,00	(237.084.200,00)	(24,78)
2	Bahan Lainnya	7.032.300,00	292.661.800,00	(285.629.500,00)	(97,60)
3	Alat Tulis Kantor	17.009.070,00	31.911.960,00	(14.902.890,00)	(46,70)
4	Alat Listrik	837.000,00	1.578.480,00	(741.480,00)	(46,97)
5	Perlengkapan Pendukung Olahraga	31.354.418,00	0,00	31.354.418,00	0,00
6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	431.304.130,00	463.956.002,00	(32.651.872,00)	(7,04)



No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
7	Obatan-Obat	3.375.412.366,91	1.884.811.260,29	1.490.601.106,62	79,08
8	Obatan Lainnya	1.762.527.156,82	76.754.925,00	1.685.772.231,82	2.196,30
9	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.148.912.461,06	43.584.923.232,06	(12.436.010.771,00)	(28,53)
10	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	5.707.275.434,00	5.669.943.434,00	37.332.000,00	0,66
11	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	2.857.016.422,00	(2.857.016.422,00)	(100,00)
12	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	43.726.190,00	0,00	43.726.190,00	0,00
13	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	195.000.000,00	(195.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	43.244.906.326,79	56.015.157.515,35	(12.770.251.188,56)	(22,80)

Mutasi nilai persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi tambah tahun 2023 sebesar Rp38.091.571.126,79 terdiri atas:

- 1) Sisa persediaan akhir sebesar Rp37.905.775.346,79; dan
- 2) Koreksi atas kurang catat persediaan pada Dinas Sosial sebesar Rp185.795.780,00.

a. Mutasi kurang tahun 2023 sebesar Rp50.861.822.315,35 terdiri atas:

- 1) Jurnal balik saldo awal sebesar Rp32.519.657.175,35;
- 2) Koreksi atas lebih catat persediaan pada DKPPP sebesar Rp237.084.200,00;
- 3) Koreksi atas persediaan yang telah diserahkan kepada pihak ketiga pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.609.493.621,00;
- 4) Koreksi atas persediaan yang telah diserahkan kepada pihak ketiga pada PUPR sebesar Rp7.701.622.874,00;
- 5) Koreksi atas persediaan yang telah diserahkan kepada pihak ketiga pada Dinas Syariat Islam sebesar Rp4.227.064.445,00; dan
- 6) Koreksi atas persediaan yang telah diserahkan kepada pihak ketiga pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.566.900.000,00.

Untuk melihat rincian Persediaan per SKPK dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

**5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang**                        **Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**Rp23.970.636.984,00**                                **Rp24.508.516.280,00**

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi non permanen berupa penyaluran dana bergulir bagi usaha mikro dan investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang, yaitu terdiri dari penyertaan modal pada Bank Aceh, PDAM Ie Beusare Rata dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL). Rincian sebagai berikut:





**Tabel 5.63**  
**Rincian Investasi Jangka Panjang Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	124.500.000,00	124.500.000,00
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	23.846.136.984,00	24.384.016.280,00
	Jumlah	23.970.636.984,00	24.508.516.280,00

**5.3.1.2.1**      **Investasi Jangka Panjang Non Permanen**                      **Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**Rp124.500.000,00**                      **Rp124.500.000,00**

Merupakan investasi dalam bentuk dana bergulir untuk usaha mikro yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang disalurkan kepada Koperasi. Dana PEM yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebesar Rp3.000.000.000,00 yang disalurkan pada TA 2007 kepada 43 koperasi. Dari 43 koperasi penerima dana PEM, sebanyak 41 koperasi telah menyatakan tidak dapat mengembalikan dana bergulir tersebut karena anggota koperasi penerima telah membuat surat pernyataan bahwa tidak dapat mengembalikan dana bergulir. Berikut daftar penerima dana bergulir sesuai Keputusan SK Wali Kota Nomor 518/226/2007 tanggal 30 November 2007 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Menurut laporan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dana bergulir yang masih lancar adalah sebesar Rp124.500.000,00 yang terdapat pada KPRI Tiga Serangkai dan Kopinkra Kriya Sakti, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.64**  
**Rincian Investasi Non Permanen Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Kopinkra Kriya Sakti	50.000.000,00	50.000.000,00
2	KPRI Tiga Serangkai	74.500.000,00	74.500.000,00
	Jumlah	124.500.000,00	124.500.000,00

**5.3.1.2.2**      **Investasi Permanen**                      **Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**Rp23.846.136.984,00**                      **Rp24.384.016.280,00**

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lhokseumawe setelah Per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp23.846.136.984,00 dan Rp24.384.016.280,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.65**  
**Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	PT Bank Aceh	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00
2	PDAM Ie Beusaree Rata	0,00	2.335.263.024,00
3	PDPL	6.346.136.984,00	4.548.753.256,00
	Jumlah	23.846.136.984,00	24.384.016.280,00

**a. Bank Aceh**

Rincian penyertaan modal pada PT Bank Aceh adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.66**  
**Rincian Penyertaan Modal PT Bank Aceh**

No. Seri Saham	Saham (Lembar)	Jumlah
·Saham seri A.No.0071619853 – 0071869582	250.000	Rp2.500.000.000,00
·Saham seri A.No.0004954483– 0005004482	500.000	Rp5.000.000.000,00
·Saham seri A.No.0019359583 – 0019459582	100.000	Rp1.000.000.000,00
·Saham seri A.No.0049044583 – 0049544582	500.000	Rp5.000.000.000,00
·Saham seri A.No.0088083138 – 0088383137	300.000	Rp3.000.000.000,00
.0301/LS/PM/2022 – Tgl 25 Mei 2022	100.000	Rp1.000.000.000,00
Jumlah	1.750.000	Rp17.500.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada PT Bank Aceh Cab. Lhokseumawe per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp17.500.000.000,00 dan Rp17.500.000.000,00, pada tahun 2022 terjadi penambahan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan nomor SP2D 0301/LS/PM/2022 tanggal 25 Mei 2022. Sesuai dengan surat Bank Aceh Cab. Lhokseumawe nomor: 809/LSM.02/III/2023 tanggal 02 Maret 2023, sehubungan dengan surat tersebut sertifikat penyertaan modal belum dapat diterbitkan karena sertifikat tersebut diterbitkan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan.

Nilai investasi pada PT Bank Aceh disajikan menggunakan metode biaya. Pemerintah Kota Lhokseumawe memperoleh dividen sebesar Rp3.236.124.545,00 sesuai dengan nota kredit PT. Bank Aceh Nomor 1733/DIR/DAK.03/IV/2023 tanggal 03 April 2023 dan Nota CN No.639/LSM.02/IV/2023 tanggal 06 April 2023.

**b. PDAM Ie Beusaree Rata**

Nilai investasi pada PDAM Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe disajikan menggunakan metode ekuitas karena hak kepemilikan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar 100%. Laporan Perubahan Ekuitas PDAM Ie Beusaree Rata Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp2.335.263.024,00.

Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 PDAM Ie Beusaree Rata sudah diaudit oleh KAP. Laporan Perubahan Ekuitas pada Laporan Keuangan 2023 *audited* menyajikan nilai ekuitas PDAM Ie Beusaree Rata adalah (Rp665.015.233,00). Nilai Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Lhokseumawe pada PDAM adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.67**  
**Nilai Investasi PDAM Ie Beusaree Rata Tahun 2023**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023
1	Porsi Kepemilikan	100%
2	Metode Penyajian Nilai Investasi	<i>Equity Method</i>



No	Uraian	Per 31 Desember 2023
3	Nilai Perolehan Investasi (Penyertaan Modal dan Hibah)	32.073.207.500,00
4	Nilai Ekuitas BUMD	(665.015.233,00)
5	Nilai Penyertaan Modal Pemda	(665.015.233,00)

Nilai ekuitas PDAM Ie Beusaree Rata diperoleh dari perhitungan tambah/kurang penyertaan modal dengan memperhatikan apakah BUMD mengalami rugi/laba yang disajikan dalam **Lampiran 8**.

### c. PT. Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda)

Nilai investasi pada PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) disajikan menggunakan metode ekuitas karena hak kepemilikan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar 100%. Pada tahun 2017, PTPL Kota Lhokseumawe dipercaya oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mengelola usaha rumah sakit (PT. RS Arun Lhokseumawe) dan usaha gas (Gas Kota Lhokseumawe).

Laporan Keuangan PTPL Tahun 2023 Laporan Keuangan sudah diaudit oleh KAP. Penyajian nilai investasi Pemerintah Kota Lhokseumawe pada PTPL menurut Laporan Perubahan Ekuitas *audited* disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.68**  
**Rincian Perubahan Ekuitas PTPL Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Penyertaan Modal TA 2021	4.548.753.256,00
2	Laba 2022	1.931.876.619,00
3	Dividen 2021 di Tahun 2022	(885.084.432,00)
4	Penyesuaian Ekuitas sesuai lap	735.658.101,00
5	Dividen-Pemko Lhokseumawe	(2.841.916.754,00)
6	Penyesuaian 2022 di Tahun 2023	2.299.512.513,00
7	Laba Tahun Berjalan 2023	750.591.541,00
	Jumlah	6.539.390.844,00

Penyesuaian ekuitas pada tabel di atas (nomor 4) merupakan penyesuaian manual yang dihitung oleh staf Bidang Akuntansi agar saldo Ekuitas PTPL per 31 Desember 2022 sesuai dengan Nilai pada LPE *Audited* PT Pembangunan Lhokseumawe tahun 2022. Tidak terdapat pembagian dividen pada tahun 2023 dan nilai dividen (nomor 5) sebesar Rp2.841.916.754,00 di atas merupakan akumulasi dividen tahun 2019 s.d. 2022 yang telah diperhitungkan dalam perubahan ekuitas 2019 s.d. 2022. Selain itu, atas penyesuaian laba ditahan (nomor 6) sebesar Rp2.299.512.513,00 merupakan selisih antara laba tahun berjalan yang telah terakumulasi dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, menurut BPK dasar perhitungan nilai investasi pada PTPL tersebut tidak memadai. Nilai investasi pada PTPL per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.346.136.984,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.69**  
**Nilai Investasi PTPL Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah
1	Sisa Penyertaan Modal TA 2021	4.548.753.256,00



No	Uraian	Jumlah
2	Laba 2022	1.931.876.619,00
3	Dividen 2021 di Tahun 2022	(885.084.432,00)
4	Laba Tahun Berjalan 2023	750.591.541,00
	Jumlah	6.346.136.984,00

**5.3.1.3 Aset Tetap** **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**  
**Rp2.013.233.690.351,33** **Rp2.041.364.518.115,96**

Aset Tetap adalah aset Barang Milik Daerah (BMD) yang berupa aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah.

Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp2.013.233.690.351,33 dan Rp2.041.364.518.115,96. Rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.70**  
**Aset Tetap Pemerintah Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Tanah	775.155.473.039,24	769.004.582.939,24
2	Peralatan Mesin	335.705.052.210,58	322.182.283.002,91
3	Gedung dan Bangunan	732.100.853.803,09	701.845.960.348,09
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.230.910.841.509,73	1.211.372.189.882,73
5	Aset Tetap Lainnya	16.468.602.833,00	15.458.801.449,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.876.358.050,00	18.686.213.050,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.088.983.491.094,31)	(997.185.512.556,01)
	Jumlah	2.013.233.690.351,33	2.041.364.518.115,96

Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 kelompok jenis aset dapat dilihat pada tabel mutasi Aset Tetap per jenis kelompok aset. Penjelasan mutasi Aset Tetap sebagai berikut:

**Tabel 5.71**  
**Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023**

No	Uraian	Saldo Awal(Per 31 Desember 2022)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir (Per 31 Desember 2023)
1	Tanah	769.004.582.939,24	87.017.144.743,00	80.866.254.643,00	775.155.473.039,24
2	Peralatan Mesin	322.182.283.002,91	30.798.095.838,00	17.275.326.630,33	335.705.052.210,58
3	Gedung dan Bangunan	701.845.960.348,09	31.347.040.965,00	1.092.147.510,00	732.100.853.803,09
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.211.372.189.882,73	19.756.452.627,00	217.801.000,00	1.230.910.841.509,73
5	Aset Tetap Lainnya	15.458.801.449,00	4.593.156.800,00	3.583.355.416,00	16.468.602.833,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.686.213.050,00	227.600.000,00	7.037.455.000,00	11.876.358.050,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(997.185.512.556,01)	(121.230.412.703,22)	(29.432.434.164,92)	(1.088.983.491.094,31)
	Jumlah	2.041.364.518.115,96	52.509.078.269,78	80.639.906.034,41	2.013.233.690.351,33



**5.3.1.3.1 Tanah** **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**  
**Rp775.155.473.039,24** **Rp769.004.582.939,24**

Saldo Aset Tetap pada tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp775.155.473.039,24 dan Rp769.004.582.939,24. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah sebagai berikut:

**Tabel 5.72**  
**Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023**

Indeks	Uraian	Jumlah
A	Saldo Per 31 Desember 2022	769.004.582.939,24
B	<u>Mutasi Tambah</u>	87.017.144.743,00
	- Mutasi Antar SKPK	79.323.458.743,00
	- Koreksi Tambah	7.693.686.000,00
C	<u>Mutasi Kurang</u>	80.866.254.643,00
	- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	1.542.795.900,00
	- Mutasi Antar SKPK	79.323.458.743,00
D=A+B-C	Saldo Per 31 Desember 2023	775.155.473.039,24

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang tanah per SKPK disajikan pada **Lampiran 9**.

Berdasarkan mutasi tanah di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah Aset Tetap Tanah tahun 2023 sebesar Rp87.017.144.743,00 terdiri dari:
  - 1) Mutasi BMD antar SKPK sebesar Rp79.323.458.743,00 merupakan mutasi masuk antar SKPK pada Pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu:
    - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa tanah non persil lainnya, tanah untuk bangunan tempat kerja, tanah lapangan parkir dan tanah untuk jalan dengan BAST No.024/667/BAST/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp1.543.780.430,00;
    - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima dari Sekretariat Daerah berupa tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan, tanah untuk bangunan tempat kerja dan tanah lapangan penimbunan barang dengan BAST No.032/1880/BA/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp8.814.939.020,00;
    - c) Dinas Kesehatan menerima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa tanah bangunan puskesmas/posyandu dengan BAST No.024/666/BAST/2023 sebesar Rp437.312.633,00;
    - d) Dinas Kesehatan menerima dari Sekretariat Daerah berupa tanah untuk pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan Puskesmas Kandang, tanah lokasi pembangunan Puskesmas Kec.Banda Sakti, tanah pembangunan Puskesmas Muara Dua, tanah pembangunan Pustu Ulee Jalan, tanah pertapakan Polindes Uteun Bayi, tanah Puskesmas Kec. Blang Cut, Puskesmas Panggoi, tanah saran kantor Gp. Meunasah Mesjid Kec. Muara Dua, tanah bangunan gedung Puskesmas Mns. Mee Kandang Kec. Muara Dua dan ganti rugi tanah untuk pembangunan *Public Safety Center* (PSC) Kota



- Lhokseumawe Kec. Muara Dua dengan BAST No.032/1881/BA/2023 sebesar Rp4.910.673.700,00;
- e) Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan menerima dari Sekretariat Daerah berupa tanah untuk pilot project peternakan Gp. Jeulikat Kec. Blang Mangat, tanah bangunan pasar hewan Desa Meunasah Masjid Kec. Blang Mangat, tanah untuk pelelangan ikan Kec. Banda Sakti, tanah untuk pembangunan rumah potong hewan Kota Lhokseumawe, pembebasan tanah untuk rumah potong hewan dengan BAST No.032/1889/BA/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp6.184.847.172,00;
  - f) Dinas Lingkungan Hidup menerima dari Sekretariat Daerah berupa tanah sarana umum tempat pembuangan akhir dan *warehouse* dengan BAST No.032/1884/BA/2023 sebesar Rp1.594.683.480,00;
  - g) Dinas Perhubungan menerima dari Sekretariat Daerah berupa tanah bangunan gudang, dan tanah bangunan terminal darat dengan BAST No.032/1882/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp9.503.483.612,00;
  - h) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menerima dari Sekretariat Daerah berupa tanah bangunan pasar dan tanah bangunan gedung dengan BAST No.032/1085/BA/2023 sebesar Rp45.719.448.696,00;
  - i) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menerima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa tanah bangunan pasar dengan BAST No.032/1085/BA/2023 sebesar Rp31.362.500,00;
  - j) Sekretariat Daerah menerima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa penimbunan halaman kantor pemadam kebakaran Kota Lhokseumawe dengan BAST No.024/669/BAST/2023 sebesar Rp23.600.000,00;
  - k) Sekretariat Daerah menerima dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berupa penimbunan ditengah pasar buah Kota Lhokseumawe dengan No.032/24/BAST/2023 sebesar Rp29.800.000,00;
  - l) Sekretariat Daerah menerima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa tanah timbun Jln. Banda Aceh – Medan Desa Alue Awe dan Desa Cunda Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan No.032/022/BA/2023 sebesar Rp209.480.000,00;
  - m) Kec. Muara Dua menerima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa tanah timbun dengan BAST No.024/671/BAST/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp102.248.750,00; dan
  - n) Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah menerima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa tanah untuk bangunan ibadah lainnya atau penimbunan halaman Islamic Center dengan BAST No.024/672/BAST/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp217.798.750,00.
- 2) Koreksi tambah sebesar Rp7.693.686.000,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berupa pencatatan baru tanah pasar inpres pengalihan dari Kab. Aceh Utara No.3856/2015 sesuai SK Kaban BPKD No.2468 tanggal 12 September 2023 sertifikat bukti pengelolaan No.1 Tahun 1980.



- b. Mutasi kurang Aset Tetap Tanah 2023 sebesar Rp80.866.254.643,00 terdiri dari:
- 1) Reklasifikasi antar Aset Tetap berasal dari reklasifikasi di antara Aset Tetap sebesar Rp1.542.795.900,00 terdiri dari:
    - a) Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat, reklasifikasi ke aset tetap lainnya sebesar Rp281.292.500,00 berupa tanah non persil lain-lainnya Kec. Muara Satu, tanah lapangan sepak bola Kec. Muara Satu dan tanah timbun pasar los Kota Lhokseumawe;
    - b) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, reklasifikasi ke aset tetap lainnya sebesar Rp40.000.000,00 berupa aset tetap dalam renovasi; dan
    - c) Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan, reklasifikasi ke jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya masing-masing sebesar Rp966.723.400,00 dan Rp254.780.000,00 sesuai dengan permohonan pemindahan pencatatan aset No.800/543/2023 tanggal 16 Juni 2023.
  - 2) Mutasi BMD antar SKPK sebesar Rp79.323.458.743,00 merupakan mutasi keluar antar SKPK pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

**5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin** **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**  
**Rp335.705.052.210,58** **Rp322.182.283.002,91**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp335.705.052.210,58 dan Rp322.182.283.002,91. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

**Tabel 5.73**  
**Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023**

Indeks	Uraian	Jumlah
A	Saldo Per 31 Desember 2022	322.182.283.002,91
B	<u>Mutasi Tambah</u>	30.798.095.838,00
	- Belanja Modal TA 2023	15.627.696.279,00
	- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	204.341.000,00
	- Reklasifikasi Antar Aset Lainnya	839.331.690,00
	- Mutasi Antar SKPK	12.182.208.929,00
	- Kapitalisasi Antar Belanja	24.700.000,00
	- Hibah	1.814.817.940,00
	- Koreksi Tambah	105.000.000,00
C	<u>Mutasi Kurang</u>	17.275.326.630,33
	- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	3.217.500,00
	- Reklasifikasi Antar Aset Lainnya	3.915.004.437,33
	- Mutasi Antar SKPK	12.182.208.929,00
	- Ekstrakomptabel	332.534.900,00
	- Penghapusan	257.829.250,00
	- Koreksi Kurang	584.531.614,00
D=A+B-C	Saldo Per 31 Desember 2023	335.705.052.210,58



Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang peralatan dan mesin per SKPK disajikan pada **Lampiran 10**.

Berdasarkan mutasi peralatan dan mesin di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp30.798.095.838,00 terdiri dari:
  - 1) Pengadaan dan Belanja Modal T.A 2023 sebesar Rp15.627.696.279,00.
  - 2) Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp204.341.000,00 terdiri dari:
    - a) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, reklasifikasi antar Aset Tetap dari gedung dan bangunan sebesar Rp6.455.000,00; dan
    - b) Dinas Lingkungan Hidup, reklasifikasi antar Aset Tetap dari jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp197.886.000,00.
  - 3) Reklasifikasi dari aset lainnya sebesar Rp839.331.690,00 pada PP-BMD berupa kendaraan bermotor penumpang Toyota Avanza BL 1025 NK Tahun 2009, Toyota Rush BL 155 NF Tahun 2013, Toyota Rush BL 152 NF Tahun 2013 dan BL 115 NF atau BL 1046 NV Tahun 2012.
  - 4) Mutasi BMD antar SKPK sebesar Rp12.182.208.929,00 merupakan mutasi masuk antar SKPK pada pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu:
    - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp188.650.000,00 berupa Toyota Avanza BL 1083 NY warna silver metalik sesuai BAST No.032/483/BA/2022 tanggal 24 November 2022;
    - b) Dinas Kesehatan menerima dari Sekretariat Daerah sebesar Rp399.397.760,00 berupa Nissan X-Trail BL 122 NF Tahun 2012 warna silver metalik sesuai BAST No.032/46/2022 tanggal 24 November 2022;
    - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mutasi antar SKPK sebesar Rp441.050.721,00 yaitu terdiri:
      - (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerima dari Sekretariat Daerah sebesar Rp238.922.440,00 berupa Kijang Innova BL 1074 NV sesuai BAST No.032/42/BA/2022 tanggal 24 November 2022; dan
      - (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerima dari PP-BMD sebesar Rp202.128.281,00 berupa Toyota Avanza Veloz BL 156 NF sesuai BAST No.032/24/BA/2022 tanggal 24 November 2022.
    - d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mutasi antar SKPK sebesar Rp624.420.820,00 yaitu terdiri:
      - (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp218.747.440,00 berupa Toyota Rush BL 1097 NV Tahun 2012 warna putih sesuai BAST No. 032/91/BA/2022 tanggal 24 November 2022; dan
      - (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerima dari Sekretariat Daerah sebesar Rp405.673.380,00 berupa Toyota Fortuner BL 249 N Tahun 2013





warna hitam metalik sesuai BAST No.032/44/BA/2022 tanggal 24 November 2022.

- e) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mutasi antar SKPK sebesar Rp845.382.438,00 yaitu terdiri:
  - (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menerima dari Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat sebesar Rp480.000.000,00 berupa Dump Truck BL 8053 AG sesuai BAST No.032/158/BA/2023; dan
  - (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menerima dari Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp365.382.438,00 berupa Toyota Hilux BL 8048 N sesuai BAST No.032/82/BA/2022.
- f) Dinas Sosial menerima dari Sekretariat Daerah sebesar Rp405.673.380,00 berupa Toyota Fortuner BL 259 N Tahun 2011 warna hitam metalik sesuai BAST No.032/47/BA/2022 tanggal 24 November 2022;
- g) Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan menerima dari Dinas Sosial sebesar Rp317.500.000,00 berupa mobil Honda CRV BL 12 NN Tahun 2008 warna hitam metalik sesuai BAST No.032/73/BA/2022 tanggal 24 November 2022;
- h) Dinas Pertanahan mutasi antar SKPK sebesar Rp269.800.000,00 yaitu terdiri:
  - (1) Dinas Pertanahan menerima dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp134.900.000,00 berupa Toyota Kijang BL 26 N sesuai BAST No.032/112/BA/2022; dan
  - (2) Dinas Pertanahan menerima dari Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah sebesar Rp134.900.000,00 berupa Toyota Kijang BL 237 NB sesuai BAST No.032/112/BA/2022.
- i) Dinas Lingkungan Hidup mutasi antar SKPK Rp407.101.600,00 yaitu terdiri:
  - (1) Dinas Lingkungan Hidup menerima dari Sekretariat Daerah sebesar Rp272.201.600,00 berupa Toyota Innova BL 1045 NH warna hitam metalik sesuai BAST No.032/43/BA/2022; dan
  - (2) Dinas Lingkungan Hidup menerima dari Sekretariat MPU sebesar Rp134.900.000,00 berupa Toyota Kijang BL 153 NB warna putih sesuai BAST No.032/297/BA/2022.
- j) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menerima dari PP-BMD sebesar Rp134.900.000,00 berupa Kijang Standart BL 27 N Tahun 2003 warna merah sesuai BAST No.032/27/BA/2022;
- k) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mutasi antar SKPK sebesar Rp352.000.000,00 yaitu terdiri:
  - (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menerima dari PP-BMD sebesar Rp179.000.000,00 berupa Kijang Grand Short BL 1019 NK Tahun 2003 warna hitam metalik sesuai BAST No.032/02/BA/2022; dan



- (2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menerima dari PP-BMD sebesar Rp173.000.000,00 berupa Kijang/LGX BL 169 NB Tahun 2003 warna biru metalik sesuai BAST No.032/11/BA/2023.
- l) Sekretariat Daerah mutasi antar SKPK sebesar Rp1.905.634.838,00 yaitu terdiri:
- (1) Sekretariat Daerah menerima dari Dinas Kesehatan sebesar Rp420.468.025,00 berupa Kijang Innova BL 257 NF warna abu-abu metalik sesuai BAST No.032/52/BA/2022 tanggal 24 November 2022;
  - (2) Sekretariat Daerah menerima dari Dinas Perhubungan sebesar Rp134.056.000,00 berupa Toyota Avanza Veloz BL 1085 NK warna silver sesuai BAST No.032/01/BA/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
  - (3) Sekretariat Daerah menerima dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp405.252.500,00 berupa Toyota Innova BL 103 NM warna hitam sesuai BAST No.032/002/BA/2023 tanggal 19 Juni 2023;
  - (4) Sekretariat Daerah menerima dari PP-BMD sebesar Rp190.300.688,00 berupa Toyota Avanza BL 145 NF warna putih sesuai BAST No.032/23/BA/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
  - (5) Sekretariat Daerah menerima dari PP-BMD sebesar Rp241.192.125,00 berupa Toyota Rush BL 159 NF warna silver metalik sesuai BAST No.032/23/BA/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
  - (6) Sekretariat Daerah menerima dari PP-BMD sebesar Rp514.365.500,00 berupa Mitsubishi atau *Double Cabin* Triton BL 8020 N warna biru mika sesuai BAST No.032/23/BA/2022 tanggal 24 Oktober 2022.
- m) Sekretariat DPRK menerima dari PP-BMD sebesar Rp162.000.000,00 berupa Daihatsu BL 1049 NK sesuai BAST No.032/02/BA/2023 tanggal 01 Februari 2023;
- n) Kecamatan Blang Mangat menerima dari PP-BMD sebesar Rp218.747.440,00 berupa Toyota Rush BL 115 NF atau BL 1046 NV Tahun 2012 warna hitam metalik sesuai BAST No.032/29/BA/2022 tanggal 24 November 2022;
- o) Kecamatan Muara Satu menerima dari PP-BMD sebesar Rp241.192.125,00 berupa Toyota Rush BL 155 NF atau BL 1067 NJ Tahun 2013 warna silver metalik sesuai BAST No.032/28/BA/2022 tanggal 24 November 2022;
- p) Kecamatan Muara Dua menerima dari PP-BMD sebesar Rp241.192.125,00 berupa Toyota Rush BL 152 NF Tahun 2013 warna hitam metalik sesuai BAST No.032/31/BA/2022 tanggal 24 November 2022;
- q) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mutasi antar SKPK sebesar Rp398.183.750,00 yaitu terdiri:
- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima dari Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat sebesar Rp263.283.750,00 berupa Toyota atau Kijang Innova BL 144 NF sesuai BAST No.032/BA/2022 tanggal 24 November 2022; dan



- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima dari PP-BMD sebesar Rp134.900.000,00 berupa Toyota atau Kijang BL 14 N atau BL 239 NB sesuai BAST No.032/10/BA/2023 tanggal 08 Februari 2023.
- r) Inspektorat menerima dari PP-BMD sebesar Rp277.305.375,00 berupa Toyota Kijang Innova BL 143 NF sesuai BAST No.032/34/BA/2022;
- s) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menerima dari PP-BMD sebesar Rp405.673.380,00 berupa Toyota Fortuner BL 1043 NV warna hitam metalik sesuai BAST No.032/01/BA/2023;
- t) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mutasi antar SKPK sebesar Rp326.850.000,00 yaitu terdiri:
  - (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menerima dari PP-BMD sebesar Rp138.200.000,00 berupa Avanza BL 1025 NK Tahun 2009 warna hitam metalik sesuai BAST No.032/03/BA/2023 tanggal 15 Juni 2023; dan
  - (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menerima dari PP-BMD sebesar Rp188.650.000,00 berupa Toyota Avanza BL 1058 NV Tahun 2006 warna biru metalik sesuai BAST No.032/03/BA/2023 tanggal 15 Juni 2023.
- u) PP-BMD mutasi antar SKPK sebesar Rp2.409.720.303,00 yaitu terdiri:
  - (1) PP-BMD menerima dari Sekretariat MPU sebesar Rp134.900.000,00 berupa Kijang Super KF80 BL 13 N Tahun 2003 warna hitam biasa sesuai BAST No.032/271/BA/2022 tanggal 25 November 2022;
  - (2) PP-BMD menerima dari Sekretariat MAA sebesar Rp134.900.000,00 berupa Toyota Kijang BL 1029 NV Tahun 2013 warna hitam sesuai BAST No.032/31/BA/2022 tanggal 24 November 2022;
  - (3) PP-BMD menerima dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp500.852.000,00 berupa Mitsubishi pajero sport 2.4L DAKR-H BL 149 AD Tahun 2017 warna hitam sesuai BAST No.032/001/BA/2023 tanggal 31 Maret 2023;
  - (4) PP-BMD menerima dari Dinas Penanaman Modal, PTSPK sebesar Rp55.000.000,00 berupa Isuzu Panther BL 271 AE Tahun 1993 warna hitam BAST No.032/964/BA/2022 tanggal 01 Desember 2022;
  - (5) PP-BMD menerima dari Sekretariat Daerah sebesar Rp118.200.000,00 berupa Toyota Avanza BL 166 N atau BL 1054 NV Tahun 2006 warna silver metalik sesuai BAST No.032/3138/BA/2022 tanggal 26 Oktober 2022;
  - (6) PP-BMD menerima dari Sekretariat Daerah sebesar Rp118.200.000,00 berupa Toyota Avanza BL 167 N Tahun 2006 warna merah sesuai BAST No.032/083/BA/2022 tanggal 24 November 2022;
  - (7) PP-BMD menerima dari Sekretariat Daerah sebesar Rp188.650.000,00 berupa Toyota Avanza BL 178 N atau BL 1058 NV Tahun 2012 warna biru metalik sesuai BAST No.032/006/BA/2023 tanggal 14 Juni 2023;



- (8) PP-BMD menerima dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp14.376.923,00 berupa Honda NG11A3C A/T BL 2462 ND Tahun 2011 warna hitam sesuai BAST No.032/73/BA/2023 tanggal 24 November 2022;
  - (9) PP-BMD menerima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp179.000.000,00 berupa Kijang Grand Short BL 1019 NK Tahun 2002 warna hitam metalik sesuai BAST No.032/73/BA/2023 tanggal 24 November 2022;
  - (10) PP-BMD menerima dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp67.118.000,00 sesuai BAST No.032/677/BA/2023 tanggal 18 Juli 2023 berupa sepeda motor BL 2303 ND dan BL 2309 ND Tahun 2009 warna hitam kuning, BL 2408 ND dan BL 2409 ND Tahun 2010 warna hitam/abu-abu;
  - (11) PP-BMD menerima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp216.850.000,00 berupa Rush/Toyota BL 285 N Tahun 2012 warna hitam sesuai BAST No.032/02/BA/2023 tanggal 06 Februari 2023;
  - (12) PP-BMD menerima dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp173.000.000,00 berupa Kijang/LGX BL 169 NB Tahun 2003 warna biru metalik sesuai BAST No.027/2023 tanggal 20 Februari 2023;
  - (13) PP-BMD menerima dari Sekretariat Baitul Mal sebesar Rp405.673.380,00 berupa Toyota Fortuner BL 1043 NV Tahun 2011 warna hitam metalik sesuai BAST No.032/31A/2022 tanggal 24 November 2022; dan
  - (14) PP-BMD menerima dari Sekretariat Daerah sebesar Rp103.000.000,00 berupa Toyota Camry BL 225 N Tahun 2002 warna hitam sesuai BAST No.032/81/BA/2022.
- v) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM menerima dari PP-BMD sebesar Rp263.283.750,00 berupa Toyota Kijang Innova BL 146 NF Tahun 2013 warna hitam metalik sesuai BAST No.032/35/BA/2022;
- w) Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah menerima dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berupa Toyota Avanza BL 103 NF sesuai BAST No.032/32/BA/2022 sebesar Rp161.349.562,00 dan mobil Jeep atau Suzuki SE 416 Escudo BL 1076 sesuai BAST No.032/04/BA/2023 sebesar Rp167.000.000,00;
- x) Sekretariat MPU menerima dari Kecamatan Muara Satu sebesar Rp150.000.000,00 berupa Toyota Avanza BL 243 N warna silver metalik sesuai BAST No.032/45/BA/2022 tanggal 24 November 2022;
- y) Sekretariat Baitul Mal mutasi antar SKPK sebesar Rp306.850.000,00 yaitu terdiri:
- (1) Sekretariat Baitul Mal menerima dari Kecamatan Blang Mangat sebesar Rp188.650.000,00 berupa Toyota New Avanza BL 1072 NV warna silver metalik sesuai BAST No.032/020/BA/2022 tanggal 24 November 2022; dan



- (2) Sekretariat Baitul Mal menerima dari PP-BMD sebesar Rp118.200.000,00 berupa Toyota Avanza BL 167 N warna Kuning metalik sesuai BAST No.032/06/BA/2023.
- z) Sekretariat Baitul Mal menerima dari Kecamatan Muara Dua sebesar Rp161.349.562,00 berupa minibus BL 1098 NV sesuai BAST No.032/410/BA/2022.
- 5) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp24.700.000,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berupa belanja bahan-bahan baku.
- 6) Hibah sebesar Rp1.814.817.940,00 sesuai BAST terdiri dari:
  - a) Dinas Kesehatan, hibah dari Kementerian Kesehatan RI sesuai BAST No: KN.01.08/D.III/3655/2023 tanggal 07 November 2023 berupa alat kedokteran umum lainnya sebesar Rp541.188.558,00;
  - b) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, hibah sesuai BAST No: 028/07/BA/PB/2023 berupa sepeda motor Trail D-Tracker 150cc, Tipe LX 150H No.Polisi B 3859 PJQ No. Rangka MH4LX150HPJPB0977, No. Mesin LX150CEWX9961 ditambah sirene motor/Lampu sirene/Lampu strobo/Tiang/Bracket sebesar Rp45.234.525,00;
  - c) Dinas Perhubungan, hibah dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh sesuai BAST No: 11/BA/2023 dan 032/02/BAST/2023 berupa traffic light sebesar Rp1.113.308.637,00;
  - d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah hibah dari APBN berupa pompa portable kebakaran sesuai BAST No: 300.1.7/8155/BAK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp105.000.000,00 dan berupa mobil pemadam kebakaran dan mobil ambulans pemadam kebakaran sesuai BAST No: 00.3.3.2/1716/BAK dan Nomor 450.51/3785 tanggal 21 Desember 2023 sebesar Rp4.186.220,00; dan
  - e) Sekretariat Baitul Mal, hibah berupa laptop Asus / A416JAO-VIPS326 sebesar Rp5.900.000,00.
- 7) Koreksi tambah pada peralatan dan mesin sebesar Rp105.000.000,00 berupa Toyota Kijang Standar KF 80 No. Polisi BL 1008 NK Tahun 2004 warna biru metalik sesuai dengan Surat Permohonan Pencatatan No. 032/147 tgl 09 Januari 2023 pada Sekretariat MPD.
- b. Mutasi kurang Aset Tetap berupa peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp17.275.326.630,33 terdiri dari:
  - 1) Reklasifikasi antar Aset Tetap berasal dari reklasifikasi di antara Aset Tetap sebesar Rp3.217.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa reklasifikasi ke aset tetap lainnya.
  - 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke aset lainnya pada aset lain-lain berupa barang dalam kondisi rusak sebesar Rp3.915.004.437,33 terdiri dari:
    - a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp202.617.000,00;



- b) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana sebesar Rp29.797.000,00;
  - c) Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan sebesar Rp45.298.033,33;
  - d) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.181.077.325,00;
  - e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp321.340.000,00;
  - f) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sebesar Rp214.803.000,00;
  - g) Sekretariat Daerah sebesar Rp504.319.788,00;
  - h) Inspektorat sebesar Rp119.342.893,00;
  - i) Dinas Syariah Islam dan Pengembangan Dayah sebesar Rp119.364.000,00;
  - j) Sekretariat Baitul Mal sebesar Rp153.723.398,00;
  - k) Sekretariat Majelis Adat Aceh sebesar Rp5.634.000,00; dan
  - l) Sekretariat MPD sebesar Rp17.688.000,00.
- 3) Mutasi BMD antar SKPK sebesar Rp12.182.208.929,00 merupakan mutasi keluar antar SKPK pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- 4) Barang Ekstrakomptabel sebesar Rp332.534.900,00 terdiri dari:
- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp241.822.000,00;
  - b) Dinas Kesehatan sebesar Rp34.431.000,00;
  - c) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp437.400,00;
  - d) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Sebesar Rp510.000,00;
  - e) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp10.421.000,00;
  - f) Sekretariat Daerah sebesar Rp43.644.400,00;
  - g) Sekretariat DPRK sebesar Rp224.400,00;
  - h) Kecamatan Banda Sakti sebesar Rp177.500,00;
  - i) Kecamatan Muara Dua sebesar Rp278.100,00;
  - j) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp222.000,00; dan
  - k) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Dayah sebesar Rp367.100,00.
- 5) Penghapusan aset daerah sebesar Rp257.829.250,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 6) Koreksi kurang akibat *double* catat pada peralatan dan mesin sebesar Rp584.531.614,00 dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

<b>5.3.1.3.3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b><u>Per 31 Desember 2023</u></b>	<b><u>Per 31 Desember 2022</u></b>
		<b>Rp732.100.853.803,09</b>	<b>Rp701.845.960.348,09</b>

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp732.100.853.803,09 dan Rp701.845.960.348,09. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut:



**Tabel 5.74**  
**Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023**

Indeks	Uraian	Jumlah
A	Saldo Per 31 Desember 2022	701.845.960.348,09
B	<u>Mutasi Tambah</u>	31.347.040.965,00
	- Belanja Modal TA 2023	21.923.145.455,00
	- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	7.057.370.000,00
	- Mutasi Antar SKPK	1.045.997.310,00
	- Kapitalisasi Antar Belanja	1.305.728.200,00
	- Koreksi Tambah	14.800.000,00
C	<u>Mutasi Kurang</u>	1.092.147.510,00
	- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	6.455.000,00
	- Mutasi Antar SKPK	1.045.997.310,00
	- Ekstrakomptabel	39.695.200,00
D=A+B-C	Saldo Per 31 Desember 2023	732.100.853.803,09

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang gedung dan bangunan per SKPK disajikan pada **Lampiran 12**.

Berdasarkan mutasi gedung dan bangunan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp31.347.040.965,00 terdiri dari:
  - 1) Pengadaan Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp21.923.145.455,00.
  - 2) Reklasifikasi antar Aset Tetap berasal dari reklasifikasi diantara Aset Tetap sebesar Rp7.057.370.000,00 terdiri dari:
    - a) Reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp6.809.855.000,00 berupa Gedung Pertokoan /Koperasi / Pasar Permanen /KDP Pasar Rakyat Pusong. No surat kapitalisasi BMD: 000.2.5/41.7/2023;
    - b) Reklasifikasi dari jalan,irigasi dan jaringan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp19.915.000,00 berupa pemasangan kanopi; dan
    - c) Reklasifikasi dari kontruksi dalam pengerjaan pada Dinas Kesehatan Rp227.600.000,00 berupa ekstrakomptabel yang dikapitalisasikan yaitu gedung kantor, bangunan kesehatan dan pagar.
  - 3) Mutasi BMD antar SKPK sebesar Rp1.045.997.310,00 merupakan mutasi masuk antar SKPK pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe yaitu:
    - a) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah menerima dari PP-BMD sebesar Rp522.998.655,00 berupa Bangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tahun 2020 BAST NO:032/08/2023 tanggal 24 November 2023; dan
    - b) PP-BMD menerima dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB sebesar Rp522.998.655,00 berupa Bangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu



Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tahun 2020 BAST NO:032/03/2023 tanggal 21 November 2023.

- 4) Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.305.728.200,00 terdiri dari:
  - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kapitalisasi antar belanja jasa konsultansi sebesar Rp14.900.000,00;
  - b) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kapitalisasi antar belanja jasa konsultansi sebesar Rp44.897.000,00; dan
  - c) Dinas Perhubungan kapitalisasi antar belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya sebesar Rp1.245.931.200,00 berupa koreksi pengakuan aset atas kesalahan penganggaran barang dan jasa.
- 5) Koreksi tambah sebesar Rp14.800.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB.
- b. Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp1.092.147.510,00 terdiri dari:
  - 1) Reklasifikasi antar Aset Tetap berasal dari reklasifikasi ke peralatan dan mesin sebesar Rp6.455.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  - 2) Mutasi BMD antar SKPK sebesar Rp1.045.997.310,00 merupakan mutasi keluar antar SKPK pada pemerintah Kota Lhokseumawe.
  - 3) Ekstrakomptabel sebesar Rp39.695.200,00 terdiri dari:
    - a) Dinas Lingkungan Hidup barang ekstrakomptabel sebesar Rp19.780.200,00; dan
    - b) Sekretariat Daerah barang ekstrakomptabel sebesar Rp19.915.000,00.

**5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**      **Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**Rp1.230.910.841.509,73**      **Rp1.211.372.189.882,73**

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp1.230.910.841.509,73 dan Rp1.211.372.189.882,73. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

**Tabel 5.75**  
**Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023**

Indeks	Uraian	Jumlah
A	Saldo Per 31 Desember 2022	1.211.372.189.882,73
B	<u>Mutasi Tambah</u>	19.756.452.627,00
	- Belanja Modal TA 2023	18.771.759.227,00
	- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	966.723.400,00
	- Kapitalisasi Antar Belanja	17.970.000,00
C	<u>Mutasi Kurang</u>	217.801.000,00
	- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	217.801.000,00
D=A+B-C	Saldo Per 31 Desember 2023	1.230.910.841.509,73





Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang jalan, irigasi dan jaringan per SKPK disajikan pada **Lampiran 13**.

Berdasarkan mutasi jalan, irigasi dan jaringan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp19.756.452.627,00 terdiri dari:
  - 1) Pengadaan Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp18.771.759.227,00.
  - 2) Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp966.723.400,00 yaitu reklasifikasi dari tanah pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan sesuai dengan Surat Permohonan Pemindahan Pencatatan Aset dari KIB A ke KIB D dan KIB E No. 800/543/2023 tanggal 16 Juni 2023.
  - 3) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp17.970.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa jasa konsultasi.
- b. Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp217.801.000,00 berupa reklasifikasi antar aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup reklasifikasi ke peralatan mesin sebesar Rp197.886.000,00 dan Sekretariat Daerah reklasifikasi ke gedung bangunan sebesar Rp19.915.000,00.

<b>5.3.1.3.5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b><u>Per 31 Desember 2023</u></b>	<b><u>Per 31 Desember 2022</u></b>
		<b>Rp16.468.602.833,00</b>	<b>Rp15.458.801.449,00</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp16.468.602.833,00 dan Rp15.458.801.449,00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

**Tabel 5.76**  
**Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023**

Indeks	Uraian	Jumlah
A	Saldo Per 31 Desember 2022	15.458.801.449,00
B	<u>Mutasi Tambah</u>	4.593.156.800,00
	- Belanja Modal TA 2023	4.013.866.800,00
	- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	579.290.000,00
C	<u>Mutasi Kurang</u>	3.583.355.416,00
	- Ekstrakomptabel	3.582.125.416,00
	- Penghapusan	1.230.000,00
D=A+B-C	Saldo Per 31 Desember 2023	16.468.602.833,00

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya per SKPK disajikan pada **Lampiran 14**.

Berdasarkan mutasi Aset Tetap Lainnya di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp4.593.156.800,00 yang terdiri dari:
  - 1) Pengadaan dari Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp4.013.866.800,00.



- 2) Reklasifikasi antar Aset Tetap berasal dari reklasifikasi diantara Aset Tetap sebesar Rp579.290.000,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi dari peralatan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.217.500,00;
  - Reklasifikasi dari tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp281.292.500,00;
  - Reklasifikasi dari tanah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah sebesar Rp40.000.000,00; dan
  - Reklasifikasi dari tanah pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan sebesar Rp254.780.000,00 sesuai dengan Surat Permohonan Pemindahan Pencatatan Aset dari KIB A ke KIB D dan KIB E No. 800/543/2023 tanggal 16 Juni 2023.
- b. Mutasi kurang Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp3.583.355.416,00 terdiri dari:
- Barang *ekstrakomptabel* sebesar Rp3.582.125.416,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - Penghapusan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.230.000,00.

**5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**      **Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**Rp11.876.358.050,00**      **Rp18.686.213.050,00**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp11.876.358.050,00 dan Rp18.686.213.050,00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

**Tabel 5.77**  
**Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam**  
**Pengerjaan Tahun 2023**

Indeks	Uraian	Jumlah
A	Saldo Per 31 Desember 2022	18.686.213.050,00
B	<u>Mutasi Tambah</u>	227.600.000,00
	- Koreksi Tambah	227.600.000,00
C	<u>Mutasi Kurang</u>	7.037.455.000,00
	- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	7.037.455.000,00
D=A+B-C	Saldo Per 31 Desember 2023	11.876.358.050,00

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang KDP per SKPK disajikan pada **Lampiran 15**.

Berdasarkan mutasi konstruksi dalam pengerjaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi koreksi tambah dari ekstrakomptabel ke intra sebesar Rp227.600.000,00.
- Mutasi kurang Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan tahun 2023 sebesar Rp7.037.455.000,00 terdiri dari:
  - Reklasifikasi antar aset tetap ke gedung bangunan sebesar Rp6.809.855.000,00 berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rakyat Pusong. No surat kapitalisasi



BMD: 000.2.5/41.7/2023 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; dan

- 2) Reklasifikasi antar aset tetap ke gedung bangunan sebesar Rp227.600.000,00 berupa gedung kantor, bangunan kesehatan dan pagar.

**5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan** Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022  
**(Rp1.088.983.491.094,31) (Rp997.185.512.556,01)**

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal Neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu Aset Tetap selain tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar (Rp1.088.983.491.094,31) dan (Rp997.185.512.556,01). Rincian mutasi akumulasi penyusutan sebagai berikut:

**Tabel 5.78**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi		Per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Peralatan Mesin	(240.514.103.988,01)	(27.039.788.041,54)	(28.717.891.439,92)	(238.836.000.589,63)
2	Gedung dan Bangunan	(111.363.419.393,00)	(14.386.212.795,84)	(713.069.788,00)	(125.036.562.400,84)
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(645.307.989.175,00)	(79.804.411.865,84)	(1.472.937,00)	(725.110.928.103,84)
	Jumlah	(997.185.512.556,01)	(121.230.412.703,22)	(29.432.434.164,92)	(1.088.983.491.094,31)

Selisih saldo akumulasi penyusutan Per 31 Desember 2023 dengan 2022 tersebut disebabkan adanya:

- a. Mutasi tambah disebabkan oleh koreksi atas saldo Aset Tetap diantaranya penambahan BMD dari Belanja Modal, Kapitalisasi Aset Tetap, hibah, kapitalisasi antar belanja barang dan jasa, dan koreksi tambah atas pencatatan nilai aset tetap.
- b. Mutasi kurang disebabkan oleh reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi aset lainnya, Reklasifikasi dari Aset Tetap ke persediaan dan koreksi kurang Aset Tetap atas penghapusan.

Rincian akumulasi penyusutan per SKPK dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

**5.3.1.4 Aset Lainnya** Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022  
**Rp44.080.334.586,00 Rp42.287.194.562,00**

Aset lainnya adalah aset non lancar pemerintah yang tidak bisa diklasifikasikan ke dalam kelompok piutang jangka panjang, investasi jangka panjang, maupun aset tetap.

Aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp44.080.334.586,00 dan Rp42.287.194.562,00 terdiri dari:



**Tabel 5.79**  
**Rincian Mutasi Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	2.788.757.383,00	(2.788.757.383,00)	(100,00)
2	Aset Tidak Berwujud	4.161.072.491,00	4.161.072.491,00	0,00	0,00
3	Aset Lain-lain	37.594.726.995,00	37.462.517.588,00	132.209.407,00	0,35
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.225.079.900,00)	(2.125.152.900,00)	(99.927.000,00)	4,70
5	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	4.549.615.000,00	0,00	4.549.615.000,00	0,00
	Jumlah	44.080.334.586,00	42.287.194.562,00	1.793.140.024,00	4,24

**5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang** Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022  
**Rp0,00** **Rp2.788.757.383,00**

Tagihan jangka panjang berupa tuntutan ganti kerugian daerah adalah suatu proses tuntutan dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. Tagihan jangka panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.788.757.383,00.

Pendapatan Pokok TDF - DBH/DAU sebesar Rp2.788.757.383,00 berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-46/PK/PK.2/2023 tentang Rincian Penyaluran DBH Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Lhokseumawe pada tanggal 14 April 2023 sebesar Rp1.382.873.000,00, tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.382.872.859,00 dan tanggal 11 April 2023 sebesar Rp23.011.524,00.

**5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud** Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022  
**Rp4.161.072.491,00** **Rp4.161.072.491,00**

Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik yang dinilai sebesar pengeluaran sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp4.161.072.491,00 dan Rp4.161.072.491,00, tidak mengalami peningkatan dan penurunan. Rincian mutasi aset tidak berwujud sebagai berikut:

**Tabel 5.80**  
**Rincian Aset Tidak Berwujud**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Aset tidak berwujud – <i>Software</i>	2.363.100.991,00	2.363.100.991,00	0,00	0,00
2	Aset tidak berwujud – <i>Kajian</i>	1.797.971.500,00	1.797.971.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.161.072.491,00	4.161.072.491,00	0,00	0,00



**5.3.1.4.2.1 Aset Tidak Berwujud – Software** **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**  
**Rp2.363.100.991,00** **Rp2.363.100.991,00**

Saldo aset tidak berwujud - *software* per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp2.363.100.991,00 dan Rp2.363.100.991,00. Rincian mutasi aset tidak berwujud sebagai berikut:

**Tabel 5.81**  
**Rincian Aset Tidak Berwujud - Software Tahun 2023**

Indeks	Uraian	Jumlah
A	Saldo Per 31 Desember 2022	2.363.100.991,00
B	<u>Mutasi Tambah</u>	0,00
	- dst	0,00
C	<u>Mutasi Kurang</u>	0,00
	- dst	0,00
D=A+B-C	Saldo Per 31 Desember 2023	2.363.100.991,00

Berdasarkan mutasi aset tidak berwujud – *software* di atas tidak adanya mutasi tambah dan kurang atas aset tidak berwujud – *software*.

**Tabel 5.82**  
**Rincian Perhitungan Aset Tidak Berwujud Per SKPK – Software Tahun 2023**

No	SKPK	Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2023
			Reklas Antar Aset Tetap	Hibah	Koreksi	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	332.757.000,00	0,00	0,00	0,00	332.757.000,00
2	Dinas Penanaman Modal, PTSPK	65.726.300,00	0,00	0,00	0,00	65.726.300,00
3	Dinas Perhubungan	72.600.000,00	0,00	0,00	0,00	72.600.000,00
4	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.940.200,00	0,00	0,00	0,00	14.940.200,00
6	Sekretariat DPRK	48.285.000,00	0,00	0,00	0,00	48.285.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	197.835.000,00	0,00	0,00	0,00	197.835.000,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.533.377.491,00	0,00	0,00	0,00	1.533.377.491,00
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Alam	49.580.000,00	0,00	0,00	0,00	49.580.000,00
	Jumlah	2.363.100.991,00	0,00	0,00	0,00	2.363.100.991,00



**5.3.1.4.2.2 Aset Tidak Berwujud - Kajian** **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**  
**Rp1.797.971.500,00** **Rp1.797.971.500,00**

Saldo aset tidak berwujud – kajian per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp1.797.971.500,00 dan Rp1.797.971.500,00. Rincian mutasi aset tidak berwujud sebagai berikut:

**Tabel 5.83**  
**Rincian Aset Tidak Berwujud – Kajian Tahun 2023**

Indeks	Uraian	Jumlah
A	Saldo Per 31 Desember 2022	1.797.971.500,00
B	<u>Mutasi Tambah</u>	0,00
	- dst	0,00
C	<u>Mutasi Kurang</u>	0,00
	- dst	0,00
D=A+B-C	Saldo Per 31 Desember 2023	1.797.971.500,00

Berdasarkan mutasi aset tidak berwujud – kajian di atas tidak adanya mutasi tambah dan kurang atas aset tidak berwujud-kajian.

**Tabel 5.84**  
**Rincian Mutasi Aset Kajian Tahun 2023**

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2023
			Kapitalisasi Antar Belanja	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Reklas Antar Aset Tidak Berwujud	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.499.000,00	0,00	0,00	0,00	4.499.000,00
2	Dinas PUPR	99.920.000,00	0,00	0,00	0,00	99.920.000,00
3	Dinas Sosial	44.930.000,00	0,00	0,00	0,00	44.930.000,00
4	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	692.672.100,00	0,00	0,00	0,00	692.672.100,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	98.590.000,00	0,00	0,00	0,00	98.590.000,00
6	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	404.005.000,00	0,00	0,00	0,00	404.005.000,00
8	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	69.800.000,00	0,00	0,00	0,00	69.800.000,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	238.555.400,00	0,00	0,00	0,00	238.555.400,00
10	Sekretariat Daerah	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00
	Jumlah	1.797.971.500,00	0,00	0,00	0,00	1.797.971.500,00

**5.3.1.4.3 Aset Lain-Lain** **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**  
**Rp37.594.726.995,00** **Rp37.462.517.588,00**

Aset lain-lain adalah Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan Aset Tetap Lainnya yang tidak



dicatat dalam Neraca karena kondisi barang tersebut sudah rusak berat, tidak ditemukan keberadaannya dan barang pinjam pakai.

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp37.594.726.995,00 dan Rp37.462.517.588,00. Rincian mutasi aset lain-lain sebagai berikut:

**Tabel 5.85**  
**Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2023**

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Mutasi		Per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Aset Rusak Berat/Usang Aset Tetap yang Tidak	36.934.397.588,00	3.869.706.404,00	3.737.496.997,00	37.066.606.995,00
2	Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	528.120.000,00	0,00	0,00	528.120.000,00
	Jumlah	37.462.517.588,00	3.869.706.404,00	3.737.496.997,00	37.594.726.995,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan mutasi tambah dan kurang sebagai berikut:

- Mutasi tambah aset lain-lain sebesar Rp3.869.706.404,00 berupa Reklasifikasi dari aset tetap dari Peralatan Mesin ke aset lain-lain.
- Mutasi kurang aset lain-lain sebesar Rp3.737.496.997,00 berupa penghapusan sesuai Keputusan Walikota No.290 Tahun 2023 sebesar Rp2.457.617.867,00, reklasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp839.331.690,00 dan koreksi kurang *double* catat pada aset lain-lain yang dimanfaatkan kembali sebesar Rp440.547.440,00.

Rincian mutasi tambah dan kurang per SKPK dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

Dalam saldo Aset Lain-lain sebesar Rp37.594.726.995,00 terdapat barang yang telah dihibahkan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan serta Dinas Syariat Islam namun masih tercatat di Aset Lain-lain, sebagai berikut:

**Tabel 5.86**  
**Aset yang Dihilangkan Masih Tercatat di BMD Tahun 2023**

No	SKPK	Nilai	Nilai yang dihapus	Sisa yang Belum Dihilangkan	Keterangan
1	DKPP	1.545.720.800,00	0,00	1.545.720.800,00	Masih dicatat pada Aset Lainnya
2	Dinas Sosial	861.415.000,00	357.065.000,00	504.350.000,00	
3	Dinas Syariat Islam	1.530.388.000,00	0,00	1.530.388.000,00	Masih tercatat di Aset Lainnya belum dilakukan penghapusan
4	Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi	246.500.000,00	246.500.000,00	0,00	
	Jumlah	4.184.023.800,00	603.565.000,00	3.580.458.800,00	

Selain itu, dalam saldo Aset Lain-lain tersebut, terdapat barang Pemerintah Kota yang dipinjam pakai namun masih tercatat di Aset Lain-lain, sebagai berikut:



**Tabel 5.87**  
**Aset Pemerintah Kota yang Dipinjam Pakaikan Masih Tercatat di BMD Tahun 2023**

NO	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Tahun Pinjam Pakai	Nama Peminjam	Keterangan
1	Bangunan Gedung	990	2020	5.185.100.000	21 Maret 2022 s.d 21 Maret 2027	Kantor Palang Merah Indonesia (PMI)	Gedung Unit Transfusi Darah
2	Gedung Pasar Kuliner KP3 Kota Lhokseumawe	450	-	0,00	20 Juni 2022 s.d 20 Juni 2027	Kantor Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan (SAR)	Gedung Pasar Kuliner KP3
3	Tanah	24.589	2021	8.606.150.000	30 Juni 2022 s.d 30 Juni 2024	Yayasan As-Saudiyyah Al Waliyyah Al Khalidiyyah	Tanah BLK Kandang
4	Bangunan Gedung		2021	904.000.000	30 Juni 2022 s.d 30 Juni 2024	Yayasan As-Saudiyyah Al Waliyyah Al Khalidiyyah	Gedung BLK Kandang
5	Bangunan / Gedung Kantor Permanen	294	2019	1.959.861.000	20 Oktober 2023 s.d 20 Oktober 2025	Kantor Pramuka	Gedung PSC Kandang
6	Bangunan / Gedung	3.780	2017	1.425.697.800	15 Desember 2023 s.d 20 Juni 2025	Kantor Bawaslu	Gedung Media Center
7	Bangunan / Gedung	56	2017	37.835.820	15 Desember 2023 s.d 20 Juni 2025	Kantor Bawaslu	Kanopy dan Parkiran Gedung Media Center
8	Pagar Permanen	120	2019	777.219.000	15 Desember 2023 s.d 20 Juni 2025	Kantor Bawaslu	Pagar Gedung Media Center
	Jumlah			18.895.863.620			

#### 5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi

**Per 31 Desember 2023**  
**(Rp2.225.079.900,00)**

**Per 31 Desember 2022**  
**(Rp2.125.152.900,00)**

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud adalah penurunan nilai atau penyusutan dari sebuah aset tak berwujud yang mempunyai umur ekonomi lebih dari satu tahun. Saldo akumulasi amortisasi aset tidak berwujud Per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar (Rp2.225.079.900,00) dan (Rp2.125.152.900,00), mengalami peningkatan sebesar (Rp99.927.000,00) atau 4,70%. Rincian mutasi Akumulasi Amortisasi sebagai berikut:

**Tabel 5.88**  
**Rincian Akumulasi Amortisasi Tahun 2023**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Akumulasi Amortisasi ATB- <i>Software</i>	(2.225.079.900,00)	(2.125.152.900,00)	(99.927.000,00)	4,70
	Jumlah	(2.225.079.900,00)	(2.125.152.900,00)	(99.927.000,00)	4,70

Mutasi akumulasi amortisasi aset tidak berwujud disebabkan pertambahan beban penyusutan untuk tahun 2023 sebesar Rp99.927.000,00. Rincian mutasi akumulasi amortisasi aset tidak berwujud – *software* sebagai berikut:





**Tabel 5.89**  
**Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi ATB - Software Tahun 2023**

No	SKPK	Per 31 Desember 2022	Penyesuaian		Per 31 Desember 2023
			Penyusutan 2023	Koreksi	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(324.323.667,00)	0,00	0,00	(324.323.667,00)
2	Dinas Penanaman Modal, PTSPTK	(61.715.699,00)	(3.005.760,00)	0,00	(64.721.459,00)
3	Dinas Perhubungan	(24.200.000,00)	(14.520.000,00)	0,00	(38.720.000,00)
4	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	(4.200.000,00)	(3.600.000,00)	0,00	(7.800.000,00)
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(3.237.043,00)	(2.988.040,00)	0,00	(6.225.083,00)
6	Sekretariat DPRK	(48.285.000,00)	0,00	0,00	(48.285.000,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(13.500.000,00)	(6.000.000,00)	0,00	(19.500.000,00)
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(197.835.000,00)	0,00	0,00	(197.835.000,00)
9	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	(1.398.276.491,00)	(69.813.200,00)	0,00	(1.468.089.691,00)
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Alam	(49.580.000,00)	0,00	0,00	(49.580.000,00)
	Jumlah	(2.125.152.900,00)	(99.927.000,00)	0,00	(2.225.079.900,00)

**5.3.1.4.5 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022  
Rp4.549.615.000,00 Rp0,00**

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp4.549.615.000,00 dan Rp0,00. Sedangkan tahun 2023 terdapat Pendapatan TDF - DBH sebesar Rp4.549.615.000,00 berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-54/PK/PK.2/2024 tentang Penyaluran Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan Belanja Daerah TA 2024 tanggal 26 Maret 2024.

Rincian Dana Transfer TDF – DBH tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a.	DBH PPh Pasal 21	Rp1.735.741.000,00
b.	DBH PPh Pasal 25/29 OP	Rp5.086.000,00
c.	DBH PBB Migas Bagian Daerah	Rp458.049.000,00
d.	DBH PBB Panas Bumi Bagian Daerah	Rp76.000,00
e.	DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah	Rp27.452.000,00
f.	DBH PBB Kehutanan Bagian Daerah	Rp1.283.000,00
g.	DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah	Rp5.372.000,00
h.	DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah	Rp12.713.000,00



i.	DBH SDA Minyak Bumi 15%	Rp22.029.000,00
j.	DBH SDA Minerba - Royalti	Rp895.398.000,00
k.	DBH SDA Minerba - Royalti	Rp1.382.729.000,00
l.	DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	Rp3.380.000,00
m.	DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	Rp307.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp4.549.615.000,00</b>

**5.3.2 Kewajiban** Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022  
**Rp47.452.945.372,29** **Rp40.176.422.871,58**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp47.452.945.372,29 dan Rp40.176.422.871,58 mengalami peningkatan sebesar Rp7.276.522.500,71 atau 18,11%. Saldo kewajiban tersebut merupakan kewajiban jangka pendek.

**5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek** Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022  
**Rp47.542.945.372,29** **Rp40.176.422.871,58**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp47.542.945.372,29 dan Rp40.176.422.871,58 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.90**  
**Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.210.967,00	4.597.180,00	(386.213,00)	(8,40)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	994.895.840,06	365.104.768,82	629.791.071,24	172,50
3	Utang Belanja	31.526.194.189,23	39.806.720.922,76	(8.280.526.733,53)	(20,80)
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.927.644.376,00	0,00	14.927.644.376,00	0,00
	Jumlah	47.452.945.372,29	40.176.422.871,58	7.276.522.500,71	18,11

**5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022  
**Rp4.210.967,00** **Rp4.597.180,00**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.210.967,00 dan Rp4.597.180,00.

Utang PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.210.967,00 merupakan utang PFK PPN sekolah sebesar Rp1.723.717,00, utang PFK PPh 21 sebesar Rp1.400.000,00, utang PFK PPh 23 sebesar Rp1.007.250,00 dan utang pajak daerah atau pajak makan minum sekolah sebesar Rp80.000,00 yang belum disetor ke kas Pemerintah Pusat dan Rekening Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023.



**5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022**  
**Rp994.895.840,06 Rp365.104.768,82**

Pendapatan diterima dimuka Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp994.895.840,06 dan Rp365.104.768,82. Rincian pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.91**  
**Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1	Pajak (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)	926.245.840,06	271.854.768,82	654.391.071,24	240,71
2	Lain-Lain PAD yang Sah (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)	56.250.000,00	81.250.000,00	(25.000.000,00)	(30,77)
3	Retribusi (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM)	12.400.000,00	12.000.000,00	400.000,00	3,33
	Jumlah	994.895.840,06	365.104.768,82	629.791.071,24	172,50

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka yaitu:

- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari pendapatan diterima dimuka pajak reklame sebesar Rp240.540.435,06, pajak PBB sebesar Rp685.705.405,00 dan lain-lain PAD sebesar Rp56.250.000,00; dan
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri dari pendapatan diterima dimuka los/kios sebesar Rp12.400.000,00.

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame, pajak PBB, Retribusi los dan lain-lain PAD yang sah (galeri ATM). Penerimaan ini timbul karena pembayaran atas pajak, retribusi dan lain-lain PAD yang melebihi dari periode akuntansi. Rincian pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 18**.

**5.3.2.1.3 Utang Belanja Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022**  
**Rp31.526.194.189,23 Rp39.806.720.922,76**

Utang belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp31.526.194.189,23 dan Rp39.806.720.922,76, terjadi penurunan utang belanja sebesar Rp8.280.526.733,53 atau 20,80%.

Mutasi tambah utang terdiri dari:

- Utang SKPK berupa belanja pegawai sebesar Rp2.537.586.979,00 yaitu iuran jaminan kesehatan dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
- Utang SKPK berupa belanja barang dan jasa sebesar Rp6.454.204.535,00 yaitu telepon, air, listrik, internet dan pemeliharaan gedung bangunan;
- Utang SKPK berupa belanja hibah sebesar Rp423.443.980,00 yaitu hibah barang kepada BUMD; dan
- Utang SKPK berupa belanja tidak terduga sebesar Rp359.201.000,00.



Mutasi Kurang terdiri dari:

- Pembayaran utang SKPK berupa iuran jaminan kesehatan TA 2020-2021 sebesar Rp2.889.801.712,00;
- Pembayaran utang SKPK berupa utang listrik, air, telepon/internet TA 2022 sebesar Rp4.256.092.845,00;
- Pembayaran utang SKPK berupa iuran jaminan kesehatan bagi non ASN sebesar Rp81.269.939,00;
- Pembayaran utang untuk kompensasi Aceh Utara sebesar Rp9.929.671.415,00; dan
- Koreksi atau penghapusan utang tahun 2023 sebesar Rp898.190.316,53.

Rincian saldo utang beban per 31 Desember 2023 dan 2022 per belanja dan per SKPK disajikan pada **Lampiran 19**. Rincian utang belanja sebagai berikut:

**Tabel 5.92**  
**Rincian Utang Belanja Tahun 2023**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.993.594,00	8.128.467,00	(134.873,00)	(1,66)
2	Dinas Kesehatan	69.574.547,00	40.150.563,00	29.423.984,00	73,28
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	437.654.407,00	14.563.673,00	423.090.734,00	2.905,11
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.528.845,00	4.450.009,00	(921.164,00)	(20,70)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	10.987.940,00	10.248.284,00	739.656,00	7,22
6	Dinas Sosial	90.745.459,00	92.183.553,00	(1.438.094,00)	(1,56)
	Dinas Penanaman Modal.				
7	Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	6.387.149,00	6.777.845,00	(390.696,00)	(5,76)
	Dinas Pemberdayaan Perempuan.				
8	Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.596.625,00	5.031.396,00	(434.771,00)	(8,64)
	Dinas Kelautan. Perikanan.				
9	Pertanian dan Pangan	7.450.658,00	7.584.466,00	(133.808,00)	(1,76)
10	Dinas Pertanahan	0,00	804.750,00	(804.750,00)	(100,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	6.116.282.240,00	4.066.647.783,00	2.049.634.457,00	50,40
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.916.391,00	8.543.112,00	373.279,00	4,37
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong				
13		3.684.182,00	6.013.789,00	(2.329.607,00)	(38,74)
14	Dinas Perhubungan	6.407.658,00	5.479.050,00	928.608,00	16,95
	Dinas Komunikasi. Informatika dan Persandian				
15		4.751.886,00	3.992.853,53	759.032,47	19,01
16	Dinas Perindustrian. Perdagangan.	9.802.373,00	14.775.019,00	(4.972.646,00)	(33,66)



No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
	Koperasi dan UKM				
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	2.480.000,00	4.043.258,00	(1.563.258,00)	(38,66)
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40.554.060,00	5.437.213,00	35.116.847,00	645,86
19	Sekretariat Daerah	60.379.282,00	67.680.014,00	(7.300.732,00)	(10,79)
20	Sekretariat DPRK	27.294.611,00	3.120.730,00	24.173.881,00	774,62
21	Kecamatan Banda Sakti	3.110.716,00	3.514.987,00	(404.271,00)	(11,50)
22	Kecamatan Blang Mangat	3.941.022,00	3.810.602,00	130.420,00	3,42
23	Kecamatan Muara Satu	4.265.886,00	4.654.187,00	(388.301,00)	(8,34)
24	Kecamatan Muara Dua	2.142.650,00	2.773.560,00	(630.910,00)	(22,75)
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	359.815.370,00	1.943.340,00	357.872.030,00	18.415,31
26	Inspektorat	51.345.534,00	5.850.605,00	45.494.929,00	777,61
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.452.887,00	13.810.403,00	(3.357.516,00)	(24,31)
28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.010.359.267,00	19.229.283.628,00	(11.218.924.361,00)	(58,34)
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	15.902.083.619,23	15.902.083.619,23	0,00	0,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.496.707,00	10.434.030,00	(3.937.323,00)	(37,74)
31	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	240.463.924,00	239.489.877,00	974.047,00	0,41
32	Sekretariat MPU	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Sekretariat Baitul Mal	12.244.700,00	12.997.507,00	(752.807,00)	(5,79)
34	Sekretariat MAA	0,00	418.750,00	(418.750,00)	(100,00)
35	Sekretariat MPD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	31.526.194.189,23	39.806.720.922,76	(8.280.526.733,53)	(20,80)

Untuk asuransi kesehatan dan JKK/JKM dicatat dalam utang belanja. Rincian utang belanja asuransi kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.93**  
**Utang Asuransi Kesehatan Tahun 2023**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1	BPJS Kesehatan	4.990.261.275,00	5.390.326.008,00	(400.064.733,00)	(7,42)
	Jumlah	4.990.261.275,00	5.390.326.008,00	(400.064.733,00)	(7,42)



**5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya**      **Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**Rp14.927.644.376,00**      **Rp0,00**

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp14.927.644.376,00 dan Rp0,00, terjadi peningkatan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp14.927.644.376,00.

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.927.644.376,00 terdiri atas utang transfer DBH sesuai Penetapan KB dan LB sesuai PMK 90 tahun 2023 tanggal 08 September 2023 dan Penyaluran KB dan LB sesuai KMK 38 tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp14.877.358.876,00, serta koreksi atas belanja barang dan jasa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum disalurkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.285.500,00.

**5.3.3 Ekuitas**      **Per 31 Desember 2023**      **Per 31 Desember 2022**  
**Rp2.153.052.907.928,57**      **Rp2.151.159.069.220,66**

Saldo ekuitas merupakan saldo akhir ekuitas pada LPE. Saldo awal ekuitas per 1 Januari 2023 adalah Rp2.151.159.069.220,66. Saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.153.052.907.928,57.

Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih pada Pemerintah Kota Lhokseumawe, yakni selisih antara nilai Aset dan Kewajiban, jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2023 yang merupakan jumlah ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah sebesar Rp2.153.052.907.928,57.

**5.4 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Operasional (LO)**

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Kota Lhokseumawe merupakan konsolidasi Laporan Operasional seluruh SKPK yang berada di Kota Lhokseumawe.

**5.4.1 Pendapatan – LO**      **Tahun 2023**      **Tahun 2022**  
**Rp737.743.143.111,08**      **Rp746.815.477.503,81**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Lhokseumawe yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

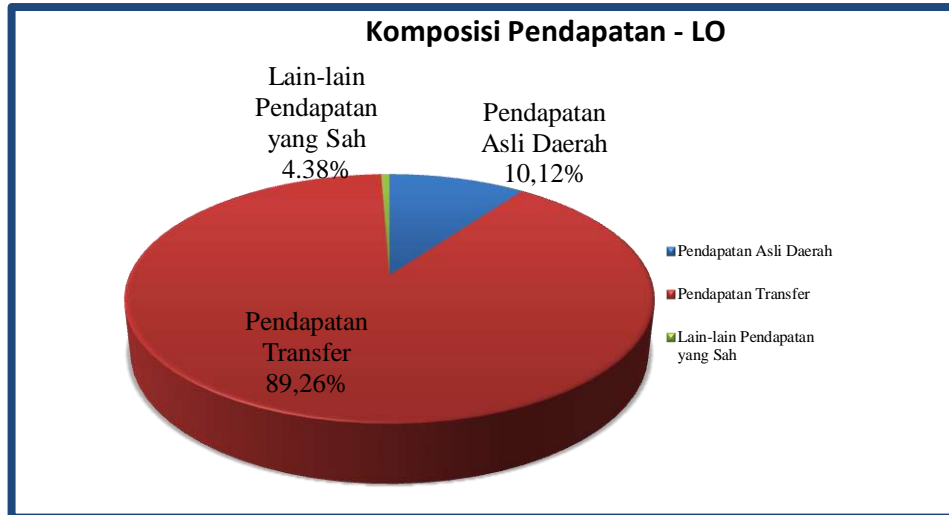
Realisasi pendapatan - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp737.743.143.111,08 dan Rp746.815.477.503,81, terdapat penurunan sebesar Rp9.072.334.392,73 atau 1,21%. Adapun rincian pendapatan-LO sebagai berikut:

**Tabel 5.94**  
**Realisasi Pendapatan Per Kelompok Pendapatan – LO**  
**Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik / Turun
1	Pendapatan Asli Daerah	69.800.576.794,28	69.830.333.900,29	(29.757.106,01)	(0,04)
2	Pendapatan Transfer	654.851.643.929,00	673.146.947.716,72	(18.295.303.787,72)	(2,72)

3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	13.090.922.387,80	3.838.195.886,80	9.252.726.501,00	241,07
	Jumlah	737.743.143.111,08	746.815.477.503,81	(9.072.334.392,73)	(1,21)

Komposisi Realisasi Pendapatan – LO Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:



Gambar 5.6  
Komposisi Realisasi Pendapatan – LO Kota Lhokseumawe Tahun 2023



Gambar 5.7  
Perbandingan Realisasi Pendapatan – LO dan Realisasi Pendapatan – LRA Kota Lhokseumawe Tahun 2023

**5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO** Tahun 2023 Tahun 2022  
**Rp69.800.576.794,28 Rp69.830.333.900,29**

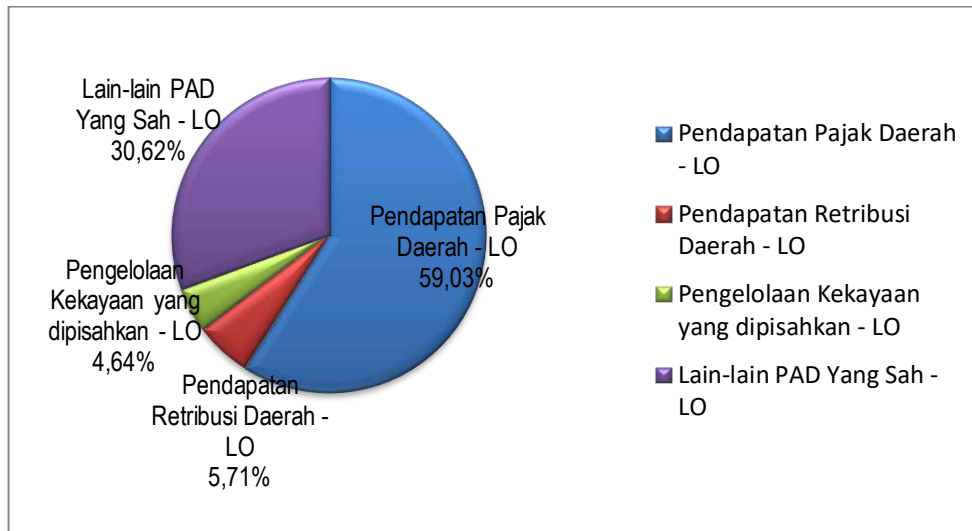
PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Terdapat dua unsur penting dalam pengertian/konsep PAD yaitu potensi asli daerah dan dikelola sepenuhnya oleh daerah.

Saldo Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp69.800.576.794,28 dan Rp69.830.333.900,29 terdapat penurunan sebesar Rp29.757.106,01 atau sebesar 0,04% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.95**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO**  
**Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik / Turun
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	41.202.037.631,76	41.222.848.671,92	(20.811.040,16)	(0,05)
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	3.992.605.512,40	3.499.949.990,00	492.655.522,40	14,08
3	Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan – LO	3.236.124.545,00	4.350.084.432,00	(1.113.959.887,00)	(25,61)
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	21.369.809.105,12	20.757.450.806,37	612.358.298,75	2,95
	Jumlah	69.800.576.794,28	69.830.333.900,29	(29.757.106,01,00)	(0,04)

Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO pada Kota Lhokseumawe sebagaimana tergambar pada diagram berikut:



**Gambar 5.8** Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2023

**5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO**      **Tahun 2023**      **Tahun 2022**  
**Rp41.202.037.631,76**      **Rp41.222.848.671,92**

Jumlah pendapatan pajak daerah – LO untuk Tahun 2023 sebesar Rp41.202.037.631,76 rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.96**  
**Perbedaan Pajak Daerah– LO Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Pembayaran Piutang 2022 (Rp)	Piutang 2023 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Jatuh Tempo (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka 2023 (Rp)	Pendapatan - Lo
1	2	3	4	5	6	7	8	10=4-5+6+7-8
1	Pajak Hotel	450.000.000,00	744.194.756,00	35.131.193,00	9.430.228,00	0,00	0,00	718.493.791,00
2	Pajak Restoran	3.755.000.000,00	6.139.818.064,00	9.960.400,00	14.937.694,00	0,00	0,00	6.144.795.358,00
3	Pajak Hiburan	170.000.000,00	348.147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.147.200,00
4	Pajak Reklame	686.250.000,00	707.298.992,00	0,00	0,00	271.854.768,82	240.540.435,06	738.613.325,76
5	Pajak Penerangan	17.005.000.000,00	17.869.554.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.869.554.495,00





No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Pembayaran Piutang 2022 (Rp)	Piutang 2023 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Jatuh Tempo (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka 2023 (Rp)	Pendapatan - Lo
1	2	3	4	5	6	7	8	10=4-5+6+7-8
	Jalan							
6	Pajak Parkir	40.000.000,00	41.827.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	41.967.000,00
7	Pajak Air Tanah	67.000.000,00	75.070.521,00	2.070.192,00	3.834.936,00	0,00	0,00	76.835.265,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.012.500.000,00	183.405.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.405.503,00
	Pajak Bumi dan Bangunan							
9	Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.500.000.000,00	6.468.194.291,00	985.052.064,00	3.263.655.270,00	9.728.611,00	685.705.405,00	8.070.820.703,00
	Bea Perolehan Hak							
10	Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.375.000.000,00	7.009.404.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009.404.991,00
	Jumlah	34.060.750.000,00	39.586.915.813,00	1.032.213.849,00	3.291.998.128,00	281.583.379,82	926.245.840,06	41.202.037.631,76

Penjelasan perbedaan saldo Pajak Daerah – LO dan Pajak Daerah – LRA sebagai berikut:

- Pajak hotel tahun 2023, dimana pada penerimaan pajak hotel - LRA sebesar Rp744.194.756,00, terdapat pembayaran piutang tahun lalu sebesar Rp35.131.193,00, dan penambahan piutang di tahun 2023 sebesar Rp9.430.228,00 sehingga pendapatan pajak hotel - LO menjadi Rp718.493.791,00;
- Pajak restoran pada tahun 2023, dimana pada penerimaan pajak restoran - LRA sebesar Rp6.139.818.064,00, terdapat pembayaran piutang tahun lalu sebesar Rp9.960.400,00 dan penambahan piutang di tahun 2023 sebesar Rp14.937.694,00 sehingga pendapatan pajak Restoran – LO menjadi Rp6.144.795.358,00;
- Pajak reklame pada tahun 2023, dimana pada penerimaan pajak reklame – LRA sebesar Rp707.298.992,00, terdapat pendapatan diterima dimuka yang telah jatuh tempo sebesar Rp271.854.768,82 dan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan sebesar Rp240.540.435,06 sehingga pendapatan pajak reklame – LO menjadi Rp738.613.325,76;
- Pajak Parkir pada tahun 2023, dimana pada penerimaan pajak parkir - LRA sebesar Rp41.827.000,00, terdapat piutang tahun 2023 sebesar Rp140.000,00 sehingga pendapatan pajak reklame – LO menjadi Rp41.967.000,00;
- Pajak air tanah tahun 2023 dimana penerimaan pajak air tanah - LRA sebesar Rp75.070.521,00, terdapat pembayaran piutang tahun lalu sebesar Rp2.070.192,00 dan piutang tahun 2023 sebesar Rp3.834.936,00 sehingga pendapatan pajak air tanah – LO menjadi Rp76.835.265,00; dan
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO tahun 2023, dimana pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA sebesar Rp6.468.194.291,00, terdapat pembayaran Piutang tahun lalu sebesar Rp985.052.064,00 dan penambahan piutang di tahun 2023 sebesar Rp3.263.655.270,00, Pendapatan Diterima Dimuka jatuh tempo sebesar Rp9.728.611 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp685.705.405,00 sehingga



pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO menjadi Rp8.070.820.703,00.

**5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO**

**Tahun 2023**  
**Rp3.992.605.512,40**

**Tahun 2022**  
**Rp3.499.949.990,00**

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 sebesar Rp3.992.605.512,40. Adapun perhitungan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.97**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Pembayaran Piutang 2022 (Rp)	Piutang 2023 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Jatuh Tempo (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka 2023 (Rp)	Pendapatan - Lo
1	2	3	4	5	6	7	8	10=4-5+6+7-8
1	Retribusi Pelayanan Puskesmas - LO	0,00	403.229.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	403.229.106,40
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	1.000.000.000,00	370.105.000,00	3.860.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	373.025.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	835.000.000,00	764.948.000,00	37.500.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	766.048.000,00
4	Retribusi Pelataran - LO	580.000.000,00	359.300.000,00	21.000.000,00	20.150.000,00	0,00	0,00	358.450.000,00
5	Retribusi Los – LO	320.000.000,00	410.665.000,00	136.305.000,00	294.720.000,00	6.000.000,00	6.400.000,00	568.680.000,00
6	Retribusi Kios – LO	256.000.000,00	152.500.000,00	55.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	247.500.000,00
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	180.000.000,00	90.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.665.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	10.000.000,00	12.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.535.000,00
9	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	420.000.000,00	461.120.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.120.906,00
10	Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000,00	621.187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.187.500,00
11	Retribusi Terminal	86.500.000,00	87.165.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	90.165.000,00
	Jumlah	4.087.500.000,00	3.733.420.512,40	256.665.000,00	516.250.000,00	6.000.000	6.400.000,00	3.992.605.512,40

Penjelasan perbedaan saldo Retribusi Daerah – LO dan Retribusi Daerah – LRA sebagai berikut:

- Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA tahun 2023 sebesar Rp370.105.000,00, terdapat pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar



Rp3.860.000,00, dan piutang tahun 2023 sebesar Rp6.780.000,00 sehingga Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO menjadi Rp373.025.000,00;

- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA tahun 2023 sebesar Rp764.948.000,00, terdapat pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp37.500.000,00, dan piutang tahun berjalan sebesar Rp38.600.000,00 sehingga Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -LO menjadi Rp766.048.000,00;
- c. Retribusi Pelataran – LRA tahun 2023 sebesar Rp359.300.000,00, terdapat pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp21.000.000,00 dan piutang tahun 2023 sebesar Rp20.150.000,00, sehingga Retribusi Pelataran – LO menjadi Rp358.450.000,00;
- d. Retribusi Los – LRA tahun 2023 sebesar Rp410.665.000,00, terdapat pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp136.305.000,00 dan piutang tahun 2023 sebesar Rp294.720.000,00, Pendapatan Diterima Dimuka yang jatuh tempo sebesar Rp6.000.000,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023 sebesar Rp6.400.000,00 sehingga Retribusi Los – LO menjadi Rp568.680.000,00;
- e. Retribusi Kios – LRA tahun 2023 sebesar Rp152.500.000,00, terdapat pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp55.000.000,00 dan piutang tahun 2023 sebesar Rp150.000.000,00. sehingga Retribusi Kios – LO menjadi Rp247.500.000,00; dan
- f. Retribusi Terminal – LRA tahun 2023 sebesar Rp87.165.000,00, terdapat pembayaran piutang tahun 2022 sebesar Rp3.000.000,00 dan piutang tahun 2023 Rp6.000.000,00, sehingga Retribusi Terminal – LO menjadi Rp90.165.000,00.

<b>5.4.1.1.3</b>	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO</b>	<b><u>Tahun 2023</u></b>	<b><u>Tahun 2022</u></b>
		<b>Rp3.236.124.545,00</b>	<b>Rp4.350.084.432,00</b>

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Lhokseumawe pada BUMD.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah – LO tahun 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp3.236.124.545,00 dan Rp4.350.084.432,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.113.959.887,00 atau 25,61%.

**Tabel 5.98**  
**Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
	Bagian Laba atas Penyertaan				
1	Modal pada Perusahaan Daerah – LO	3.236.124.545,00	4.350.084.432	(1.113.959.887,00)	(25,61)
	Jumlah	3.236.124.545,00	4.350.084.432	(1.113.959.887,00)	(25,61)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA tahun 2023 sebesar Rp3.236.124.545,00 sehingga tidak terdapat perbedaan antara Hasil Pengelolaan



Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO.

**5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO** **Tahun 2023** **Tahun 2022**  
**Rp21.369.809.105,12** **Rp20.757.450.806,37**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar Rp21.369.809.105,12 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.99**  
**Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO dan LRA Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Pembayaran Piutang 2022 (Rp)	Piutang 2023 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka Jatuh Tempo (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka 2023 (Rp)	Pendapatan - Lo
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4-5+6+7-8
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	43.750.000,00	18.750.000,00	50.000.000,00
3	Jasa Giro	400.000.000	33.312.891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33.312.891,21
4	Pendapatan Bunga	4.100.000.000	625.392.946,99	676.358,48	0,00	0,00	0,00	624.716.588,51
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	93.556.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93.556.555,19
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	4.202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.400,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	110.000.000	296.772.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.772.798,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	2.211.242.617	2.315.647.790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.647.790,98
9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	13.050.609.547	11.105.654.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.105.654.885,00
10	Pendapatan atas Pelanggaran Perda	2.999.931.461	116.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.445.000,00
11	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	8.900.000.000	6.726.500.196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726.500.196,23
<b>Jumlah</b>		<b>31.771.783.625,00</b>	<b>21.345.485.463,60</b>	<b>676.358,48</b>	<b>0,00</b>	<b>43.750.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>21.369.809.105,12</b>

Penjelasan perbedaan saldo Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA sebagai berikut:

- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA tahun 2023 sebesar Rp25.000.000,00, terdapat Pendapatan Diterima Dimuka Jatuh Tempo sebesar Rp43.750.000,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka untuk Tahun 2023 sebesar Rp18.750.000,00, sehingga Hasil Sewa BMD – LO menjadi Rp50.000.000,00; dan
- Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah – LRA tahun 2023 sebesar Rp625.392.946,99 terdapat pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp676.358,48 sehingga Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO menjadi Rp624.716.588,51.

**5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO**

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp654.851.643.929,00**      **Rp673.146.947.716,72**

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya, pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Pendapatan Transfer - LO tahun 2023 adalah sebesar Rp654.851.643.929,00, rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.100**  
**Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	597.924.688.037,00	571.662.882.388,48	26.261.805.648,52	4,59
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	592.194.122.037,00	537.217.801.388,48	54.976.320.648,52	10,23
b	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO	5.730.566.000,00	34.445.081.000,00	(28.714.515.000,00)	(83,36)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	56.926.955.892,00	101.484.065.328,24	(44.557.109.436,24)	(43,91)
<b>Jumlah</b>		654.851.643.929,00	673.146.947.716,72	(18.295.303.787,72)	(2,72)

Pendapatan Transfer – LO sebesar Rp654.851.643.929,00, sedangkan Pendapatan Transfer – LRA tahun 2023 sebesar Rp687.825.852.338,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp32.974.208.409,00). Penjelasan perbedaan Pendapatan Transfer – LO dan Pendapatan Transfer – LRA sebagai berikut:

1. Selisih Transfer Pemerintah Pusat – LO dan Transfer Pemerintah Pusat – LRA sebesar (Rp32.981.902.531,00) rincian sebagai berikut:
  - a. Selisih Transfer Pemerintah Pusat – LO dan Transfer Pemerintah Pusat – LRA sebesar Rp28.419.350.724,00 Koreksi pengakuan piutang berdasarkan perubahan rincian dana bagi hasil TA 2023 sesuai PMK 159 Tahun 2023 sebesar Rp31.208.108.107,00 dan karena terdapat Dana Bagi Hasil Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 sebesar Rp2.788.757.383,00; dan
  - b. Selisih Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA sebesar (Rp61.401.253.255,00) karena adanya penjurnalan terhadap Dana Desa sebesar Rp61.401.253.255,00.
2. Selisih Transfer Antar Daerah - LO dan Transfer Antar Daerah – LRA sebesar Rp7.694.122,00 karena terdapat pembayaran piutang transfer Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2022 sebesar Rp7.750.690.261,00 dan piutang transfer Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2023 sebesar Rp7.758.384.383,00.

**5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat –LO**

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp597.924.688.037,00**      **Rp571.662.882.388,48**

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat Lainnya, Pemerintah Daerah lainnya maupun Pemerintah Provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Pendapatan Transfer Pemerintah pusat sebesar Rp597.924.688.037,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:



**5.4.1.2.1.1 Transfer Pemerintah Pusat –LO**                      **Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp592.194.122.037,00**                      **Rp537.217.801.388,48**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO sebesar Rp592.194.122.037,00, rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.101**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO**  
**Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik / Turun
I	Bagi Hasil Pajak – LO	27.573.029.639,00	19.666.583.345,00	7.906.446.294,00	40,20
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan – LO	6.802.431.000,00	10.074.254.921,00	(3.271.823.921,00)	(32,48)
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LO	366.714.000,00	140.555.000,00	226.159.000,00	160,90
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	19.560.787.609,00	9.216.469.000,00	10.344.318.609,00	112,24
4	Bagi Hasil Cukai Tembakau	843.097.030,00	235.304.424,00	607.792.606,00	258,30
II	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	26.095.671.498,00	5.842.230.812,00	20.253.440.686,00	346,67
1	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	29.176.071,00	0,00	29.176.071,00	100,00
2	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	0,00	19.404.896,00	0,00	(100,00)
3	DBH SDA Kehutanan–DR-LO	10.391.368.000,00	0,00	10.391.368.000,00	0,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	11.306.059.290,00	3.063.068.444,00	8.242.990.846,00	269,11
5	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	2.694.780.000,00	1.958.311.000,00	736.469.000,00	37,61
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	1.023.090.432,00	401.045.196,00	622.045.236,00	155,11
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	630.316.000,00	377.533.157,00	252.782.843,00	66,96
8	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	20.881.705,00	22.868.119,00	(1.986.414,00)	(8,69)
III	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	436.369.459.000,00	418.472.663.478,48	17.896.795.521,52	4,28
IV	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	102.155.961.900,00	93.236.323.753,00	8.919.638.147,00	9,57
	<b>Jumlah</b>	<b>592.194.122.037,00</b>	<b>537.217.801.388,48</b>	<b>54.976.320.648,52</b>	<b>10,23</b>

Terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA sebesar Rp28.419.350.724,00. Perbedaan pendapatan transfer – LO dan Pendapatan Transfer – LRA adalah sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LO dan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LRA selisih sebesar Rp2.465.538.535,00 karena Koreksi pengakuan piutang berdasarkan perubahan rincian bagi hasil TA 2023 sesuai PMK 159 Tahun 2023 sebesar Rp3.653.688.000,00 dan terdapat Bagi Hasil Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 sebesar Rp1.188.149.465,00.
2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 – LO dan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 – LRA selisih sebesar Rp9.564.387.145,00 karena adanya koreksi atas pengakuan piutang berdasarkan perubahan rincian bagi hasil TA



- 2023 sesuai PMK 159 Tahun 2023 sebesar Rp10.704.463.609,00 dan adanya Bagi Hasil Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 sebesar Rp1.140.076.464,00
3. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LO dan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA selisih sebesar Rp168.513.358,00 karena adanya Koreksi pengakuan piutang berdasarkan perubahan rincian bagi hasil TA 2023 sesuai PMK 159 Tahun 2023 sebesar Rp185.900.000,00 dan adanya Bagi Hasil Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 sebesar Rp17.386.642,00.
  4. Bagi Hasil Cukai Tembakau – LO dan Bagi Hasil Cukai Tembakau – LRA selisih sebesar Rp422.933.476,00 karena adanya Koreksi pengakuan piutang berdasarkan perubahan rincian bagi hasil TA 2023 sesuai PMK 159 Tahun 2023 sebesar Rp445.945.000,00 dan adanya Bagi Hasil Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 sebesar Rp23.011.524,00.
  5. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LO dan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA selisih sebesar Rp634.274.467,00 karena adanya koreksi pengakuan piutang berdasarkan perubahan rincian bagi hasil TA 2023 sesuai PMK 159 Tahun 2023 sebesar Rp660.303.432,00 dan adanya Bagi Hasil Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 sebesar Rp26.028.965,00.
  6. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LO dan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA selisih sebesar Rp282.013.280,00 karena koreksi pengakuan piutang berdasarkan perubahan rincian bagi hasil TA 2023 sesuai PMK Tahun 159 Tahun 2023 sebesar Rp315.158.000,00 dan adanya Bagi Hasil Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 sebesar Rp33.144.170,00.
  7. Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi - LO dan Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi – LRA selisih sebesar Rp10.487.792,00 karena koreksi pengakuan piutang berdasarkan perubahan rincian bagi hasil TA 2023 sesuai PMK Tahun 159 Tahun 2023 sebesar Rp12.284.705,00 dan adanya Bagi Hasil Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 sebesar Rp1.796.913,00.
  8. Bagi Hasil SDA Kehutanan-PSDH-LO dan Bagi Hasil SDA Kehutanan-PSDH-LRA selisih sebesar Rp13.022.393,00 karena koreksi pengakuan piutang berdasarkan perubahan rincian bagi hasil TA 2023 sesuai PMK 159 Tahun 2023 sebesar Rp14.598.071,00 dan adanya Bagi Hasil Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 sebesar Rp1.575.678,00.
  9. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO dan Bagi Hasil SDA Perikanan – LRA selisih sebesar Rp1.135.636.789,00 karena koreksi pengakuan piutang berdasarkan perubahan rincian bagi hasil TA 2023 sesuai PMK 159 Tahun 2023 sebesar Rp1.347.390.000,00 dan adanya Bagi Hasil Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 sebesar Rp211.753.211,00.
  10. Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO dan Bagi Hasil DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty – LRA selisih sebesar Rp8.526.858.939,00 karena koreksi pengakuan piutang berdasarkan perubahan rincian bagi hasil TA 2023 sesuai PMK 159 Tahun 2023 sebesar Rp8.672.693.290,00 dan adanya Bagi Hasil Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022 sebesar Rp145.834.351,00.
  11. Bagi Hasil SDA Kehutanan-DR-LO dan Bagi Hasil SDA Kehutanan-DR-LRA selisih sebesar Rp5.195.684.000,00 karena koreksi pengakuan piutang berdasarkan



perubahan rincian bagi hasil TA 2023 sesuai PMK 159 Tahun 2023 sebesar Rp5.195.684.000,00.

**5.4.1.2.1.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya –LO** **Tahun 2023**  
**Rp5.730.566.000,00** **Tahun 2022**  
**Rp34.445.081.000,00**

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.730.566.000,00 dan Rp34.445.081.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah (DID).

**Tabel 5.102**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO**  
**Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Dana Insentif Daerah (DID)	5.730.566.000,00	34.445.081.000,00	(28.714.515.000,00)	(83,36)
	Jumlah	5.730.566.000,00	34.445.081.000,00	(28.714.515.000,00)	(83,36)

Tidak terdapat perbedaan nilai antara Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dengan Transfer Pusat Pemerintah Lainnya-LRA.

**5.4.1.2.2 Transfer Antar Daerah –LO** **Tahun 2023**  
**Rp56.926.955.892,00,00** **Tahun 2022**  
**Rp101.484.065.328,24**

Dana Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari PAD Pemerintah Provinsi yang dialokasikan untuk pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh berupa pendapatan bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya.

Pendapatan transfer bagi hasil pajak Provinsi-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp56.926.955.892,00,00 dan Rp101.484.065.328,24 sebagai berikut:

**Tabel 5.103**  
**Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2023**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi – LO	34.257.971.719,00	32.165.474.384,29	2.092.497.334,31	6,51
2	Bantuan Keuangan - LO	22.668.984.173,00	69.318.590.943,95	(46.649.606.770,95)	(67,30)
	Jumlah	56.926.955.892,00	101.484.065.328,24	(44.557.106.436,24)	(43,91)

**5.4.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi –LO** **Tahun 2023**  
**Rp34.257.971.719,00** **Tahun 2022**  
**Rp32.165.474.384,29**

Jumlah pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi-LO tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.104**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Pembayaran Piutang 2022 (Rp)	Piutang 2023 (Rp)	Pendapatan - LO
1	2	3	4	5	6	7=4-5+6
1	Bagi Hasil dari Pajak	7.410.408.672,00	6.429.103.465,00	1.586.591.426,00	1.661.297.025,00	6.503.809.064,00





No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Pembayaran Piutang 2022 (Rp)	Piutang 2023 (Rp)	Pendapatan - LO
1	2	3	4	5	6	7=4-5+6
	Kendaraan Bermotor					
	Bagi Hasil dari Bea					
2	Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.296.883.848,00	3.709.563.527,00	895.412.796,00	1.007.368.559,00	3.821.519.290,00
	Bagi Hasil Dari Pajak					
3	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.408.137.224,00	12.554.518.767,00	3.137.065.291,00	3.162.466.118,00	12.579.919.594,00
	Bagi Hasil Dari Pajak					
4	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	72.389.343,00	76.231.954,00	17.762.315,00	19.257.500,00	77.727.139,00
	Bagi Hasil Dari Pajak					
5	Rokok	12.032.287.368,00	11.480.859.884,00	2.113.858.433,00	1.907.995.181,00	11.274.996.632,00
	Jumlah	31.220.106.455,00	34.250.277.597,00	7.750.690.261,00	7.758.384.383,00	34.257.971.719,00

Penjelasan perbedaan saldo Pendapatan Transfer Bagi Hasil Provinsi-LO dan Pendapatan Transfer Bagi Hasil Provinsi – LRA sebagai berikut:

- Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor – LRA tahun 2023 sebesar Rp6.429.103.465,00 terdapat pembayaran piutang tahun 2022 yang dibayar pada tahun 2023 sebesar Rp1.586.591.426,00, dan adanya piutang baru tahun 2023 sebesar Rp1.661.297.025,00 sehingga pendapatan bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor – LO menjadi Rp6.503.809.064,00;
- Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LRA tahun 2023 sebesar Rp3.709.563.527,00 terdapat pembayaran piutang tahun 2022 yang dibayar tahun 2023 sebesar Rp895.412.796,00 dan adanya piutang bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.007.368.559,00 sehingga pendapatan bagi hasil pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO menjadi Rp3.821.519.290,00;
- Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA tahun 2023 sebesar Rp12.554.518.767,00 terdapat pembayaran piutang tahun 2022 sebesar Rp3.137.065.291,00 dan adanya piutang baru tahun 2023 sebesar Rp3.162.466.118,00 sehingga pendapatan bagi hasil pajak dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO menjadi Rp12.579.919.594,00;
- Bagi hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LRA tahun 2023 sebesar Rp76.231.954,00 terdapat pembayaran piutang tahun 2022 sebesar Rp17.762.315,00 dan adanya piutang baru tahun 2023 sebesar Rp19.257.500,00 sehingga Bagi hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LO menjadi Rp77.727.139,00; dan
- Bagi hasil dari Pajak Cukai Tembakau – LRA Tahun 2023 sebesar Rp11.480.859.884,00 terdapat piutang tahun 2022 sebesar Rp2.113.858.433,00 dan adanya piutang tahun 2023 sebesar Rp1.907.995.181,00 sehingga Bagi hasil dari Pajak Cukai dan Tembakau – LO tahun 2023 menjadi Rp11.274.996.632,00.

**5.4.1.2.2 Bantuan Keuangan - LO**

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp22.668.984.173,00**                      **Rp69.318.590.943,95**

Bantuan Keuangan-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp22.668.984.173,00 dan Rp69.318.590.943,95.

**Tabel 5.105**  
**Pendapatan Bantuan Keuangan-LO Tahun 2023**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Bantuan Keuangan - LO	22.668.984.173,00	69.318.590.943,95	(46.649.606.770,95)	(67,30)
	Jumlah	22.668.984.173,00	69.318.590.943,95	(46.649.606.770,95)	(67,30)

Jumlah pendapatan Bantuan Keuangan - LO tahun 2023 sebesar Rp22.668.984.173,00 terdiri atas Dana Otonomi Khusus Rp22.614.984.173,00 dan Dana BOP Mukim sebesar Rp54.000.000,00.

**5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO**

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp13.090.922.387,80**                      **Rp3.838.195.886,80**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO tahun 2023 merupakan pendapatan diluar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yaitu berupa Pendapatan Hibah – LO sebesar Rp13.090.922.387,80.

**Tabel 5.106**  
**Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO**  
**Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik / Turun
1	Pendapatan Hibah -LO	13.090.922.387,80	3.838.195.886,80	9.252.726.501,00	241,07
	Jumlah	13.090.922.387,80	3.838.195.886,80	9.252.726.501,00	241,07

**5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO**

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp13.090.922.387,80**                      **Rp3.838.195.886,80**

Pendapatan Hibah – LO tahun 2023 adalah sebesar Rp13.090.922.387,80. Pendapatan Hibah tahun 2023 berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri.

Adapun rincian Pendapatan Hibah - LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.107**  
**Rincian Pendapatan Hibah – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	999.065.303,00	306.724.083,00	692.341.220,00	225,72
2	Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	12.085.957.084,80	3.531.471.803,80	8.554.485.281,00	242,24
3	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LO	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
	Jumlah	13.090.922.387,80	3.838.195.886,80	9.252.726.501,00	241,07

**5.4.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat– LO****Tahun 2023  
Rp999.065.303,00****Tahun 2022  
Rp306.724.083,00**

Pendapatan Hibah adalah penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp999.065.303,00 dan Rp306.724.083,00. Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.108**  
**Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Pendapatan Hibah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	109.186.220,00	0,00	109.186.220,00	0,00
2	Pendapatan Hibah pada Dinas Kesehatan	541.188.558,00	0,00	541.188.558,00	0,00
3	Pendapatan Hibah dari Pusat (DPMPTSP)	0,00	21.900.000,00	(21.900.000,00)	(100,00)
4	Pendapatan Hibah dari Pusat (Dinas Dukcapil)	81.456.000,00	124.797.100,00	(43.341.100,00)	(34,73)
5	Pendapatan Hibah dari Pusat (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	0,00	160.026.983,00	(160.026.983,00)	(100,00)
6	Pendapatan Hibah dari Pusat (Satpol PP WH)	45.234.525,00	0,00	45.234.525,00	0,00
7	Pendapatan Hibah (PPKD)	222.000.000,00	0,00	222.000.000,00	0,00
	Jumlah	999.065.303,00	306.724.083,00	692.341.220,00	225,72

Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat– LO sebagai berikut:

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp109.186.220,00 merupakan Pendapatan Hibah dari pemerintah Pusat berupa Alat Pemadam Kebakaran dengan BAST Nomor 300.1.7/8155/BAK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp105.000.000,00 dan Kendaraan Bermotor Khusus dengan BAST Nomor 00.3.3.2/1716/BAK, Nomor 450.51/3785 tanggal 21 Desember 2023 sebesar Rp4.186.220,00;
- Dinas Kesehatan sebesar Rp541.188.558,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan RI berupa Alat Kedokteran umum lainnya, BAST No. KN.01.08/D.III/3655/2023, Tanggal 07-11-2023;
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp81.456.0000,00 berupa hibah barang milik Negara berupa Blangko KTP Elektronik hasil Pengadaan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dari sumber dana APBN Tahun 2023 dengan Nomor BAST 400.8.1.2/704/SES Berjumlah 4000 keping Senilai Rp81.456.0000,00;
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sebesar Rp45.234.525,00 berupa Sepeda Motor Trail D-Tracker 150cc ditambah serine motor/Lampu sirene/Lampu strobo/ Tiang/ Bracket dengan BAST No: 028/07/BA/PB/2023;
- Pendapatan Hibah pada PPKD sebesar Rp222.000.000,00 merupakan hibah sanitasi dari Pemerintah Pusat.



**5.4.1.3.1.2 Pendapatan Hibah  
Pemerintah Daerah  
Lainnya– LO**

**Tahun 2023**  
**Rp12.085.957.084,80**

**Tahun 2022**  
**Rp3.531.471.803,80**

Jumlah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO untuk tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp12.085.957.084,80 dan Rp3.531.471.803,80. Adapun rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebagai berikut:

**Tabel 5.109**  
**Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Pendapatan Hibah (Dinas Kesehatan)	2.994.924.044,80	2.840.280.093,80	154.643.951,00	5,44
2	Pendapatan Hibah (BPBD)	68.059.743,00	109.897.000,00	(41.837.257,00)	(38,07)
3	Pendapatan Hibah (Disdukcapil)	63.637.500,00	0,00	63.637.500,00	0,00
4	Pendapatan Hibah (Dinas PPPADaldukKel)	152.341.160,00	144.287.900,00	8.053.260,00	5,58
5	Pendapatan Hibah (Dinas Dinas Perhubungan)	1.113.308.637,00	0,00	1.113.308.637,00	0,00
6	Pendapatan Hibah (Disperindagkop)	7.693.686.000,00	0,00	7.693.686.000,00	0,00
7	Pendapatan Hibah (Dinas Sosial)	0,00	177.770.670,00	(177.770.670,00)	(100,00)
8	Pendapatan Hibah (MAA)	0,00	249.236.140,00	(249.236.140,00)	(100,00)
	Jumlah	12.085.957.084,80	3.521.471.803,80	8.564.485.281,00	243,21

Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya– LO sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.994.924.044,80 merupakan hibah berupa obat-obatan dari Pemerintah Provinsi;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp68.059.743,00 adalah Pendapatan Hibah dari pemerintah Daerah berupa persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya dengan BAST Nomor 018/BAST/BPBA/III/2023 tanggal 17 Maret 2023;
- c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp63.637.500,00 dan Hibah dari Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Hibah DRKA Blangko KTP Elektronik No. 471.13/008/I/BAST/2023 Berjumlah 750 keping sebesar Rp7.636.500,00;
  - (2) Hibah DRKA Blangko KTP Elektronik No. 471.13/028/I/BAST/2023 Berjumlah 500 keping sebesar Rp5.091.000;
  - (3) Hibah DRKA Blangko KTP Elektronik No. 471.13/155/VII/BAST/2023 Berjumlah 500 keping sebesar Rp5.091.000;
  - (4) Hibah DRKA Blangko KTP Elektronik No. 471.13/165/VII/BAST/2023 Berjumlah 500 keping sebesar Rp5.091.000;
  - (5) Hibah DRKA Blangko KTP Elektronik No. 471.13/176/VIII/BAST/2023 Berjumlah 500 keping sebesar Rp5.091.000;
  - (6) Hibah DRKA Blangko KTP Elektronik No. 471.13/188/VIII/BAST/2023 Berjumlah 500 keping sebesar Rp5.091.000;
  - (7) Hibah DRKA Blangko KTP Elektronik No. 471.13/194/IX/BAST/2023 Berjumlah 1100 keping sebesar Rp10.182.000;
  - (8) Hibah DRKA Blangko KTP Elektronik No. 471.13/207/IX/BAST/2023 Berjumlah 500 keping sebesar Rp5.091.000; dan



- (9) Hibah DRKA Blangko KTP Elektronik No. 471.13/215/IX/BAST/2023 Berjumlah 150 keping sebesar Rp15.273.000.
- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp152.341.160,00 merupakan Hibah dari BKKBN Provinsi berupa alat kontrasepsi dengan rincian sebagai berikut:
- (1) BAST Nomor: 07/SP/J.I/2023 Tanggal 9 Februari 2023 berupa barang ALOKON sebesar Rp4.612.000,00;
  - (2) BAST Nomor: 42/SP/J.I/2023 Tanggal 5 Juni 2023 berupa barang ALOKON sebesar Rp77.268.000,00;
  - (3) BAST Nomor: 52/SP/J.I/2023 Tanggal 19 Juni 2023 berupa barang ALOKON sebesar Rp45.733.960,00;
  - (4) BAST Nomor: 42/SP/J.I/2023 Tanggal 11 Oktober 2023 berupa barang ALOKON sebesar Rp15.192.400,00; dan
  - (5) BAST Nomor: 100/SP/J.I/2023 Tanggal 01 Desember 2023 berupa barang ALOKON senilai Rp9.534.800,00.
- e. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.113.308.637,00 merupakan Hibah Traffic Light dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh No: 11/BA/2023 dan 032/02/BAST/2023; dan
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp7.693.686.000,00 merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi berupa tanah untuk pasar inpres dengan Surat Keterangan nomor 2468.

<b>5.4.1.3.1.3</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri– LO</b>	<b><u>Tahun 2023</u></b> <b>Rp5.900.000,00</b>	<b><u>Tahun 2022</u></b> <b>Rp0,00</b>
--------------------	---	---	---

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp5.900.000,00 berupa Laptop ASUS A416JAO-VIPS326 Silver sesuai dengan Nomor 032/001/NPHD/2023 terdapat pada Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

<b>5.4.2</b>	<b>Beban Daerah</b>	<b><u>Tahun 2023</u></b> <b>Rp720.187.933.349,26</b>	<b><u>Tahun 2022</u></b> <b>Rp739.412.852.926,88</b>
--------------	---------------------	---	---

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, dan terjadinya pengeluaran kas. Timbulnya kewajiban terjadi saat peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset atau berlalunya waktu, seperti pada penyusutan atau amortisasi. Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp720.187.933.349,26 dan Rp739.412.852.926,88. Berikut jenis beban dan komposisinya.



**Tabel 5.110**  
**Beban Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Operasi	557.065.139.103,12	575.808.905.464,88	(18.743.766.361,76)	(3,26)
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	114.838.448.734,14	117.755.935.992,00	(2.917.487.257,86)	(2,48)
3	Beban Transfer	48.231.695.144,00	45.848.011.470,00	2.383.683.674,00	5,2
4	Beban Tidak Terduga	52.650.368,00	0	52.650.368,00	0
	Jumlah	720.187.933.349,26	739.412.852.926,88	(19.224.919.577,62)	(2,60)

#### 5.4.2.1 **Beban Operasi**

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp557.065.139.103,12**      **Rp575.808.905.464,88**

Beban Operasi – LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp557.065.139.103,12 dan Rp575.808.905.464,88, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.111**  
**Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Pegawai	316.232.129.315,00	307.398.707.189,00	8.833.422.126,00	2,87
2	Beban Barang	41.621.547.395,36	41.048.620.645,92	572.926.749,44	1,40
3	Beban Jasa	89.280.015.850,96	108.188.858.437,48	(18.908.842.586,52)	(17,48)
4	Beban Pemeliharaan	8.197.639.280,00	12.019.913.144,50	(3.822.273.864,50)	(31,80)
5	Beban Perjalanan Dinas	26.224.373.459,00	25.221.117.808,00	1.003.255.651,00	3,98
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	862.040.500,00	0,00	862.040.500,00	0,00
7	Beban Barang dan Jasa BOS	16.180.875.800,00	0,00	16.180.875.800,00	0,00
8	Beban Subsidi	470.000.000,00	200.000.000,00	270.000.000,00	135,00
9	Beban Hibah	23.473.953.742,00	34.226.957.487,00	(10.753.003.745,00)	(31,42)
10	Beban Bantuan Sosial	31.138.321.155,00	40.463.863.030,53	(9.325.541.875,53)	(23,05)
11	Beban Penyisihan Piutang	3.384.242.605,80	384.855.623,45	2.999.386.982,35	779,35
12	Beban Lain-lain	0,00	6.656.012.099,00	(6.656.012.099,00)	(100,00)
	Jumlah	557.065.139.103,12	575.808.905.464,88	(18.743.766.361,76)	(3,26)

Berikut penjelasan rinci atas Beban Operasi Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

#### 5.4.2.1.1 **Beban Pegawai – LO**

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp316.232.129.315,00**      **Rp307.398.707.189,00**

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Beban Pegawai – LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp316.232.129.315,00 dan Rp307.398.707.189,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.112**  
**Rincian Beban Pegawai - LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	230.567.174.685,00	224.744.908.570,00	5.822.266.115,00	2,59
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	36.198.382.070,00	30.145.700.746,00	6.052.681.324,00	20,08
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.522.522.729,00	43.097.666.254,00	(3.575.143.525,00)	(8,30)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	9.433.238.631,00	8.773.361.485,00	659.877.146,00	7,52
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.931.200,00	130.190.134,00	(126.258.934,00)	(96,98)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	506.880.000,00	506.880.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	316.232.129.315,00	307.398.707.189,00	8.833.422.126,00	2,87

Beban pegawai – LO tahun 2023 sebesar Rp316,232.129.315,00 merupakan beban pegawai selama tahun 2023, berikut beban pegawai masing-masing SKPK.

**Tabel 5.113**  
**Rekapitulasi Beban Pegawai – LO Per SKPK Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	113.725.397.857,00	117.447.782.026,00	(3.722.384.169,00)	(3,17)
2	Dinas Kesehatan	61.408.516.834,00	58.247.038.556,00	3.161.478.278,00	5,43
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.556.062.316,00	4.570.925.875,00	(14.863.559,00)	(0,33)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.236.001.170,00	2.445.328.215,00	(209.327.045,00)	(8,56)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	4.282.380.692,00	3.951.267.276,00	331.113.416,00	8,38
6	Dinas Sosial	2.604.511.524,00	2.490.254.939,00	114.256.585,00	4,59
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB	2.955.352.950,00	3.009.421.713,00	(54.068.763,00)	(1,80)
8	Dinas Pertanahan	2.872.510.645,00	2.824.262.750,00	48.247.895,00	1,71
9	Dinas Lingkungan Hidup	3.219.883.653,00	3.119.466.463,00	100.417.190,00	3,22
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.451.651.908,00	2.371.509.417,00	80.142.491,00	3,38
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	2.151.093.582,00	2.162.700.328,00	(11.606.746,00)	(0,54)
12	Dinas Perhubungan	2.351.833.578,00	2.347.092.224,00	4.741.354,00	0,20
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.538.226.247,00	1.793.043.682,00	(254.817.435,00)	(14,21)
14	Dinas Penanaman Modal, PTSPTK	4.686.296.043,00	4.488.016.548,00	198.279.495,00	4,42
15	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	2.589.705.904,00	2.526.273.222,00	63.432.682,00	2,51
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.985.925.797,00	2.115.783.442,00	(129.857.645,00)	(6,14)
17	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	5.632.527.187,00	5.732.323.415,00	(99.796.228,00)	(1,74)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	3.254.629.851,00	3.245.701.818,00	8.928.033,00	0,28
19	Sekretariat Daerah	12.086.997.480,00	12.791.081.013,00	(704.083.533,00)	(5,50)



No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
20	Inspektorat	5.908.029.258,00	5.447.590.374,00	460.438.884,00	8,45
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.367.556.690,00	4.620.012.195,00	(252.455.505,00)	(5,46)
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.247.598.454,00	13.600.622.601,00	(3.353.024.147,00)	(24,65)
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	28.246.163.743,00	15.358.727.992,00	12.887.435.751,00	83,91
25	Sekretariat DPRK	14.901.173.153,00	14.056.740.037,00	844.433.116,00	6,01
26	Kecamatan Banda Sakti	2.122.059.728,00	2.018.936.648,00	103.123.080,00	5,11
27	Kecamatan Blang Mangat	1.621.869.692,00	1.670.491.716,00	(48.622.024,00)	(2,91)
28	Kecamatan Muara Satu	1.563.881.829,00	1.538.152.857,00	25.728.972,00	1,67
29	Kecamatan Muara Dua	1.729.615.362,00	2.006.714.476,00	(277.099.114,00)	(13,81)
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.025.393.048,00	2.372.300.239,00	(346.907.191,00)	(14,62)
31	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	2.819.187.355,00	3.130.591.615,00	(311.404.260,00)	(9,95)
32	Sekretariat MPU	1.381.697.947,00	1.190.746.631,00	190.951.316,00	16,04
33	Sekretariat Baitul Mal	1.002.750.487,00	951.193.097,00	51.557.390,00	5,42
34	Sekretariat MAA	800.143.740,00	778.984.540,00	21.159.200,00	2,72
35	Sekretariat MPD	905.503.611,00	977.629.249,00	(72.125.638,00)	(7,38)
	Jumlah	316.232.129.315,00	307.398.707.189,00	8.833.422.126,00	2,87

Beban Pegawai – LO sebesar Rp316.232.129.315,00 sedangkan Belanja pegawai – LRA sebesar Rp316.584.344.048,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp352.214.733,00). Penjelasan selisih Belanja Pegawai – LRA dengan Beban Pegawai – LO sebagai berikut (rincian dapat dilihat pada **Lampiran 20**).

- Selisih Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN – LO dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN – LRA sebesar (Rp400.064.733,00) karena terdapat pembayaran kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2022 sebesar Rp2.889.801.712,00 dan adanya kewajiban tahun 2023 sebesar Rp2.489.736.979,00; dan
- Selisih Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-LO dan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN – LRA sebesar Rp47.850.000,00 karena adanya kewajiban tahun 2023 sebesar Rp47.850.000,00.

#### 5.4.2.1.2 Beban Barang

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp41.756.147.395,36**                      **Rp41.048.620.645,92**

Beban Barang tahun 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp41.756.147.395,36 dan Rp41.048.620.645,92. Rincian beban barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.114**  
**Rincian Beban Barang Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.512.000,00	68.721.880,00	(58.209.880,00)	(84,70)





No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	22.800.000,00	61.174.235,00	(38.374.235,00)	(62,73)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.104.545.805,00	4.798.629.563,00	305.916.242,00	6,38
4	Beban Bahan-Bahan Baku	38.959.801,00	502.397.600,00	(463.437.799,00)	(92,25)
5	Beban Komponen Peralatan	0,00	58.809.000,00	(58.809.000,00)	(100,00)
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	(11.124.000,00)	11.124.000,00	(100,00)
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	(221.762.500,00)	221.762.500,00	(100,00)
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	287.112.812,00	559.588.095,00	(272.475.283,00)	(48,69)
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	18.166.250,00	206.795.439,00	(188.629.189,00)	(91,22)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.274.292.075,00	4.877.907.322,00	(603.615.247,00)	(12,37)
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.947.453.420,00	3.386.985.260,00	(439.531.840,00)	(12,98)
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	111.279.500,00	200.045.000,00	(88.765.500,00)	(44,37)
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	8.698.320,00	93.388.300,00	(84.689.980,00)	(90,69)
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	92.936.600,00	118.203.400,00	(25.266.800,00)	(21,38)
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	780.558.012,00	641.463.993,00	139.094.019,00	21,68
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	16.620.000,00	140.134.900,00	(123.514.900,00)	(88,14)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.500.000,00	60.000.000,00	(55.500.000,00)	(92,50)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	272.385.000,00	133.430.000,00	138.955.000,00	104,14
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	835.601.822,00	1.251.433.743,00	(415.831.921,00)	(33,23)
21	Beban Obat-Obatan-Obat	3.390.136.918,18	7.622.872.010,92	(4.232.735.092,74)	(55,53)
22	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.381.691.785,18	322.247.927,00	1.059.443.858,18	328,77
23	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.154.524.931,00	(675.046.174,00)	2.829.571.105,00	(419,17)
24	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	2.857.016.422,00	177.544.813,00	2.679.471.609,00	1.509,18
25	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	27.549.403,00	2.450.000,00	25.099.403,00	1.024,47



No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
26	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	735.515.900,00	882.088.850,00	(146.572.950,00)	(16,62)
27	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.060.482.748,00	0,00	7.060.482.748,00	0,00
28	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	768.035.000,00	0,00	768.035.000,00	0,00
29	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.606.143.017,00	0,00	2.606.143.017,00	0,00
30	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.805.745.342,00	0,00	3.805.745.342,00	0,00
31	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	134.992.650,00	0,00	134.992.650,00	0,00
32	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
33	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	364.057.430,00	0,00	364.057.430,00	0,00
34	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	991.455.000,00	0,00	991.455.000,00	0,00
35	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	119.501.207,00	0,00	119.501.207,00	0,00
36	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	99.250.000,00	0,00	99.250.000,00	0,00
38	Beban Pakaian Adat Daerah	37.975.000,00	0,00	37.975.000,00	0,00
39	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Beban Pakaian Olahraga	204.927.200,00	0,00	204.927.200,00	0,00
41	Beban Pakaian Paskibraka	82.226.025,00	0,00	82.226.025,00	0,00
42	Beban Pakaian Jas/Safari	103.500.000,00	0,00	103.500.000,00	0,00
43	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	15.776.741.989,00	(15.776.741.989,00)	(100,00)
	Jumlah	41.756.147.395,36	41.048.620.645,92	707.526.749,44	1,72

**Tabel 5.115**  
**Rekapitulasi Beban Barang Per SKPK Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.313.159.476,00	17.209.270.804,00	(14.896.111.328,00)	(86,56)
2	Dinas Kesehatan	12.984.072.921,36	11.514.107.823,92	1.469.965.097,44	12,77
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	447.758.839,00	156.226.540,00	291.532.299,00	186,61
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	727.931.615,00	441.349.131,00	286.582.484,00	64,93
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	2.514.529.068,00	172.773.360,00	2.341.755.708,00	1355,39
6	Dinas Sosial	367.817.031,00	551.153.285,00	(183.336.254,00)	(33,26)
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB	850.040.431,00	568.527.490,00	281.512.941,00	49,52
8	Dinas Pertanahan	108.879.047,00	81.332.680,00	27.546.367,00	33,87
9	Dinas Lingkungan Hidup	3.793.081.625,00	2.229.672.610,00	1.563.409.015,00	70,12
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	639.294.240,00	726.914.250,00	(87.620.010,00)	(12,05)
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	288.266.584,00	164.810.390,00	123.456.194,00	74,91



No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
12	Dinas Perhubungan	529.774.488,00	491.859.010,00	37.915.478,00	7,71
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	125.666.341,00	67.385.600,00	58.280.741,00	86,49
14	Dinas Penanaman Modal, PTSPK	749.535.229,00	839.804.980,00	(90.269.751,00)	(10,75)
15	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	328.070.285,00	293.494.850,00	34.575.435,00	11,78
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	221.880.395,00	103.717.027,00	118.163.368,00	113,93
17	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	955.921.395,00	(12.152.863,00)	968.074.258,00	(7965,81)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.325.977.816,00	363.649.830,00	962.327.986,00	264,63
19	Sekretariat Daerah	3.543.837.680,00	2.172.945.265,00	1.370.892.415,00	63,09
20	Inspektorat	245.586.380,00	227.937.595,00	17.648.785,00	7,74
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	410.630.399,00	217.554.200,00	193.076.199,00	88,75
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.732.519.033,00	1.373.263.350,00	359.255.683,00	26,16
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	542.156.545,00	145.949.920,00	396.206.625,00	271,47
25	Sekretariat DPRK	1.983.952.147,00	1.653.853.810,00	330.098.337,00	19,96
26	Kecamatan Banda Sakti	308.498.917,00	212.119.250,00	96.379.667,00	45,44
27	Kecamatan Blang Mangat	244.920.295,00	73.536.940,00	171.383.355,00	233,06
28	Kecamatan Muara Satu	216.470.645,00	64.684.100,00	151.786.545,00	234,66
29	Kecamatan Muara Dua	217.865.859,00	90.810.200,00	127.055.659,00	139,91
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.215.275.044,00	199.298.730,00	1.015.976.314,00	509,78
31	Dinas Syariah Islam dan Pengembangan Dayah	1.322.846.660,00	(1.819.097.702,00)	3.141.944.362,00	(172,72)
32	Sekretariat MPU	163.957.891,00	135.879.120,00	28.078.771,00	20,66
33	Sekretariat Baitul Mal	98.645.939,00	104.269.765,00	(5.623.826,00)	(5,39)
34	Sekretariat MAA	117.263.585,00	79.315.505,00	37.948.080,00	47,84
35	Sekretariat MPD	120.063.550,00	152.403.800,00	(32.340.250,00)	(21,22)
	Jumlah	41.756.147.395,36	41.048.620.645,92	707.526.749,44	1,72

Beban Barang – LO sebesar Rp41.756.147.395,36 sedangkan Belanja barang – LRA sebesar Rp38.018.628.219,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.737.519.176,36. Penjelasan selisih adalah sebagai berikut (rincian dapat dilihat pada **Lampiran 21**).

- Beban Bahan-bahan Baku -LO dan Belanja Bahan-bahan Baku – LRA selisih sebesar (Rp24.700.000,00) karena terdapat Reklasifikasi dari belanja bahan baku (terali besi) ke KIB B alat kantor lainnya sebesar Rp24.700.000,00;
- Beban Bahan-bahan Lainnya – LO dan Belanja Bahan -bahan Lainnya - LRA selisih sebesar Rp285.629.500,00 karena terdapat persediaan awal tahun 2023 sebesar Rp292.661.800,00 dan adanya persediaan akhir tahun 2023 sebesar Rp7.032.200,00;
- Beban Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Beban Alat Tulis Kantor – LO dan Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Belanja Alat Tulis Kantor - LRA selisih sebesar Rp159.996.390,00 karena terdapat persediaan awal tahun 2023 sebesar



- Rp31.911.960,00, adanya persediaan akhir tahun 2023 sebesar Rp17.009.070,00, dan adanya hibah sebesar Rp145.093.500,00;
- d. Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender – LO dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender – LRA selisih sebesar Rp87.000,00 karena terdapat persediaan awal tahun 2023 sebesar Rp87.000,00;
  - e. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik selisih sebesar Rp741.480,00 karena terdapat persediaan awal tahun 2023 Rp1.578.480,00 dan persediaan akhir tahun 2023 sebesar Rp837.000,00;
  - f. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya -LO dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya – LRA selisih sebesar Rp1.210.454,00 karena terdapat persediaan awal tahun 2023 sebesar Rp90.050.584,00 dan adanya persediaan akhir tahun 2023 sebesar Rp88.840.130,00;
  - g. Beban Obat-Obatan-Obat – LO dan Belanja Obat-obatan-Obat - LRA selisih sebesar Rp1.656.664.098,18 karena terdapat persediaan awal tahun 2023 sebesar Rp1.884.811.260,29, adanya persediaan akhir tahun 2023 sebesar Rp3.375.412.366,91 dan adanya hibah sebesar Rp3.147.265.204,80;
  - h. Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya – LO dan Belanja Obat-obatan-Obat-obatan Lainnya – LRA selisih sebesar (Rp1.585.969.081,82) karena terdapat persediaan awal tahun 2023 sebesar Rp76.754.925,00 dan persediaan akhir tahun 2023 sebesar Rp1.762.527.156,82 serta reklasifikasi tambah dari Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp99.803.150,00;
  - i. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat – LO dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - LRA selisih sebesar Rp164.293.511,00 karena terdapat persediaan awal tahun 2023 sebesar Rp18.854.441.992,06 dan adanya persediaan akhir tahun 2023 sebesar Rp18.590.345.331,06 serta reklasifikasi kurang ke Beban Obat-obatan Lainnya sebesar Rp99.803.150,00;
  - j. Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga – LO dan Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga – LRA selisih sebesar Rp2.857.016.422,00 karena terdapat persediaan awal tahun 2023 sebesar Rp2.857.016.422,00;
  - k. Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya – LO dan Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya – LRA selisih sebesar Rp27.549.403,00 karena terdapat persediaan akhir tahun 2023 sebesar Rp40.510.340,00 dan adanya Hibah dari pemerintah Daerah berupa persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya dengan BAST Nomor 018/BAST/BPBA/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp68.059.743,00; dan
  - l. Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya – LO dan Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya – LRA selisih sebesar Rp195.000.000,00 karena terdapat persediaan awal tahun 2023 sebesar Rp195.000.000,00.

**5.4.2.1.3 Beban Jasa**

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp89.280.015.850,96**      **Rp108.188.858.437,48**

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban jasa tahun 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp89.280.015.850,96 dan Rp108.188.858.437,48. Rincian beban jasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.116**  
**Rincian Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Jasa Kantor	79.390.828.940,00	80.383.116.176,53	(992.287.236,53)	(1,23)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1.114.920.443,52	1.360.639.318,44	(245.718.874,92)	(18,06)
3	Beban Sewa Tanah	270.450.000,00	150.625.000,00	119.825.000,00	79,55
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.311.889.939,02	1.315.300.000,00	996.589.939,02	75,77
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.690.363.150,42	2.060.238.070,51	(369.874.920,09)	(17,95)
	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	9.081.819,00	(9.081.819,000)	(100,00)
	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	29.000.000,00	6.000.000,00	23.000.000,00	383,33
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.546.274.550,00	3.633.561.453,00	(1.087.286.903,00)	(29,92)
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	317.561.500,00	173.849.400,00	143.712.100,00	82,66
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.608.727.328,00	1.522.153.400,00	86.573.928,00	5,69
9	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	375.000.000,00	(375.000.000,00)	(100,00)
10	Beban Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	0,00	727.110.000,00	(727.110.000,00)	(100,00)
11	Beban Penghargaan Atas Suatu Prestasi	0,00	1.513.700.000,00	(1.513.700.000,00)	(100,00)
12	Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya/Masyarakat	0,00	270.220.000,00	(270.220.000,00)	(100,00)
13	Beban Makanan dan Minuman	0,00	12.565.501.600,00	(12.565.501.600,00)	(100,00)
14	Beban Pakaian	0,00	2.122.762.200,00	(2.122.762.200,00)	(100,00)
	Jumlah	89.280.015.850,96	108.188.858.437,48	(18.908.842.586,52)	(17,48)

**Tabel 5.117**  
**Rekapitulasi Beban Jasa Per SKPK Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Dinas Pendidikan	8.184.461.275,00	13.119.861.593,55	(4.935.400.318,55)	(37,62)
2	Dinas Kesehatan	13.495.675.497,00	12.310.624.763,00	1.185.050.734,00	9,63
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.160.033.624,00	2.239.983.024,00	(1.079.949.400,00)	(48,21)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.777.777.705,00	2.520.757.145,00	(742.979.440,00)	(29,47)



No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	3.947.594.380,00	5.627.572.780,00	(1.679.978.400,00)	(29,85)
6	Dinas Sosial	219.743.602,00	316.875.424,00	(97.131.822,00)	(30,65)
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.178.175.082,00	1.559.057.874,00	(380.882.792,00)	(24,43)
8	Dinas Pertanahan	93.129.727,00	119.262.822,00	(26.133.095,00)	(21,91)
9	Dinas Lingkungan Hidup	28.938.586.008,00	27.321.565.081,00	1.617.020.927,00	5,92
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	438.349.318,00	513.843.925,00	(75.494.607,00)	(14,69)
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	354.785.680,00	507.428.835,00	(152.643.155,00)	(30,08)
12	Dinas Perhubungan	1.226.483.529,00	1.450.859.702,00	(224.376.173,00)	(15,47)
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	810.980.279,00	442.671.906,38	368.308.372,62	83,20
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	676.299.745,00	1.146.401.310,00	(470.101.565,00)	(41,01)
15	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	373.350.650,00	1.793.014.602,00	(1.419.663.952,00)	(79,18)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	324.799.456,00	330.638.648,00	(5.839.192,00)	(1,77)
17	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	736.760.454,00	1.505.073.595,00	(768.313.141,00)	(51,05)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.023.547.506,00	2.197.818.434,00	(174.270.928,00)	(7,93)
19	Sekretariat Daerah	4.678.716.920,32	9.954.407.001,01	(5.275.690.080,69)	(53,00)
20	Inspektorat	475.323.364,00	553.097.681,00	(77.774.317,00)	(14,06)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	444.970.664,00	567.814.210,00	(122.843.546,00)	(21,63)
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.147.344.391,64	2.965.778.455,54	(818.434.063,90)	(27,60)
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.057.785.860,00	1.647.385.214,00	410.400.646,00	24,91
25	Sekretariat DPRK Lhokseumawe	3.766.475.985,00	6.516.385.872,00	(2.749.909.887,00)	(42,20)
26	Kecamatan Banda Sakti	329.519.768,00	656.891.362,00	(327.371.594,00)	(49,84)
27	Kecamatan Blang Mangat	362.119.492,00	538.239.424,00	(176.119.932,00)	(32,72)
28	Kecamatan Muara Satu	286.472.416,00	395.298.433,00	(108.826.017,00)	(27,53)
29	Kecamatan Muara Dua	264.930.364,00	438.542.568,00	(173.612.204,00)	(39,59)
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	698.306.893,00	422.276.664,00	276.030.229,00	65,37
31	Dinas Syariah Islam dan Pengembangan Dayah	5.393.480.901,00	5.367.825.700,00	25.655.201,00	0,48



No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
32	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	1.301.388.480,00	1.737.161.920,00	(435.773.440,00)	(25,09)
33	Sekretariat Baitul Mal	511.398.745,00	568.215.449,00	(56.816.704,00)	(10,00)
34	Sekretariat Majelis Adat Aceh	382.419.370,00	383.854.760,00	(1.435.390,00)	(0,37)
35	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	218.828.720,00	452.372.260,00	(233.543.540,00)	(51,63)
	Jumlah	89.280.015.850,96	108.188.858.437,48	(18.908.842.586,52)	(17,48)

Beban Jasa – LO sebesar Rp89.280.015.850,96 sedangkan Belanja Jasa – LRA sebesar Rp87.118.609.075,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.161.406.775,96. Penjelasan selisih tersebut adalah sebagai berikut (dapat dilihat pada **Lampiran 22**):

- a. Beban Tagihan Telepon selisih sebesar (Rp1.506.043,00) karena terdapat kewajiban Belanja Tagihan Telepon tahun 2023 sebesar Rp808.772,00 dan adanya pembayaran kewajiban Tagihan Telepon tahun 2022 sebesar Rp2.314.815,00;
- b. Beban Tagihan Air selisih sebesar (Rp263.598,00) karena terdapat kewajiban Tagihan Air tahun 2023 sebesar Rp4.981.630,00 dan pembayaran kewajiban Tagihan Air tahun 2022 sebesar Rp5.245.228,00;
- c. Beban Tagihan Listrik selisih sebesar Rp2.204.319.520,00 karena terdapat kewajiban tahun 2023 sebesar Rp6.401.241.385,00 dan pembayaran kewajiban tagihan Listrik tahun 2022 sebesar Rp4.196.921.865,00;
- d. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan selisih sebesar (Rp40.400.698,00), karena terdapat pembayaran kewajiban tahun 2023 sebesar Rp11.189.355,00 dan pembayaran kewajiban tahun 2022 sebesar Rp51.590.053,00;
- e. Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN selisih sebesar (Rp81.269.939,00) karena adanya pembayaran kewajiban tahun 2022 sebesar Rp81.269.939,00;
- f. Beban Asuransi Barang Milik Daerah selisih sebesar (Rp11.893.555,48) karena terdapat Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 sebesar Rp39.951.262,33 dan Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2022 yang telah jatuh tempo pada tahun 2023 sebesar Rp28.057.706,85;
- g. Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang selisih sebesar (Rp14.597.560,98) karena terdapat Beban Sewa Dibayar Dimuka tahun 2023 sebesar Rp14.597.560,98;
- h. Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor selisih sebesar Rp134.822.180,10 karena terdapat Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gedung Kantor tahun 2023 sebesar Rp136.986.163,89 dan Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gedung Kantor tahun 2022 yang telah jatuh tempo pada tahun 2023 sebesar Rp271.808.343,99;
- i. Beban Sewa Bangunan Gudang selisih sebesar Rp26.630.136,99 karena Beban Sewa Bangunan Gudang tahun 2022 yang telah jatuh tempo pada tahun 2023 sebesar Rp26.630.136,99;
- j. Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya selisih senilai (Rp26.666.666,67) karena terdapat Beban Sewa Dibayar Dimuka Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp26.666.666,67;



- k. Beban Sewa Rumah Negara Golongan III selisih sebesar Rp50.000.000,00 karena terdapat Beban Sewa Rumah Negara Golongan III tahun 2022 yang telah jatuh tempo pada tahun 2023 sebesar Rp50.000.000,00;
- l. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air selisih sebesar (Rp17.970.000,00) karena terdapat pembayaran kewajiban tahun 2022 sebesar Rp17.970.000,00; dan
- m. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya selisih sebesar (Rp59.797.000,00) karena terdapat pembayaran kewajiban tahun 2022 sebesar Rp59.797.000,00.

**5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan**

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp8.197.639.280,00**                      **Rp12.019.913.144,50**

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksud untuk mempertahankan Aset Tetap atau aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal agar dapat memperpanjang umur ekonomis. Beban Pemeliharaan tahun 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp8.197.639.280,00 dan Rp12.019.913.144,50, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.118**  
**Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Pemeliharaan Tanah	9.550.000,00	261.590.000,00	(252.040.000,00)	(96,35)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.585.379.971,00	4.194.709.783,00	(609.329.812,00)	(14,53)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.254.114.159,00	6.870.524.311,50	(3.616.410.152,50)	(52,64)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.321.395.150,00	693.089.050,00	628.306.100,00	90,65
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	27.200.000,00	0,00	27.200.000,00	0,00
	Jumlah	8.197.639.280,00	12.019.913.144,50	(3.822.273.864,50)	(31,80)

Pada tahun 2023, Belanja Pemeliharaan – LRA sebesar Rp9.407.544.971,00 sedangkan Beban Pemeliharaan – LO sebesar Rp8.197.639.280,00 sehingga terdapat selisih antara belanja pemeliharaan dengan beban pemeliharaan sebesar Rp1.209.905.691,00.

Penjelasan selisih Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO sebagai berikut (rincian dapat dilihat pada **Lampiran 23**):

- a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor karena ada kewajiban tahun 2023 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp36.025.509,00; dan
- b. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya karena ada reklasifikasi Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp1.245.931.200,00).

**Tabel 5.119**  
**Rekapitulasi Beban Pemeliharaan Per SKPK Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	121.180.479,00	1.070.459.400,00	(949.278.921,00)	(88,68)
2	Dinas Kesehatan	1.925.680.100,00	1.193.855.674,00	731.824.426,00	61,30





No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	676.471.400,00	740.970.750,00	(64.499.350,00)	(8,70)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	125.464.100,00	132.819.400,00	(7.355.300,00)	(5,54)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	371.708.157,00	324.874.000,00	46.834.157,00	14,42
6	Dinas Sosial	58.538.000,00	59.861.290,00	(1.323.290,00)	(2,21)
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	74.129.000,00	69.889.500,00	4.239.500,00	6,07
8	Dinas Pertanahan	64.412.100,00	21.890.915,00	42.521.185,00	194,24
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.098.228.967,00	1.053.963.680,00	44.265.287,00	4,20
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	136.302.400,00	122.758.300,00	13.544.100,00	11,03
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	132.232.857,00	265.554.400,00	(133.321.543,00)	(50,20)
12	Dinas Perhubungan	389.639.268,00	1.211.648.782,00	(822.009.514,00)	(67,84)
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	75.050.000,00	113.200.000,00	(38.150.000,00)	(33,70)
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	52.100.500,00	76.518.400,00	(24.417.900,00)	31,91
15	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	54.486.573,00	19.484.200,00	35.002.373,00	179,64
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	112.686.514,00	11.621.200,00	101.065.314,00	869,66
17	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	200.638.849,00	1.886.330.821,00	(1.685.691.972,00)	(89,36)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	218.764.600,00	377.498.891,50	(158.734.291,50)	(42,05)
19	Sekretariat Daerah	1.024.464.700,00	1.692.152.000,00	(667.687.300,00)	(39,46)
20	Inspektorat	61.185.975,00	61.117.700,00	68.275,00	0,11
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	80.664.200,00	139.514.000,00	(58.849.800,00)	(42,18)
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	246.789.200,00	360.705.000,00	(113.915.800,00)	(31,58)
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	37.614.250,00	32.846.900,00	4.767.350,00	14,51
24	Sekretariat DPRK	160.788.374,00	442.025.466,00	(281.237.092,00)	(63,62)
25	Kecamatan Banda Sakti	56.760.216,00	81.870.000,00	(25.109.784,00)	(30,67)
26	Kecamatan Blang Mangat	126.417.901,00	49.827.000,00	76.590.901,00	153,71
27	Kecamatan Muara Satu	96.752.340,00	73.670.000,00	23.082.340,00	31,33
28	Kecamatan Muara Dua	141.075.000,00	166.917.500,00	(25.842.500,00)	(15,48)
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	109.481.500,00	43.122.260,00	66.359.240,00	153,89
30	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	59.858.300,00	22.454.500,00	37.403.800,00	166,58
31	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	39.450.000,00	8.469.100,00	30.980.900,00	365,81
32	Sekretariat Baitul Mal	25.390.000,00	28.000.000,00	(2.610.000,00)	(9,32)
33	Sekretariat Majelis Adat Aceh	13.820.960,00	7.922.115,00	5.898.845,00	74,46



No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
34	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	29.412.500,00	56.100.000,00	(26.687.500,00)	(47,57)
	Jumlah	8.197.639.280,00	12.019.913.144,50	(3.822.273.864,50)	(31,80)

**5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas**

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp26.224.373.459,00**                      **Rp25.221.117.808,00**

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban mengeluarkan uang pemerintah kepada yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan, baik dalam daerah maupun luar daerah demi kepentingan pemerintahan.

Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp26.224.373.459,00 dan Rp25.221.117.808,00. Rincian perjalanan dinas adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.120**  
**Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	19.982.707.909,00	20.689.166.676,00	(706.458.767,00)	(3,41)
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	81.315.021,00	112.601.476,00	(31.286.455,00)	(27,79)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.912.542.200,00	4.372.820.000,00	1.539.722.200,00	35,21
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	186.715.000,00	0,00	186.715.000,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61.093.329,00	46.529.656,00	14.563.673,00	31,30
	Jumlah	26.224.373.459,00	25.221.117.808,00	1.003.255.651,00	3,98

Tidak terdapat selisih antara Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas, dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

Adapun Rincian Beban Perjalanan Dinas masing-masing SKPK dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.121**  
**Rekapitulasi Beban Perjalanan Dinas Per SKPK Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	898.173.719,00	752.156.230,00	146.017.489,00	19,41
2	Dinas Kesehatan	3.207.673.018,00	2.621.672.398,00	586.000.620,00	22,35
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	547.350.977,00	273.967.885,00	273.383.092,00	99,79
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89.970.798,00	109.695.997,00	(19.725.199,00)	17,98
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	148.497.731,00	130.919.143,00	17.578.588,00	13,43
6	Dinas Sosial	250.252.000,00	322.327.372,00	(72.075.372,00)	(22,36)
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	526.617.380,00	512.270.103,00	14.347.277,00	2,80



No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
8	Dinas Pertanahan	191.951.000,00	151.152.430,00	40.798.570,00	26,99
9	Dinas Lingkungan Hidup	219.872.984,00	158.611.998,00	61.260.986,00	38,62
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	131.654.669,00	169.695.700,00	(38.041.031,00)	(22,42)
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	529.471.748,00	383.569.473,00	145.902.275,00	38,04
12	Dinas Perhubungan	251.013.350,00	126.792.500,00	124.220.850,00	97,97
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	101.060.441,00	146.173.780,00	(45.113.339,00)	(30,86)
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	682.295.490,00	396.580.742,00	285.714.748,00	72,04
15	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	191.103.980,00	825.848.778,00	(634.744.798,00)	(76,86)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78.706.421,00	109.998.200,00	(31.291.779,00)	(28,45)
17	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	575.119.464,00	564.011.435,00	11.108.029,00	1,97
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	701.435.380,00	754.463.466,00	(53.028.086,00)	(7,03)
19	Sekretariat Daerah	5.417.244.186,00	4.161.230.941,00	1.256.013.245,00	30,18
20	Inspektorat	1.726.002.168,00	2.258.537.253,00	(532.535.085,00)	(23,58)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	727.137.238,00	713.570.712,00	13.566.526,00	1,90
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.377.565.375,00	1.452.343.618,00	(74.778.243,00)	(5,15)
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	569.724.586,00	559.783.290,00	9.941.296,00	1,78
24	Sekretariat DPRK Lhokseumawe	5.110.413.928,00	5.760.010.172,00	(649.596.244,00)	(11,28)
25	Kecamatan Banda Sakti	90.000.000,00	170.887.476,00	(80.887.476,00)	(47,33)
26	Kecamatan Blang Mangat	79.712.398,00	103.677.476,00	(23.965.078,00)	(23,12)
27	Kecamatan Muara Satu	84.700.000,00	137.000.000,00	(52.300.000,00)	(38,18)
28	Kecamatan Muara Dua	122.973.152,00	131.661.540,00	(8.688.388,00)	(6,60)
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	657.261.277,00	180.188.030,00	477.073.247,00	264,76
30	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	574.880.221,00	577.235.770,00	(2.355.549,00)	(0,41)
31	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	93.924.530,00	161.285.400,00	(67.360.870,00)	(41,77)
32	Sekretariat Baitul Mal	93.000.000,00	99.738.900,00	(6.738.900,00)	(6,76)
33	Sekretariat Majelis Adat Aceh	69.309.350,00	99.077.900,00	(29.768.550,00)	(30,05)
34	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	108.304.500,00	144.981.700,00	(36.677.200,00)	(25,30)
	Jumlah	26.224.373.459,00	25.221.117.808,00	1.003.255.651,00	3,98

**5.4.2.1.6** **Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat-LO** **Tahun 2023** **Tahun 2022**  
**Rp862.040.500,00** **Rp0,00**

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp862.040.500,00 dan Rp0,00. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 5.122**  
**Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	Naik/ Turun
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	589.820.500,00	0,00	589.820.500,00	0,00
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	272.220.000,00	0,00	272.220.000,00	0,00
	Jumlah	862.040.500,00	0,00	862.040.500,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LRA dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO.

**5.4.2.1.7** **Beban Barang dan Jasa BOS-LO** **Tahun 2023** **Tahun 2022**  
**Rp16.180.875.800,00** **Rp0,00**

Beban Barang dan Jada BOS-LO untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.180.875.800,00 dan Rp0,00. Pada tahun 2022, Beban Barang dan Jasa – LO dicatat pada akun Beban Persediaan dan adanya perubahan kodefikasi sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.123**  
**Beban Barang dan Jasa BOS – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Barang dan Jasa BOS – LO	16.180.875.800,00	0,00	16.180.875.800,00	0,00
	Jumlah	16.180.875.800,00	0,00	16.180.875.800,00	0,00

Belanja Barang dan Jasa BOS – LRA sebesar Rp16.180.875.800,00 sedangkan Beban Barang dan Jasa – LO sebesar Rp16.180.875.800,00 sehingga tidak terdapat selisih antara Belanja Barang dan Jasa BOS dengan Beban Barang dan Jasa BOS – LO.

**5.4.2.1.8** **Beban Subsidi** **Tahun 2023** **Tahun 2022**  
**Rp470.000.000,00** **Rp200.000.000,00**

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kota kepada perusahaan/lembaga tertentu agar jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi tahun 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp470.000.000,00 dan Rp200.000.000,00 sebagai berikut:

**Tabel 5.124**  
**Rincian Beban Subsidi Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	470.000.000,00	200.000.000,00	270.000.000,00	135
	Jumlah	470.000.000,00	200.000.000,00	270.000.000,00	135



Tahun 2022 belanja Subsidi – LRA sebesar Rp200.000.000,00 sedangkan Beban Subsidi – LO sebesar Rp200.000.000,00 sehingga tidak terdapat selisih antara Belanja Subsidi dengan Beban Subsidi.

#### 5.4.2.1.9 Beban Hibah

**Tahun 2023**  
**Rp23.473.953.742,00**

**Tahun 2022**  
**Rp34.226.957.487,00**

Beban Hibah merupakan beban atas hibah Pemerintah Daerah yang disalurkan dalam bentuk tunai yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah dalam bentuk uang dicatat sesuai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban Hibah tahun 2023 dan 2022 masing-masing disajikan Rp23.473.953.742,00 dan Rp34.226.957.487,00. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.125**  
**Rincian Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.234.995.980,00	3.005.413.340,00	(770.417.360,00)	(25,63)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.511.302.017,00	1.314.302.017,00	(6.197.000.000,00)	471,51
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.500.000,00	120.000.000,00	(70.500.000,00)	(58,75)
4	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	25.000.000,00	148.376.000,00	(123.376.000,00)	(83,15)
5	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.057.200.000,00	2.307.632.700,00	(1.250.432.700,00)	(54,19)
6	Dinas Kesehatan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Lingkungan hidup	0,00	633.700.000,00	(633.700.000,00)	(100,00)
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	0,00	63.120.000,00	(63.120.000,00)	(100,00)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB	0,00	1.160.000.000,00	(1.160.000.000,00)	(100,00)
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.579.897.300,00	1.677.128.300,00	5.902.769.000,00	351,96
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
12	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	4.836.058.445,00	22.177.392.290,00	(17.341.333.845,00)	(78,19)
13	Dinas Sosial	0,00	229.465.000,00	(229.465.000,00)	(100,00)
14	Sekretariat Daerah	0,00	1.160.427.840,00	(1.160.427.840,00)	(100,00)
	Jumlah	23.473.953.742,00	34.226.957.487,00	(10.753.003.745,00)	(31,42)

Beban Hibah – LO sebesar Rp23.473.953.742,00 dan Belanja Hibah – LRA sebesar Rp22.501.686.262,00 sehingga terdapat selisih Rp972.267.480,00. Penjelasan selisih tersebut adalah sebagai berikut (dapat dilihat pada **Lampiran 25**):

- a. Selisih Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat – LRA sebesar (Rp11.587.500,00) karena adanya koreksi beban persediaan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga sebesar



Rp294.200.000,00 dan terdapat persediaan akhir tahun 2023 sebesar Rp305.787.500,00;

- b. Selisih Beban Hibah Barang kepada BUMD dan Belanja Hibah Barang kepada BUMD sebesar Rp423.443.980,00 karena terdapat kewajiban tahun 2023 sebesar Rp423.443.980,00;
- c. Selisih Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan – LO dan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan – LRA sebesar Rp4.227.064.445,00 karena adanya koreksi persediaan yang telah diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp4.227.064.445,00; dan
- d. Selisih Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan – LRA sebesar (Rp3.666.653.445,00) karena terdapat persediaan awal tahun 2023 sebesar Rp2.250.312.900,00 dan persediaan akhir tahun 2023 sebesar (Rp5.916.966.345,00).

#### 5.4.2.1.10 Beban Bantuan Sosial

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp31.003.721.155,00**            **Rp40.463.863.030,53**

Beban Bantuan Sosial merupakan beban atas bantuan sosial Pemerintah Daerah dalam bentuk tunai/barang/jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Beban Bantuan Sosial tahun 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp31.033.721.155,00 dan Rp40.463.863.030,53. Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.126**  
**Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	1.898.986.672,00	10.024.635.325,00	(8.125.648.653,00)	(81,06)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	19.151.416.455,00	14.735.951.720,53	4.415.464.734,47	29,96
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	507.210.500,00	(507.210.500,00)	(100,00)
4	Dinas Kesehatan	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	799.124.000,00	533.774.960,00	265.349.040,00	49,71
6	Dinas Sosial	0,00	169.698.000,00	(169.698.000,00)	(100,00)
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.390.954.028,00	5.964.681.550,00	(3.573.727.522,00)	(59,91)
8	Sekretariat Baitul Mal	6.714.100.000,00	8.449.648.975,00	(1.735.548.975,00)	(20,54)
9	Sekretariat Daerah	49.140.000,00	75.762.000,00	(26.622.000,00)	(35,14)
	Jumlah	31.003.721.155,00	40.463.863.030,53	(9.460.141.875,53)	(23,38)



Belanja Bantuan Sosial – LRA sebesar Rp31.141.171.655,00 sedangkan Beban Bantuan Sosial – LO sebesar Rp31.003.721.155,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp137.450.500. Penjelasan selisih tersebut adalah sebagai berikut (rincian dapat dilihat pada **Lampiran 26**):

- Selisih Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu – LRA dan Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp134.600.000,00 karena terdapat koreksi kurang persediaan akhir barang yang diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp134.600.000,00;
- Selisih Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga – LRA dan Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga – LO sebesar Rp1.818.750,00 karena terdapat persediaan akhir tahun 2023 sebesar Rp111.481.250,00 dan adanya koreksi kurang persediaan barang yang diserahkan kepada keluarga sebesar Rp109.662.500,00; dan
- Selisih Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat – LRA dan Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat – LO sebesar Rp1.031.750,00 karena terdapat persediaan akhir tahun 2023 sebesar Rp1.703.996.705,00 dan koreksi kurang persediaan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp1.702.964.955,00.

**5.4.2.1.11** **Beban Penyisihan Piutang** **Tahun 2023**  
**Rp3.384.242.605,80** **Tahun 2022**  
**Rp384.855.623,45**

Beban Penyisihan Piutang adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang merupakan bagian dari upaya menyajikan akun piutang yang mendekati kebenaran kemampuan konversinya menjadi kas. Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.384.242.605,80 dan Rp384.855.623,45. Rincian Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.127**  
**Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	2.640.900.222,60	21.277,80	2.640.878.944,80	12.411.428,55
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	527.172.550,00	357.813.116,50	169.359.433,50	47,33
3	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	216.169.833,20	27.021.229,15	189.148.604,05	700,00
	Jumlah	3.384.242.605,80	384.855.623,45	2.999.386.982,35	779,35

Adapun penjelasan beban penyisihan piutang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Beban Penyisihan Piutang Pajak tahun 2023 sebesar Rp2.640.900.222,60 dikarenakan terdapat pengaruh penambahan umur piutang pajak sebesar Rp2.653.106.693,15 dan adanya pembayaran piutang pajak sebesar Rp12.206.470,55.
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2023 sebesar Rp527.172.550,00 dikarenakan terdapat pengaruh penambahan umur piutang retribusi sebesar



Rp536.542.550,00 dan adanya pembayaran piutang retribusi sebesar Rp9.370.000,00.

- c. Beban Penyisihan Piutang Lainnya tahun 2023 sebesar Rp216.169.833,20 dikarenakan pengaruh penambahan umur piutang sebesar Rp216.169.833,20.

**5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi** **Tahun 2023**  
**Rp114.838.448.734,14** **Tahun 2022**  
**Rp117.755.935.992,00**

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tidak Berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp114.838.448.734,14 dan Rp117.755.935.992,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.128**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	Naik/ Turun
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	20.881.534.295,45	24.810.868.713,00	(3.929.334.417,55)	(15,84)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.098.342.179,18	13.485.621.024,00	612.721.155,18	4,54
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	79.758.645.259,51	79.324.595.671,00	434.049.588,51	0,55
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	99.927.000,00	134.850.584,00	(34.923.584,00)	(25,90)
	Jumlah	114.838.448.734,14	117.755.935.992,00	(2.917.487.257,86)	(2,48)

Rincian beban penyusutan dan amortisasi tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

**5.4.2.2.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin** **Tahun 2023**  
**Rp20.881.534.295,45** **Tahun 2022**  
**Rp24.810.868.713,00**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp20.881.534.295,45 dan Rp24.810.868.713,00. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.129**  
**Rekapitulasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**  
**Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Penyusutan Alat Besar	1.279.696.327,00	1.536.078.739,00	(256.382.412,00)	(16,69)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	3.554.134.537,83	3.713.291.536,00	(159.156.998,17)	(4,29)
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	222.485.242,00	229.150.448,00	(6.665.206,00)	(2,91)
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	238.266.740,00	560.126.714,00	(321.859.974,00)	(57,46)
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.441.124.059,40	6.859.138.386,00	(1.418.014.326,60)	(20,67)
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan	496.402.199,19	615.106.280,00	(118.704.080,81)	(19,30)





No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
	Pemancar				
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.956.578.123,22	2.841.071.682,00	115.506.441,22	4,07
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.444.897.309,21	1.810.916.499,00	(366.019.189,79)	(20,21)
9	Beban Penyusutan	44.368.994,00	56.297.391,00	(11.928.397,00)	(21,19)
10	Beban Penyusutan Komputer	4.424.813.987,70	6.036.862.218,00	(1.612.048.230,30)	(26,70)
11	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	60.758.915,34	54.481.706,00	6.277.209,34	11,52
12	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	99.301.337,00	97.677.768,00	1.623.569,00	1,66
13	Beban Penyusutan Alat Peraga	5.602.590,00	5.602.590,00	0,00	0,00
14	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	388.378.227,01	155.410.089,00	232.968.138,01	149,91
15	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	224.725.706,55	239.656.667,00	(14.930.960,45)	(6,23)
	Jumlah	20.881.534.295,45	24.810.868.713,00	(3.929.334.417,55)	(15,48)

**5.4.2.2.2** **Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan** **Tahun 2023** **Tahun 2022**  
**Rp14.098.342.179,18** **Rp13.485.621.024,00**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp14.098.342.179,18 dan Rp13.485.621.024,00. Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.130**  
**Rekapitulasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**  
**Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	13.472.693.040,83	12.919.562.049,00	553.130.991,83	4,28
2	Beban Penyusutan Monumen	269.081.319,38	267.310.095,00	1.771.224,38	0,66
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	2.904.062,50	2.904.062,00	0,50	0,00
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	353.663.756,47	295.844.818,00	57.818.938,47	19,54
	Jumlah	14.098.342.179,18	13.485.621.024,00	612.721.155,18	4,54

**5.4.2.2.3** **Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi** **Tahun 2023** **Tahun 2022**  
**Rp79.758.645.259,51** **Rp79.324.595.671,00**

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp79.758.645.259,51 dan Rp79.324.595.671,00. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.131**  
**Rekapitulasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**  
**Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	64.955.523.710,77	65.245.342.141,00	(289.818.430,23)	(0,44)
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	12.982.875.214,95	12.360.686.317,00	622.188.897,95	5,03



No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
3	Beban Penyusutan Instalasi	842.147.570,00	835.131.532,00	7.016.038,00	0,84
4	Beban Penyusutan Jaringan	978.098.763,79	883.435.681,00	94.663.082,79	10,72
	Jumlah	79.758.645.259,51	79.324.595.671,00	434.049.588,51	0,55

**5.4.2.2.4** **Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud** **Tahun 2023** **Tahun 2022**  
**Rp99.927.000,00** **Rp134.850.584,00**

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp99.927.000,00 dan Rp134.850.584,00. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.132**  
**Rekapitulasi Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud**  
**Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	99.927.000,00	134.850.584,00	(34.923.584,00)	(25,90)
	Jumlah	99.927.000,00	134.850.584,00	(34.923.584,00)	(25,90)

**5.4.2.3** **Beban Transfer** **Tahun 2023** **Tahun 2022**  
**Rp48.231.695.144,00** **Rp45.848.011.470,00**

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer tahun 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp48.231.695.144,00 dan Rp45.848.011.470,00.

**Tabel 5.133**  
**Rekapitulasi Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1	Beban Bagi Hasil	3.183.566.844,00	1.857.425.770,00	1.326.141.074,00	71,40
2	Beban Bantuan Keuangan	45.048.128.300,00	43.990.585.700,00	1.057.542.600,00	2,40
	Jumlah	48.231.695.144,00	45.848.011.470,00	2.383.683.674,00	5,20

Rincian masing-masing Beban Transfer adalah sebagai berikut:

**5.4.2.3.1** **Beban Bagi Hasil** **Tahun 2023** **Tahun 2022**  
**Rp3.183.566.844,00** **Rp1.857.425.770,00**

Beban bagi hasil pendapatan lainnya kepada pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa tahun 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp3.183.566.844,00 dan Rp1.857.425.770,00. Rincian Beban bagi hasil adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.134**  
**Rincian Beban Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.843.458.400,00	1.659.031.000,00	1.184.427.400,00	71,39



No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	340.108.444,00	198.394.770,00	141.713.674,00	71,43
	Jumlah	3.183.566.844,00	1.857.425.770,00	1.326.141.074,00	71,40

Tahun 2023 Belanja Bagi Hasil – LRA sebesar Rp3.814.825.000,00 sedangkan Beban Bagi Hasil– LO sebesar Rp3.183.566.844,00 tidak terdapat selisih antara Belanja Bagi Hasil – LRA dengan Beban Bagi Hasil – LO.

**5.4.2.3.2 Beban Bantuan Keuangan** **Tahun 2023**  
**Rp45.048.128.300,00** **Tahun 2022**  
**Rp43.990.585.700,00**

Beban Bantuan Keuangan digunakan untuk pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada pemerintah desa. Beban transfer bantuan keuangan kepada pemerintahan desa tahun 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp45.048.128.300,00 dan Rp43.990.585.700,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.135**  
**Rincian Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	45.048.128.300,00	44.027.380.200,00	1.020.748.100,00	2,32
2	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	(36.794.500,00)	36.794.500,00	(100,00)
	Jumlah	45.048.128.300,00	43.990.585.700,00	1.057.542.600,00	2,40

Beban Bantuan Keuangan – LO sebesar Rp45.048.128.300,00 sedangkan Belanja Bantuan Keuangan – LRA sebesar Rp116.379.052.970,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp71.330.924.670,00. Penjelasan perbedaan nilai tersebut secara singkat adalah sebagai berikut (rincian dapat dilihat pada **Lampiran 27**):

- Selisih Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota – LO dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota – LRA sebesar Rp9.929.671.415,00 karena adanya pembayaran kompensasi atas Peralihan Aset Aceh Utara senilai Rp9.929.671.415,00; dan
- Selisih Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa – LO dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa – LRA sebesar Rp61.401.253.255,00 merupakan Belanja Dana Desa Tahun 2023.

**5.4.3 Beban Tidak Terduga** **Tahun 2023**  
**Rp56.650.368,00** **Tahun 2022**  
**Rp0,00**

Beban Tidak Terduga terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Beban Tidak Terduga tahun 2023 dan 2022 masing-masing disajikan sebesar Rp56.650.368,00 dan Rp0,00.



**Tabel 5.136**  
**Rincian Beban Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Beban Tak Terduga	52.650.368,00	0,00	52.650.368,00	0,00
	Jumlah	52.650.368,00	0,00	52.650.368,00	0,00

**5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

**Tahun 2023**  
**Rp17.555.209.761,82**

**Tahun 2022**  
**Rp0,00**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional tahun 2023 adalah sebesar Rp16.318.930.117,69 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1) Pendapatan Operasional	Rp737.743.143.111,08
2) Beban Operasional	Rp720.187.933.349,26
3) Surplus/Defisit Operasional	Rp 17.555.209.761,82

**5.4.5 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

**Tahun 2023**  
**(Rp6.716.330.666,33)**

**Tahun 2022**  
**Rp0,00**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan/atau beban yang tidak termasuk dalam kategori kegiatan operasional seperti surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5.137**  
**Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
1	Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	34.431.000,00	0,00	34.431.000,00	0,00
2	Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO	295.285.500,00	0,00	295.285.500,00	0,00
3	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO	39.695.200,00	0,00	39.695.200,00	0,00
4	Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO	3.584.943.816,00	0,00	3.588.161.316,00	0,00
6	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	2.761.975.150,33	0,00	2.761.975.150,33	0,00
7	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	6.716.330.666,33	0,00	6.719.548.166,33	0,00

**5.4.6 Pos Luar Biasa**

**Tahun 2023**  
**Rp0,00**

**Tahun 2022**  
**Rp488.213.432,00**

Pos Luar terdiri dari Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa. Pos Pendapatan Luar Biasa Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan 488.213.432,00.



**5.4.6.1.1 Beban Luar Biasa** **Tahun 2023**  
**Rp0,00** **Tahun 2022**  
**Rp488.213.432,00**

Beban Luar Biasa terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pos Beban Luar Biasa Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan 488.213.432,00. Pos luar biasa tahun 2022 sebesar Rp488.213.432,00 merupakan belanja tidak terduga tahun 2022.

**5.4.7 Surplus/Defisit-LO** **Tahun 2023**  
**Rp10.838.879.095,49** **Tahun 2022**  
**Rp6.914.411.144,93**

Surplus/Defisit LO tahun 2023 adalah sebesar Rp9.482.891.094,68 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

1) Surplus/Defisit Operasional	Rp 17.555.209.761,82
2) Surplus/Defisit Non Operasional	Rp (6.716.330.666,33)
3) Pos Luar Biasa	<u>Rp 0,00</u>
Surplus/Defisit LO	Rp 10.838.879.095,49

**5.5 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi sehubungan dengan kegiatan/aktivitas Operasional, Investasi, dan Pembiayaan. Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Lhokseumawe menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Tujuan pelaporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menggunakan Kas tersebut.

Selama periode 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 Pemerintah Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan/penurunan kas sebesar Rp26.488.883.527,00 dan 2022 sebesar (Rp37.861.226.867,32) terdiri dari:

**Tabel 5.138**  
**Rincian Arus Kas Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	87.822.254.501,00	106.002.182.117,52	(18.179.927.616,52)	(17,15)
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(61.333.467.761,00)	(143.945.758.456,00)	82.612.290.695,00	(57,39)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	96.787,00	82.349.471,16	(82.252.684,16)	(99,88)
Jumlah Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode		26.488.883.527,00	(37.861.226.867,32)	64.350.110.394,32	(169,96)

**5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi** **Tahun 2023**  
**Rp87.822.254.501,00** **Tahun 2022**  
**Rp106.002.182.117,52**

Arus Kas ini merupakan Saldo dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 dan 2022 yang merupakan realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi belanja operasi kegiatan pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

**5.5.1.1 Arus Kas Masuk**

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp755.946.798.672,00**      **Rp789.260.103.279,52**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kota Lhokseumawe selama Tahun 2023 dan Tahun 2022 terdiri dari:

**Tabel 5.139**  
**Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi**  
**Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					
1	Penerimaan Pajak Daerah – LRA	39.586.915.813,00	40.032.463.309,91	(445.547.496,91)	(1,11)
2	Penerimaan Retribusi Daerah – LRA	3.733.420.512,40	3.022.508.323,00	710.912.189,40	23,52
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	3.236.124.545,00	4.350.084.432,00	(1.113.959.887,00)	(25,61)
4	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	21.342.485.463,60	20.501.458.006,37	841.027.457,23	4,10
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil - LRA	25.249.350.413,00	25.508.814.157,00	(259.463.744,00)	(1,02)
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	436.369.459.000,00	415.683.229.737,00	20.686.229.263,00	4,98
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	22.632.985.556,00	33.292.658.226,00	(10.659.672.670,00)	(32,02)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	79.522.976.344,00	59.943.665.527,00	19.579.310.817,00	32,66
9	Penerimaan Dana Insentif	5.730.566.000,00	34.445.081.000,00	(28.714.515.000,00)	(83,36)
10	Penerimaan Dana Desa	61.401.253.255,00	53.900.119.902,00	7.501.133.353,00	13,92
11	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	34.250.277.597,00	29.261.429.715,29	4.988.847.881,71	17,05
12	Penerimaan Bantuan Keuangan	22.668.984.173,00	69.318.590.943,95	(46.649.606.770,95)	(67,30)
13	Penerimaan Hibah	222.000.000,00	0,00	222.000.000,00	100,00
Jumlah Arus Kas Masuk		755.946.798.672,00	789.260.103.279,52	(33.313.304.607,52)	(4,22)

**5.5.1.2 Arus Kas Keluar**

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp668.124.544.171,00**      **Rp683.257.921.162,00**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kota Lhokseumawe selama Tahun 2023 dan Tahun 2022 terdiri dari:

**Tabel 5.140**  
**Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1	Pembayaran Pegawai	316.584.344.048,00	304.916.122.038,00	11.668.222.010,00	3,83
2	Pembayaran Barang dan Jasa	177.812.072.024,00	185.425.254.292,00	(7.613.182.268,00)	(4,11)
3	Pembayaran Subsidi	470.000.000,00	200.000.000,00	270.000.000,00	135,00
4	Pembayaran Belanja Hibah	22.501.686.262,00	36.702.542.385,00	(14.200.856.123,00)	(38,69)
5	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	31.141.171.655,00	49.131.020.993,00	(17.989.849.338,00)	(36,62)
6	Pembayaran Tak Terduga	52.650.368,00	2.134.850.082,00	(2.082.199.714,00)	(97,53)
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke	3.183.566.844,00	1.820.631.270,00	1.362.935.574,00	74,86



No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
	Kabupaten/Kota				
	Pembayaran Belanja Bantuan				
8	Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	9.929.671.415,00	5.000.000.000,00	4.929.671.415,00	98,59
9	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	106.449.381.555,00	97.927.500.102	8.521.881.453,00	8,70
	Jumlah Arus Kas Keluar	668.124.544.171,00	683.257.921.162,00	(15.133.376.991,00)	(2,21)

**5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi** **Tahun 2023** **Tahun 2022**  
**(Rp61.333.467.761,00) (Rp143.945.758.456,00)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 dan 2022 yang merupakan realisasi pendapatan daerah dari penjualan aset daerah setelah dikurangi Belanja Modal Pemerintah berupa pengadaan barang inventaris milik daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan. Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 defisit sebesar (Rp61.333.467.761,00). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

**5.5.2.1 Arus Kas Masuk** **Tahun 2023** **Tahun 2022**  
**Rp3.000.000,00 Rp305.992.800,00**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi sebesar Rp3.000.000,00 merupakan Hasil Penjualan Aset Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pemerintah Kota Lhokseumawe selama Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

**Tabel 5.141**  
**Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi**  
**Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	297.992.800,00	(297.992.800,00)	(100,00)
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	3.000.000,00	8.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)
	Jumlah Arus Kas Masuk	3.000.000,00	305.992.800,00	(302.992.800,00)	(99,02)

**5.5.2.2 Arus Kas Keluar** **Tahun 2023** **Tahun 2022**  
**Rp61.336.467.761,00 Rp144.251.751.256,00**

Arus Kas Keluar sebesar Rp61.336.467.761,00 merupakan Belanja Modal dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata pada Laporan Realisasi Anggaran. Rincian arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Lhokseumawe selama Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 5.142**  
**Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi**  
**Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
1	Belanja Modal Tanah	0,00	13.713.809.182,00	(13.713.809.182,00)	(100,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.627.696.279,00	21.363.441.916,00	(5.735.745.637,00)	(26,85)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.923.145.455,00	40.945.930.770,00	(19.022.785.315,00)	(46,46)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.771.759.227,00	62.614.371.138,00	(43.842.611.911,00)	(70,02)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.013.866.800,00	3.614.198.250,00	399.668.550,00	11,06
6	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(50,00)
	Jumlah Arus Kas Keluar	61.336.467.761,00	144.251.751.256,00	(82.915.283.495,00)	(57,48)

**5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris** **Tahun 2023**  
**Rp96.787,00** **Tahun 2022**  
**Rp82.349.471,16**

Arus Kas ini merupakan Saldo dari Aktivitas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 dan 2022, yaitu Arus Kas dari penerimaan daerah namun bukan merupakan pendapatan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

**5.5.3.1 Arus Kas Masuk** **Tahun 2023**  
**Rp47.712.427.360,40** **Tahun 2022**  
**Rp68.080.645.539,84**

Arus Kas Masuk sebesar Rp47.712.427.360,40 merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe selama Tahun 2023 dan Tahun 2022 terdiri dari:

**Tabel 5.143**  
**Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris**  
**Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris				
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	47.712.427.360,40	67.765.363.254,00	(20.052.935.893,60)	(29,59)
2	Saldo Sisa Uang Transitoris TA. 2022	0,00	315.282.285,84	(315.282.285,84)	(100,00)
	Jumlah Arus Kas Masuk	47.712.427.360,40	68.080.645.539,84	(20.368.218.179,44)	(29,92)

**5.5.3.2 Arus Kas Keluar** **Tahun 2023**  
**Rp47.712.330.573,40** **Tahun 2022**  
**Rp67.998.296.068,68**

Arus Kas Keluar sebesar Rp47.712.330.573,40 merupakan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe selama tahun 2023 dan tahun 2022 terdiri dari:





**Tabel 5.144**  
**Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris**  
**Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris				
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	47.712.330.573,40	67.789.492.061,00	(20.077.161.487,60)	(29,62)
2	Saldo Sisa Uang Transitoris TA. 2022	0,00	208.804.007,68	(208.804.007,68)	(100,00)
	Jumlah Arus Kas Keluar	47.712.330.573,40	67.998.296.068,68	(20.285.965.495,28)	(29,83)

**5.5.4****Saldo Akhir Kas**

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp37.034.515.381,37**            **Rp10.545.631.854,37**

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

**Tabel 5.145**  
**Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di				
1	Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	37.034.515.381,37	10.334.150.946,69	26.697.687.534,68	258,28
2	Kas di Bendahara FKTP	0,00	204.216.827,68	(204.216.827,68)	(100,00)
3	Kas di Bendahara BOS	0,00	4.587.180,00	(4.587.180,00)	(100,00)
4	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	2.650.000,00	(2.650.000,00)	(100,00)
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	26.900,00	(26.900,00)	(100,00)
6	Saldo Akhir Kas	37.034.515.381,37	10.545.631.854,37	26.488.883.527,00	251,18

**5.6****Penjelasan atas Akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan Laporan Keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**5.6.1****Ekuitas Awal**

**Tahun 2023**                      **Tahun 2022**  
**Rp2.151.159.069.220,66**            **Rp2.047.597.067.411,11**

Saldo ekuitas awal tahun 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp2.151.159.069.220,66 dan Rp2.047.597.067.411,11. Saldo ekuitas awal tahun 2023 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2022.



**5.6.2 Surplus/Defisit dari Laporan Operasional (LO)** **Tahun 2023**  
Rp10.838.879.095,49 **Tahun 2022**  
Rp6.914.411.144,93

Saldo surplus/defisit – LO tahun 2023 dan 2022 disajikan masing-masing sebesar Rp10.838.879.095,49 dan Rp6.914.411.144,93. Saldo surplus/defisit – LO tahun 2023 merupakan saldo pendapatan – LO dikurangi dengan beban – LO sebagai berikut:

Pendapatan LO	737.743.143.111,08
Beban LO	720.187.933.349,26
Surplus (Defisit)	17.555.209.761,82
Kegiatan Non Operasional	(6.716.330.666,33)
Surplus (Defisit)	10.838.879.095,49
Pos Luar Biasa	0,00
Surplus (Defisit) – LO	10.838.879.095,49

**5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan** **Tahun 2023**  
(Rp8.945.040.387,58) **Tahun 2022**  
Rp96.647.590.664,62

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai Aset Tetap karena revaluasi Aset Tetap dan lain sebagainya. Adapun rincian koreksi-koreksi ekuitas per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.146**  
**Daftar Koreksi Ekuitas Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
<b>KOREKSI NILAI PERSEDIAAN</b>					
1	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	(237.084.200,00)	0,00	(237.084.200,00)	0,00
2	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	(11.313.593.260,00)	0,00	(11.313.593.260,00)	0,00
3	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	(406.400.000,00)	0,00	(406.400.000,00)	0,00
<b>KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP</b>					
1	Koreksi Aset Tetap	(237.131.614,00)	0,00	(237.131.614,00)	0,00
2	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	22.940.543.195,84	0,00	22.940.543.195,84	0,00
<b>LAIN-LAIN</b>					
1	Koreksi Kas Lainnya	3.260.500,00	0,00	3.260.500,00	0,00
2	Koreksi Piutang	780.511.897,05	(6.037.744.708,24)	6.818.256.605,29	(112,93)
3	Koreksi Investasi Jangka Panjang	(1.537.879.296,00)	0,00	(1.537.879.296,00)	0,00
4	Koreksi Aset Tetap	0,00	103.143.734.076,86	(103.143.734.076,86)	(100,00)
5	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	(2.332.439.393,00)	2.332.439.393,00	(100,00)
6	Koreksi Akumulasi Amortisasi	0,00	(9.680.000,00)	9.680.000,00	(100,00)
7	Koreksi Aset Lain-Lain	(440.547.440,00)	(2.070.651.907,00)	1.630.104.467,00	(78,72)
8	Koreksi Utang PFK	483.000,00	0,00	483.000,00	0,00



No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%Naik/ Turun
9	Koreksi PDD	(9.728.611,00)	1.930.643.240,00	(1.940.371.851,00)	(100,50)
10	Koreksi Utang	(18.487.474.559,47)	2.023.729.356,00	(20.511.203.915,47)	(1.013,53)
	Jumlah	(8.945.040.387,58)	96.647.590.664,62	(105.592.631.052,20)	(109,26)

Rincian penjelasan atas koreksi-koreksi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Koreksi nilai persediaan sebesar (Rp11.957.077.460,00) berupa:
  - 1) Koreksi ekuitas tambah, kurang catat persediaan sebesar Rp51.195.780,00;
  - 2) Koreksi ekuitas kurang, persediaan yang telah diserahkan kepada pihak ketiga dan berdasarkan hasil stock opname sebesar (Rp12.008.273.240,00).
- b. Koreksi Aset Tetap sebesar (Rp237.131.614,00) berupa:
  - 1) Koreksi ekuitas tambah, mutasi masuk antar SKPK sebesar Rp92.551.664.982,00;
  - 2) Koreksi ekuitas kurang, mutasi masuk antar SKPK sebesar (Rp92.551.664.982,00);
  - 3) Koreksi ekuitas tambah, aset yang sebelumnya belum pernah dicatat dan dicatat pada tahun 2023 sebesar Rp105.000.000,00 pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
  - 4) Koreksi ekuitas tambah, berupa ekstrakomptabel tahun sebelumnya dan dikapitalisasi pada tahun 2023 sebesar Rp14.800.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB;
  - 5) Koreksi ekuitas tambah, berupa ekstrakomptabel yang akan dikapitalisasi pada tahun 2023 sebesar Rp227.600.000,00 pada Dinas Kesehatan; dan
  - 6) Koreksi ekuitas kurang, berupa aset tetap peralatan dan mesin yang *double* catat pada SKPK sebesar (Rp584.531.614,00).
- c. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp22.940.543.195,84 yaitu koreksi ekuitas tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp29.432.434.164,59 dan koreksi ekuitas kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp6.491.890.968,75).
- d. Koreksi Kas Lainnya sebesar Rp3.260.500,00 merupakan pajak daerah.
- e. Koreksi Piutang sebesar Rp780.511.897,05 berupa:
  - 1) Koreksi ekuitas tambah, Penyisihan setelah pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp792.896.373,05; dan
  - 2) Koreksi ekuitas kurang, kesalahan pengakuan Piutang Transfer Bagi Hasil dari Pemerintah Aceh TA 2019 sebesar (Rp12.384.476,00).
- f. Koreksi Investasi Jangka Panjang sebesar (Rp1.537.879.296,00) berupa:
  - 1) Koreksi Investasi Jangka Panjang PTPL sebesar Rp1.990.637.588,00 yaitu:
    - a. Koreksi ekuitas tambah sebesar Rp8.559.555.528,00 berupa laba 2022 sebesar Rp1.931.876.619,00, penyesuaian ekuitas sesuai laporan keuangan PTPL tahun 2022 sebesar Rp735.658.101,00, penyesuaian



2022 di tahun 2023 sebesar Rp2.299.512.513,00 dan laba tahun berjalan 2023 sebesar Rp750.591.541,00, dan koreksi deviden PemKo Lhokseumawe sebesar Rp2.841.916.754,00; dan

- b. Koreksi ekuitas kurang sebesar (Rp6.762.171.800,00) berupa dividen 2021 di tahun 2022 sebesar (Rp885.084.432,00) dan dividen Pemerintah Kota Lhokseumawe 2019 s.d. 2022 berdasarkan laporan keuangan PTPL tahun 2023 sebesar (Rp2.841.916.754,00), koreksi penyesuaian ekuitas sesuai laporan 2022 PTPL sebesar (Rp735.658.101,00) dan koreksi penyesuaian 2022 di tahun 2023 sebesar (Rp2.299.512.513,00).
- 2) Koreksi Investasi Jangka Panjang PDAM Ie Beusaree Rata sebesar (Rp3.335.263.024,00) yaitu:
- a. Koreksi ekuitas tambah sebesar Rp678.791.233,00 berupa koreksi saldo laba tahun lalu sebesar Rp13.776.000,00 dan koreksi ekuitas atas nilai investasi permanen kepada PDAM Ie Beusaree Rata sebesar Rp665.015.233,00; dan
  - b. Koreksi ekuitas kurang sebesar (Rp4.014.054.257,00) berupa rugi tahun berjalan 2023 (Rp3.863.618.572,00), koreksi laba/rugi PDAM berdasarkan laporan *audited* sebesar (Rp136.659.685,00) dan koreksi atas saldo laba tahun lalu PDAM Ie Beusaree Rata sebesar (Rp13.776.000,00).
- g. Koreksi aset lain-lain sebesar (Rp440.547.440,00) berupa koreksi *double* catat aset lain-lain yang telah dapat dimanfaatkan kembali.
- h. Koreksi Utang PFK sebesar Rp483.000,00 pelunasan pajak daerah tahun lalu.
- i. Koreksi PDD sebesar (Rp9.728.611,00), berupa lebih bayar PBB tahun lalu.
- j. Koreksi Utang sebesar (Rp18.487.474.559,47) berupa:
- 1) Koreksi ekuitas tambah, penghapusan atau koreksi pembayaran utang rutin Desember 2022 sebesar Rp898.190.316,53; dan
  - 2) Koreksi ekuitas kurang, berupa penambahan utang sebesar (Rp19.385.664.876,00) terdiri atas koreksi utang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar (Rp359.201.000,00) dan koreksi pengakuan utang TA 2021 dan 2022 berdasarkan PMK 90 2023 sebesar (Rp19.026.463.876,00).

#### 5.6.4

#### Ekuitas Akhir

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	<b>Rp2.153.246.161.788,57</b>	<b>Rp2.151.159.069.220,66</b>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.

Saldo Ekuitas akhir sebesar Rp2.153.246.161.788,57 merupakan penjumlahan dari saldo ekuitas awal sebesar Rp2.151.159.069.220,66, surplus/defisit LO sebesar Rp10.838.879.095,49 dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar lain-lain sebesar (Rp8.751.786.527,58).

## 5.7 Penjelasan atas Baitul Mal Kota Lhokseumawe

### 5.7.1 Profil Baitul Mal

#### 5.7.1.1 Latar Belakang Lahirnya Baitul Mal Kota Lhokseumawe

##### Latar Belakang Lahirnya Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Baitul Mal Kota Lhokseumawe adalah lembaga kekhususan Aceh non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Zakat, Infaq, Wakaf dan harta keagamaan lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi Wali Pengawas terhadap Anak Yatim Piatu dan atau pengelola harta warisan tidak memiliki Wali berdasarkan Syariat Islam. Baitul Mal dibentuk berdasarkan amanat Undang – Undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal serta dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Nomor 24 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe.

#### 5.7.1.2 Dasar Hukum

- a. Al-Quran;
- b. Hadist;
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang;
- i. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
- j. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
- k. Keputusan Wali Kota Nomor 366 Tahun 2012 tentang Pemotongan Zakat Infaq; dan
- l. Keputusan Badan Pengawas (Dewas) 1 Nomor 2023 tentang Besaran Alokasi Penyaluran Dana Zakat dan Infak TA 2023.

#### 5.7.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Lhokseumawe terdiri dari tiga komponen sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Badan Baitul Mal Kota;
- c. Sekretariat Baitul Mal Kota; dan
- d. Tenaga Profesional.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 14 tentang 2016, Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe adalah:

No	Nama	Unsur	Jabatan
1	Dr. Tgk. Munawar Khalil, S. Ag., MA	Akademisi	Ketua
2	T. Mohtar Mohamad Said, SH	Praktisi	Sekretaris merangkap Anggota



No	Nama	Unsur	Jabatan
3	Tgk. H. Abu Bakar Ismail, S. AG., S. Pd	Ulama	Anggota

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 91 tentang 2016, Susunan Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe adalah:

No	Nama	Jabatan Pokok
1	Tgk. Syuib	Ketua
2	Saifullah	Keanggotaan
3	Tgk. Saleh Yatim	Keanggotaan
4	Tgk. Muhammad Isa, S. Pd	Keanggotaan
5	Yuswardi, M. Kom. I	Keanggotaan

Susunan Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Pokok
1	Dr. Ir. Tgk. H. Anwar Ali, ST., MT., M. Ag. IPU.AER Penata Tk.I, ( IV/b) NIP. 19690810 2002112 1 001 Irfandi, S.Sos	Plt Kepala Sekretariat
2	Penata (III/c) NIP. 198007112007011002 Badiuzzaman, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3	Penata Muda TKI (III/b) NIP. 197609292012121001 Siti Asiah, S.Sos	Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Informasi
4	Penata (III/c) NIP. 196909302005042002	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program

#### 5.7.1.4 Tugas, Fungsi dan Wewenang

- a. Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan Syariah terhadap:
  - 1) pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK;
  - 2) Pengajuan rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
  - 3) Pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
  - 4) Pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha milik Kabupaten/Kota; dan
  - 5) Fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Kabupaten/Kota.
- b. Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan zakat, infaq, harta wakaf dan harta keagamaan

lainnya dan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota (Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, Pasal 1), dalam rangka meningkatkan pelaksanaan syariat islam dan pemberdayaan ekonomi umat.

- c. Sekretariat BMK mempunyai tugas memberikan pelayanan dan menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan dibuat oleh Badan BMK dan telah disahkan oleh Dewan Pengawas mengenai pengelolaan dan pengembangan di Kabupaten/Kota.
- d. Tenaga Profesional adalah tenaga non PNS yang diangkat sebagai karyawan karena keahliannya, dan bertugas membantu sekretariat menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.

#### 5.7.1.5 Penerimaan

Baitul Mal Kota Lhokseumawe mendapatkan dua sumber penerimaan yaitu dari Pendapatan Zakat dan Pendapatan Infaq. Sesuai dengan SK Penetapan Anggaran Zakat Tahun 2021, penerimaan untuk Zakat dan Infaq pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dianggarkan pada pos Lain-lain PAD Yang Sah. Seluruh dana pembayaran Zakat dan Infaq disetorkan pada Rekening Pembantu Zakat, Infaq Baitul Mal dan akan disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Zakat, Infaq Kota Lhokseumawe.

Pemotongan zakat dan/atau Infak melalui SP2D oleh BUD yang telah dihitung oleh SKPK diperuntukkan untuk:

- a. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir;
- b. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin;
- c. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil;
- d. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf;
- e. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin;
- f. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah;
- g. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil; dan
- h. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq.

Jumlah Penerimaan Zakat dan Infaq selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.147 Penerimaan Zakat dan Infaq TA 2023**

No	Tahun	Penerimaan	Jumlah (Rp)
1	2023	Zakat dan Infaq	Rp6.726.500.196,23

Penyetoran Zakat dan/atau infaq oleh muzakki disetorkan langsung oleh muzakki individu dan kelompok ke Rekening Pembantu Zakat dan Infaq yang disalurkan ke Rekening:

- a. Bank Aceh Norek : 030.01.02.100010-0 (zakat)
- b. Bank Aceh Norek : 030.01.02.100020-0 (infaq)

#### 5.7.1.6 Penyaluran

Penyaluran ZIS TA 2023 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.148 Data Penyaluran Zakat dan Infaq Kota Lhokseumawe TA 2023**

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
---------------	----------	-----------	---



Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Peningkatan pendistribusian dan pendayagunaan ZISWAF			
- Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS senif Fakir	2.040.000.000,00	2.020.000.000,00	99,02
- Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS senif Miskin	2.249.000.000,00	2.195.000.000,00	97,60
- Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS senif Amil	670.400.000,00	670.400.000,00	100,00
- Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS senif Muallaf	45.000.000,00	36.000.000,00	80,00
- Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS senif Gharimin	15.000.000,00	10.000.000,00	66,67
- Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS senif Fisabilillah	58.000.000,00	58.000.000,00	100,00
- Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS senif Ibnu Sabil	285.000.000,00	285.000.000,00	100,00
- Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS senif Infaq	1.499.700.000,00	1.471,460.000,00	98,12
	<b>6.862.100.000,00</b>	<b>6.745.860.000,00</b>	<b>98,31</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat capaian penyaluran 3 (tiga) asnaf yang mencapai 100%, yaitu senif Amil, senif Fisabilillah, senif Ibnu Sabil. Hal ini karena target awal penyalurannya dilakukan pada Bulan Maret mendekati Bulan Syawal Hari Raya Idul Fitri, diutamakan senif Fakir dan senif Miskin karena lebih membutuhkan, sementara itu, persentase terkecil penyaluran berada pada senif Gharimin, yaitu sebesar 66,67%.



## **BAB VI**

### **PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Pembentukan Kota Lhokseumawe didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta daerah otonom mengandung makna adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam konteks pemilihan Kepala Daerah, visi Kepala Daerah terpilih harus dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berlaku selama 5 (lima) tahun. Untuk menyusun visi tersebut, antara lain Kepala Daerah terpilih harus berpedoman kepada dokumen perencanaan makro (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dalam rangka sinkronisasi sasaran pokok dan arah kebijakannya. Atas dasar itu, dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Aceh, maka Visi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 ditetapkan sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KOTA LHOKSEUMAWE BERSYARIAT, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA BERDASARKAN UU-PA DAN MOU HELSINKI”.**

#### **5.1 VISI**

Pengertian pokok unsur-unsur yang terkandung dalam visi daerah Kota Lhokseumawe tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bersyariat, mengandung pengertian bahwa segenap aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan dilandasi oleh nilai-nilai Agama Islam;
- b. Sehat, mengandung pengertian bahwa lingkungan hidup dan masyarakat Kota Lhokseumawe yang teratur bersih dan sehat;
- c. Cerdas, mengandung pengertian bahwa sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe yang berkarakter dan berwawasan global; dan
- d. Sejahtera, mengandung pengertian terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe baik materil maupun spiritual.

#### **5.2 MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI**

Untuk mewujudkan visi Kota Lhokseumawe tersebut ditempuh melalui beberapa misi sebagai berikut:

- a. **Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat**, yaitu membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai dasar dalam mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang islami.



Misi ini **bertujuan** memperkuat pelaksanaan Syariat Islam dengan sasaran menguatnya penegakan Syariat dalam bermasyarakat melalui strategi peningkatan sosialisasi dan edukasi pemahaman Syariat Islam bagi masyarakat dan peningkatan sosialisasi ZIS.

- b. **Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan**, yaitu mengembangkan dan mendorong perekonomian yang berdaya saing dan mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi, membangun kerja sama perekonomian dengan berbagai pihak, pengembangan iklim usaha yang kondusif untuk merangsang investasi dari dalam dan luar negeri, regulasi yang mendukung perkembangan perekonomian terutama usaha kecil dan menengah dan menyinergikan sektor-sektor lain berbasis potensi daerah yang mendukung perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan perikanan.

Misi ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran:

- 1) Menurunkan angka kemiskinan melalui strategi peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja serta peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan anak;
  - 2) Meningkatnya pertumbuhan UMKM melalui strategi peningkatan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima;
  - 3) Meningkatnya iklim investasi melalui strategi peningkatan promosi dan potensi daerah serta percepatan pelayanan investasi melalui *e-permit*; dan
  - 4) Meningkatnya pertumbuhan pariwisata melalui strategi peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang, melibatkan segenap *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan dengan standar kualitas yang tinggi, pendidikan yang memiliki daya saing dan kompetensi yang tinggi mengupayakan sistem pendidikan yang unggul, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat, pendidikan yang menjunjung nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, sehingga dapat terbentuk manusia yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan mengamalkan nilai-nilai agama. Demikian pula, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Misi ini bertujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang dengan sasaran:
  - a) Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas melalui strategi peningkatan kualitas guru dan media pembelajaran;
  - b) Meningkatnya generasi yang berdaya saing melalui strategi peningkatan peran pemuda dalam pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga; dan
  - c) Meningkatnya status tipe Dayah melalui strategi peningkatan sarana dan prasarana Dayah.



- 2) Meningkatkan kualitas kesehatan dengan sasaran:
  - a) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui strategi peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar;
  - b) Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui strategi peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi; dan
  - c) Menurunnya angka kesakitan dan kematian karena penyakit PD3I melalui strategi peningkatan kemitraan kesehatan.
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*), yaitu peningkatan kinerja serta peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan aparatur, pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Demikian pula, memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.

Misi ini bertujuan ;

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*) dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui strategi peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi sesuai prosedur; dan
  - 2) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK terhadap informasi publik melalui strategi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai, yaitu mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan pada masyarakat yang lemah, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar perkotaan, membangun sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas barang, jasa dan orang, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.

Misi ini bertujuan:

- 1) Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar dengan sasaran:

Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat melalui strategi penyediaan sambungan air bersih dan fungsionalisasi PDAM Ie Beusare Rata serta penanganan kawasan kumuh dan sanitasi berbasis masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang handal dengan sasaran:
  - a) Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan melalui strategi peningkatan ruas jalan dalam kondisi mantap.



- b) Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal melalui strategi penataan dan pengembangan sistem keselamatan transportasi secara merata.
- f. Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari, yaitu pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan, mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan;

Misi ini bertujuan:

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran:

- 1) Terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau melalui strategi peningkatan kawasan terbuka hijau; dan
- 2) Terselenggaranya manajemen sampah kota melalui strategi peningkatan manajemen pengelolaan sampah.
- g. Mewujudkan ketenteraman, ketertiban, kedamaian dan persatuan, yaitu menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dengan memantapkan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas.

Misi ini bertujuan:

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan dengan sasaran;

- 1) Meningkatnya pemahaman terhadap Syariat Islam melalui strategi peningkatan patrol dan penertiban qanun Syariat Islam.
- 2) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan melalui strategi peningkatan wawasan kebangsaan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 *Addendum* Perjanjian Peralihan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang Pengalihan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara kepada Kota Lhokseumawe Nomor 18/MOU/2022, Nomor 028/954/2022, dan Nomor 6/MOU/2022.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Taqwallah selaku Sekda Aceh, dari Kabupaten Aceh Utara diwakili oleh H. Muhammad Thaib selaku Bupati Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe diwakili oleh Suaidi Yahya selaku Wali Kota Lhokseumawe. Ketiganya sepakat untuk melakukan *Addendum* atas perjanjian peralihan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang pengalihan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara kepada Kota Lhokseumawe Nomor: 01/Mou/2021, Nomor: 028/16/2021 dan Nomor: 22/Mou/2022 tanggal Lima Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (05-01-2021), selanjutnya disebut “*Addendum* Perjanjian Peralihan”.



Pada Addendum Perjanjian Peralihan pihak Provinsi dan Kota Lhokseumawe akan memberikan bantuan keuangan sebagai bentuk kompensasi kepada pihak Aceh Utara sejumlah Rp44.359.342.829,00 (Empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang akan ditanggung bersama masing-masing sebesar Rp22.179.671.415,00 (Dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima belas ribu rupiah), dan perjanjian kompensasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Kota Lhokseumawe Nomor 028/9174/2013 tanggal 2 Desember 2013 terdapat sisa pembayaran yang masing-masing sebesar Rp1.750.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp23.929.671.415,00, (Dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah) berdasarkan kompensasi yang akan dibayarkan dengan rincian Tahun 2023 sebesar Rp9.929.671.415,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah), telah terjadi pembayaran di tahap I (pertama) pada tanggal 19 Mei 2023 dengan SP2D 06.15/04.0/000147/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.01/5/2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah), tahap ke-II (Dua) pada tanggal 21 Agustus 2023 SP2D 06.15/04.0/000406/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/8/2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah) dan tahap ke-III (Tiga) sebesar Rp3.929.671.415,00 (Tiga miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah) sehingga Pemerintah Kota Lhokseumawe menanggung sisa pembayaran sebesar Rp9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah).

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada pasal 2 ayat 2 poin B dengan bunyi Dana BOP PAUD terdiri atas:

1. BOP Paud Reguler; dan
2. BOP Paud Kinerja

Untuk BOP Paud ada sisa lebih tidak tersalur yang masih di Kas Daerah sebesar Rp3.050.000,00 (Tiga juta lima puluh ribu rupiah), karena ada sekolah yang tidak beroperasi lagi dan ada kelebihan uang Afirmasi di tahun 2020 yang telah disetorkan ke Kas Daerah di Tanggal 7 Juli 2023 sebesar Rp14.000,00 (Empat belas ribu rupiah).

Modal Hibah bantuan dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi ke PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Ie Beusaree Rata sebesar Rp1.000.000.000,00, (Satu miliar rupiah) selama terbentuknya PDAM Ie Beusaree Rata, Pemerintah Kota Lhokseumawe sampai saat ini telah memberikan Penyertaan Modal sejumlah Rp10.452.207.500,00 (Sepuluh milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), dan hibah dari Provinsi sejumlah Rp3.996.024.579,00 (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mencairkan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp1.000.000.000,00. (Satu miliar rupiah) pada Tanggal 20 Maret 2023 dengan SP2D 06.15/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/03/2023.



## BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penyampaian Laporan Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan Laporan Keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan Laporan Keuangan tahun-tahun mendatang.

Besar harapan kami, pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 ini dapat berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kota Lhokseumawe di masa yang akan datang.

**Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE**

**A. HANAN, SP, MM**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL KOTA LHOSEUMAWE  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN ALOKASI PENDISTRIBUSIAN BELANJA ZAKAT DAN INFAK  
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI PENETAPAN PENDISTRIBUSIAN BELANJA INFAK  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ASNAF/URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN					JUMLAH	PERSENT ASE
		VOL	SAT	FREK	SAT	HARGA SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>BELANJA INFAK</b>						<b>Rp 1,499,700,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>1.</b>	<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</b>						<b>Rp 204,000,000</b>	<b>13.60%</b>
	Bantuan Dana untuk Usaha Ultra Mikro (UMi)	68	Org	1	Kali	Rp 3,000,000	Rp 204,000,000	13.60%
<b>2.</b>	<b>Program Kemaslahatan Umat</b>						<b>Rp 1,109,000,000</b>	<b>73.95%</b>
	a. Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Fakir Miskin (Dhuafa)	69	Org	1	Kali	Rp 11,000,000	Rp 759,000,000	50.61%
	c. Bantuan Dana untuk Pembelian Bahan/Peralatan Kerja	140	Org	1	Kali	Rp 2,500,000	Rp 350,000,000	23.34%
<b>3.</b>	<b>Amil Infak</b>						<b>Rp 186,700,000</b>	<b>12.45%</b>
	a. Pemberian Amil Infak untuk Dewan Pengawas BMK						<b>Rp 10,800,000</b>	<b>0.72%</b>
	- Ketua	1	Org	12	Bln	Rp 300,000	Rp 3,600,000	0.24%
	- Sekretaris	1	Org	12	Bln	Rp 300,000	Rp 3,600,000	0.24%
	- Anggota	1	Org	12	Bln	Rp 300,000	Rp 3,600,000	0.24%
	b. Pemberian Amil Infak untuk Badan BMK						<b>Rp 61,200,000</b>	<b>4.08%</b>
	- Ketua	1	Org	12	Bln	Rp 800,000	Rp 9,600,000	0.64%
	- Sekretaris	1	Org	12	Bln	Rp 500,000	Rp 6,000,000	0.40%
	- Anggota	4	Org	12	Bln	Rp 950,000	Rp 45,600,000	3.04%
	c. Pemberian Amil Infak untuk Tenaga Profesional BMK						<b>Rp 44,400,000</b>	<b>2.96%</b>
	Bagian Penyaluran						<b>Rp 30,000,000</b>	<b>2.00%</b>
	- Koordinator	1	Org	12	Bln	Rp 700,000	Rp 8,400,000	0.56%
	- Anggota	6	Org	12	Bln	Rp 300,000	Rp 21,600,000	1.44%
	Bagian Pengelolaan						<b>Rp 7,200,000</b>	<b>0.48%</b>
	- Ketua	1	Org	12	Bln	Rp 150,000	Rp 1,800,000	0.12%
	- Anggota	3	Org	12	Bln	Rp 150,000	Rp 5,400,000	0.36%
	Bagian Pengembangan						<b>Rp 7,200,000</b>	<b>0.48%</b>
	- Ketua	1	Org	12	Bln	Rp 150,000	Rp 1,800,000	0.12%
	- Anggota	3	Org	12	Bln	Rp 150,000	Rp 5,400,000	0.36%
	d. Pemberian Amil Infak untuk Sekretariat BMK						<b>Rp 66,000,000</b>	<b>4.40%</b>
	- Kasubbag	3	Org	12	Bln	Rp 250,000	Rp 9,000,000	0.60%
	- Bendahara	2	Org	12	Bln	Rp 200,000	Rp 4,800,000	0.32%
	- Staf	25	Org	12	Bln	Rp 150,000	Rp 45,000,000	3.00%
	- Relawan Amil	2	Org	12	Bln	Rp 300,000	Rp 7,200,000	0.48%
	f. Penunjang Kebutuhan Operasional Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Infak	1	Ls	1	Thn	Rp 4,300,000	Rp 4,300,000	0.29%
	<b>JUMLAH</b>	<b>277</b>	<b>CALON MUSTAHIK</b>				<b>Rp 1,499,700,000</b>	

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL KOTA LHKSEUMAWE  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN ALOKASI PENDISTRIBUSIAN BELANJA ZAKAT DAN INFRAK  
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI PENETAPAN PENDISTRIBUSIAN BELANJA ZAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ASNAF/URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH	PERSENT ASE	
		VOL	SAT	FREK	SAT			HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>BELANJA ZAKAT</b>						<b>Rp 5,362,400,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>1.</b>	<b>Senif Fakir</b>						<b>Rp 2,040,000,000</b>	<b>38.04%</b>
	Bantuan Dana Tunai Konsumtif (30 org x 68 gmp)	2040	Org	1	Kali	Rp 1,000,000	Rp 2,040,000,000	38.04%
<b>2.</b>	<b>Senif Miskin</b>						<b>Rp 2,249,000,000</b>	<b>41.94%</b>
a.	Pemberdayaan Zakat Berbasis Keluarga (Zakat Family Development/ZFD)	1549	Org	1	Kali	Rp 1,000,000	Rp 1,549,000,000	28.89%
b.	Bantuan Dana untuk Renovasi Rumah Keluarga Miskin	70	Org	1	Kali	Rp 10,000,000	Rp 700,000,000	13.05%
<b>3.</b>	<b>Senif Amil</b>						<b>Rp 670,400,000</b>	<b>12.50%</b>
a.	Pemberian Hak Amil untuk Dewan Pengawas BMK						<b>Rp 36,000,000</b>	<b>0.67%</b>
	- Ketua	1	Org	12	Bln	Rp 1,000,000	Rp 12,000,000	0.22%
	- Sekretaris	1	Org	12	Bln	Rp 1,000,000	Rp 12,000,000	0.22%
	- Anggota	1	Org	12	Bln	Rp 1,000,000	Rp 12,000,000	0.22%
b.	Pemberian Hak Amil untuk Badan BMK						<b>Rp 184,800,000</b>	<b>3.45%</b>
	- Ketua	1	Org	12	Bln	Rp 2,000,000	Rp 24,000,000	0.45%
	- Sekretaris	1	Org	12	Bln	Rp 1,400,000	Rp 16,800,000	0.31%
	- Anggota	4	Org	12	Bln	Rp 3,000,000	Rp 144,000,000	2.69%
c.	Pemberian Hak Amil untuk Tenaga Profesional BMK						<b>Rp 144,000,000</b>	<b>2.69%</b>
	Bagian Penyaluran						<b>Rp 96,000,000</b>	<b>1.79%</b>
	- Koordinator	1	Org	12	Bln	Rp 2,000,000	Rp 24,000,000	0.45%
	- Anggota	6	Org	12	Bln	Rp 1,000,000	Rp 72,000,000	1.34%
	Bagian Pengelolaan						<b>Rp 24,000,000</b>	<b>0.45%</b>
	- Ketua	1	Org	12	Bln	Rp 500,000	Rp 6,000,000	0.11%
	- Anggota	3	Org	12	Bln	Rp 500,000	Rp 18,000,000	0.34%
	Bagian Pengembangan						<b>Rp 24,000,000</b>	<b>0.45%</b>
	- Ketua	1	Org	12	Bln	Rp 500,000	Rp 6,000,000	0.11%
	- Anggota	3	Org	12	Bln	Rp 500,000	Rp 18,000,000	0.34%
d.	Pemberian Hak Amil untuk Sekretariat BMK						<b>Rp 210,000,000</b>	<b>3.92%</b>
	- Kasubbag	3	Org	12	Bln	Rp 1,000,000	Rp 36,000,000	0.67%
	- Bendahara	2	Org	12	Bln	Rp 700,000	Rp 16,800,000	0.31%
	- Staf	21	Org	12	Bln	Rp 500,000	Rp 126,000,000	2.35%
	- Relawan Amil	2	Org	12	Bln	Rp 1,300,000	Rp 31,200,000	0.58%
e.	Pemberian Hak Amil untuk Ketua BMG	68	Org	1	Kali	Rp 700,000	Rp 47,600,000	0.89%
f.	Penunjang Kebutuhan Operasional Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Zakat	1	Ls	1	Thn	Rp 48,000,000	Rp 48,000,000	0.90%
<b>4.</b>	<b>Senif Muallaf</b>						Rp 45,000,000	<b>0.84%</b>
	Bantuan Dana untuk Pemberdayaan Muallaf	15	Org	1	Kali	Rp 3,000,000	Rp 45,000,000	0.84%
<b>5.</b>	<b>Senif Gharimin</b>						<b>Rp 15,000,000</b>	<b>0.28%</b>
	Bantuan Dana untuk Pelunasan Utang	6	Org	1	Kali	Rp 2,500,000	Rp 15,000,000	0.28%
<b>6.</b>	<b>Senif Fisabilillah</b>						<b>Rp 58,000,000</b>	<b>1.08%</b>
	Bantuan Dana untuk Khadim Masjid	58	Org	1	Kali	Rp 1,000,000	Rp 58,000,000	1.08%
<b>7.</b>	<b>Senif Ibnu Sabil</b>						Rp 285,000,000	<b>5.31%</b>
a.	Bantuan Beasiswa Santri Pesantren/Dayah	210	Org	1	Kali	Rp 1,000,000	Rp 210,000,000	3.92%
b.	Bantuan Dana untuk Pembelian Kitab (Individu)	25	Org	1	Kali	Rp 3,000,000	Rp 75,000,000	1.40%
	<b>JUMLAH</b>	<b>3973</b>	<b>CALON MUSTAHIK</b>				<b>Rp 5,362,400,000</b>	





## LAMPIRAN 2

NO	NAMA PAUD	TOTAL PENERIMAAN	PENGELUARAN SEMESTER I							PENGELUARAN SEMESTER II							SALDO AKHIR	KEADAAN KAS Per 31 Desember 2023	
			SILPA	PENERIMAAN	BELANJA	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		JUMLAH	Saldo Awal Sem 2	PENERIMAAN	BELANJA	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		JUMLAH		Kas Bank	Kas Tunai
							PERALATAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA						PERALATAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA				
1	TKN PEMBINA BLANG MANGAT	30.500.000,00	-	15.250.000,00	15.250.000,00	9.950.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00	15.250.000,00	-	15.250.000,00	15.250.000,00	11.750.000,00	3.500.000,00	-	15.250.000,00	-	-	-
2	TKN ARUN	79.300.000,00	-	39.650.000,00	39.650.000,00	32.810.000,00	5.810.000,00	1.030.000,00	39.650.000,00	-	39.650.000,00	39.650.000,00	23.566.060,00	15.483.940,00	600.000,00	39.650.000,00	-	-	-
3	TKN PEMBINA BANDA SAKTI	25.010.000,00		12.505.000,00	12.505.000,00	9.236.000,00	3.139.000,00	130.000,00	12.505.000,00	-	12.505.000,00	12.505.000,00	7.440.000,00	2.400.000,00	2.665.000,00	12.505.000,00	-	-	-
4	TKN PEMBINA MUJARA SATU	43.920.000,00		21.960.000,00	21.960.000,00	13.085.000,00	8.875.000,00	-	21.960.000,00	-	21.960.000,00	21.960.000,00	14.456.000,00	7.504.000,00	-	21.960.000,00	-	-	-
5	TKN PEMBINA MUJARA DUA	9.150.000,00		4.575.000,00	4.575.000,00	4.575.000,00	-	-	4.575.000,00	-	4.575.000,00	4.575.000,00	4.575.000,00	-	-	4.575.000,00	-	-	-
<b>Total BoP-PAUD</b>		<b>187.880.000,00</b>	<b>-</b>	<b>93.940.000,00</b>	<b>93.940.000,00</b>	<b>69.656.000,00</b>	<b>19.824.000,00</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>93.940.000,00</b>	<b>-</b>	<b>93.940.000,00</b>	<b>93.940.000,00</b>	<b>61.787.060,00</b>	<b>28.887.940,00</b>	<b>3.265.000,00</b>	<b>93.940.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Piutang Transfer Provinsi 2023  
Pemerintah Kota Lhokseumawe**

No	Uraian	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok	Total
<b>1</b>	<b>Total Piutang 2022</b>	<b>1.586.591.426,00</b>	<b>895.412.796,00</b>	<b>3.137.065.291,00</b>	<b>30.146.791,00</b>	<b>2.113.858.433,00</b>	<b>7.763.074.737,00</b>
<b>2</b>	<b>Penerimaan Tahun 2023</b>						
2a	973/736 Tahun 2023 (Okt s.d Des 2022)	1.586.591.426,00	895.412.796,00	3.137.065.291,00	17.762.315,00		5.636.831.828,00
2b	903/614 Tahun 2023 (Okt s.d Nov 2022)					2.113.858.433,00	2.113.858.433,00
2c	903/1039 Tahun 2023 (Jan s.d Maret 2023)	1.846.944.191,00	899.106.354,00	3.137.321.738,00	18.978.499,00		5.902.350.782,00
2d	973/1077 Tahun 2023 (Des 2022 dan Jan s.d Maret 2023)					4.579.439.131,00	4.579.439.131,00
2e	903/1296 Tahun 2023 (April s.d Juni 2023)	1.484.086.427,00	891.246.084,00	3.197.334.164,00	18.986.631,00		5.591.653.306,00
2f	973/1304 Tahun 2023 (April s.d Juni 2023)					2.532.647.108,00	2.532.647.108,00
2g	973/571 Tahun 2023 (Juli s.d Sept 2023)	1.511.481.421,00	1.023.798.293,00	3.082.797.574,00	20.504.509,00		5.638.581.797,00
<b>3</b>	<b>Pelunasan (3 = 2a)</b>	<b>1.586.591.426,00</b>	<b>895.412.796,00</b>	<b>3.137.065.291,00</b>	<b>17.762.315,00</b>	<b>2.113.858.433,00</b>	<b>7.750.690.261,00</b>
<b>4</b>	<b>Penerimaan Murni (4 = 2b+2c+2d+2e+2f+2g)</b>	<b>4.842.512.039,00</b>	<b>2.814.150.731,00</b>	<b>9.417.453.476,00</b>	<b>58.469.639,00</b>	<b>7.112.086.239,00</b>	<b>24.244.672.124,00</b>
<b>5</b>	<b>Sisa Piutang 2022 - 32 Tahun 2019 (Jan s.d Mar 2019) (5 = 1-2a)</b>	-	-	-	<b>12.384.476,00</b>	-	<b>12.384.476,00</b>
<b>6</b>	<b>Piutang Tahun Berjalan</b>						
	900.1.14.3/163 Tahun 2024 (Okt s.d Des 2023)	1.661.297.025,00	1.007.368.559,00	3.162.466.118,00	19.257.500,00		5.850.389.202,00
	900.1.14.3/173 Tahun 2024 (Okt s.d Nov 2023)					1.907.995.181,00	1.907.995.181,00
<b>7</b>	<b>Koreksi Piutang</b>						
	32 Tahun 2019 (Jan s.d Mar 2019)				12.384.476,00		12.384.476,00
<b>7</b>	<b>Total Piutang Tahun 2023 (7 = 5+6)</b>	<b>1.661.297.025,00</b>	<b>1.007.368.559,00</b>	<b>3.162.466.118,00</b>	<b>19.257.500,00</b>	<b>1.907.995.181,00</b>	<b>7.758.384.383,00</b>

**DAFTAR PENYISIHAN PIUTANG  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA LHKSEUMAWE  
31 Desember 2023**

NO	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	JUMLAH PIUTANG	UMUR PIUTANG			
			≤ 1 Tahun 2023	> 1 s.d 2 Tahun 2022	>2 s.d 3 Tahun 2021	>3 Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PAJAK DAERAH</b>					
1	Pajak Hotel	434.227.000,00	-	-	-	434.227.000,00
2	Pajak Losmen	12.398.228,00	9.430.228,00	-	-	2.968.000,00
3	Pajak Restoran	7.222.694,00	7.222.694,00	-	-	-
4	Pajak Rumah Makan	116.465.200,00	7.715.000,00	3.510.000,00	3.830.000,00	101.410.200,00
5	Pajak Hiburan	-	-	-	-	-
6	Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN	-	-	-	-	-
7	Pajak Parkir	140.000,00	140.000,00	-	-	-
8	Pajak Air Tanah	3.834.936,00	3.834.936,00	-	-	-
9	Pajak Bumi Bangunan	29.247.181.273,00	3.263.655.270,00	2.760.784.916,00	2.572.078.180,00	20.650.662.907,00
	<b>Total</b>	<b>29.821.469.331,00</b>	<b>3.291.998.128,00</b>	<b>2.764.294.916,00</b>	<b>2.575.908.180,00</b>	<b>21.189.268.107,00</b>
	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>					
1	Los	2.114.356.000,00	294.720.000,00	244.220.000,00	279.847.000,00	1.295.569.000,00
2	Kios	897.500.000,00	150.000.000,00	237.500.000,00	135.000.000,00	375.000.000,00
3	Pasar	741.416.500,00	20.150.000,00	-	146.300.000,00	574.966.500,00
4	Parkir	439.645.000,00	38.600.000,00	-	1.000.000,00	400.045.000,00
5	Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	21.600.000,00	6.000.000,00	15.600.000,00	-	-
6	Ijin Gangguan (HO)	-	-	-	-	-
7	Sampah	78.961.500,00	6.780.000,00	1.645.000,00	16.480.000,00	54.056.500,00
8	Menara	163.168.851,00	-	-	-	163.168.851,00
	<b>Total</b>	<b>4.456.647.851,00</b>	<b>516.250.000,00</b>	<b>498.965.000,00</b>	<b>578.627.000,00</b>	<b>2.862.805.851,00</b>
	<b>PIUTANG LAIN-LAIN PAD YG SAH</b>					
1	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>PIUTANG TRANSFER PROVINSI</b>					
1	Piutang Transfer Provinsi	7.758.384.383,00	7.758.384.383,00	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>7.758.384.383,00</b>	<b>7.758.384.383,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>PIUTANG TRANSFER PUSAT</b>					
1	p	22.509.388.107,00	22.509.388.107,00	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>22.509.388.107,00</b>	<b>22.509.388.107,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>PIUTANG LAINNYA</b>					
1	Piutang Lainnya	45.523.637,00	-	-	-	45.523.637,00
2	BPR	780.158.243,00	-	-	-	780.158.243,00
3	PPN Pusat Pantai Meuraksa	540.424.583,00	-	-	540.424.583,00	-
	<b>Total</b>	<b>1.366.106.463,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>540.424.583,00</b>	<b>825.681.880,00</b>
	<b>Total</b>	<b>65.911.996.135,00</b>	<b>34.076.020.618,00</b>	<b>3.263.259.916,00</b>	<b>3.694.959.763,00</b>	<b>24.877.755.838,00</b>

NO	JENIS PAJAK	SALDO AWAL PIUTANG (SEBELUM PENYISIHAN)	PENYISIHAN PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
			≤ 1 Tahun	> 1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	>3 Tahun		
			5%	10%	50%	100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>29.821.469.331,00</b>	<b>164.599.906,40</b>	<b>276.429.491,60</b>	<b>1.287.954.090,00</b>	<b>21.189.268.107,00</b>	<b>22.918.251.595,00</b>	<b>6.903.217.736,00</b>
1	Pajak Hotel	434.227.000,00	-	-	-	434.227.000,00	434.227.000,00	-
2	Pajak Losmen	12.398.228,00	471.511,40	-	-	2.968.000,00	3.439.511,40	8.958.716,60
3	Pajak Restoran	7.222.694,00	361.134,70	-	-	-	361.134,70	6.861.559,30
4	Pajak Rumah Makan	116.465.200,00	385.750,00	351.000,00	1.915.000,00	101.410.200,00	104.061.950,00	12.403.250,00
5	Pajak Hiburan	-	-	-	-	-	-	-
6	Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN	-	-	-	-	-	-	-
7	Pajak Parkir	140.000,00	7.000,00	-	-	-	7.000,00	133.000,00
8	Pajak Air Tanah	3.834.936,00	191.746,80	-	-	-	191.746,80	3.643.189,20
9	Pajak Bumi Bangunan	29.247.181.273,00	163.182.763,50	276.078.491,60	1.286.039.090,00	20.650.662.907,00	22.375.963.252,10	6.871.218.020,90
	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>4.456.647.851,00</b>	<b>25.812.500,00</b>	<b>49.896.500,00</b>	<b>289.313.500,00</b>	<b>2.862.805.851,00</b>	<b>3.227.828.351,00</b>	<b>1.228.819.500,00</b>
1	Los	2.114.356.000,00	14.736.000,00	24.422.000,00	139.923.500,00	1.295.569.000,00	1.474.650.500,00	639.705.500,00
2	Kios	897.500.000,00	7.500.000,00	23.750.000,00	67.500.000,00	375.000.000,00	473.750.000,00	423.750.000,00
3	Pasar	741.416.500,00	1.007.500,00	-	73.150.000,00	574.966.500,00	649.124.000,00	92.292.500,00
4	Parkir	439.645.000,00	1.930.000,00	-	500.000,00	400.045.000,00	402.475.000,00	37.170.000,00
5	Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	21.600.000,00	300.000,00	1.560.000,00	-	-	1.860.000,00	19.740.000,00
6	Ijin Gangguan (HO)	-	-	-	-	-	-	-
7	Sampah	78.961.500,00	339.000,00	164.500,00	8.240.000,00	54.056.500,00	62.800.000,00	16.161.500,00
8	Menara	163.168.851,00	-	-	-	163.168.851,00	163.168.851,00	-
	<b>PIUTANG LAIN-LAIN PAD YG SAH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Lain- lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PIUTANG TRANSFER</b>	<b>7.758.384.383,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.758.384.383,00</b>
1	Piutang Transfer	7.758.384.383,00	-	-	-	-	-	7.758.384.383,00
	<b>PIUTANG TRANSFER</b>	<b>22.509.388.107,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.509.388.107,00</b>
1	Piutang Transfer	22.509.388.107,00	-	-	-	-	-	22.509.388.107,00
	<b>PIUTANG LAINNYA</b>	<b>825.681.880,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>825.681.880,00</b>	<b>1.095.894.171,50</b>	<b>-</b>
1	Piutang Lainnya	45.523.637,00	-	-	-	45.523.637,00	45.523.637,00	-
2	Bpr Sabee Meusampee	780.158.243,00	-	-	-	780.158.243,00	780.158.243,00	-
3	PPN Pusat Pantai Meuraksa	540.424.583,00	-	-	270.212.291,50	-	270.212.291,50	270.212.291,50
	<b>TOTAL</b>	<b>65.371.571.552,00</b>	<b>190.412.406,40</b>	<b>326.325.991,60</b>	<b>1.577.267.590,00</b>	<b>24.877.755.838,00</b>	<b>27.241.974.117,50</b>	<b>38.399.809.726,00</b>

## REKAPITULASI SEWA DI BAYAR DIMUKA TAHUN ANGGARAN 2023

No	SKPK	No. Kontrak / Tanggal	Jenis Sewa/Biaya	SP2D		Jangka Waktu			Tarif	Jumlah Hari Belum Dimanfaatkan		Nilai Belum Dimanfaatkan	Jumlah Telah Dimanfaatkan
				Nomor	Nilai	Mulai	Berakhir	Lama		10=(6/9)	11=(7-8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6/9)	11=(7-8)	12=(10x11)	13=(6-12)	
1	SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKEUMAWA	Nomor: 01/IX/2023 01 September 2023	Gedung Tempat Kerja Lainnya	06.15/04.0/000572/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/9/2023	40.000.000,00	01/09/23	31/08/24	366 Hari	109.289,62	244 Hari	26.666.666,67	13.333.333,33	
2	INSPEKTORAT	Nomor: 001/PPKom-IKL/SPSM/II/2023 31 Januari 2023	Gedung Kantor	06.15/04.0/000005/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/2/2023	110.000.000,00	01/02/23	31/01/24	365 Hari	301.369,86	31 Hari	9.342.465,75	100.657.534,25	
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Nomor: 877/001/2021 01 November 2021	Gedung Kantor	4250/L/LS/2021	180.000.000,00	15/11/21	15/11/24	1097 Hari	164.083,87	320 Hari	52.506.836,83	127.493.163,17	
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Nomor: 877/002/2021 01 November 2021	Gedung Kantor	4581/L/LS/2021	225.000.000,00	01/01/22	31/12/24	1096 Hari	205.291,97	366 Hari	75.136.861,31	149.863.138,69	
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Nomor: 87/SP-UM/BPKD/2023 25 Mei 2023	Kendaraan	06.15/04.0/000213/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.01/6/2023	119.700.000,00	30/05/23	30/01/24	246 Hari	486.585,37	30 Hari	14.597.560,98	105.102.439,02	
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Asuransi Kendaraan		79.593.650,00						39.951.262,33	39.642.387,67	
<b>Jumlah</b>					<b>150.000.000,00</b>						<b>218.201.653,87</b>	<b>536.091.996,13</b>	



## Rekapitulasi Persediaan Pemerintah Kota Lhokseumawe

No	SKPD	Belanja Bahan-Bahan Ternak/Bibit Ikan	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Pendukung Olahraga	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Belanja Obat-Obatan-Obat	Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjajajaga-Persediaan untuk Tujuan	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Belanja Hibah Barang Kepada BUMD	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirfaba, Sukarela dan Sosial	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirfaba, Sukarela Bersifat Sosial	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	TOTAL PERSEDIaan PER 31 DESEMBER 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	7.032.300,00	15.434.500,00	837.000,00	-	88.840.130,00	3.246.721.032,91	1.762.527.156,82	-	-	-	1.954.776.696,00	-	785.524.684,00	4.414.219.500,00	-	-	-	12.275.912.999,73
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	875.764.385,00	-	-	492.170.386,67	3.747.732.420,00	2.220.880,00	-	-	9.785.857,47	1.895.755.204,92	7.023.429.134,06
4	Badan Keselamatan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	793.993.741,00	-	-	-	-	19.656.000,00	-	155.744.000,00	-	-	969.393.741,00
7	Dinas Penanaman Modal, PTSP/K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB	-	-	-	-	-	342.464.000,00	128.691.334,00	-	80.865.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552.021.234,00
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Pangan	719.515.800,00	-	-	-	-	-	-	-	69.448.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788.964.300,00
10	Dinas Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	457.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457.900,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Perhubungan	-	-	183.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.990,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	16.442.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.442.000,00
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	-	-	-	-	-	31.354.418,00	-	-	-	306.731.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	338.085.668,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	19.421.067.590,00	-	-	-	-	-	-	25.400.000,00	-	-	19.446.467.590,00
20	Sekretariat DPRK	-	-	187.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.680,00
21	Kecamatan Banda Sakti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kecamatan Blang Mangat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kecamatan Muara Satu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kecamatan Muara Dua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.726.190,00	-	-	-	98.987.000,00	-	-	-	142.713.190,00
26	Inspektoral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	173.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.000,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	572.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572.000,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.689.901.900,00	-	-	-	1.689.901.900,00
32	Sekretariat MPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Sekretariat Baitul Mal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Sekretariat MAA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Sekretariat MPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>719.515.800,00</b>	<b>7.032.300,00</b>	<b>17.009.070,00</b>	<b>837.000,00</b>	<b>31.354.418,00</b>	<b>431.304.130,00</b>	<b>3.375.412.366,91</b>	<b>1.762.527.156,82</b>	<b>21.257.582.116,00</b>	<b>306.731.250,00</b>	<b>43.726.190,00</b>	<b>2.446.947.082,67</b>	<b>3.747.732.420,00</b>	<b>807.401.564,00</b>	<b>6.203.108.400,00</b>	<b>181.144.000,00</b>	<b>9.785.857,47</b>	<b>1.895.755.204,92</b>	<b>43.244.906.326,79</b>



## LAMPIRAN 7

## PENERIMA DANA BERGULIR PROGRAM PEM

No	Nama Koperasi	Badan Hukum		Alamat		Jumlah	Keterangan
		Nomor	Tanggal	Desa	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kop. Niaga "Global Mandiri"	16/BH/PPK.1.17/V/2007	06/06/2007	Kota Lhokseumawe	Banda Sakti	50.000.000	17-05-2012/ 16/BH/PPK.1.17/V/2007/. "MACET"
2	Kopwan. "Maharani"	21/BH/PPK.1.14/II/2006	10/07/2006	Kuta Blang	Banda Sakti	50.000.000	5-02-2015/ 21/BH/PPK.1.14/II/2016/. "MACET"
3	Kopwan. "Mawar Merah"	29/BH/PPK.1.17/II/2007	10/07/2007	Tumpok Teungoh	Banda Sakti	100.000.000	17-05-2012/ 29/BH/PPK.1.17/II/2007/. "MACET"
4	Kop.Niaga "Pusaka Aceh"	12/BH/PPK.1.17.IV/2007	27/04/2007	Hagu selatan	Banda Sakti	50.000.000	18-06-2012/ 12/BH/PPK.1.17/IV/2007/. "MACET"
5	Kop. Niaga "Karunia Alam"	03/BH/PPK.1.14/II/2007	22/01/2007	Batuphat Timur	Muara satu	100.000.000	16-05-2012/ 03/BH/PPK.1.17/II/2007/. 22-01-2007 "MACET"
6	Kop. Industri "Jeumpa Karya"	03/BH/KDK.1.3/II/2001	08/02/2001	Batuphat Barat	Muara satu	100.000.000	30-04-2012/ 03/BH/KDK.1.3/II/2001/. 08-02-2001 "MACET"
7	Kopwan "Hidayah"	06/BH/PPK.1.17/II/2007	26/03/2007	Mns. Mesjid	Muara Dua	50.000.000	04-06-2012/ 06/BH/PPK.1.17.III/2007/. "MACET"
8	Kopwan "Bunga Melati"	08/BH/PPK.1.17/II/2007	28/03/2007	Mns. Mesjid	Muara Dua	100.000.000	05-02-2012/ 08/BH/PPK.1.17/III/2007/. "MACET"
9	Kop. Nelayan "Pante Meuraksa"	58/BH/KDK.1.3/IV/1999	27/04/1999	Jambo Mesjid	Blang Mangat	100.000.000	16-05-2012/ 58/BH/KDK.1.3/IV/1999/. "MACET"
10	Kop. Perikanan "Sahmita Djaja"	05/BH/PPK.1.14/II/2007	26/02/2007	Gp. Tunong	Blang Mangat	100.000.000	14-05-2012/ 05/BH/PPK.1.14/II/2007/. "MACET"
11	Kop. Pertanian "Maju Bersama"	21/BH/PPK.1.17/II/2007	03/07/2007	Rayeuk Kareung	Blang Mangat	100.000.000	15-05-2012/ 21/BH/PPK.1.17/II/2007/. "MACET"
12	Kop. Pedagang kecil "Cinta Wisata"	18/BH/PPK.1.17/II/2007	14/06/2007	Mon Geudong	Banda Sakti	50.000.000	15-05-2012/ 18/BH/PPK.1.17/II/2007/. "MACET"
13	KSU. "Aneuk Bangsa"	20/BH/PPK.1.17/II/2007	03/07/2007	Tumpok Teungoh	Banda Sakti	100.000.000	03-04-2012/ 20/BH/PPK.1.17/II/2007/.03-07-2007/. "MACET"
14	Kop. Perikanan "Behtra Bahari"	26/BH/PPK.1.17/II/2007	04/07/2007	Ujong Blang	Banda Sakti	50.000.000	16-05-2012/ 26/BH/PPK.1.17/II/2007/. "MACET"
15	Kop. Industri "Syuhada"	24/BH/PPK.1.17/II/2007	03/07/2007	Uteun Bayi	Banda Sakti	100.000.000	17-05-2012/ 24/BH/PPK.1.17/II/2007/. "MACET"
16	Kop. Peternakan "Putra Bangsa"	11/BH.PPK.1.17/IV/2007	19/04/2007	Cunda	Muara Dua	100.000.000	16-05-2012/ 11/BH/PPK.1.17/IV/2007/. "MACET"
17	Kop. Industri "Rakan Pase"	27/BH/PPK.1.17/II/2007	05/07/2007	Tp. Teungoh	Banda Sakti	50.000.000	14-05-2012/ 27/BH/PPK.1.17/II/2007/. "MACET"

No	Nama Koperasi	Badan Hukum		Alamat		Jumlah	Keterangan
18	Kop. Industri "Beurata"	27/BH/PK.1.14/XI/2006	24/11/2006	Mesjid Cunda	Muara Dua	50.000.000	11-05-2012/. 2146/BH/XII/1990/. "MACET"
19	Kop. Mebel "Sang Seunesab"	14/BH/PPK.1.17/VI/2007	23/05/2007	Uteun Bayi	Banda Sakti	50.000.000	01-06-2012/. 14/BH/PPK.1.17/VI/2007/. "MACET"
20	Kop. Industri "Asoe Bumoe"	02/BH/PPK.1.14/VI/2007	12/01/2007	Mns. Manyang kandang	Muara Dua	100.000.000	06-02-2015/. 02/BH/PPK.1.14/VI/2007/. "MACET"
21	Kop. Industri "Gunung Alimon"	10/BH/PPK.1.17/VI/2007	12/04/2007	Blang Panyang	Muara Satu	50.000.000	10-05-2012/. 10/BH/PPK.1.17/VI/2007/. 12-04-2007/. "MACET"
22	Kop. Perikanan "Hareukat Aneuk Pante"	07/BH/PPK.1.14/XI/2005	18/10/2005	Ujong Blang	Banda Sakti	50.000.000	15-05-2012/. 07/BH/PPK.1.14/XI/2005/. 18-10-2005/. "MACET"
23	Kopwan "Rahmatullah"	26/BH/KDK.1.3/VI/2000	15/05/2000	Batuphat Barat	Muara Satu	100.000.000	15-02-2015/. 26/BH/KDK.1.3/VI/2015/. "MACET"
24	Kop. Bengkel "Sumber teknik service"	20/BH/PPK.1.14/VI/2006	30/06/2006	Uteunkot	Muara Dua	50.000.000	10-05-2012/. 18/BH/1.17/VI/2008/. "MACET"
25	Kop. Industri "Jasa Syuhada"	19/BH/PPK.1.17/VI/2007	22/06/2007	Uteunkot	Muara Dua	50.000.000	16-05-2012/. 19/BH/PPK.1.17/VI/2007/. "MACET"
26	Kop. Perikanan "Tong engkot"	07/BH/PPK.1.17/II/2007	27/03/2007	Pusong Baru	Banda Sakti	100.000.000	17-05-2012/. 07/BH/PPK.1.17/II/2007/. "MACET"
27	Kop. Perikanan "Seumadu Rancong"	25/BH/PPK.1.14/XI/2006	15/11/2006	Rancong	Muara Satu	100.000.000	15-06-2012/. 25/BH/PPK.1.14/XI/2006/. "MACET"
28	Koppas "Primajaya"	28/BH/PPK.1.17/VI/2007	06/07/2007	Kel. Kota Lhokseumawe	Banda Sakti	50.000.000	10-04-2012/. 28/BH/PPK.1.17/VI/2007/. "MACET"
29	Kop. Perikanan "Masda"	30/BH/PPK.1.17/VI/2007	13/07/2007	Hagu Teungoh	Banda Sakti	50.000.000	16-05-2012/. 30/BH/PPK.1.17/VI/2007/. 13-07-2007/. "MACET"
30	Kop. Transportasi "Lautan Niaga"	13/BH/PPK.1.17/VI/2007	30/04/2007	Ujong Blang	Banda Sakti	50.000.000	16-05-2012/. 13/BH/PPK.1.17/VI/2007/. "MACET"
31	Kop. Konsumsi "Sapue Kheun"	13/BH/PPK.1.14/II/2006	01/03/2006	Hagu Selatan	Banda Sakti	50.000.000	21-05-2002/. 13/BH/PPK.1.14/II/2006/. 01-06-2006/. "MACET"
32	Kop. Pedagang kecil "Karya Sepakat"	31/BH/PPK.1.17/VI/2007	06/08/2007	Tp. Teungoh	Banda Sakti	50.000.000	18-05-2012/. 31/BH/PPK.1.17/VI/2007/. "MACET"
33	Kop. Niaga "Rakyat Mandiri"	23/BH/PPK.1.17/VI/2007	03/07/2007	Pusong Baru	Banda Sakti	50.000.000	16-05-2012/. 23/BH/PPK.1.17/VI/2007/. "MACET"
34	Kopontren "Baitul Mal"	17/BH/PPK.1.17/VI/2007	30/05/2007	Alue Awe	Muara Dua	50.000.000	12-04-2012/. 17/BH/PPK.1.17/VI/2007/. "MACET"
35	KSU. "Multi Guna"	07/BH/DK.1/3/VI/2003	17/05/2003	Jl. Merdeka No. 53 Mon Geudong	Banda Sakti	50.000.000	06.02.2015/. 07/BH/DK.1/3/VI/2003/. "MACET"
36	Kopwan "Cut Nur Asikin"	09/BH/PPK.1.17/II/2007	28/03/2007	Pusong Baru	Banda Sakti	100.000.000	17-05-2012/. 09/BH/PPK.1.17/2007/. "MACET"

No	Nama Koperasi	Badan Hukum		Alamat		Jumlah	Keterangan
37	Koppas "Cakra Donya"	04/BH/PAD/Kwk.1 /I/1998	26/01/1998	Jl. Merdeka Barat Cunda	Muara Dua	100.000.000	19-05-2012/ 04/BH/PAD/KWK.1/I/1 998/. "MACET"
38	Kopinkra "Kriya Sakti"	57/BH/KDK.1.3/XI 2000	13/11/2000	SMK Negeri 4 Lhokseumawe	Banda Sakti	50.000.000	
39	Kop. "PrimKopabri - 17"	15/BH/PPK.1.17/V /2007	24/05/2007	Simpang IV	Banda Sakti	50.000.000	05-02-2015/ 15/BH/PPK.1.17/V/200 7/. "MACET"
40	KPRI "Tiga Serangkai"	04/BH/PPK.1.14/X /2004	20/10/2004	DisperindagKop Lhokseumawe	Banda Sakti	100.000.000	
41	KPN "Setdako"	22/BH/PPK.1.17/V II/2007	03/07/2007	Setdako Lhokseumawe	Banda Sakti	50.000.000	27-12-2012/ 22/BH/PPK.1.17.V/II/20 07/. "MACET"
42	KPRI "Pengayoman"	02/BH/PAD/PPK.1 .14/XII/2006	02/12/2006	Lembaga Pemasyarakatan	Banda Sakti	50.000.000	06-02-2015/ 02/BH/PAD/PPK.1.14/ XII/2006 "MACET"
43	KPRI "Guru Al- lkhlas"	25/BH/KDK.1.3/XI 1998	13/11/1998	SMK Negeri 3 Lhokseumawe	Banda Sakti	50.000.000	06-02-2015/ 25/BH/KDK.1.3/XI/199 8/. "MACET"
<b>JUMLAH</b>						<b>3.000.000.000</b>	

**KOTA LHOKSEUMAWE**  
**Penyertaan Modal pada PDAM le Beusaree Rata**

No	Tahun	Modal Awal Tahun	Penyertaan Modal	Tambah/ Kurang	Modal Akhir Tahun
1	2011	0,00	375.000.000,00		375.000.000,00
2	2012	375.000.000,00	5.000.000.000,00		5.375.000.000,00
3	2013	5.375.000.000,00		1.500.000.000,00	6.875.000.000,00
4	2014	6.875.000.000,00	4.000.000.000,00		10.875.000.000,00
5	2015	10.875.000.000,00	4.000.000.000,00	(5.489.395.163,00)	9.385.604.837,00
6	2016	9.385.604.837,00		(1.715.977.271,00)	7.669.627.566,00
7	2017	7.669.627.566,00	1.000.000.000,00	(2.419.159.764,00)	6.250.467.802,00
8	2018	6.250.467.802,00	2.300.000.000,00	(2.598.990.192,00)	5.951.477.610,00
9	2019	5.951.477.610,00	1.000.000.000,00	(3.931.515.705,00)	3.019.961.905,00
10	2020	3.019.961.905,00	1.500.000.000,00	(2.182.638.139,00)	2.337.323.766,00
11	2021	2.337.323.766,00	6.144.640.000,00	(4.211.461.970,00)	4.270.501.796,00
12	2022	4.270.501.796,00	1.000.000.000,00	(2.935.238.772,00)	2.335.263.024,00
13	2023	2.335.263.024,00	1.000.000.000,00	(4.000.278.257,00)	(665.015.233,00)

MUTASI KIB A - ASET TETAP TANAH  
PEMERINTAH KOTA LHKOSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 9

No	KIB A - TANAH SKPD	Saldo Awal T.A. 2023	Nilai Belanja Modal T.A. 2023	Mutasi Tambah						Mutasi Kurang						Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir T.A 2023			
				Reklas Antar Aset Tetap	Reklas dari Aset Lainnya	Reklas dari Belanja Operasi	Mutasi Antar SKPD	Kapitalisasi Antar Belanja	Hibah	Pencatatan Baru	Jumlah Mutasi Tambah	Reklas Antar Aset Tetap	Reklas Ke Aset Lainnya	Reklas Ke Persediaan	Mutasi Antar SKPD			Pembayaran Kewajiban 2022	Kapitalisasi Antar Belanja	Ekstrakomabel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.430.136.607,00					10.358.719.450,00			10.358.719.450,00									-	41.788.856.057,00
2	Dinas Kesehatan	3.439.114.000,00					5.347.986.333,00			5.347.986.333,00									-	8.787.100.333,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penumahan Rakyat	363.185.175.058,24								-	281.292.500,00			2.356.103.063,00					2.637.395.563,00	360.547.779.495,24
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-								-									-	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hibah	40.000.000,00								-	40.000.000,00								40.000.000,00	-
6	Dinas Sosial	1.183.011.000,00								-									-	1.183.011.000,00
7	Dinas Penanaman Modal, PTSPK	-								-									-	-
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB	4.651.600.000,00								-									-	4.651.600.000,00
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	1.576.446.600,00					6.184.847.172,00			6.184.847.172,00	1.221.503.400,00								1.221.503.400,00	6.539.790.372,00
10	Dinas Pertahanan	457.174.700,00								-									-	457.174.700,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	523.959.750,00					1.594.683.480,00			1.594.683.480,00									-	2.118.643.230,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-								-									-	-
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	477.360.000,00								-									-	477.360.000,00
14	Dinas Perhubungan	10.601.732.000,00					9.503.483.612,00			9.503.483.612,00									-	20.105.215.612,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Pnsandian	-								-									-	-
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	29.800.000,00					45.750.811.196,00		7.693.686.000,00	53.444.497.196,00				29.800.000,00					29.800.000,00	53.444.497.196,00
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	139.870.000,00								-									-	139.870.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	53.705.346,00								-									-	53.705.346,00
19	Sekretariat Daerah	281.143.740.450,00								262.880.000,00				76.728.075.680,00					76.728.075.680,00	204.618.544.770,00
20	Sekretariat DPRK	10.560.953.000,00								-									-	10.560.953.000,00
21	Kecamatan Banda Sakti	641.674.500,00								-									-	641.674.500,00
22	Kecamatan Biang Mangat	1.057.490.000,00								-									-	1.057.490.000,00
23	Kecamatan Muara Satu	-								-									-	-
24	Kecamatan Muara Dua	1.000.000,00					102.248.750,00			102.248.750,00									-	103.248.750,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	209.480.000,00								-				209.480.000,00					209.480.000,00	-
26	Inspektorat	-								-									-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-								-									-	-
28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.767.643.250,00								-									-	2.767.643.250,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	32.300.814.511,00								-									-	32.300.814.511,00
30	Badan Kepegawain dan Pengembangan SDM	982.710.000,00								-									-	982.710.000,00
31	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	21.549.992.167,00					217.798.750,00			217.798.750,00									-	21.767.790.917,00
32	Sekretariat MPU	-								-									-	-
33	Sekretariat Benut Mal	-								-									-	-
34	Sekretariat MAA	-								-									-	-
35	Sekretariat MPD	-								-									-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>769.004.582.939,24</b>					<b>79.323.458.743,00</b>			<b>7.693.686.000,00</b>	<b>87.017.144.743,00</b>			<b>1.542.795.900,00</b>					<b>80.866.254.643,00</b>	<b>775.155.473.039,24</b>



## DAFTAR NAMA-NAMA KENDARAAN DOUBLE CATAT KIB B

No	Merek/Jenis Kendaraan	Kendaraan Dinas			Status Penggunaan	Keterangan	Pengguna Saat Ini	Hapus	Ket	Rekening	Nama Rekening
		Nomor Polisi	Nilai Perolehan (Rp)	Nomor Rangka							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Merk: Honda / NF125D	BL 2068 N	14.000.000,00	MH1JB2112 4K460864	Sekretariat Daerah	Staf Bag.pemerintahan (yusrizal,sh)	Saifuni BPKD	14.000.000,00	Double Catat di BPKD	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
2	Merk: Honda / NF 125 TR	BL 2199 ND	13.580.000,00	MH1JB9110 8K542008	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	13.580.000,00	Double Catat di Setdako	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
3	Merk: Honda / New Absolute Revo	BL 2247 AI	11.750.000,00	MH1JBE213 BK113363	BPKD - PPBMD	Mukim Blang Mangat	Bag Ekonomi Setdako	11.750.000,00	Double Catat di Setdako	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
4	Merk: Honda / Supra NF	BL 2862 N	11.782.000,00	MH1JB6113 7K022382	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jauhari (KESBANGPOL)	11.782.000,00	Double Catat di Kesbangpol	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
5	Merk: MAZDA / -	BL 8030 N	180.648.750,00	MM6UNY0 W4C091785 3	BPKD - PPBMD	MUTASI, Satpol PP	MOBIL PATROLI (SATPOL PP)	180.648.750,00	Double Catat di Satpol PP	1.3.2.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG
6	Merk: Honda / New Absolute Revo	BL 2000 AI	11.750.000,00	MH1JBE219 BK113352	BPKD - PPBMD	Geuchik gampong Lama	NANI HIJRIATI (BENDAHARA DISPERINDAGKOP)	11.750.000,00	Double Catat di Satpol Disperindagk	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
7	Merk: Honda / New Absolute Revo	BL 2237 AI	11.750.000,00	MH1JBE21X BKJ113361	BPKD - PPBMD	Mukim Blang Mangat	OSKANDAR (KESBANGPOL)	11.750.000,00	Double Catat di Kesbangpol	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
8	Merk: YAMAHA / VEGA ZR DB	BL 2640 ND	12.749.281,00	MH35D9205 DJ846296	BPKD - PPBMD	BPPKS	(Novaldie Kasyahh, A. Md) DP3AP2KB	12.749.281,00	Double Catat di DP3AP2KB	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
9	Merk: HONDA / VARIO CW	BL 2754 ND	16.181.583,00	MH1JF8127 EK001153	BPKD - PPBMD	GEUCHIK	ALKHALIDI DOSTY (SEKCAM BANDA SAKTI)	16.181.583,00	Double Catat di Kec. Banda Sakti	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
10	Merk: Honda / Supra X 125	BL 2397 ND	15.340.000,00	MH1JB9123 AK415042	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	PUSKESMAS/PUSKES DES	15.340.000,00	Double Catat Dinkes	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
11	Merk: Honda / Supra X 125	BL 2386 ND	15.340.000,00	MH1JB9126 AK445202	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	kasie keswa / ZAHARA	15.340.000,00	Double Catat Dinkes	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
12	Merk: Honda / NF125TR	BL 2402 ND	15.340.000,00	MH1JB9122 AK383880	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	kasie imunisasi / ERLAWATI	15.340.000,00	Double Catat Dinkes	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
13	Merk: HONDA / NF125TR2	BL 2404 ND	15.340.000,00	MH1JB9128 AK406160	Dinas Kesehatan	1 Unit kendaraan dinas	HERAWATI (PUSKESMAS)	15.340.000,00	Double Catat Dinkes	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
14	Merk: Honda / NF125TR	BL 2394 ND	15.340.000,00	MH1JB9121 AK427013	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Taufiq Kelana/ Supir Asisten 3	15.340.000,00	Double Catat Dinkes	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
15	Merk: Honda / NF125TR	BL 2401 ND	15.340.000,00	MH1JB9122 AK387749	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Gudang Dinkes	15.340.000,00	Double Catat Dinkes	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
16	Merk: Honda / NF125TR	BL 2391 ND	15.340.000,00	MH1JB9128 AK427056	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	FAISAL (SUPIR KADIS)	15.340.000,00	Double Catat Dinkes	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
17	Merk: Honda / NF125TR	BL 2387 ND	15.340.000,00	MH1JB9120 AK445213	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	YUS (KASIE YANKES)	15.340.000,00	Double Catat Dinkes	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA

No	Merek/Jenis Kendaraan	Kendaraan Dinas			Status Penggunaan	Keterangan	Pengguna Saat Ini	Hapus	Ket	Rekening	Nama Rekening
		Nomor Polisi	Nilai Perolehan (Rp)	Nomor Rangka							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Merk: Honda / NF125TR	BL 2392 ND	14.000.000,00	MH1JB9126 AK427055	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Zulifikar Kabid P2P	15.340.000,00	Double Catat Dinkes	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
19	Merk: Honda / NF125TR	BL 2399 ND	13.580.000,00	MH1JB912X AK397414	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	JUNAIDI (PUSKESMAS BANDA SAKTI)	15.340.000,00	Double Catat Dinkes	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
20	Merk: Honda / NF125TR	BL 4970 ND	15.340.000,00	MH1JB912X AK445204	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan		15.340.000,00	Double Catat Dinkes	1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
21	Merk: Toyota / Kijang Pick Up	BL 8021 NB	131.600.000,00	MHF31KF60 40031006	Sekretariat Daerah	Wakil Walikota (Yusuf Muhammad, SE,MSM)	Pinjam Pakai PDAM	131.600.000,00	Double Catat Di PPBMD	1.3.2.02.01.02	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )
<b>Jumlah</b>								<b>584.531.614,00</b>			



**MUTASI KIB C - GEDUNG DAN BANGUNAN**  
**PEMERINTAH KOTALHOKSEUMAWA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	KIB C - GEDUNG DAN BANGUNAN SKPD	Saldo Awal T.A. 2023	Nilai Belanja Modal T.A. 2023	Mutasi Tambah					Mutasi Kurang							Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir T.A. 2023				
				Reklas Antar Aset Tetap	Reklas dari Aset Lainnya	Reklas dari Belanja Operasi	Mutasi Antar SKPD	Kapitalisasi Antar Belanja	Hibah	Koreksi Tambah	Jumlah Mutasi Tambah	Reklas Antar Aset Tetap	Reklas Ke Aset Lainnya	Reklas Ke Persediaan	Mutasi Antar SKPD			Pembayaran Kewajiban 2022	Kapitalisasi Antar Belanja	Ekrakomtabel	Hibah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	212.921.158.166,60	12.758.000.081,00							-									-	225.679.158.187,60	
2	Dinas Kesehatan	87.221.561.734,00	2.015.642.900,00	227.600.000,00				14.900.000,00		227.600.000,00									-	89.464.804.634,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penunahan Rakyat	65.122.504.762,00	1.163.400.500,00							14.900.000,00									-	66.300.805.262,00	
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-							-									-	-	
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah	891.550.624,00	-				522.998.655,00			522.998.655,00									-	1.414.549.279,00	
6	Dinas Sosial	2.679.667.000,00	-							-									-	2.679.667.000,00	
7	Dinas Penanaman Modal, PTSP/TK	2.883.878.000,00	-							-									-	2.883.878.000,00	
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB	6.423.407.155,00	300.208.000,00							-									-	6.213.959.500,00	
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	8.193.020.023,00	1.287.584.680,00						14.800.000,00	14.800.000,00	6.455.000,00			522.998.655,00					-	9.450.584.673,00	
10	Dinas Pertanian	575.260.710,00	-							-									-	575.260.710,00	
11	Dinas Lingkungan Hidup	12.919.535.927,46	1.009.974.900,00							-							19.780.200,00		19.780.200,00	13.969.730.627,46	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	495.578.000,00	-							-									-	495.578.000,00	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	500.487.640,00	-							-									-	500.487.640,00	
14	Dinas Perhubungan	28.827.142.790,00	-					1.245.931.200,00		1.245.931.200,00									-	30.073.073.990,00	
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	3.389.490.800,00	-							-									-	3.389.490.800,00	
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	58.952.280.665,50	1.931.143.000,00	6.809.855.000,00				44.997.000,00		6.854.752.000,00									-	67.738.175.665,50	
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	3.158.546.047,53	98.828.000,00							-									-	3.257.374.047,53	
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.164.950.534,00	197.817.940,00							-									-	4.362.768.474,00	
19	Sekretariat Daerah	35.655.969.659,00	-	19.915.000,00						19.915.000,00							19.915.000,00		19.915.000,00	35.655.969.659,00	
20	Sekretariat DPRD	23.318.701.589,00	-							-									-	23.318.701.589,00	
21	Kecamatan Banda Sakti	777.861.799,00	-							-									-	777.861.799,00	
22	Kecamatan Blang Manggát	118.482.080,00	-							-									-	118.482.080,00	
23	Kecamatan Muara Satu	1.023.307.877,00	-							-									-	1.023.307.877,00	
24	Kecamatan Muara Dua	175.545.500,00	-							-									-	175.545.500,00	
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.138.384.750,00	506.074.000,00							-									-	1.644.458.750,00	
26	Inspektoriat	-	-							-									-	-	
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.031.474.102,00	-							-									-	1.031.474.102,00	
28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	16.063.000.896,00	38.584.044,00							-									-	16.101.584.940,00	
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	2.581.969.000,00	-				522.998.655,00			522.998.655,00				522.998.655,00					-	2.581.969.000,00	
30	Badan Kependidikan dan Pengembangan SDM	408.128.000,00	-							-									-	408.128.000,00	
31	Dinas Syariat Islam dan Penanggulangan Dayah	119.331.950.210,00	645.913.440,00							-									-	119.977.863.650,00	
32	Sekretariat MPU	-	-							-									-	-	
33	Sekretariat Bupati Mei	-	-							-									-	-	
34	Sekretariat MAA	149.082.700,00	-							-									-	149.082.700,00	
35	Sekretariat MPD	149.082.700,00	-							-									-	149.082.700,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>701.845.960.348,09</b>	<b>21.923.145.455,00</b>	<b>7.057.370.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.045.997.310,00</b>	<b>1.305.728.200,00</b>	<b>-</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>9.423.895.510,00</b>	<b>6.455.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.045.997.310,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.695.200,00</b>	<b>-</b>	<b>1.092.147.510,00</b>	<b>732.100.853.803,09</b>

MUTASI KIB D - JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN  
 PEMERINTAH KOTA LHOEKSEUMAWE  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 13

No	KIB D - JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN SKPD	Saldo Awal T.A. 2023	Nilai Belanja Modal T.A. 2023	Mutasi Tambah						Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi Kurang							Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir T.A. 2023		
				Reklas Antar Aset Tetap	Reklas dari Aset Lainnya	Reklas dari Belanja Operasi	Mutasi Antar SKPD	Kapitalisasi Antar Belanja	Hibah		Reklas Antar Aset Tetap	Reklas Ke Aset Lainnya	Reklas Ke Persediaan	Mutasi Antar SKPD	Pembayaran Kewajiban 2022	Kapitalisasi Antar Belanja	Ekstrakomtabel			Hibah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.094.793.203,00								-										-	4.094.793.203,00
2	Dinas Kesehatan	2.104.943.460,00								-										-	2.104.943.460,00
3	Dinas Pelelagaan Umum dan Penumahan Ralyat	1.144.463.706.594,73	18.131.541.500,00					17.970.000,00		17.970.000,00										-	1.162.613.218.094,73
4	Badan Keastuan Bangsa dan Politik	45.000.000,00								-										-	45.000.000,00
5	Satuan Polis Pamong Praja dan Wilayahul Hibah	-								-										-	-
6	Dinas Sosial	-								-										-	-
7	Dinas Penanaman Modal, PTSPTK	154.925.000,00								-										-	154.925.000,00
8	Dinas Pembendayaan Perempuan, PAPPKB	109.946.250,00								-										-	109.946.250,00
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Pentanian dan Pangan	17.411.198.767,00		966.723.400,00						966.723.400,00										-	18.377.922.167,00
10	Dinas Pertanahan	-								-										-	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	12.598.268.180,00	620.302.727,00							-	197.886.000,00									197.886.000,00	13.020.684.907,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.806.000,00								-										-	30.806.000,00
13	Dinas Pembendayaan Masyarakat dan Gampong	92.986.000,00								-										-	92.986.000,00
14	Dinas Perhubungan	842.058.800,00								-										-	842.058.800,00
15	Dinas Komunkasi, Informatika dan Pensandian	-								-										-	-
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	692.762.900,00								-										-	692.762.900,00
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	37.733.750,00								-										-	37.733.750,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.170.000,00								-										-	22.170.000,00
19	Sekretariat Daerah	5.291.548.190,00	19.915.000,00							-	19.915.000,00									19.915.000,00	5.291.548.190,00
20	Sekretariat DPRK	136.130.750,00								-										-	136.130.750,00
21	Kecamatan Banda Sakti	-								-										-	-
22	Kecamatan Biang Mangat	21.850.000,00								-										-	21.850.000,00
23	Kecamatan Muara Satu	22.850.000,00								-										-	22.850.000,00
24	Kecamatan Muara Dua	21.163.000,00								-										-	21.163.000,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.275.012.038,00								-										-	22.275.012.038,00
26	Inspektorat	-								-										-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	185.490.000,00								-										-	185.490.000,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	648.200.000,00								-										-	648.200.000,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	-								-										-	-
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	68.647.000,00								-										-	68.647.000,00
31	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	-								-										-	-
32	Sekretariat MPU	-								-										-	-
33	Sekretariat Baiful Mal	-								-										-	-
34	Sekretariat MAA	-								-										-	-
35	Sekretariat MPD	-								-										-	-
	Jumlah	1.211.372.189.882,73	18.771.759.227,00	966.723.400,00	-	-	-	17.970.000,00	-	984.693.400,00	217.801.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	217.801.000,00	1.230.910.841.509,73

**MUTASI KIB E - ASET TETAP LAINNYA**  
**PEMERINTAH KOTA LHKOSEUMAWE**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	KIB E - ASET TETAP LAINNYA SKPD	Saldo Awal T.A. 2023	Nilai Belanja Modal T.A. 2023	Mutasi Tambah						Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi Kurang								Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir T.A. 2023	
				Reklas Antar Aset Tetap	Reklas dari Aset Lainnya	Reklas dari Belanja Operasi	Mutasi Antar SKPD	Kapitalisasi Antar Belanja	Hibah		Reklas Antar Aset Tetap	Reklas Ke Aset Lainnya	Reklas Ke Persediaan	Mutasi Antar SKPD	Pembayaran Kewajiban 2022	Kapitalisasi Antar Belanja	Ekstrakomtabel	Hibah			penghapusan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.859.719.039,00	4.013.866.800,00	3.217.500,00						3.217.500,00							3.582.125.416,00		1.230.000,00	3.583.355.416,00	12.293.447.923,00
2	Dinas Kesehatan	-								-											-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penumahan Rakyat	-		281.292.500,00						281.292.500,00											281.292.500,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-								-											-
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hibah	70.611.250,00			40.000.000,00					40.000.000,00											110.611.250,00
6	Dinas Sosial	8.744.000,00								-											8.744.000,00
7	Dinas Penanaman Modal, PTSPK	14.590.000,00								-											14.590.000,00
8	Dinas Pembudayaan Perempuan, PAPPKB	5.539.800,00								-											5.539.800,00
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	-		254.780.000,00						254.780.000,00											254.780.000,00
10	Dinas Pertanian	23.531.250,00								-											23.531.250,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	119.187.500,00								-											119.187.500,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-								-											-
13	Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Gampong	166.998.000,00								-											166.998.000,00
14	Dinas Pemhubungan	33.777.500,00								-											33.777.500,00
15	Dinas Komunitas, Informatika dan Pensandian	-								-											-
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan	-								-											-
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	-								-											-
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	791.201.120,00								-											791.201.120,00
19	Sekretariat Daerah	589.110.462,00								-											589.110.462,00
20	Sekretariat DPRK	110.571.597,00								-											110.571.597,00
21	Kecamatan Banda Sakti	-								-											-
22	Kecamatan Biang Manqat	-								-											-
23	Kecamatan Muara Satu	-								-											-
24	Kecamatan Muara Dua	-								-											-
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	702.108.000,00								-											702.108.000,00
26	Inspektorat	219.720.311,00								-											219.720.311,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	560.000,00								-											560.000,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	204.286.432,00								-											204.286.432,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	-								-											-
30	Badan Kepegawain dan Pengembangan SDM	1.686.500,00								-											1.686.500,00
31	Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah	-								-											-
32	Sekretariat MPU	32.166.000,00								-											32.166.000,00
33	Sekretariat Baitul Mal	445.000,00								-											445.000,00
34	Sekretariat MAA	498.142.688,00								-											498.142.688,00
35	Sekretariat MPD	6.105.000,00								-											6.105.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.458.801.449,00</b>	<b>4.013.866.800,00</b>	<b>579.290.000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>579.290.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>3.582.125.416,00</b>	-	<b>1.230.000,00</b>	<b>3.583.355.416,00</b>	<b>16.468.602.833,00</b>

MUTASI KIB F - KONTRUKSI DALAM PENERJAAN  
 PEMERINTAH KOTA LHKOSELU MAWE  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 15

No	KIB F - KONTRUKSI DALAM PENERJAAN SKPD	Saldo Awal T.A. 2023	Nilai Belanja Modal T.A. 2023	Mutasi Tambah						Mutasi Kurang								Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir T.A. 2023		
				Reklas Antar Aset Tetap	Reklas dari Aset Lainnya	Reklas dari Belanja dan Operasi	Mutasi Antar SKPD	Kapitalisasi Antar Belanja	Koreksi Tambah	Reklas Antar Aset Tetap	Reklas Ke Aset Lainnya	Reklas Ke Persediaan	Mutasi Antar SKPD	Pembayaran Kewajiban 2022	Kapitalisasi Antar Belanja	Ekrakomtabel	Hibah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	227.600.000,00	227.600.000,00	227.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9.029.575.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.029.575.000,00	
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Dinas Penanaman Modal, PTSP/TK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA/PPKB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	7.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.600.000,00	
10	Dinas Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	9.649.038.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.809.855.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.809.855.000,00	
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Perwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Sekretariat DPRK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Kecamatan Banda Sakti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Kecamatan Biang Mangat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Kecamatan Muara Satu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Kecamatan Muara Dua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PRKD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Dinas Syariah Islam dan Pengembangan Dayah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Sekretariat MPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Sekretariat Baitul Mal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Sekretariat MRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Sekretariat MPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>18.686.213.050,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>227.600.000,00</b>	<b>227.600.000,00</b>	<b>7.037.455.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.037.455.000,00</b>	<b>11.876.358.050,00</b>

**MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP  
PEMERINTAH KOTA LHOEKSEUMAWE  
PER 31 DESEMBER 2023**

No	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP				
		Akumulasi Penyusutan s.d 2022	Penyusutan Selama T.A 2023	Koreksi Penyusutan Saldo Awal T.A 2023 Sifatnya menambah	Koreksi Penyusutan Saldo Awal T.A 2023 Sifatnya mengurangi	Akumulasi Penyusutan s.d 2023
1	2	3	4	5	6	6=3+4+5-6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(78.336.901.996,84)	(8.064.857.384,27)	-	(18.693.954.036,00)	(67.707.805.345,11)
	- Peralatan Dan Mesin	(45.710.733.663,84)	(3.888.222.826,52)	-	(18.693.954.036,00)	(30.905.002.454,36)
	- Gedung Dan Bangunan	(32.287.106.500,00)	(4.075.224.898,75)	-	-	(36.362.331.398,75)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(339.061.833,00)	(101.409.659,00)	-	-	(440.471.492,00)
2	Dinas Kesehatan	(57.542.942.439,00)	(8.252.119.835,31)	(399.789.360,00)	(1.334.610.371,64)	(64.860.241.262,67)
	- Peralatan Dan Mesin	(46.437.175.487,00)	(6.544.613.479,10)	(399.789.360,00)	(646.705.013,64)	(52.734.873.312,46)
	- Gedung Dan Bangunan	(10.637.085.901,00)	(1.640.736.276,21)	-	(687.905.358,00)	(11.589.916.819,21)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(468.681.051,00)	(66.770.080,00)	-	-	(535.451.131,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(644.595.107.055,00)	(77.465.342.012,69)	(177.766.971,00)	(659.000.000,00)	(721.579.216.038,69)
	- Peralatan Dan Mesin	(8.210.474.657,00)	(78.251.193,00)	(177.766.971,00)	(659.000.000,00)	(7.807.492.821,00)
	- Gedung Dan Bangunan	(10.062.251.175,00)	(1.376.032.212,63)	-	-	(11.438.283.387,63)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(626.322.381.223,00)	(76.011.058.607,06)	-	-	(702.333.439.830,06)
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.043.393.783,00)	(26.314.508,33)	(300.870.820,00)	(202.617.000,00)	(1.167.962.111,33)
	- Peralatan Dan Mesin	(1.033.018.783,00)	(24.814.508,33)	(300.870.820,00)	(202.617.000,00)	(1.156.087.111,33)
	- Gedung Dan Bangunan	-	-	-	-	-
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(10.375.000,00)	(1.500.000,00)	-	-	(11.875.000,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	(2.089.951.242,00)	(90.204.431,73)	(881.731.579,66)	-	(3.061.887.253,39)
	- Peralatan Dan Mesin	(1.984.918.696,00)	(59.757.294,08)	(845.382.438,00)	-	(2.890.058.428,08)
	- Gedung Dan Bangunan	(105.032.546,00)	(30.447.137,65)	(36.349.141,66)	-	(171.828.825,31)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-	-
6	Dinas Sosial	(1.810.591.541,00)	(106.121.074,00)	(88.173.380,00)	-	(2.004.885.995,00)
	- Peralatan Dan Mesin	(1.677.786.605,00)	(52.527.734,00)	(88.173.380,00)	-	(1.818.487.719,00)
	- Gedung Dan Bangunan	(132.804.936,00)	(53.593.340,00)	-	-	(186.398.276,00)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-	-
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	(2.299.205.437,94)	(130.443.313,20)	-	(55.000.000,00)	(2.374.648.751,14)
	- Peralatan Dan Mesin	(1.723.067.866,94)	(68.214.294,20)	-	(55.000.000,00)	(1.736.282.161,14)
	- Gedung Dan Bangunan	(537.537.723,00)	(57.677.560,00)	-	-	(595.215.283,00)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(38.599.848,00)	(4.551.459,00)	-	-	(43.151.307,00)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(3.524.105.562,00)	(383.832.166,97)	(10.578.737,00)	(104.683.167,00)	(3.813.833.298,97)
	- Peralatan Dan Mesin	(3.009.369.662,00)	(257.164.121,97)	(5.035.800,00)	(78.045.800,00)	(3.193.523.783,97)
	- Gedung Dan Bangunan	(481.503.784,00)	(123.166.670,00)	(4.070.000,00)	(25.164.430,00)	(583.576.024,00)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(33.232.116,00)	(3.501.375,00)	(1.472.937,00)	(1.472.937,00)	(36.733.491,00)
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	(15.671.114.599,67)	(1.986.754.832,21)	(587.845.544,33)	(43.781.859,33)	(18.201.933.116,88)
	- Peralatan Dan Mesin	(7.661.987.229,67)	(653.305.081,33)	(317.500.000,00)	(43.781.859,33)	(8.589.010.451,67)
	- Gedung Dan Bangunan	(1.437.071.069,00)	(263.264.705,88)	(226.051.875,00)	-	(1.926.387.649,88)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(6.572.056.301,00)	(1.070.185.045,00)	(44.293.669,33)	-	(7.686.535.015,33)
10	Dinas Pertanahan	(326.065.347,00)	(136.534.783,20)	(269.800.000,00)	-	(732.400.130,20)
	- Peralatan Dan Mesin	(308.389.804,00)	(125.029.569,00)	(269.800.000,00)	-	(703.219.373,00)
	- Gedung Dan Bangunan	(17.675.543,00)	(11.505.214,20)	-	-	(29.180.757,20)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	(25.538.679.867,00)	(2.126.423.073,50)	(407.101.600,00)	(2.519.684.394,00)	(25.552.520.146,50)
	- Peralatan Dan Mesin	(22.263.338.077,00)	(1.484.238.782,20)	(407.101.600,00)	(2.519.684.394,00)	(21.634.994.065,20)
	- Gedung Dan Bangunan	(1.346.928.903,00)	(268.141.141,05)	-	-	(1.615.070.044,05)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(1.928.412.887,00)	(374.043.150,25)	-	-	(2.302.456.037,25)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.488.753.742,00)	(165.350.978,33)	-	(321.340.000,00)	(2.332.764.720,33)
	- Peralatan Dan Mesin	(2.388.550.681,00)	(154.656.768,33)	-	(321.340.000,00)	(2.221.867.449,33)
	- Gedung Dan Bangunan	(91.059.906,00)	(9.911.560,00)	-	-	(100.971.466,00)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(9.143.155,00)	(782.650,00)	-	-	(9.925.805,00)
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	(1.320.758.698,00)	(80.173.770,80)	-	(213.428.000,00)	(1.187.504.468,80)
	- Peralatan Dan Mesin	(1.224.934.983,00)	(67.064.486,00)	-	(213.428.000,00)	(1.078.571.469,00)
	- Gedung Dan Bangunan	(61.847.297,00)	(10.009.752,80)	-	-	(71.857.049,80)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(33.976.418,00)	(3.099.532,00)	-	-	(37.075.950,00)
14	Dinas Perhubungan	(12.046.875.290,00)	(1.603.225.954,29)	-	(338.162.583,45)	(13.311.938.660,84)
	- Peralatan Dan Mesin	(6.996.352.148,00)	(959.464.094,35)	-	(338.162.583,45)	(7.617.653.658,90)
	- Gedung Dan Bangunan	(4.616.856.989,00)	(579.065.141,94)	-	-	(5.195.922.130,94)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(433.666.153,00)	(64.696.718,00)	-	-	(498.362.871,00)
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	(1.844.378.096,00)	(528.367.931,67)	(145.275.000,00)	(10.375.000,00)	(2.507.646.027,67)
	- Peralatan Dan Mesin	(1.665.672.464,00)	(448.578.115,67)	(145.275.000,00)	(10.375.000,00)	(2.249.150.579,67)
	- Gedung Dan Bangunan	(178.705.632,00)	(79.789.816,00)	-	-	(258.495.448,00)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-	-
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	(8.365.348.656,00)	(1.864.371.306,49)	-	-	(10.229.719.962,49)
	- Peralatan Dan Mesin	(3.355.520.915,00)	(543.237.569,01)	-	-	(3.898.758.484,01)
	- Gedung Dan Bangunan	(4.928.986.155,00)	(1.303.413.244,48)	-	-	(6.232.399.399,48)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(80.841.586,00)	(17.720.493,00)	-	-	(98.562.079,00)

No	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP				
		Akumulasi Penyusutan s.d 2022	Penyusutan Selama T.A 2023	Koreksi Penyusutan Saldo Awal T.A 2023 Sifatnya menambah	Koreksi Penyusutan Saldo Awal T.A 2023 Sifatnya mengurangi	Akumulasi Penyusutan s.d 2023
1	2	3	4	5	6	6=3+4+5-6
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	(821.622.943,00)	(285.221.217,22)	(352.000.000,00)	-	(1.458.844.160,22)
	- Peralatan Dan Mesin	(648.025.166,00)	(216.815.911,94)	(352.000.000,00)	-	(1.216.841.077,94)
	- Gedung Dan Bangunan	(168.189.130,00)	(67.288.629,28)	-	-	(235.477.759,28)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(5.408.647,00)	(1.116.676,00)	-	-	(6.525.323,00)
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(2.474.536.436,00)	(532.165.891,55)	-	-	(3.006.702.327,55)
	- Peralatan Dan Mesin	(2.316.945.579,00)	(446.648.314,04)	-	-	(2.763.593.893,04)
	- Gedung Dan Bangunan	(151.997.637,00)	(84.947.493,51)	-	-	(236.945.130,51)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(5.593.220,00)	(570.084,00)	-	-	(6.163.304,00)
19	Sekretariat Daerah	(41.460.418.334,00)	(2.836.545.914,76)	(824.710.946,75)	(2.127.258.822,00)	(42.994.416.373,51)
	- Peralatan Dan Mesin	(27.817.781.630,00)	(1.948.902.838,78)	(824.710.946,75)	(2.127.258.822,00)	(28.464.136.593,53)
	- Gedung Dan Bangunan	(11.415.635.578,00)	(713.119.393,98)	-	-	(12.128.754.971,98)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(2.227.001.126,00)	(174.523.682,00)	-	-	(2.401.524.808,00)
20	Sekretariat DPRK	(11.309.752.392,02)	(1.014.400.557,97)	(162.000.000,00)	(57.666.100,00)	(12.428.486.849,99)
	- Peralatan Dan Mesin	(9.521.699.664,02)	(544.697.194,19)	(162.000.000,00)	(57.666.100,00)	(10.170.730.758,21)
	- Gedung Dan Bangunan	(1.762.449.960,00)	(466.374.031,78)	-	-	(2.228.823.991,78)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(25.602.768,00)	(3.299.332,00)	-	-	(28.932.100,00)
21	Kecamatan Banda Sakti	(821.293.829,00)	(77.208.692,98)	-	-	(898.502.521,98)
	- Peralatan Dan Mesin	(656.984.520,00)	(61.651.457,00)	-	-	(718.635.977,00)
	- Gedung Dan Bangunan	(164.309.309,00)	(15.557.235,98)	-	-	(179.866.544,98)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-	-
22	Kecamatan Blang Mangat	(859.730.972,00)	(71.608.724,10)	(45.972.440,00)	-	(977.312.136,10)
	- Peralatan Dan Mesin	(853.688.844,00)	(68.802.084,10)	(45.972.440,00)	-	(968.463.368,10)
	- Gedung Dan Bangunan	(3.128.795,00)	(2.369.640,00)	-	-	(5.498.435,00)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(2.913.333,00)	(437.000,00)	-	-	(3.350.333,00)
23	Kecamatan Muara Satu	(1.094.489.386,00)	(43.584.691,54)	(91.192.125,00)	-	(1.229.266.202,54)
	- Peralatan Dan Mesin	(943.950.819,00)	(22.534.784,00)	(91.192.125,00)	-	(1.057.677.728,00)
	- Gedung Dan Bangunan	(142.191.795,00)	(20.466.157,54)	-	-	(162.657.952,54)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(8.346.772,00)	(583.750,00)	-	-	(8.930.522,00)
24	Kecamatan Muara Dua	(1.093.465.883,00)	(39.453.038,67)	(79.842.563,00)	-	(1.212.761.484,67)
	- Peralatan Dan Mesin	(1.034.834.631,00)	(35.236.696,67)	(79.842.563,00)	-	(1.149.913.890,67)
	- Gedung Dan Bangunan	(47.990.975,00)	(3.510.910,00)	-	-	(51.501.885,00)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(10.640.277,00)	(705.432,00)	-	-	(11.345.709,00)
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(19.983.137.615,00)	(2.765.813.708,53)	(398.183.750,34)	(20.017.474,00)	(23.127.117.599,87)
	- Peralatan Dan Mesin	(13.369.380.629,00)	(909.834.835,00)	(398.183.750,34)	(20.017.474,00)	(14.657.381.740,34)
	- Gedung Dan Bangunan	(195.537.004,00)	(26.984.978,33)	-	-	(222.521.982,33)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(6.418.219.982,00)	(1.828.993.895,20)	-	-	(8.247.213.877,20)
26	Inspektorat	(2.076.229.782,00)	(106.453.182,67)	(277.305.375,00)	(119.055.393,00)	(2.340.932.946,67)
	- Peralatan Dan Mesin	(2.076.229.782,00)	(106.453.182,67)	(277.305.375,00)	(119.055.393,00)	(2.340.932.946,67)
	- Gedung Dan Bangunan	-	-	-	-	-
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(3.091.956.600,00)	(170.085.841,67)	(405.673.380,00)	-	(3.667.715.821,67)
	- Peralatan Dan Mesin	(2.907.185.981,00)	(142.843.909,67)	(405.673.380,00)	-	(3.455.703.270,67)
	- Gedung Dan Bangunan	(136.804.041,00)	(21.154.898,00)	-	-	(157.958.939,00)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(47.966.578,00)	(6.087.034,00)	-	-	(54.053.612,00)
28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	(11.017.761.854,54)	(824.067.180,79)	-	(476.109.044,00)	(11.365.719.991,33)
	- Peralatan Dan Mesin	(7.484.838.101,54)	(481.136.190,13)	-	(476.109.044,00)	(7.489.865.247,67)
	- Gedung Dan Bangunan	(3.258.152.784,00)	(321.324.324,66)	-	-	(3.579.477.108,66)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(274.770.969,00)	(21.606.666,00)	-	-	(296.377.635,00)
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	(8.342.595.785,00)	(185.412.220,50)	(102.894.523,00)	(1.429.491.475,50)	(7.201.411.053,00)
	- Peralatan Dan Mesin	(8.243.596.945,00)	(125.213.000,50)	(81.494.923,00)	(1.429.491.475,50)	(7.020.813.393,00)
	- Gedung Dan Bangunan	(98.998.840,00)	(60.199.220,00)	(21.399.600,00)	-	(180.597.660,00)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-	-
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(1.453.906.455,00)	(116.871.956,00)	(263.283.750,00)	(173.000.000,00)	(1.661.062.161,00)
	- Peralatan Dan Mesin	(1.414.458.385,00)	(107.376.496,00)	(263.283.750,00)	(173.000.000,00)	(1.612.118.631,00)
	- Gedung Dan Bangunan	(28.350.138,00)	(8.122.520,00)	-	-	(36.472.658,00)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(11.097.932,00)	(1.372.940,00)	-	-	(12.470.872,00)
31	Dinas Syariah Islam dan Pengembangan Dayah	(28.468.327.977,00)	(2.447.297.888,20)	(193.449.562,00)	(118.439.000,00)	(30.990.636.427,20)
	- Peralatan Dan Mesin	(1.657.253.112,00)	(48.317.121,67)	(193.449.562,00)	(118.439.000,00)	(1.780.580.795,67)
	- Gedung Dan Bangunan	(26.811.074.865,00)	(2.398.980.766,53)	-	-	(29.210.055.631,53)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-	-
32	Sekretariat MPU	(932.862.964,00)	(55.282.648,00)	-	(119.800.000,00)	(868.345.612,00)
	- Peralatan Dan Mesin	(932.862.964,00)	(55.282.648,00)	-	(119.800.000,00)	(868.345.612,00)
	- Gedung Dan Bangunan	-	-	-	-	-
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-	-
33	Sekretariat Baitul Mal	(1.105.409.990,00)	(43.508.976,00)	-	(252.546.778,00)	(896.372.188,00)
	- Peralatan Dan Mesin	(1.105.409.990,00)	(43.508.976,00)	-	(252.546.778,00)	(896.372.188,00)
	- Gedung Dan Bangunan	-	-	-	-	-

No	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP				
		Akumulasi Penyusutan s.d 2022	Penyusutan Selama T.A 2023	Koreksi Penyusutan Saldo Awal T.A 2023 Sifatnya menambah	Koreksi Penyusutan Saldo Awal T.A 2023 Sifatnya mengurangi	Akumulasi Penyusutan s.d 2023
1	2	3	4	5	6	6=3+4+5-6
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-	-
<b>34</b>	<b>Sekretariat MAA</b>	<b>(955.377.783,00)</b>	<b>(76.602.005,00)</b>	<b>(26.449.562,00)</b>	<b>(5.634.000,00)</b>	<b>(1.052.795.350,00)</b>
	- Peralatan Dan Mesin	(928.294.426,00)	(73.620.351,00)	(26.449.562,00)	(5.634.000,00)	(1.022.730.339,00)
	- Gedung Dan Bangunan	(27.083.357,00)	(2.981.654,00)	-	-	(30.065.011,00)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-	-
<b>35</b>	<b>Sekretariat MPD</b>	<b>(978.462.223,00)</b>	<b>(36.500.041,00)</b>	<b>-</b>	<b>(36.779.667,00)</b>	<b>(978.182.597,00)</b>
	- Peralatan Dan Mesin	(949.391.097,00)	(33.518.387,00)	-	(36.779.667,00)	(946.129.817,00)
	- Gedung Dan Bangunan	(29.071.126,00)	(2.981.654,00)	-	-	(32.052.780,00)
	- Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(997.185.512.556,01)</b>	<b>(114.738.521.734,14)</b>	<b>(6.491.890.969,08)</b>	<b>(29.432.434.164,92)</b>	<b>(1.088.983.491.094,31)</b>

DAFTAR MUTASI ASET LAIN-LAIN  
PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 17

No	SKPD	Aset Lainnya							Jumlah Mutasi Kurang	Saldo akhir TA 2023
		Saldo Awal TA 2023	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang					
			Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain	Jumlah Mutasi Tambah	Penghapusan Sesuai Keputusan Walikota No. 290 tahun 2023	Reklas dari Aset Lain-Lain ke Aset Tetap	Koreksi Kurang			
1	2	3	4	5=4	6	7	8=6+7	9=3+5-8		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	472.572.400,00	-	-	-	-	-	-	472.572.400,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	472.572.400,00	-	-	-	-	-	-	472.572.400,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Dinas Kesehatan	11.433.465.913,00	-	-	-	-	-	-	11.433.465.913,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	11.433.465.913,00	-	-	-	-	-	-	11.433.465.913,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	234.510.000,00	-	-	-	-	-	-	234.510.000,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	234.510.000,00	-	-	-	-	-	-	234.510.000,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.500.000,00	202.617.000,00	202.617.000,00	202.617.000,00	-	-	202.617.000,00	13.500.000,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	13.500.000,00	202.617.000,00	202.617.000,00	202.617.000,00	-	-	202.617.000,00	13.500.000,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hisbah	5.250.000,00	-	-	-	-	-	-	5.250.000,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	5.250.000,00	-	-	-	-	-	-	5.250.000,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Aset Rusak Berat/Usang	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	43.280.000,00	-	-	-	-	-	-	43.280.000,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	43.280.000,00	-	-	-	-	-	-	43.280.000,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	29.797.000,00	29.797.000,00	29.797.000,00	-	-	29.797.000,00	-	
	- Aset Rusak Berat/Usang	-	29.797.000,00	29.797.000,00	29.797.000,00	-	-	29.797.000,00	-	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	4.926.753.174,00	-	-	-	-	-	-	4.926.753.174,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	4.926.753.174,00	-	-	-	-	-	-	4.926.753.174,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Dinas Pertanahan	31.508.290,00	-	-	21.507.915,00	-	-	21.507.915,00	10.000.375,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	31.508.290,00	-	-	21.507.915,00	-	-	21.507.915,00	10.000.375,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.257.585.000,00	2.181.077.325,00	2.181.077.325,00	687.612.873,00	-	-	687.612.873,00	5.751.049.452,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	4.257.585.000,00	2.181.077.325,00	2.181.077.325,00	687.612.873,00	-	-	687.612.873,00	5.751.049.452,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	139.054.000,00	321.340.000,00	321.340.000,00	395.695.000,00	-	-	395.695.000,00	64.699.000,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	139.054.000,00	321.340.000,00	321.340.000,00	395.695.000,00	-	-	395.695.000,00	64.699.000,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	-	214.803.000,00	214.803.000,00	214.803.000,00	-	-	214.803.000,00	-	
	- Aset Rusak Berat/Usang	-	214.803.000,00	214.803.000,00	214.803.000,00	-	-	214.803.000,00	-	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Dinas Perhubungan	275.534.000,00	-	-	-	-	-	-	275.534.000,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	275.534.000,00	-	-	-	-	-	-	275.534.000,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Aset Rusak Berat/Usang	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	703.835.000,00	-	-	124.877.000,00	-	-	124.877.000,00	578.958.000,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	703.835.000,00	-	-	124.877.000,00	-	-	124.877.000,00	578.958.000,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Aset Rusak Berat/Usang	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Aset Rusak Berat/Usang	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Sekretariat Daerah	5.318.857.823,00	504.319.788,00	504.319.788,00	504.319.788,00	-	-	504.319.788,00	5.318.857.823,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	5.318.857.823,00	504.319.788,00	504.319.788,00	504.319.788,00	-	-	504.319.788,00	5.318.857.823,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Sekretariat DPRK	1.539.825.993,00	-	-	-	-	-	-	1.539.825.993,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	1.539.825.993,00	-	-	-	-	-	-	1.539.825.993,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Kecamatan Banda Sakti	159.848.000,00	-	-	-	-	-	-	159.848.000,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	159.848.000,00	-	-	-	-	-	-	159.848.000,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Kecamatan Blang Mangat	32.640.000,00	-	-	-	-	-	-	32.640.000,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	32.640.000,00	-	-	-	-	-	-	32.640.000,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Kecamatan Muara Satu	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Kecamatan Muara Dua	24.400.000,00	-	-	-	-	-	-	24.400.000,00	
	- Aset Rusak Berat/Usang	24.400.000,00	-	-	-	-	-	-	24.400.000,00	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Aset Rusak Berat/Usang	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Inspektorat	171.400.000,00	119.342.893,00	119.342.893,00	119.342.893,00	-	-	119.342.893,00	171.400.000,00	



No	SKPD	Aset Lainnya							
		Saldo Awal TA 2023	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang			Jumlah Mutasi Kurang	Saldo akhir TA 2023
			Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain	Jumlah Mutasi Tambah	Penghapusan Sesuai Keputusan Walikota No. 290 tahun 2023	Reklas dari Aset Lain-Lain ke Aset Tetap	Koreksi Kurang		
1	2	3	4	5=4	6	7	8=6+7	9=3+5-8	
	- Aset Rusak Berat/Usang	171.400.000,00	119.342.893,00	119.342.893,00	119.342.893,00	-	-	119.342.893,00	171.400.000,00
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>27</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>511.121.465,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>511.121.465,00</b>
	- Aset Rusak Berat/Usang	511.121.465,00	-	-	-	-	-	-	511.121.465,00
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>28</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>202.726.100,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>202.726.100,00</b>
	- Aset Rusak Berat/Usang	202.726.100,00	-	-	-	-	-	-	202.726.100,00
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>29</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)</b>	<b>6.235.062.470,00</b>	-	-	-	<b>639.331.690,00</b>	<b>440.547.440,00</b>	<b>1.279.879.130,00</b>	<b>4.955.183.340,00</b>
	- Aset Rusak Berat/Usang	5.706.942.470,00	-	-	-	839.331.690,00	440.547.440,00	1.279.879.130,00	4.427.063.340,00
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	528.120.000,00	-	-	-	-	-	-	528.120.000,00
<b>30</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Aset Rusak Berat/Usang	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31</b>	<b>Dinas Syariat Islam dan Pengembangan Dayah</b>	<b>502.220.000,00</b>	<b>119.364.000,00</b>	<b>119.364.000,00</b>	-	-	-	-	<b>621.584.000,00</b>
	- Aset Rusak Berat/Usang	502.220.000,00	119.364.000,00	119.364.000,00	-	-	-	-	621.584.000,00
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>32</b>	<b>Sekretariat MPU</b>	<b>198.777.960,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>198.777.960,00</b>
	- Aset Rusak Berat/Usang	198.777.960,00	-	-	-	-	-	-	198.777.960,00
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>33</b>	<b>Sekretariat Baitul Mal</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>153.723.398,00</b>	<b>153.723.398,00</b>	<b>133.723.398,00</b>	-	-	<b>133.723.398,00</b>	<b>33.000.000,00</b>
	- Aset Rusak Berat/Usang	13.000.000,00	153.723.398,00	153.723.398,00	133.723.398,00	-	-	133.723.398,00	33.000.000,00
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>34</b>	<b>Sekretariat MAA</b>	-	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	-	-	<b>5.634.000,00</b>	-
	- Aset Rusak Berat/Usang	-	5.634.000,00	5.634.000,00	5.634.000,00	-	-	5.634.000,00	-
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>35</b>	<b>Sekretariat MPD</b>	<b>9.790.000,00</b>	<b>17.688.000,00</b>	<b>17.688.000,00</b>	<b>17.688.000,00</b>	-	-	<b>17.688.000,00</b>	<b>9.790.000,00</b>
	- Aset Rusak Berat/Usang	9.790.000,00	17.688.000,00	17.688.000,00	17.688.000,00	-	-	17.688.000,00	9.790.000,00
	- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>37.462.517.588,00</b>	<b>3.869.706.404,00</b>	<b>3.869.706.404,00</b>	<b>2.457.617.867,00</b>	<b>839.331.690,00</b>	<b>440.547.440,00</b>	<b>3.737.496.997,00</b>	<b>37.594.726.995,00</b>

## REKAPAN PAJAK DITERIMA DIMUKA PEMKO LHKSEUMAWE

NO	URAIAN	PPD 2022	PPD JATUH TEMPO	PDD BARU	PPD 2023	SKPD
<b>I</b>	<b>Pajak</b>					
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	229.922.682,68	229.922.682,68	181.764.426,41	181.764.426,41	BPKD
2	Reklame Kain	883.131,68	883.131,68	7.883.568,05	7.883.568,05	BPKD
3	Reklame Berjalan	13.433.566,20	13.433.566,20	32.330.312,18	32.330.312,18	BPKD
4	Reklame Film/Slide	27.615.388,26	27.615.388,26	18.562.128,42	18.562.128,42	BPKD
5	PBB	-	-	685.705.405,00	685.705.405,00	BPKD
	<b>Jumlah</b>	<b>271.854.768,82</b>	<b>271.854.768,82</b>	<b>926.245.840,06</b>	<b>926.245.840,06</b>	
<b>II</b>	<b>Retribusi</b>					
1	Los	12.000.000,00	6.000.000,00	6.400.000,00	12.400.000,00	Disperdingkop
	<b>Jumlah</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	
<b>III</b>	<b>Lain-Lain PAD</b>					
1	Galeri Bank Aceh Syariah	62.500.000,00	25.000.000,00	-	37.500.000,00	BPKD
2	BSI	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	BPKD
	<b>Jumlah</b>	<b>81.250.000,00</b>	<b>43.750.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>56.250.000,00</b>	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>365.104.768,82</b>	<b>321.604.768,82</b>	<b>951.395.840,06</b>	<b>994.895.840,06</b>	

Rekapitan Kewajiban Pemerintah Kota Lhokseumawe

No	SKPD	UTANG PER 31 DES 2022	PEMBAYARAN HUTANG	KOREKSI KURANG	UTANG 2016-2022	UTANG BARU PER 31 DESEMBER 2023										TOTAL UTANG BARU PER 31 DESEMBER 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya
						BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG DAN JASA					BELANJA HIBAH	BELANJA TIDAK TERDUGA	JUMLAH UTANG BELANJA BARU PER 31 DESEMBER 2023		
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	Belanja Tagihan Telepon	Belanja Tagihan Air	Belanja Tagihan Listrik	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	Belanja Hibah Barang Kepada BUMD	Belanja Tidak Terduga			
5.1.1.01.09.0001	5.1.01.02.05.0001			5.1.2.02.01.0061	5.1.2.02.01.0063			5.3.1.01.01.0001									
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.128.467,00	8.128.467,00	-	-	-	-	-	-	7.993.594,00	-	-	-	-	7.993.594,00	-	
2	Dinas Kesehatan	40.150.563,00	40.084.349,00	66.214,00	-	-	-	34.000,00	69.540.547,00	-	-	-	-	-	69.574.547,00	-	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penumahan Rakyat	14.563.673,00	14.563.673,00	-	-	-	-	-	14.210.427,00	-	-	-	423.443.980,00	-	437.654.407,00	-	
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.450.009,00	4.450.009,00	-	-	-	-	-	3.529.845,00	-	-	-	-	-	3.529.845,00	50.285.500,00	
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah	10.248.284,00	10.248.284,00	2.000,00	-	-	36.907,00	2.662.800,00	8.288.233,00	-	-	-	-	-	10.987.940,00	-	
6	Dinas Sosial	92.183.553,00	4.843.553,00	-	87.340.000,00	-	-	-	3.405.459,00	-	-	-	-	-	3.405.459,00	-	
7	Dinas Penanaman Modal, PT SPTK	6.777.845,00	6.668.674,00	109.171,00	-	-	-	-	4.886.149,00	1.501.000,00	-	-	-	-	6.387.149,00	-	
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPPKB	5.031.396,00	5.031.396,00	-	-	-	-	42.116,00	2.972.079,00	1.582.430,00	-	-	-	-	4.596.625,00	-	
9	Dinas Kelautan, Perikanan, Petanian dan Pangan	7.584.466,00	7.548.666,00	35.800,00	-	-	-	-	6.494.108,00	856.550,00	-	-	-	-	7.450.658,00	-	
10	Dinas Pertanahan	804.750,00	804.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Dinas Lingkungan Hidup	4.066.647.783,00	4.060.300.474,00	6.347.309,00	-	-	-	-	6.116.282.240,00	-	-	-	-	-	6.116.282.240,00	-	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.543.112,00	8.543.112,00	-	-	-	-	-	6.012.341,00	2.904.050,00	-	-	-	-	8.916.391,00	-	
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	6.013.789,00	6.013.789,00	-	-	-	-	-	3.884.182,00	-	-	-	-	-	3.884.182,00	-	
14	Dinas Perhubungan	5.479.050,00	5.476.050,00	3.000,00	-	-	403.507,00	-	6.004.151,00	-	-	-	-	-	6.407.658,00	-	
15	Dinas Komunikas, Informatika dan Persandian	3.982.853,53	3.839.497,00	153.356,53	-	-	-	-	4.751.886,00	-	-	-	-	-	4.751.886,00	-	
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	14.775.019,00	14.774.219,00	800,00	-	-	-	283.000,00	9.519.373,00	-	-	-	-	-	9.802.373,00	-	
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	4.043.258,00	4.043.258,00	-	-	-	-	-	2.480.000,00	-	-	-	-	-	2.480.000,00	-	
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	5.437.213,00	5.437.213,00	-	-	-	-	-	4.528.651,00	-	-	36.025.509,00	-	-	40.554.060,00	-	
19	Sekretariat Daerah	67.680.014,00	53.589.934,00	5.000,00	14.085.080,00	-	55.500,00	1.672.000,00	40.321.377,00	4.245.325,00	-	-	-	-	46.294.202,00	60.379.282,00	
20	Sekretariat DPRK	3.120.730,00	3.120.730,00	-	-	-	-	-	27.294.611,00	-	-	-	-	-	27.294.611,00	-	
21	Kecamatan Banda Sakti	3.514.987,00	3.514.987,00	-	-	-	-	-	3.110.716,00	-	-	-	-	-	3.110.716,00	-	
22	Kecamatan Bilang Mangat	3.810.602,00	3.810.602,00	-	-	-	-	-	3.941.022,00	-	-	-	-	-	3.941.022,00	-	
23	Kecamatan Muara Satu	4.654.187,00	4.654.187,00	-	-	-	68.714,00	253.714,00	3.943.458,00	-	-	-	-	-	4.265.886,00	-	
24	Kecamatan Muara Dua	2.773.560,00	2.773.560,00	-	-	-	-	17.000,00	2.125.650,00	-	-	-	-	-	2.142.650,00	-	
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.943.340,00	1.943.340,00	-	-	-	-	-	614.370,00	-	-	359.201.000,00	-	-	359.815.370,00	-	
26	Inspektorat	5.850.605,00	5.850.605,00	-	-	47.850.000,00	-	-	3.495.534,00	-	-	-	-	-	51.345.534,00	-	
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.810.403,00	13.809.403,00	1.000,00	-	-	155.430,00	17.000,00	10.280.457,00	-	-	-	-	-	10.452.887,00	-	
28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	19.229.283.628,00	12.837.292.666,00	891.466.666,00	5.500.524.296,00	2.489.736.979,00	-	88.714,00	20.009.278,00	-	-	-	-	-	2.509.834.971,00	8.010.359.267,00	
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	15.902.083.619,23	-	-	15.902.083.619,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.902.083.619,23	14.877.358.876,00	
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	10.434.030,00	10.434.030,00	-	-	-	-	-	6.496.707,00	-	-	-	-	-	6.496.707,00	-	
31	Dinas Syaria Islam dan Pengembangan Bayah	238.489.877,00	-	-	235.480.000,00	-	-	-	4.983.824,00	-	-	-	-	-	4.983.824,00	-	
32	Sekretariat MPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Sekretariat Baitul Mal	12.997.507,00	752.807,00	-	12.244.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.244.700,00	-	
34	Sekretariat MAA	418.750,00	418.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Sekretariat MPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>39.896.720.922,76</b>	<b>17.156.772.911,00</b>	<b>898.190.316,53</b>	<b>21.751.757.695,23</b>	<b>2.489.736.979,00</b>	<b>47.850.000,00</b>	<b>808.772,00</b>	<b>4.981.630,00</b>	<b>6.401.199.289,00</b>	<b>11.189.355,00</b>	<b>36.025.509,00</b>	<b>423.443.980,00</b>	<b>359.201.000,00</b>	<b>9.774.436.494,00</b>	<b>31.526.194.189,23</b>	<b>14.927.644.376,00</b>

**PENJELASAN SELISIH BEBAN PEGAWAI DAN BELANJA PEGAWAI  
TA 2023**

KODE REKENING	URAIAN	LO	LRA	SELISIH	PENJELASAN		
					Pembayaran kewajiban 2022	Kewajiban 2023	REKLAS
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	174.362.013.043	174.362.013.043	0,00			
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	15.413.510.186	15.413.510.186	0,00			
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	8.226.460.000	8.226.460.000	0,00			
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	5.981.675.000	5.981.675.000	0,00			
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.783.062.000	4.783.062.000	0,00			
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	9.693.779.096	9.693.779.096	0,00			
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	942.144.431	942.144.431	0,00			
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.465.446	2.465.446	0,00			
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.724.843.496	10.124.908.229	-400.064.733,00	-2.889.801.712,00	2.489.736.979,00	
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	358.567.099	358.567.099	0,00			
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.078.654.888	1.078.654.888	0,00			
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.562.910.006	5.515.060.006	47.850.000,00		47.850.000,00	
8.1.01.02.04	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	19.500.000	19.500.000	0,00			
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	30.615.972.064	30.615.972.064	0,00			
8.1.01.03.01	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	448.505.008	448.505.008	0,00			
8.1.01.03.02	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	22.262.500	22.262.500	0,00			
8.1.01.03.03	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	33.410.716.400	33.410.716.400	0,00			
8.1.01.03.05	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	867.750.000	867.750.000	0,00			
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	4.725.438.821	4.725.438.821	0,00			
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	47.850.000	47.850.000	0,00			
8.1.01.04.01	Beban Uang Representasi DPRD	556.815.000	556.815.000	0,00			
8.1.01.04.02	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	63.124.000	63.124.000	0,00			
8.1.01.04.03	Beban Tunjangan Beras DPRD	83.138.160	83.138.160	0,00			
8.1.01.04.04	Beban Uang Paket DPRD	47.659.500	47.659.500	0,00			
8.1.01.04.05	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	802.053.000	802.053.000	0,00			
8.1.01.04.06	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	70.857.150	70.857.150	0,00			
8.1.01.04.07	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	6.379.275	6.379.275	0,00			
8.1.01.04.08	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.871.100.000	1.871.100.000	0,00			
8.1.01.04.09	Beban Tunjangan Reses DPRD	472.500.000	472.500.000	0,00			
8.1.01.04.10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	244.504.214	244.504.214	0,00			
8.1.01.04.12	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.463.308.332	2.463.308.332	0,00			
8.1.01.04.13	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.743.500.000	2.743.500.000	0,00			
8.1.01.04.14	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000	6.300.000	0,00			
8.1.01.05.03	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	3.931.200	3.931.200	0,00			
8.1.01.06.01	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	0,00			
8.1.01.06.02	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	396.000.000	396.000.000	0,00			
	<b>JUMLAH</b>	<b>316.232.129.315,00</b>	<b>316.584.344.048,00</b>	<b>-352.214.733,00</b>	<b>-2.889.801.712,00</b>	<b>2.537.586.979,00</b>	<b>0,00</b>

**PENJELASAN SELISIH BEBAN BARANG DAN BELANJA BARANG  
TA 2023**

KODE REKENING	URAIAN	LO	LRA	SELISIH	PENJELASAN								
					PERSEDIaan AWAL	PERSEDIaan AKHIR	PEMBAYARAN KEWAJIBAN	KEWAJIBAN TA 2023	REKLAS	KOREKSI (BTT DAN SALDO AWAL)	HIBAH		
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.512.000,00	10.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.104.545.805,00	5.104.545.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku	38.959.801,00	63.659.801,00	-24.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	287.112.812,00	1.483.312,00	285.629.500,00	292.661.800,00	-7.032.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	18.166.250,00	18.166.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.274.292.075,00	4.114.295.685,00	159.996.390,00	31.911.960,00	-17.009.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.093.500,00	0,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.947.453.420,00	2.947.453.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	111.279.500,00	111.279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0028	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	8.698.320,00	8.611.320,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Parabot Kantor	92.936.600,00	92.936.600,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	780.558.012,00	779.816.532,00	741.480,00	1.578.480,00	-837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	16.620.000,00	16.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	272.385.000,00	272.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	835.601.822,00	834.391.368,00	1.210.454,00	90.050.584,00	-88.840.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	3.390.136.918,18	1.733.472.820,00	1.656.664.098,18	1.884.811.260,29	-3.375.412.366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.265.204,80	0,00
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.381.691.785,18	2.967.660.867,00	-1.585.969.081,82	76.754.925,00	-1.762.527.156,82	0,00	0,00	99.803.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.154.524.931,00	1.990.231.420,00	164.293.511,00	18.854.441.992,06	-18.590.345.331,06	0,00	0,00	-99.803.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0041	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	2.857.016.422,00	0,00	2.857.016.422,00	2.857.016.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0042	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	27.549.403,00	0,00	27.549.403,00	0,00	-40.510.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.059.743,00	0,00
8.1.02.01.01.0051	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	735.515.900,00	540.515.900,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.060.482.748,00	7.060.482.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	768.035.000,00	768.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.606.143.017,00	2.606.143.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.805.745.342,00	3.805.745.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	134.992.650,00	134.992.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0062	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	384.057.430,00	384.057.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	991.455.000,00	991.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0065	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	119.501.207,00	119.501.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	99.250.000,00	99.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah	37.975.000,00	37.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	204.927.200,00	204.927.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0077	Beban Pakaian Paskibraka	82.226.025,00	82.226.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01.0078	Beban Pakaian Jas/Safari	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>41.756.147.395,36</b>	<b>38.018.628.219,00</b>	<b>3.737.519.176,36</b>	<b>24.284.314.423,35</b>	<b>-23.882.513.694,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.418.447,80</b>	<b>0,00</b>



KODE REKENING	URAIAN	LO	LRA	SELISIH	PENJELASAN					
					KEWAJIBAN 2023	PEMBAYARAN KEWAJIBAN 2022	REKLAS	Koreksi Pembayaran Kewajiban	Beban sewa dibayar dimuka	Beban sewa jatuh tempo
8.1.02.02.05.0030	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	13.333.333,33	40.000.000,00	-26.666.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.666.666,67	0,00
8.1.02.02.05.0040	Beban Sewa Rumah Negara Golongan III	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	490.327.500,00	490.327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.07.0035	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.09.0007	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	2.318.842.900,00	2.318.842.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.09.0008	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	3.568.650,00	21.538.650,00	-17.970.000,00	0,00	-17.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.09.0009	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	43.833.900,00	43.833.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.09.0013	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	123.574.000,00	183.371.000,00	-59.797.000,00	0,00	-59.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.09.0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	53.874.350,00	53.874.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.09.0021	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	2.580.750,00	2.580.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.10.0009	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	43.399.000,00	43.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	274.162.500,00	274.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.470.137.328,00	1.470.137.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	138.590.000,00	138.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>89.280.015.850,96</b>	<b>87.118.609.075,00</b>	<b>2.161.406.775,96</b>	<b>6.418.221.142,00</b>	<b>-4.415.108.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.201.653,87</b>	<b>376.496.187,83</b>

## PENJELASAN SELISIH BEBAN PEMELIHARAAN DAN BELANJA PEMELIHARAAN TA 2023

KODE REKENING	URAIAN	LO	LRA	SELISIH	PENJELASAN		REKLAS
					KEWAJIBAN 2023	PEMBAYARAN KEWAJIBAN 2022	
8.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00			
8.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			
8.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00			
8.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.633.291.661,00	1.633.291.661,00	0,00			
8.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	243.135.600,00	243.135.600,00	0,00			
8.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	59.945.000,00	59.945.000,00	0,00			
8.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	722.063.350,00	722.063.350,00	0,00			
8.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	17.990.000,00	17.990.000,00	0,00			
8.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.899.000,00	1.899.000,00	0,00			
8.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00			
8.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	284.321.760,00	284.321.760,00	0,00			
8.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	228.701.000,00	228.701.000,00	0,00			
8.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.930.000,00	34.930.000,00	0,00			
8.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00			
8.1.02.03.02.0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00			
8.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00			
8.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	94.430.000,00	94.430.000,00	0,00			
8.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	123.397.600,00	123.397.600,00	0,00			
8.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00			
8.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00			
8.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	34.650.000,00	34.650.000,00	0,00			
8.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.924.607.880,00	2.888.582.371,00	36.025.509,00	36.025.509,00		
8.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	24.950.700,00	24.950.700,00	0,00			
8.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	65.667.000,00	65.667.000,00	0,00			
8.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	77.547.479,00	77.547.479,00	0,00			
8.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00			
8.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	133.841.100,00	133.841.100,00	0,00			
8.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			
8.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	3.600.000,00	1.249.531.200,00	-1.245.931.200,00			1.245.931.200,00



KODE REKENING	URAIAN	LO	LRA	SELISIH	PENJELASAN		REKLAS
					KEWAJIBAN 2023	PEMBAYARAN KEWAJIBAN 2022	
8.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	894.380.000,00	894.380.000,00	0,00			
8.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	273.504.000,00	273.504.000,00	0,00			
8.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	25.062.000,00	25.062.000,00	0,00			
8.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	42.841.300,00	42.841.300,00	0,00			
8.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	82.007.850,00	82.007.850,00	0,00			
8.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00			
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>8.197.639.280,00</b>	<b>9.407.544.971,00</b>	<b>-1.209.905.691,00</b>	<b>36.025.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.931.200,00</b>

**PENJELASAN BEBAN PERJALANAN DINAS DENGAN BELANJA PERJALANAN DINAS  
TA 2023**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	<b>SELISIH</b>
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	19.982.707.909,00	19.982.707.909,00	0,00
8.1.02.04.01.0002	Beban Perjalanan Dinas Tetap	81.315.021,00	81.315.021,00	0,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.912.542.200,00	5.912.542.200,00	0,00
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	186.715.000,00	186.715.000,00	0,00
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61.093.329,00	61.093.329,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>26.224.373.459,00</b>	<b>26.224.373.459,00</b>	<b>0,00</b>

## PENJELASAN BEBAN HIBAH DAN BELANJA HIBAH TA 2023

KODE REKENING	URAIAN	LO	LRA	SELISIH	PEMB. KEWAJIBAN 2022	KEWAJIBAN 2023	REKLAS	PERSEDIAAN AWAL 2023	PERSEDIAAN AKHIR 2023	KOREKSI
8.1.05.01.02.0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.811.552.000,00	1.823.139.500,00	-11.587.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.787.500,00	294.200.000,00
8.1.05.02.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.05.04.02.0001	Beban Hibah Barang kepada BUMD	423.443.980,00	0,00	423.443.980,00	0,00	423.443.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	323.500.000,00	323.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.05.05.01.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.227.064.445,00	0,00	4.227.064.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.064.445,00
8.1.05.05.01.0003	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.021.172.300,00	3.021.172.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.05.05.02.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	794.100.000,00	794.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.05.05.02.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.05.05.03.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	997.793.000,00	4.664.446.445	-3.666.653.445,00	0,00	0,00	0,00	-2.250.312.900,00	5.916.966.345,00	0,00
8.1.05.05.06.0001	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.05.06.02.0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.314.026.000,00	4.314.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.05.07.01.0001	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	536.302.017,00	536.302.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.473.953.742,00</b>	<b>22.501.686.262,00</b>	<b>972.267.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.443.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.250.312.900,00</b>	<b>5.611.178.845,00</b>	<b>4.521.264.445,00</b>

## PENJELASAN BEBAN BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TA 2023

NO. REKENING	URAIAN	LO	LRA	SELISIH	PEMB. KEWAJIBAN 2022	KEWAJIBAN 2023	REKLAS	PERSEDIAAN AWAL 2023	PERSEDIAAN AKHIR 2023	KOREKSI
8.1.06.01.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.813.100.000,00	3.813.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.06.01.02.0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	4.136.122.980,00	4.270.722.980,00	-134.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.600.000,00
8.1.06.02.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.901.000.000,00	2.901.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.06.02.02.0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.410.112.500,00	5.411.931.250,00	-1.818.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.481.250,00	109.662.500,00
8.1.06.03.02.0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	14.743.385.675,00	14.744.417.425,00	-1.031.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.703.996.705,00	1.702.964.955,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>31.003.721.155,00</b>	<b>31.141.171.655,00</b>	<b>-137.450.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.815.477.955,00</b>	<b>1.678.027.455,00</b>

## PENJELASAN BEBAN BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN TA 2023

NO. REKENING	URAIAN	LO	LRA	SELISIH	KETERANGAN
8.3.02.02.02.0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	9.929.671.415,00	-9.929.671.415,00	Pembayaran atas Kompensasi Aceh Utara
8.3.02.05.02.0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	45.048.128.300,00	45.048.128.300,00	0,00	
8.3.02.05.02.0004	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	0,00	61.401.253.255,00	-61.401.253.255,00	Belanja Dana Desa 2023
	<b>JUMLAH</b>	<b>45.048.128.300,00</b>	<b>116.379.052.970,00</b>	<b>-71.330.924.670,00</b>	

**PT PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE (PERSERODA)**

**LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022  
BESERTA  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK BUDIANDRU DAN REKAN**

---

---

## **SURAT PERNYATAAN DIREKSI**



PT. PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE  
(BERSEROD)

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI**  
06.002/PTPL-SPn/II/2024

**TENTANG**  
**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023**

Kami yang bertanda di bawah ini :

1. Nama : Muhammad YY Dinar, S.Si  
Alamat Kantor : Jl. Iskandar Muda, No. 18, Kampung Jawa Lama, Lhokseumawe  
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE;
2. Laporan keuangan PT. PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE telah dimuat secara lengkap dan benar ;  
b. Laporan keuangan PT. PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material ;
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PT. PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe, 15 Februari 2024

PT. PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE  
METERAL TAMPEL  
Muhammad YY Dinar, S.Si  
Direktur Utama



**PT PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE (PERSERODA)**  
**DAFTAR ISI**

---

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Direksi	
Ikhtisar Laporan Keuangan Neraca	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 15
Laporan Auditor Independen	



KANTOR AKUNTAN PUBLIK BUDIANDRU DAN REKAN

---

---

# LAPORAN KEUANGAN

**PT PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE (PERSERODA)**  
**NERACA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>Aset lancar</b>			
Kas dan setara kas	2b,4	2,864,614,723	4,469,426,289
Piutang usaha	2d,5	3,362,157,926	873,963,665
Piutang pihak berelasi	2d,6	1,599,000	1,800,000,000
Pajak dibayar dimuka	2h,9a	54,688,022	32,039,477
<b>Jumlah aset lancar</b>		<b><u>6,283,059,671</u></b>	<b><u>7,175,429,431</u></b>
<b>Aset tidak lancar</b>			
<i>(Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu Rp 182.385.750,- dan Rp 520.595.658,-)</i>	2i,7	90,819,250	86,133,825
Aset lain-lain	8	565,250,000	90,250,000
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>		<b><u>656,069,250</u></b>	<b><u>176,383,825</u></b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b><u>6,939,128,921</u></b>	<b><u>7,351,813,256</u></b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>Kewajiban jangka pendek</b>			
Utang pajak	2h,9b	378,738,077	475,000,300
Biaya yang masih harus dibayar	10	-	237,276,078
Pendapatan diterima dimuka	11	21,000,000	308,333,334
<b>Jumlah kewajiban jangka pendek</b>		<b><u>399,738,077</u></b>	<b><u>1,020,609,712</u></b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	12	5,000,000,000	5,000,000,000
Saldo Laba	13	1,539,390,844	1,331,203,544
<b>Jumlah ekuitas</b>		<b><u>6,539,390,844</u></b>	<b><u>6,331,203,544</u></b>
<b>Jumlah kewajiban dan ekuitas</b>		<b><u>6,939,128,921</u></b>	<b><u>7,351,813,256</u></b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE (PERSERODA)**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
Pendapatan Usaha	2i,14	3,628,068,775	5,019,194,029
Beban Pokok Pendapatan	2m,15	-	(450,058,930)
<b>LABA KOTOR</b>		<b>3,628,068,775</b>	<b>4,569,135,099</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	2i,16		
Beban Administrasi dan Umum		(2,886,252,493)	(2,626,568,291)
<b>LABA USAHA</b>		<b>741,816,282</b>	<b>1,942,566,808</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>	2i,17		
Pendapatan Lain-Lain		13,206,608	13,182,978
Beban Lain-Lain		(4,431,348)	(23,873,167)
<b>JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>		<b>8,775,259</b>	<b>(10,690,189)</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		<b>750,591,541</b>	<b>1,931,876,619</b>
Taksiran Pajak Penghasilan		-	-
<b>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK</b>		<b>750,591,541</b>	<b>1,931,876,619</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE (PERSERODA)**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>136,159,246</b>	<b>5,136,159,246</b>
Dividen	-	(736,832,321)	(736,832,321)
Saldo Laba (Rugi)	-	1,931,876,619	1,931,876,619
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>1,331,203,544</b>	<b>6,331,203,544</b>
Dividen-Pemko Lhokseumawe	-	(2,841,916,754)	(2,841,916,754)
Penyesuaian 2022	-	2,299,512,513	2,299,512,513
Laba Tahun Berjalan	-	750,591,541	750,591,541
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>1,539,390,844</b>	<b>6,539,390,844</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE (PERSERODA)**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>		
Laba (rugl) bersih	750,591,541	1,931,876,619
Penyesuaian untuk :		
Penyusutan aset tetap	(338,209,908)	28,764,608
<b>Perubahan Aktivitas dan Kewajiban Operasi</b>		
<b>Penurunan (Peningkatan) pada :</b>		
Piutang usaha	(2,488,194,261)	(1,748,750,176)
Pembayaran dimuka	-	(24,910,805)
Piutang pihak berelasi	1,798,401,000	
Pajak dibayar dimuka	(22,648,545)	
<b>Peningkatan (Penurunan) pada :</b>		
Utang pajak	(96,262,223)	(129,668,715)
Imbalan paska kerja	-	(249,749,999)
Biaya yang masih harus dibayar	(237,276,078)	207,276,078
Pendapatan diterima dimuka	(287,333,334)	208,333,334
<b>Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional</b>	<u>(920,931,807)</u>	<u>223,170,944</u>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>		
Perolehan aset tetap	333,524,483	(53,957,000)
Perolehan aset lain-lain	(475,000,000)	-
<b>Kas bersih diperoleh digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<u>(141,475,517)</u>	<u>(53,957,000)</u>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Tambahan modal disetor	-	(100,000,000)
Dividen	(2,841,916,754)	(49,426,331)
Selisih Laba Ditahan	2,299,512,513	
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk aktivitas pendanaan)</b>	<u>(542,404,241)</u>	<u>(149,426,331)</u>
<b>PENINGKATAN PADA KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(1,604,811,566)</b>	<b>19,787,613</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>4,469,426,289</b>	<b>4,449,638,676</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<u><b>2,864,614,723</b></u>	<u><b>4,469,426,289</b></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



KANTOR AKUNTAN PUBLIK BUDIANDRU DAN REKAN

---

---

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**PT PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE (PERSERODA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023**

(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan**

PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) pada awalnya bernama Perseroan Daerah Pembangunan Lhokseumawe yang didirikan berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 08 Tahun 2009 Tanggal 28 Agustus 2009. Qanun Kota Lhokseumawe tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018 yang merubah bentuk hukum Perseroan Daerah Pembangunan Lhokseumawe menjadi Perseroan Daerah Pembangunan Lhokseumawe dengan nama PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda).

Pendirian Perseroan Terbatas PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda), selanjutnya disebut entitas, dituangkan dalam Akta Notaris Aminuddin, SH., M.Kn, Notaris di Kota Lhokseumawe, Nomor 08 Tanggal 31 Desember 2019. Entitas berkedudukan di Lhokseumawe. Pendirian badan hukum telah disahkan oleh

**Maksud dan Tujuan Perseroan**

Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang: Pertambangan dan Penggalian, Real Estate, Konstruksi, Aktivitas Kesehatan, Pengawasan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.

Untuk mencapai maksud tersebut, entitas dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Pertambangan minyak bumi, gas alam dan panas bumi;
2. Pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk;
3. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata;
4. Konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil;
5. Aktivitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan ,anusia lainnya;
6. Perhotelan dan pariwisata;
7. Jasa boga.

Usaha yang aktif dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini yaitu entitas dipercayakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, untuk mengelola:

1. Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 29 Tanggal 4 Januari 2016, tentang penunjukan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) sebagai pengelola Rumah Sakit Arun Lhokseumawa.
2. Jaringan distribusi gas (Unit Usaha Gas Kota Lhokseumawe) melalui perjanjian kerjasama denfan PT Pertagas Niaga yang telah beberapa kali direvisi, terakhir dengan Nomor:071/PN0000/2019-SO Tanggal 25 Juli 2019 yang mengatur tentang pengelolaan jaringan distribusi gas kota untuk lokasi Kota Lhokseumawe.
3. Pasar Induk Terpadu Kota Lhokseumawe, berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 122 Tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukkan PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) sebagai pengelola Pasar Induk Terpadu Kota Lhokseumawe.

**b. Dewan Komisaris dan Direksi**

Berdasarkan perubahan bentuk organisasi dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas pada tanggal 31 Desember 2019, susunan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi pada Tahun 2022 dan 2021

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Miswar, SE., MSP  
Komisaris : Ridwan Hadi, SH



**PT PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE (PERSERODA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris dan Direksi (Lanjutan)

Direksi:  
Direktur Utama : Abdul Gani Jalil, SE  
Direktur : Hariadi, SKM., MKM., MoH

Pada waktu awal proses audit untuk laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2022, tanggal 17 Februari 2023 telah terjadi pergantian direksi perusahaan yaitu:

Direksi:  
Direktur Utama : Muhammad YY Dinar, S.Si  
Direktur Keuangan : Irfan Abdullah, SE  
Direktur Bisnis : Bolhaki, S.Sos.I, MA

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

**Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik**

Berdasarkan persyaratan dan kriteria dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), perusahaan memenuhi kriteria sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik. Oleh karena itu manajemen perusahaan memutuskan untuk menerapkan SAK ETAP sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan efektif tahun buku 01 Januari 2011.

Apabila dibandingkan persyaratan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan diterapkan perusahaan untuk tahun-tahun buku sebelumnya maka persyaratan dalam SAK ETAP lebih sederhana. Demikian juga apabila dibandingkan dengan perkembangan terkini SAK yang saat ini sedang dalam proses konvergensi dengan *International Financial Reporting Standard* (IFRS), maka persyaratan dalam Perusahaan memilih untuk menerapkan SAK ETAP, dengan pertimbangan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP masih mampu mencerminkan substansi ekonomi dari kegiatan operasi dan bisnis perusahaan. Pertimbangan lainnya adalah biaya dan manfaat dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP lebih efisien bagi perusahaan.

Meskipun persyaratan dalam SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan SAK yang diterapkan sebelumnya maupun perkembangan teknis SAK tersebut, namun perusahaan tetap mengedepankan penyajian wajar dan pengungkapan secara penuh atas informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemakai sebagai mana disyaratkan oleh standar tersebut. Oleh karena itu tujuan penyajian laporan

a. **Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan perusahaan terdiri atas : Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.

Entitas merupakan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

**PT PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE (PERSERODA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**b. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas, bank dan semua investasi yang jatuh temponya tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehan dan yang tidak dijaminakan serta tidak dibatasi penggunaannya.

**c. Penjabaran Mata Uang Asing**

Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam satuan Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Selisih kurs yang terjadi akibat penjabaran tersebut dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

**d. Piutang**

Sako piutang dinyatakan dalam nilai nominal. Perusahaan belum membentuk penyisihan atas kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih. Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih langsung dibedakan pada laba rugi bersangkutan.

**e. Persediaan**

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO).

Nilai realisasi bersih ditentukan sebesar harga jual dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Entitas mengakui kerugian penurunan nilai ketika nilai realisasi bersih rendah dari pada biaya perolehan dengan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

**f. Aset Tetap**

Aset tetap perusahaan diakui sebesar harga perolehan yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dipakai.

Metode penyusutan yang dipakai adalah metode garis lurus yang meliputi taksiran masa manfaat untuk masing-masing aset tetap.

Jenis Aset	Masa Manfaat	Tarif (%)
Inventaris Kantor	4 tahun	25%

Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi bila menambah umur ekonomis atau menambah manfaat aset yang bersangkutan. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

**g. Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**h. Pajak Dibayar Dimuka**

Pajak dibayar dimuka merupakan kredit pajak yang akan dikompensasikan dengan pajak terutang lainnya pada setiap akhir bulan atau akhir tahun.

**i. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait (*imputed interest rate*).

**PT PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE (PERSERODA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai berikut :

**i. Penjualan barang**

Penjualan barang diakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi, yaitu:

- a) Resiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dialihkan kepada pembeli;
- b) Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang
- c) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
- d) Besar kemungkinan masa manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan, dan;
- e) Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

**ii. Penjualan jasa**

Penjualan jasa diakui dalam metode persentase penyelesaian dalam periode akuntansi ketika semua kondisi berikut terpenuhi:

- a) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
- b) Besar kemungkinan masa manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan;
- c) Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal, dan
- d) Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Biaya diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

**j. Utang Usaha**

Utang usaha dinyatakan sebesar nilai nominalnya.

**k. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi baik diperlakukan sama atau tidak sama dengan transaksi pihak ketiga diungkapkan dalam laporan keuangan.

**l. Pajak Penghasilan**

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

**m. Pengakuan Harga Pokok**

Harga pokok penjualan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dan pembebanannya dilakukan berdasarkan asumsi arus biaya (*cash flow assumption*) harga pokok rata-rata berjalan.

**n. Pinjaman**

Pinjaman diakui sebesar nilai wajar. Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman.

**o. Imbalan Kerja**

PT Pembangunan Lhokseumawe (PERSERODA) belum menerapkan imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan No.11 Tahun 2020 Tanggal 2 November 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu alih daya waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja. .

**PT PEMBANGUNAN LHKOSEUMAWE (PERSERODA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**p. Pengakuan Estimasi**

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban kontijen pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan biaya selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dari jumlah estimasi. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau kewajiban atau jumlah konsumsi periodik suatu aset yang berasal dari pengujian status sekarang dari dan ekspektasi manfaat ekonomi dan kewajiban masa mendatang terkait dengan aset dan kewajiban. Entitas harus mengakui pengaruh perubahan estimasi akuntansi secara prospektif dengan memasukkan ke laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan jika hanya berpengaruh pada periode tersebut dan periode terjadinya perubahan dan periode mendatang jika berpengaruh terhadap keduanya.

Entitas mengakui kewajiban diestimasi jika :

- Memiliki kewajiban kini sebagai hasil dari peristiwa masa lalu.
- Kemungkinan terjadi bahwa entitas akan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomi pada saat
- Jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan andal.

Entitas mengakui kewajiban diestimasi sebagai kewajiban dalam neraca dan mengakui jumlah kewajiban diestimasi tersebut sebagai biaya dalam laporan laba rugi, kecuali jika :

- Merupakan bagian dari biaya memproduksi persediaan.
- Termasuk dalam nilai aset tetap.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban diestimasi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah kewajiban diestimasi adalah nilai kini dari perkiraan nilai pengeluaran yang

**q. Penurunan Nilai Aset**

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*estimated recoverable amount*) maka nilai tercatat tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara nilai jual neto dengan nilai pakai.

**r. Informasi Segmen**

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional (*owner*) dan mengalokasikannya kepada sumber daya serta menilai kinerja segmen operasi serta membuat suatu keputusan strategis.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI**

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi, jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontingensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas taksiran akuntansi diakui pada periode dimana taksiran tersebut direvisi dan periode-periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi taksiran tersebut.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

**PT PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE (PERSERODA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (Lanjutan)**

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber data untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode pelaporan keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan aset tetap

Perusahaan mengestimasi masa manfaat dari aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perusahaan secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan diatas. Jumlah dan waktu dari beban yang dicatat untuk setiap periode akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap Perusahaan akan meningkatkan beban operasi dan menurunkan aset tidak lancar yang dicatat.

Nilai buku neto atas aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 90.819.250,- dan Rp 86.133.825,-. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam

**PT PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE (PERSERODA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

**4. KAS DAN SETARA KAS**

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Kas	5,265,500	19,787,613
<b>Bank</b>		
PT Bank Aceh Syariah AC. 03001910032800	1,787,337,833	-
PT Bank Syariah Indonesia AC. 1050348474	1,069,819,543	2,364,118,376
PT Bank Syariah Indonesia (eks Bank BSM)	-	754,935,559
PT Bank Syariah Indonesia Tab EM AC. 1050597632	-	96,709
<b>USD:</b>		
PT Bank Syariah Indonesia AC. 808877077	2,191,847	1,330,488,032
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b><u>2,864,614,723</u></b>	<b><u>4,469,426,289</u></b>

**5. PIUTANG USAHA**

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
PT. Pertagas Niaga	89,227,926	565,213,490
Piutang Pembinaan UMKM	94,530,000	-
Piutang Lain-lain	3,178,400,000	308,750,175
<b>Jumlah Piutang usaha</b>	<b><u>3,362,157,926</u></b>	<b><u>873,963,665</u></b>

**6. PIUTANG PIHAK BERELASI**

	2023	2022
Rumah Sakit Arun Lhokseumawe	-	1,800,000,000
Rumah Sakit Arun Medica	1,599,000	-
<b>Jumlah Piutang Pihak Berelasi</b>	<b><u>1,599,000</u></b>	<b><u>1,800,000,000</u></b>

**7. ASET TETAP**

Akun ini terdiri dari :

	2023			Saldo 31 Desember 2023
	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	
<b>Nilai Perolehan</b>				
Peralatan Kantor	606,729,483		333,524,483	273,205,000
	<u>606,729,483</u>	-	<u>333,524,483</u>	<u>273,205,000</u>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Peralatan Kantor	520,595,658	-	338,209,908	182,385,750
<b>Jumlah</b>	<u>520,595,658</u>	-	<u>338,209,908</u>	<u>182,385,750</u>
<b>Nilai Buku</b>	<u>86,133,825</u>			<u>90,819,250</u>

**PT PEMBANGUNAN LHKSEUMAWE (PERSERODA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

**7. ASET TETAP (Lanjutan)**

	2022			
	Saldo 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2022
<b>Nilai Perolehan</b>				
Peralatan Kantor	552,772,483	53,957,000	-	606,729,483
	<u>552,772,483</u>	<u>53,957,000</u>	<u>-</u>	<u>606,729,483</u>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Peralatan Kantor	487,377,867	33,217,791	-	520,595,658
Jumlah	<u>487,377,867</u>	<u>33,217,791</u>	<u>-</u>	<u>520,595,658</u>
<b>Nilai Buku</b>	<u>65,394,616</u>			<u>86,133,825</u>

**8. ASET LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
<b>Investasi Saham Pada Entitas Asosiasi</b>		
Rumah Sakit Arun Medica	475,000,000	-
PT PEMA Petrogas, Lhokseumawe	87,500,000	87,500,000
PT PEMA Petrogas Malaka	2,500,000	2,500,000
PT PEMA Petrogas Energi	250,000	250,000
<b>Jumlah Aset Lain-lain</b>	<u>565,250,000</u>	<u>90,250,000</u>

**9. PERPAJAKAN**

**a. PAJAK DIBAYAR DIMUKA**

	2023	2022
Uang Muka PPh Pasal 23	7,128,671	7,128,671
Pajak Dibayar Dimuka	47,559,351	24,910,806
<b>Jumlah Pajak dibayar dimuka</b>	<u>54,688,022</u>	<u>32,039,477</u>

**b. UTANG PAJAK**

	2023	2022
Utang Pajak Kini	186,744,039	186,744,039
PPN	185,603,205	166,079,598
PPh Pasal 21	5,890,833	6,161,239
PPh Pasal 23	500,000	500,000
Utang Pajak	-	115,515,424
<b>Jumlah Utang pajak</b>	<u>378,738,077</u>	<u>475,000,300</u>

**10. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Jasa Profesional	-	35,000,000
Selisih Lebih	-	202,276,078
<b>Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar</b>	<u>-</u>	<u>237,276,078</u>

**PT PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE (PERSERODA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

**11. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Sewa Gudang	21,000,000	308,333,334
<b>Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>21,000,000</b>	<b>308,333,334</b>

**12. MODAL SAHAM**

Sesuai dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2009 Tanggal 28 Agustus 2009, modal dasar Perseroan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) oleh Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe sebagai penyertaan modal daerah. Berdasarkan Akta Nomor 19 Tanggal 14 Desember 2020 Perseroan Terbatas "PT Pembangunan Lhokseumawe Perseroda", menyetujui perubahan modal dasar Perseroan dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar) yang terbagi atas 10.000 saham menjadi Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang terbagi atas 5.000 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh 5.000 saham atau sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Komposisi pemegang saham Perusahaan sebagai berikut:

Nama pemegang saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Disetor
Pemko Lhokseumawe	5,000	100%	5,000,000,000
<b>Jumlah Modal Saham</b>	<b>5,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,000,000,000</b>

**13 SALDO LABA**

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Dividen-Pemko Lhokseumawe	(2,841,916,754)	(2,841,916,754)
Saldo Laba (Rugi)	1,331,203,544	2,241,243,679
Penyesuaian 2022	2,299,512,513	-
Laba tahun berjalan	750,591,541	1,931,876,619
<b>Jumlah Saldo Laba</b>	<b>1,539,390,844</b>	<b>1,331,203,544</b>

**14 PENDAPATAN USAHA**

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Pendapatan Dividen	1,663,406,861	966,540,887
Pengelolaan Jaringan Gas Lhokseumawe	1,157,729,580	767,743,233
Pendapatan Sewa Gedung PPT	805,333,334	41,666,666
Penjualan UMKM Binaan	-	-
Jasa Manajemen	1,599,000	3,243,243,243
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>	<b>3,628,068,775</b>	<b>5,019,194,029</b>

**15 BEBAN POKOK PENDAPATAN**

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
Beban Tenaga Kerja	-	449,358,930
Material Jargas	-	700,000
<b>Jumlah Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>450,058,930</b>



**PT PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE (PERSERODA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

**16 BEBAN OPERASIONAL**

Akun ini terdiri dari :

**BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM**

	2023	2022
Gaji, Upah, Tunjangan dan Lembur	1,490,017,259	1,254,500,831
Perjalanan Dinas	206,246,536	276,757,884
Sewa Kendaraan	139,550,054	352,682,021
Jamsostek	116,743,835	86,223,928
Listrik dan Air	105,847,679	127,381,609
Jasa Profesional dan Konsultan	102,671,140	75,500,000
Beban Pajak	80,061,623	28,152,964
Entertain	73,507,300	12,429,606
CSR Kantor	69,000,000	-
Baju Seragam Kantor	56,586,100	20,383,000
Perlengkapan Safety & Maintenance	55,701,000	18,180,681
Kemamanan, Kebersihan & Koran	38,820,000	11,801,500
Beban Lain-lain	34,036,080	-
Photo Copy, Cetak dan ATK	24,981,800	17,970,900
Promosi Kantor	23,278,000	-
Sewa Kantor	20,010,000	20,010,000
Rapat Kantor	18,324,600	-
Denda Pajak	16,060,400	-
BBM dan Parkir	15,268,000	763,000
Pemeliharaan dan Perbaikan	14,024,000	25,965,000
Rumah Tangga Kantor	12,370,466	15,362,264
Tunjangan Lain-lain	11,750,000	-
Telepon, Fax dan Internet	8,071,212	6,296,322
Beban Medical Check Up Jargas	4,050,000	-
luran dan Sumbangan	30,075,538	63,500,000
Material	2,450,000	-
Pendidikan dan Pelatihan	2,304,500	-
Pos, Pengiriman & Ekspedisi	1,480,000	3,053,500
Pembangunan & Renovasi	1,064,000	28,265,000
Transportasi dan Akomodasi	709,000	5,521,000
Pembulatan	6	-
Tantiem	-	46,583,390
Publikasi	-	7,350,000
Makan dan Minum	-	49,209,200
Depresiasi	111,192,366	33,217,791
Biaya Konsultan	-	39,506,900
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b><u>2,886,252,493</u></b>	<b><u>2,626,568,291</u></b>

**PT PEMBANGUNAN LHKSEUMAWE (PERSERODA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

**17 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari :

	2023	2022
<b>Pendapatan Lain-Lain</b>		
Pendapatan Lain Lain	-	13,182,978
Bagi Hasil atau Bonus	13,206,608	-
<b>Jumlah Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>13,206,608</b>	<b>13,182,978</b>
<b>Beban Lain-Lain</b>		
Luar Usaha	-	23,873,167
Beban Admin Bank	1,790,124	-
Pajak Bank	2,641,224	-
<b>Jumlah Beban Lain-Lain</b>	<b>4,431,348</b>	<b>23,873,167</b>
<b>Jumlah Pendapatan ( Beban) Lain- lain</b>	<b>8,775,259</b>	<b>(10,690,189)</b>

**18 PROGRAM MANFAAT KARYAWAN**

PT PEMBANGUNAN LHKSEUMAWE (PERSERODA) belum menghitung atas Utang yang diestimasi terhadap besarnya uang pesangon serta kompensasi lainnya apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang pengaturan uang pesangon dan kompensasi lainnya dalam kaitannya apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.

**19 PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan terlampir pada tanggal 15 Februari 2024



KANTOR AKUNTAN PUBLIK BUDIANDRU DAN REKAN

---

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth,  
Dewan Komisaris dan Direksi  
**PT PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE (PERSERODA)**

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE (PERSERODA)**, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Penekanan Suatu Hal

Laporan keuangan **PT PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE (PERSERODA)** belum menerapkan kewajiban imbalan kerja tertentu dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 23 mengenai imbalan kerja dan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang perjanjian kerja, waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja sesuai catatan 2o pada catatan atas laporan keuangan.

### Hal Lain

Laporan keuangan **PT PEMBANGUNAN LHOKEUMAWE (PERSERODA)** untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif untuk seluruh jumlah yang di laporkan dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain Nomor: 003/16.2.1091/AU.2/11/0715-1/0/V/2023 yang menyatakan opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 2 Mei 2023.

### Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak Yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

No. Laporan: 00205/2.1308/AU.202/1253-1/1/II/2024

Kantor Akuntan Publik BUDIANDRU DAN REKAN | Nomor Izin Usaha : KMK-RI No. 514/KM.1/2020  
Member off Global Integrated Assurance | [www.kapbudiandrudandanrekan.com](http://www.kapbudiandrudandanrekan.com)

### Head Office in Jakarta:

Grand Kartika, Jl. Jambore No. 8A - 9A RT.005 RW.006, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur  
DKI Jakarta 13720 - Indonesia | T: (021) 2287 0841 | 8773 0083



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

#### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

No. Laporan: 00205/2.1308/AU.2/02/1253-1/1/1/2024

**Kantor Akuntan Publik BUDIANDRU DAN REKAN | Nomor Izin Usaha : KMK-RI No. 514/KM.1/2020**  
Member off Global Integrated Assurance | [www.kapbudlandrudanrekan.com](http://www.kapbudlandrudanrekan.com)

**Head Office in Jakarta:**

Grand Kartika, Jl. Jambore No. 8A - 9A RT.005 RW.006, Kelurahan Cibukur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur  
DKI Jakarta 13720 - Indonesia | T: (021) 2287 0841 | 8773 0083



Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai Independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap Independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Kantor Akuntan Publik Budiandru dan Rekan

Dr. Budiandru, Ak. CA, CPA  
Nomor Registrasi Akuntan Publik: 1253

Jakarta, 15 Februari 2024



00205

No. Laporan: 00205/2.1308/AU.2/02/1253-1/1/1E/2024

Kantor Akuntan Publik BUDIANDRU DAN REKAN | Nomor Izin Usaha : KMK-RI No. 514/KM.1/2020  
Member off Global Integrated Assurance | [www.kapbudiandrudanrekan.com](http://www.kapbudiandrudanrekan.com)

Head Office In Jakarta:

Grand Kartika, Jl. Jambore No. 8A - 9A RT.005 RW.006, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur  
DKI Jakarta 13720 - Indonesia | T. (021) 2287 0841 | 8773 0083

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



**PDAM IE BEUSAREE RATA  
KOTA LHOSEUMAWE**

**OLEH:**



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
MAHLIZAR  
PUBLIC ACCOUNTANTS FIRM**

IZIN : NO.KEP.38/KM.1/2022; KEP.38/KM.1/2022 (AP.0715);  
KEP.1338/KM.1/2016 (98.1.0240; KEP.NO.SI.1355/KM.17/1996)

## DAFTAR ISI

	Hal.
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
<b>SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>1</b>
<b>LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>	<b>2</b>
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Per 31 Desember 2023 dan 2022</b>	<b>4</b>
<b>LAPORAN LABA RUGI Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal -Tanggal 31 Desember 2022 dan 2022</b>	<b>5</b>
<b>LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2023 dan 2022</b>	<b>6</b>
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2023 dan 2022</b>	<b>7</b>
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>8</b>
1. Umum, Pendirian dan Kegiatan serta Organisasi Perusahaan	8
2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	9
3. Catatan Atas Laporan Keuangan	12
3.1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	12
3.3.1. Kas dan Setara Kas	12
3.3.2. Piutang Usaha	12
3.3.3. Piutang/Pinjaman Pegawai	12
3.3.4. Persediaan	13
3.3.4. Sewa Dibayar Di Muka	13
3.2. Aset Tetap	14
3.3. Aset Lain-Lain	14
3.4. Liabilitas Jangka Pendek	14
3.5. Ekuitas	14
3.6. Laporan Laba Rugi	15
3.6.1. Pendapatan Usaha	15
3.6.2. Beban Usaha	15
4. Penyajian dan Penyelesaian Laporan Keuangan	15
<b>ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022</b>	
1. Rasio Likuiditas	16
2. Rasio Profitabilitas (Rentabilitas)	16
3. Rasio Aktivitas	16
4. Rasio Leverage	16
<b>INFORMASI DAN MASUKAN DARI AUDITOR INDEPENDEN</b>	<b>17</b>
1. Perikatan Audit	17
2. Informasi dan Masukan dari Auditor Independen	17



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 DAFTAR PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2023  
PDAM IE BEUSAREE RATA PEMKO LHOKSEUMAWE
- Lampiran 2 DAFTAR ASET TETAP DAN DEPRESIASI PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022  
PDAM IE BEUSAREE RATA PEMKO LHOKSEUMAWE



SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PDAM IE BEUSAREE RATA  
TAHUN 2023

NOMOR: 690/198/PDAM/2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakaria SKM., M.Kes  
Alamat Kantor : Jl. T. Nyak Adam Kamil Gampong Sp. Empat Kota Lhokseumawe  
Nomor Telepon : 0853 6292 7334  
Jabatan : Plt Direktur

Untuk dan atas nama PDAM IE Beusaree Rata Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PDAM IE Beusaree Rata Kota Lhokseumawe
2. Laporan keuangan PDAM IE Beusaree Rata Kota Lhokseumawe tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
3. a) Semua informasi dalam laporan keuangan PDAM IE Beusaree Rata Kota Lhokseumawe telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b) Laporan keuangan PDAM IE Beusaree Rata Kota Lhokseumawe tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;  
c) Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PDAM IE Beusaree Rata Kota Lhokseumawe sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PDAM IE Beusaree Rata Kota Lhokseumawe

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe, 22 April 2024

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
IE BEUSAREE RATA KOTA LHOKESEUMAWÉ

  
  
ZAKARIA, SKM., M.Kes  
Plt. Direktur



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**  
**NOMOR: 001/16.2.1091/AU.2/11/0715-11/IV/2024**

DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI  
**PDAM IE BEUSAREE RATA**  
KOTA LHOEKSEUMAWE

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PDAM IE BEUSAREE RATA** (Entitas), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Laporan keuangan per 31 Desember 2022 diaudit oleh auditor independen lain yaitu Kantor Akuntan Publik Suryadi & Rizal, dengan laporannya Nomor:00010/3.0380/AU.2/05/0736-11/1/1/2023 Tanggal 15 Februari 2023 yang berisi opini wajar tanpa pengecualian.

Menurut opini kami, kecuali untuk basis opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan terlampir, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

**Basis untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Sebagaimana yang diungkapkan dalam catatan 3.5 sub akun saldo laba (rugi) (Rp.28.787.969.054,-) per 31 Desember 2023 dan (Rp.24.743.789.482,-) per 31 Desember 2022; saldo ini terkait akumulasi saldo laba (rugi) tahun-tahun sebelumnya dan hal ini berdampak signifikan atas posisi keuangan dari entitas agar menjadi perhatian yang serius dari manajemen entitas dalam hal untuk dilakukan langkah-langkah strategis dari manajemen terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) atau rencana bisnis yang efisien dalam operasional agar bisa mempertahankan kelangsungan usaha.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

**KORESPONDENSI/KORRESPONDENCE**

B/B/A:  
Jl. Cut Meutia No.39, Kampung Baru, Banda Aceh 23242 | HP>0811-164620, 0853-61876187 & 0815-36595933 | +62-651 23236  
Email: [ke@mahlizar.com](mailto:ke@mahlizar.com), [mahlizar@mahlizar.com](mailto:mahlizar@mahlizar.com), [mahlizar@akuntanindonesia.or.id](mailto:mahlizar@akuntanindonesia.or.id)

ACCOUNTING & AUDITING | **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN** | MANAGEMENT SERVICES  
Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023 dan 2022



**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)**  
**PDAM IE BEUSAREE RATA PEMKO LHOKEUMAWA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain

AKUN/PERKIRAAN	Catatan	Per 31 Des 2023 Rupiah (Rp.)	Per 31 Des 2022 Rupiah (Rp.)
<b>ASET</b>	<b>3.1.</b>		
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	3.3.1.	4.964.509	7.332.395
Piutang Usaha	3.3.2.	245.050.742	230.530.375
Penyisihan Piutang		(86.438.936)	(86.438.936)
Piutang Pegawai	3.3.3.	386.005.000	314.755.000
Persediaan	3.3.4.	763.646.494	770.026.874
Sewa dibayar dimuka	3.3.5.	7.700.000	21.175.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>1.320.927.809</b>	<b>1.277.380.708</b>
<b>Aset Tetap</b>	<b>3.2.</b>		
Instalasi Pengolahan Air		376.827.200	376.827.200
Instalasi Transmisi dan Distribusi		9.560.120.932	9.560.120.932
Peralatan dan Perlengkapan		711.434.000	711.434.000
Kendaraan/Alat Pengangkutan		579.368.000	579.368.000
Inventaris/Perabot Kantor		1.193.511.179	1.184.803.679
<b>Harga Perolehan</b>		<b>12.421.261.311</b>	<b>12.412.553.811</b>
Akumulasi Penyusutan		(7.206.123.392)	(6.140.455.592)
<b>Jumlah Aset Tetap Net</b>		<b>5.215.137.919</b>	<b>6.272.098.219</b>
<b>Aset Lain-Lain</b>	<b>3.3</b>		
Aset Tidak Berwujud		4.015.376.140	4.015.376.140
Amortisasi		(2.007.688.070)	(1.806.919.263)
<b>Jumlah Aset Lain-lain</b>		<b>2.007.688.070</b>	<b>2.208.456.877</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>8.543.753.798</b>	<b>9.757.935.804</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>3.4.</b>		
Utang Usaha		4.873.782.249	4.064.707.901
Utang Non Usaha		66.873.509	138.513.509
Pinjaman Dari Dana Absensi		129.000.000	129.000.000
Gaji Yang Masih Harus Dibayar		4.045.413.272	3.078.651.369
Utang Lain-lain		93.700.000	11.800.000
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>9.208.769.030</b>	<b>7.422.672.779</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>9.208.769.030</b>	<b>7.422.672.779</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>3.5.</b>		
Kekayaan Pemko Yang Dipsahkan		16.675.000.000	16.675.000.000
Tambahan Setoran Pemko Lhokseumawe		11.452.207.500	9.452.207.500
Modal Hibah		3.996.024.579	3.996.024.579
Saldo Laba (Rugi) tahun lalu		(28.787.969.054)	(24.743.789.482)
Labas (Rugi) tahun lalu berjalan		(4.000.278.257)	(3.044.179.572)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>(665.015.232)</b>	<b>2.335.263.025</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>8.543.753.798</b>	<b>9.757.935.804</b>

*Lihat catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

## LAPORAN LABA RUGI

### PDAM IE BEUSAREE RATA PEMKO LHKOSEUMAWE

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain

AKUN/PERKIRAAN	Catatan	Per 31 Des 2023 Rupiah (Rp.)	Per 31 Des 2022 Rupiah (Rp.)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.6.</b>		
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	<b>3.6.1.</b>		
Penjualan Air		1.142.712.378	1.091.008.174
- Pendapatan Penjualan Air - Harga Air		1.142.712.378	1.091.008.174
- Pendapatan Penjualan Air - Beban Tetap		0	0
Penjualan Non Air		267.402.272	1.032.901.397
- Pendapatan Sumbangan Baru		2.780.000	1.500.000
- Pendapatan Balik Nama		500.000	430.000
- Pendapatan Denda		70.739.059	1.000.000.000
- Pendapatan Non Air-Lainnya		193.383.213	30.971.397
Pendapatan Lain-Lain		5.546	117.554
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.410.120.198</b>	<b>2.124.027.125</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	<b>3.6.2.</b>		
<b>Biaya Layanan</b>			
- Beban Pegawai		2.288.316.244	2.427.668.964
- Beban Bahan Bakar		420.000	1.237.500
- Beban Listrik		154.345.184	145.920.213
- Beban Kimia		215.896.140	126.986.000
- Beban Pemeliharaan		19.461.880	122.727.750
- Beban Depresiasi		797.909.362	1.357.144.340
- Beban Air Baku		101.408.500	626.650.200
- Beban Bahan Pembantu		19.410.800	4.744.000
- Beban Umum Kantor		20.000.000	213.865.436
- Beban ATK dan Barang Cetak		26.675.000	16.528.800
- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		123.952.589	20.000.000
- Beban Sewa		23.607.100	18.608.333
- Beban Operasional Lainnya		152.243.000	1.939.988
- Beban Pajak		0	16.194.300
- Beban Admi-Provisi Bank		1.765.000	67.990.873
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>		<b>5.410.398.453</b>	<b>5.168.206.697</b>
<b>LABA USAHA SEBELUM PAJAK</b>		<b>(4.000.278.257)</b>	<b>(3.044.179.572)</b>

*Lihat catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

Laporan Auditor Independen

Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023 dan 2022  
PDAM IE BEUSAREE RATA, KOTA LHKOSEUMAWE

**LAPORAN ARUS KAS**  
**PDAM IE BEUSAREE RATA PEMKO LHOXSEUMAWE**

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

AKUN/PERKIRAAN	Per 31 Des 2023 Rupiah (Rp.)	Per 31 Des 2022 Rupiah (Rp.)
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
Laba (rugi) bersih setelah pajak	(4.000.278.257)	(3.044.179.572)
Penyesuaian untuk :		
- Depresiasi aset tetap	1.266.436.607	1.156.375.532
- Amortisasi aset tidak berwujud	0	200.768.807
- Penyisihan piutang usaha	20.000.000	20.000.000
- Dividen tahun lalu	0	0
<b>Laba operasi sebelum perubahan modal kerja</b>	<b>(2.713.841.650)</b>	<b>(1.667.035.233)</b>
- Penurunan (peningkatan) piutang usaha	(14.520.367)	(81.181.908)
- Penurunan (peningkatan) piutang pegawai	(71.250.000)	(162.540.000)
- Penurunan (peningkatan) piutang lain-lain	0	0
- Penurunan (peningkatan) pembayaran dimuka	13.475.000	(11.091.667)
- Penurunan (peningkatan) persediaan	6.380.380	34.866.873
- Penurunan (peningkatan) persediaan lainnya	0	0
- Kenaikan (penurunan) utang usaha	809.074.348	(243.359.216)
- Kenaikan (penurunan) utang non usaha	(71.640.000)	(24.880.598)
- Kenaikan (penurunan) biaya yang masih harus dibayar	988.761.903	1.015.508.102
- Kenaikan (penurunan) pendapatan diterima dimuka	0	0
- Kenaikan (penurunan) lain-lain	81.900.000	11.800.000
- Kenaikan (penurunan) utang dapenmapamsi	0	0
- Kenaikan (penurunan) utang Pinjaman Dari Dana Absensi	0	0
- Kenaikan (penurunan) utang bunga yang masih harus dibayar	0	0
- Kenaikan (penurunan) utang kepada pemerintah yang akan dihapuskan	0	0
<b>Kas yang diperoleh dari hasil operasi</b>	<b>(993.660.386)</b>	<b>(1.127.913.647)</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>		
- Penurunan (peningkatan) aset tetap	(8.707.500)	(7.937.000)
- Penurunan (peningkatan) aset penyertaan	0	0
- Penurunan (peningkatan) aset tetap dalam penyelesaian	0	0
- Penurunan (peningkatan) aset lain-lain	0	0
- Penurunan (peningkatan) bahan instalasi	0	0
<b>Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(8.707.500)</b>	<b>(7.937.000)</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		
- Koreksi saldo lab / (rugi)	(1.000.000.000)	1.108.940.800
- Kenaikan (penurunan) penyertaan pemerintah YBDS	0	0
- Kenaikan (penurunan) penyertaan modal dari pemko	2.000.000.000	0
- Kenaikan (penurunan) Modal Hibah	0	0
<b>Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.108.940.800</b>
<b>Kenaikan/penurunan kas bersih</b>	<b>(2.367.886)</b>	<b>(26.909.847)</b>
<b>Kas dan Setara Kas pada awal periode ( 01 - 01 - 2023 )</b>	<b>7.332.395</b>	<b>34.242.242</b>
<b>Kas dan Setara Kas pada akhir periode ( 31 - 12 - 2023 )</b>	<b>4.964.509</b>	<b>7.332.395</b>

*Lihat catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PDAM IE BEUSAREE RATA PEMKO LHOKEUMAWE**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
 Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain

AKUN/PERKIRAAN	Catatan	Per 31 Des 2023 Rupiah (Rp.)	Per 31 Des 2022 Rupiah (Rp.)
<b>Ekuitas Awal</b>	3.5.	2.335.263.025	4.270.501.797
Laba (rugl) tahun lalu	3.5.		
Laba (rugl) tahun berjalan	3.5.	(4.000.278.257)	(3.044.179.572)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan :			
- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Hasil (Inventarisasi)		0	0
- Koreksi Tahun Lalu		(1.000.000.000)	1.108.940.800
- Kenalkan Penyertaan Modal dari Pemko		2.000.000.000	0
- Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan		0	0
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>(665.015.232)</b>	<b>2.335.263.025</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan*



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PDAM IE BEUSAREE RATA, KOTA LHOEKSEUMAWE

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022



### 1. Pendirian dan Kegiatan serta Organisasi Perusahaan.

#### a) Pendirian.

Dasar hukum pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Lhokseumawe adalah Qanun nomor 4 tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata yang berdomisili dan berkantor pusat di Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Pendirian PDAM Ie Beusaree Rata selanjutnya disebut entitas dengan tujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

#### b) Kegiatan Perusahaan.

Entitas mempunyai tugas/fungsi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Lhokseumawe secara merata dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perusahaan dalam pengelolaannya serta tidak mengabaikan aspek sosial, budaya dan kondisi masyarakat sehingga masyarakat Kota Lhokseumawe dan sekitarnya menjadi lebih sehat dan sejahtera.

#### c) Organisasi dan Personalia.

Struktur Organisasi entitas disusun/ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Lhokseumawe yang terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas, Direktur, Bagian ADM dan Keuangan, Bagian Hubungan Pelanggan, Bagian Perencanaan Teknik.

#### Dewan Pengawas

Dewan Pengawas PDAM Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 288 Tahun 2021 yang menetapkan DR. Ir. Anwar, ST, MT, M Ag, IPU, AER sebagai dewan pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe.

#### Direksi

Berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 489 Tahun 2023 Tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe yaitu: **Zakaria, SKM, M.Kes.**

#### Kepala Bagian

Adapun yang mengisi jabatan sesuai dengan struktur organisasi tersebut adalah :

- Kepala Bagian ADM dan Keuangan : Darmawan. SH
- Kepala Bagian Hubungan Pelanggan : Musriahardi. S.Kom
- Kepala Bagian Tekhnik : T. Safran Azmi. ST

## Pegawai

Jumlah pegawai (tenaga kerja) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebanyak 34 orang yang terdiri dari:

Pegawai Tetap	: 18 orang
Pegawai Kontrak	: 13 orang
Tenaga harian lepas	: 3 orang

Komposisi pegawai Tetap dengan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Sarjana	: 15 orang
Ahli Madya	: 1 orang
SMA (sederajat)	: 2 orang

## 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi.

Sesuai perubahan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dimana Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui proses konvergensi International Financial Reporting Standard (IFRS) telah menetapkan Standar Akuntansi yang harus diikuti oleh seluruh entitas yang ada di Indonesia, maka PDAM Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dalam pelaporan atas Laporan Keuangannya telah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang ditetapkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan tanggal 19 Mei 2009 sejak tahun 2011.

Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang digunakan PDAM Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dalam menyusun Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :

### 1) Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ie Beusaree Rata menetapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan Perusahaan. Laporan keuangan Perusahaan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Perusahaan menyajikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas secara tersendiri.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

- 2) Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing  
Mata uang pelaporan yang digunakan oleh Perusahaan adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional. Semua jumlah-jumlah transaksi dan saldo akun disajikan dalam Rupiah, kecuali dijelaskan lain.
- 3) Perubahan terhadap Kebijakan Akuntansi  
Sampai dengan 31 Desember 2013, kebijakan akuntansi yang diterapkan PDAM mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM. Namun dengan telah ditetapkannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 17 Juli 2009, maka sejak 1 Januari 2014, PDAM le Beusaree Rata menerapkan SAK ETAP dengan dasar pertimbangan:
- 1) PDAM tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
  - 2) Laporan Keuangan PDAM ditujukan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*).
- Beberapa perubahan kebijakan akuntansi berdasarkan SAK ETAP adalah sebagai berikut:
- a) Uang Jaminan Langganan dan Cadangan Dana Meter yang semula disajikan sebagai kewajiban diakui sebagai Pendapatan Non Air.
  - b) Bahan Instalasi yang semula disajikan sebagai Aset Lain-lain diakui sebagai Persediaan.
  - c) Penurunan nilai Aset Tetap dan Persediaan diakui sebagai beban pada saat terjadinya dan setiap tanggal neraca dilakukan pengujian.
  - d) Tidak mengakui adanya Pos Luar Biasa.
  - e) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan secara internal tidak diakui dan pengeluaran tersebut dicatat sebagai beban.
  - f) Beban disajikan berdasarkan fungsi atau berdasarkan sifat beban.
- d. Kas dan Setara Kas  
Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank yang tidak dijaminakan serta tidak dibatasi penggunaannya.
- 4) Piutang Usaha  
Piutang usaha disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tagihan yang dapat direalisasikan. Piutang usaha yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih dibuatkan penyisihan. Besarnya cadangan penyisihan piutang pada akhir tahun ditentukan sebesar presentase tertentu dari nilai total penjualan.
- 5) Persediaan  
Persediaan dinyatakan sebesar biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian persediaan ditentukan berdasarkan metode *First In First Out (FIFO)*. Pencatatan persediaan dilakukan dengan *physical inventory method*. Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai ketika nilai realisasi bersih lebih rendah dari pada biaya perolehan dengan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.
- 6) Aset Tetap  
Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode *First In First Out (FIFO)*. Pencatatan persediaan dilakukan dengan *physical inventory method*. Nilai realisasi bersih ditentukan sebesar harga jual dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai ketika nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya perolehan dengan membentuk penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

Kelompok Aset Tetap	Metode Penyusutan	Umur Ekonomis	Tarif
Instalasi Sumber	Garis Lurus	20 tahun	5 %
Instalasi Pompa	Garis Lurus	8 tahun	12,5 %
Transmisi dan Distribusi	Garis Lurus	4-16 tahun	25-6,25 %
Kendaraan	Garis Lurus	4 tahun	25 %
Inventaris Perabot Kantor	Garis Lurus	4-8 tahun	25-12,5 %

7) Imbalan Kerja

Perusahaan berkewajiban memperhitungkan imbalan pascakerja sebagaimana di atur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja karena mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja dihitung berdasarkan UU RI nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

8) Pengakuan Pendapatan dan Beban

Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan non usaha diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. Sedangkan beban diakui pada saat terjadinya (akrual basis) dan disajikan berdasarkan sifat beban. Pendapatan penjualan air dibukukan pada saat rekening tagihan diterbitkan. Perusahaan mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap pelanggan.

9) Perpajakan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak (pajak pusat dan pajak daerah) periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan (pajak pusat).

10) Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

11) Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan tahun 2023 yang diselesaikan pada tanggal 31 Januari 2023.

### 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### 3.1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Merupakan saldo akun-akun Neraca (Laporan Posisi Keuangan) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	(Dalam Rp) 31/12/2023	(Dalam Rp) 31/12/2022
<b>3.3.1. Kas dan Setara Kas</b>	<b>4.984.509</b>	<b>7.332.395</b>
Merupakan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :		
1 Saldo Kas Bank*)	3.032.568	7.211.182
2 Kas Kantor	1.931.941	121.213
<b>Jumlah Kas dan Setara kas</b>	<b>4.984.509</b>	<b>7.332.395</b>

\*)Saldo Bank per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

1 Bank Aceh No. Rek 030.01.03.610004-9	1.213.534	826.423
2 Bank Syariah Indonesia No. Rek 6996996989	1.457.407	5.723.132
3 Bank BNI Syariah No. Rek 3001196863	361.627	661.627
	<b>3.032.568</b>	<b>7.211.182</b>

#### 3.3.2. Piutang Usaha

Merupakan saldo Piutang Usaha Pelanggan per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

1. Piutang Rekening Air Instansi Pemerintah	724.374	0
2. Piutang Rekening Air Niaga Kecil	6.779.862	0
3. Piutang Rekening Air Niaga Sedang	10.609.510	0
4. Piutang Rekening Air Rumah Tangga B	228.552.848	0
5. Piutang Rekening Air Sosial Khusus	202.168	0
6. Piutang Rekening Air Sosial Umum	181.982	0
7. Pendapatan Denda	0	0
8. Piutang Rekening Air 2022	0	230.530.375
Akumulasi Penyisihan Piutang	(86.438.936)	(66.438.936)
<b>Jumlah Piutang Kegiatan Operasional Bersih</b>	<b>158.611.806</b>	<b>164.091.439</b>

#### 3.3.3. Piutang/Pinjaman Pegawai

Merupakan saldo Piutang/pinjaman pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah merupakan pinjaman pegawai yang terjadi disebabkan perusahaan belum membayarkan gaji selama tahun 2023 dengan rincian..

1. Safril, ST	4.500.000	4.500.000
2. Musriahardi, S.Kom	3.000.000	1.500.000
3. Khairiah, SE	7.500.000	10.000.000
4. Hanafiah, ST	6.000.000	2.400.000
5. Juanda, SE	8.050.000	7.500.000
6. Safwan, SE	6.500.000	4.000.000
7. Mutakhalli, S.ST	5.300.000	1.500.000
8. T. Safran Azmi, ST	6.000.000	2.500.000
9. A. Febrian Maulana, SE	3.000.000	1.000.000
10. Darmawan, SH	20.700.000	13.000.000

11. Eka Mutia, SE	8.800.000	10.000.000
12. Adiwir	10.000.000	7.500.000
13. Ir. Ahmad Fauza Obany	9.000.000	6.500.000
14. Syahrizal, S.Sos	6.700.000	3.400.000
15. Muhammad Ali	9.500.000	5.500.000
16. Rosnawati	3.000.000	2.000.000
17. Hendra Juliza	1.500.000	2.000.000
18. Vinta Dwi Lestari, Amd	8.200.000	3.700.000
19. Rini Merinza	4.000.000	3.000.000
20. Balkis, Amd	1.500.000	500.000
21. Helmi, SE	7.000.000	5.500.000
22. M. Nazir, ST	4.500.000	3.500.000
23. T. Armansyah, Amd	2.500.000	1.000.000
24. Safrizal	5.000.000	2.500.000
25. M. Yusuf	10.500.000	8.000.000
26. Ikramullah	5.500.000	7.000.000
27. Nasruddin, ST	4.000.000	1.500.000
28. M. Falsal	6.000.000	3.500.000
29. Soraya Ulfa	8.200.000	4.700.000
30. Qamarullah	10.500.000	8.000.000
31. Raudhani, SE	11.210.000	7.710.000
32. M. Ichsan	6.330.000	7.330.000
33. M. Fajar	7.500.000	6.500.000
34. Fitra Andilan Nst	170.000	170.000
35. M. Nasir	5.200.000	6.000.000
36. M. Riza, S.I.Kom	15.800.000	5.500.000
37. Zarbaiti	0	1.000.000
38. Angsuran Kredit Karyawan	143.345.000	143.345.000
<b>Jumlah</b>	<b>386.005.000</b>	<b>314.755.000</b>

<b>3.3.4. Persediaan</b>	<b>763.646.494</b>	<b>770.026.874</b>
Merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari :		
1. Persediaan Bahan Kimia	3.867.500	0
2. Pipa	128.396.000	134.998.000
3. Meter Air	198.600.000	198.600.000
4. Gate Valve	30.000.000	30.000.000
5. Suku Cadang Lainnya	382.705.494	386.351.374
6. Suku Cadang (Bantuan Propinsi)	20.077.500	20.077.500
<b>Jumlah</b>	<b>763.646.494</b>	<b>770.026.874</b>

Lihat Lampiran 1

<b>3.3.5. Sewa dibayar dimuka</b>	<b>7.700.000</b>	<b>21.175.000</b>
Sewa dibayar dimuka adalah jumlah pembayaran sewa kantor yang masih memberikan nilai atau manfaat kepada perusahaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 :		
- Sewa dibayar dimuka	7.700.000	21.175.000

**3.2. Aset Tetap**5.215.137.9196.272.098.219

Merupakan Aset Tetap dan akumulasi depresiasi per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri katagori sebagai berikut :\*)

Jenis Aset Tetap	Saldo Awal (Akhir 2022)	Tahun 2023			Saldo Akhir 31/12/2023
		Penambahan	Pengurangan	Koreksi	
Harga Perolehan :					
-Instalasi Pengolahan Air	376.827.200	0	0	0	376.827.200
-Instalasi Transmisi dan Distribusi	9.560.120.932	0	0	0	9.560.120.932
-Peralatan dan Perlengkapan	711.434.000	0	0	0	711.434.000
-Kendaraan/Alat Pengangkutan	579.368.000	0	0	0	579.368.000
-Inventaris/Perabot Kantor	1.184.803.679	8.707.500	0	0	1.193.511.179
	<b>12.412.553.811</b>	<b>8.707.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.421.261.311</b>
Akum. Penyusutan	(6.140.455.592)	(1.065.667.800)			(7.206.123.392)
Nilai Buku	<b>6.272.098.219</b>	<b>(1.056.960.300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.215.137.919</b>

Lihat Lampiran 2

**3.3. Aset Lain-Lain**2.007.688.0702.208.456.877

Aset lain-lain adalah aset tidak berwujud yang disajikan di neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, yang terdiri dari :

- Aset Tidak Berwujud	4.015.376.140	4.015.376.140
- Amortisasi	(2.007.688.070)	(1.806.919.263)
<b>Jumlah</b>	<b>2.007.688.070</b>	<b>2.208.456.877</b>

**3.4. Liabilitas Jangka Pendek**9.208.769.0307.422.672.779

Merupakan kewajiban perusahaan per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari :

- Utang Usaha*)	4.873.782.249	4.064.707.901
- Utang Non Usaha	66.873.509	138.513.509
- Utang Gaji	3.799.119.748	3.078.651.369
- BPJS - Ketenagakerjaan	130.983.160	0
- Pensiun	115.330.364	0
- Pinjaman dari Dana Absensi	129.000.000	129.000.000
- Pinjaman pada Pihak Ketiga	93.700.000	11.800.000
<b>Jumlah</b>	<b>9.208.769.030</b>	<b>7.422.672.779</b>

\*)Catatan: saldo hutang pembelian air ke PT.PAG, saldo sejak 2018 dan hutang lainnya terkait operasional perusahaan.

**3.5. Ekuitas**(665.015.232)2.335.263.025

Merupakan ekuitas perusahaan yang bersumber dari ekuitas Pemko Banda Aceh, ekuitas hibah, dan saldo laba (rugi) per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari :

- Kekayaan Pemko Yang Dipsahkan	16.675.000.000	16.675.000.000
- Tambahan Setoran Pemko Lhokseumawe	11.452.207.500	9.452.207.500
- Modal Hibah	3.996.024.579	3.996.024.579
- Saldo Laba (Rugi)/Akumulasi Kerugian*)	(28.787.969.054)	(24.743.789.482)
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(4.000.278.257)	(3.044.179.572)
<b>Jumlah</b>	<b>(665.015.232)</b>	<b>2.335.263.025</b>

\*)Catatan: hal ini sudah disampaikan dalam basis opini pengecualian dan masukan dari auditor independen.

### 3.6. Laporan Laba Rugi

#### 3.6.1. Pendapatan Usaha

	<u>1.410.120.196</u>	<u>2.124.027.125</u>
Merupakan pendapatan perusahaan dari pendapatan air, pendapatan non air dan pendapatan lain-lain seperti yang disajikan di dalam Laporan Laba (Rugi) untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:		
- Pendapatan Penjualan Air (Rekening Air)	1.142.712.378	1.091.008.174
- Pendapatan Sambungan Baru	2.780.000	1.500.000
- Pendapatan Balik Nama	500.000	430.000
- Pendapatan Subaldi Pemko	70.739.059	1.000.000.000
- Pendapatan Non Air Lainnya	193.383.213	30.971.397
- Pendapatan Jasa Giro	5.546	117.554
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b><u>1.410.120.196</u></b>	<b><u>2.124.027.125</u></b>

Lihat Lampiran 2 dan 3.

#### 3.6.2. Beban Usaha

	<u>5.410.398.453</u>	<u>5.168.206.697</u>
Merupakan beban usaha perusahaan seperti yang disajikan di dalam Laporan Laba (Rugi) untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:		
- Beban Pegawai	2.288.316.244	2.427.668.964
- Beban Bahan Bakar	420.000	1.237.500
- Beban Listrik	154.345.184	145.920.213
- Beban Kimia	215.896.140	128.988.000
- Beban Pemeliharaan	19.481.880	122.727.750
- Beban Depresiasi	797.909.382	1.357.144.340
- Beban Air Baku	101.408.500	626.650.200
- Beban Bahan Pembantu	19.410.600	4.744.000
- Beban Umum Kantor	20.000.000	213.885.438
- Beban ATK dan Barang Cetak	26.675.000	16.528.800
- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	123.952.589	20.000.000
- Beban Sewa	23.607.100	18.608.333
- Beban Admi-Provisi Bank	152.243.000	1.939.988
- Beban Pajak / Retribusi	0	16.194.300
- Beban Operasi Lainnya	1.765.000	67.990.873
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b><u>5.410.398.453</u></b>	<b><u>5.168.206.697</u></b>

Lihat Lampiran 2 dan 3.

## 4. Penyajian dan Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2023 yang diselesaikan pada tanggal 31 Januari 2024 dan per 31 Desember 2022 yang diselesaikan pada tanggal 31 Januari 2023. Hal ini berkaitan dengan standar yang berlaku seperti yang disebut di dalam SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023.

@KAPMR2542024



**ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN 2023 DAN 2022**

RASIO LIKUIDITAS	HASIL	PENGETRIAN			RASIO
	2023	AKUN / PERKURAN	2023	2022	2022
Current Ratio	14,54%	Kemampuan membayar HL sebesar Rp. 1,- dijamin oleh Aset Lancar sebesar			0,17
		Aset Lancar	1.320.827.809	x 100%	
Cash Ratio	0,05%	Kemampuan membayar HL sebesar Rp. 1,- dijamin Kas dan Surat Berharga sebesar			0,0010
		Kas/Bank+S B B	4.964.509	x 100%	
Quick Ratio	6,05%	Kemampuan membayar HL sebesar Rp. 1,- dijamin oleh Surat Berharga dan Piutang			0,07
		Hutang Lancar	9.208.769.030	x 100%	
Working Capital to Total Assets	-92,32%	Kemampuan membayar dari aset yang likuid bebas HL dari TA sebesar			-0,83
		Aset Lancar - Kewajiban	(7.887.841.221)	x 100%	
RASIO PROFITABILITAS		PENGETRIAN			RASIO
ROI (Return On Investment)	0,0000%	Aset sebesar Rp. 1,- dapat menghasilkan keuntungan bersih (EAT) sebesar			Rp 0,0000
		A.L - Persediaan	857.281.318	x 100%	
Rate of Return on Net Worth	16,62%	Setiap Rp. 1,- dapat menghasilkan EAT sebesar			-Rp 0,7671
		Ekuitas	(655.015.232)	x 100%	
Net Profit Margin	-35,25%	Setiap Rp. 1,- penjualan/pendapatan bersih akan menghasilkan EAT sebesar			-Rp 0,7671
		Pendapatan Usaha	1.410.120.196	x 100%	
Gross Profit Margin	-263,66%	Setiap Rp. 1,- penjualan/pendapatan bersih akan menghasilkan keuntungan kotor sebesar			-Rp 1,3036
		Labo Kotor Usaha	(4.000.278.257)	x 100%	
Rate of Return on Total Assets	-48,82%	Setiap Rp. 1,- total aset akan menghasilkan keuntungan (EBIT) sebesar			-Rp 0,3120
		EBIT (Earning Before Interest & Tax)	(4.000.278.257)	x 100%	
Operating Income Ratio	-35,25%	Setiap Rp. 1,- penjualan/pendapatan bersih akan dapat menghasilkan EBIT sebesar			-Rp 0,7671
		Pendapatan Usaha	1.410.120.196	x 100%	
Operating Ratio	363,66%	Setiap Rp. 1,- penjualan/pendapatan bersih mempunyai beban biaya operasi sebesar			Rp 2,2131
		B P P dan B U O	5.410.398.453	x 100%	
RASIO AKTIVITAS		PENGETRIAN			RASIO
Total Assets Turn Over	0,2 kali	Kemampuan perputaran aset sebesar Rp. 1,- dapat menghasilkan penjualan bersih			Rp 0,239
		Pendapatan Usaha	1.410.120.196	x 100%	
Receivable Turn Over	2,6 kali	Setiap rata-rata perputaran piutang Rp. 1,- terjadi dari penjualan kredit sebesar			Rp 4,88
		Pendapatan Usaha	1.410.120.196	x 100%	
Average Collection Period	3.883.343 kali	Rate-rata piutang dapat ditagih selama			8.397.960,89
		Pendapatan Usaha	1.410.120.196	x 100%	
Working Capital Turn Over	(0,18)	Modal kerja yang berputar dalam bentuk penjualan/pendapatan bersih dalam setahun rata-rata			-Rp 0,38
		Pendapatan Usaha	1.410.120.196	x 100%	
Inventory Turn Over	14.823.009,5	Dibanding dengan BPP-nya, dana yang tertanam dalam persediaan berputar rata-rata			14.159.470,40
		Persediaan	5.410.398.453	x 100%	
RASIO LEVERAGE		PENGETRIAN			RASIO
Total Debt to Equity Ratio	-1384,75%	Setiap Rp. 1,- dan Modal sendiri menjadi jaminan dari total hutang sebesar			Rp 3,179
		HL + H J P	9.208.769.030	x 100%	
Total Debt to Capital Assets	107,76%	Setiap Rp. 1,- dari Aset menjadi jaminan dari total hutang sebesar			Rp 0,761
		HL + H J P	9.208.769.030	x 100%	
Long Term Debt to Equity Ratio	0,00%	Setiap Rp. 1,- dari Aset Bersih-Ekuitas sendiri menjadi jaminan dari total HJP sebesar			Rp 0,000
		Jumlah TLE	8.543.753.798	x 100%	
Times Interest Earned Ratio	0,00%	Setiap laba (EBIT) sebesar (Rp 4.000.278.232,-) dan (3.044.179.572,-) menjadi jaminan bunga HJP sebesar Rp. 1,-			Rp 0,000
		Bunga Bank (Interest)	0	x 100%	

Garteran:  
 ASET LANCAR (AL)  
 SURAT BERHARGA/DEPOSITO (SBB)  
 ASET TETAP (AT)  
 TOTAL ASET (TA)  
 HUTANG LANCAR (HL)  
 HUTANG JANGKA PANJANG (HJP)  
 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (TLE)

PENDAPAT/PENJUALAN (PP)  
 BEBAN POKOK PENJUALAN (BPP)  
 BEBAN USAHA/OPERASIONAL (BUO)  
 EBIT (Earning Before Interest & Tax)  
 EBT (Earning Before Tax)  
 EAT (Earning After Tax)

**4.1. Perikatan Audit**

Audit atas Laporan Keuangan PDAM Ie Beusaree Rata Pemko Lhokseumawe per 31 Desember 2023 dilakukan berdasarkan permintaan langsung dari Pk.Direktur tanggal 25 Februari 2024 Kepada KAP MAHLIZAR, yang merupakan audit untuk tahun pertama lanjutan dari Auditor Independen sebelumnya.

Untuk maksud di atas sudah ditandatangani **SURAT PERIKATAN AUDIT** tanggal 29 Februari 2024 Nomor: 2/SPA/KAPMR-MA/2024.

**4.2. Masukan dari Auditor Independen**

Hal-hal berikut ini perlu mendapat perhatian manajemen entitas sebagai masukan penting untuk ditindaklanjuti seperti yang pernah disampaikan dalam Surat Kepada Manajemen (Management Letter) Nomor:1/ML-KAPMR/ PDAMLSM/ 2024 Tanggal 20 April 2024 yaitu:

**1. Rencana Anggaran Pendapatan & Biaya**

Agar entitas menyajikan kolom perbandingan atas realisasi Rencana Anggaran Pendapatan & Biaya dari Laporan Keuangan Intern yang tujuannya untuk memonitor apakah ada kenaikan dan penurunan pendapatan dan biaya dari yang telah direncanakan. Pada akhir periode bisa dibuat perbandingan antara anggaran dengan aktual dan analisa perbedaan (variance) yang terjadi, dan bisa diketahui bagian mana yang bekerja secara efisien dan bagian mana yang tidak efisien (controlable dan uncontrolable).

**2. Penguatan Pengawasan Intern (SPI)**

Penguatan peran SPI secara maksimal dan memantau pelaksanaan tugasnya sebagai fungsi staf internal audit untuk membantu setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif, serta menyediakan analisa-analisa, penilaian-penilaian, rekomendasi-rekomendasi, dan informasi mengenai kegiatan obyek yang dilakukan atas laporan keuangan yang dihasilkan bagian akuntansi dan keuangan, serta memeriksa apakah kebijaksanaan yang telah ditetapkan manajemen sudah ditaati atau belum oleh setiap bagian di dalam entitas.

**3. Sistem dan prosedur administrasi dan akuntansi perlu dibenahi dan dilengkapi dengan SOP dan Job Descriptions secara lebih tegas dan tepat untuk setiap orang dan bagian sesuai tanggung jawabnya. Juga hal yang dapat meningkatkan tertip administrtasi dan tidak mengurangi arus kas entitas atas hal pajak rutin bulanan dan tahunan.**

**4. Fungsi Dewan Komisaris untuk mengawasi kinerja Direksi harus diperkuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mereview Laporan Direksi dan Laporan Keuangan minimal 3 bulan sekali (tergantung keperluan).**

**5. Penyajian laporan keuangan rutin harian, mingguan, bulanan, dan tahunan secara tepat waktu (timeline); entitas sudah seharusnya menggunakan aplikasi sistem komputer akuntansi termasuk sub sistem aset tetap, dan sub sistem gaji dan PPH pasal 21.**

**6. Rancana Kerja Bisnis dan Kelangsungan Usaha**

Perlu dilakukan kajian bisnis dalam hal revitalisasi dan reorganisasi bisnis entitas untuk mengantisipasi akumulasi kerugian yang terus bertambah. Hal ini penting dikaji dan dilakukan langkah-langkah strategis terkait Akumulasi Saldo Laba (Rugi) per 31 Desember 2022 sebesar (Rp.28.787.969.054,-) dan Laba (Rugi) per 31 Desember 2023 sebesar (Rp.4.000.278.257,-) agar menjadi perhatian yang serius dari manajemen entitas terkait Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan efisiensi dalam operasional untuk keberlangsungan usahanya, lihat CALK tahun 2022.

@KAPMR2542024

## LAMPIRAN

**DAFTAR PERSEDIAAN**  
PDAM IE BEUSARE RATA- KOTA LHOEKSEUMAWE  
TAHUN 2023

NO	BARANG / PERSEDIAAN	SATUAN	SALDO AWAL JANUARI 2023	MUTASI TAHUN 2023		SALDO AKHIR DESEMBER 2023 (SATUAN)	HARGA	SALDO AKHIR DESEMBER 2023 ( RP )
				PEMERIKSAAN	PENGELUARAN			
				Jumlah	Jumlah			
<b>1. BAHAN KIMIA</b>								
1	Tawas	Kg	-	11.640	11.215	425	9.100	3.867.500
<b>JUMLAH PERSEDIAAN BAHAN KIMIA</b>			-	11.640	11.215	425		3.867.500
<b>2. PIPA - PIPA</b>								
1	Pipa PVC AW 0.5"	Batang	1.795	-	25	1.770	32.000	56.640.000
2	Pipa PVC 2"	Batang	-	1	1	-	179.700	-
3	Pipa PVC 3"	Batang	8	-	3	5	370.000	1.850.000
4	Pipa PVC 4"	Batang	-	-	-	-	550.000	-
5	Pipa PVC 6"	Batang	18	-	4	14	1.173.000	16.422.000
6	Pipa PVC 8"	Batang	27	-	-	27	1.864.000	50.328.000
7	Pipa PVC 315MM	Batang	-	-	-	-	-	-
8	Pipa HDPE 0.5"	Batang	-	-	-	-	-	-
9	Pipa HDPE 315MM	Batang	29	-	-	29	-	-
10	Pipa Casing 1"	Batang	-	-	-	-	-	-
11	Pipa GIP 1/2"	Batang	12	-	-	12	263.000	3.156.000
12	Pipa GIP 1"	Batang	-	-	-	-	-	-
13	Pipa GIP 3/4"	Batang	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PIPA - PIPA</b>			1.889	1	33	1.857		128.396.000
<b>3. WATER METER</b>								
1	Water Meter 0.5"	Unit	662	-	-	662	300.000	198.600.000
<b>JUMLAH WATER METER</b>			662	-	-	662		198.600.000
<b>4. GATE VALVE</b>								
1	Gate Valve 12" KITZ	Unit	-	-	-	-	-	-
2	Gate Valve 2"	Unit	3	-	-	3	2.000.000	6.000.000
3	Gate Valve 4"	Unit	-	-	-	-	-	-
4	Gate Valve 6"	Unit	-	-	-	-	-	-
5	Gate Valve 8"	Unit	2	-	-	2	5.000.000	10.000.000
6	Gate Valve 12"	Unit	1	-	-	1	14.000.000	14.000.000
<b>JUMLAH GATE VALVE</b>			6	-	-	6		30.000.000
<b>5. SUKU CADANG ( ASSESORIES SAMBUNGAN RUMAH )</b>								
1	V.Socket 0.5"	Unit	2.844	-	24	2.820	3.500	9.870.000
2	Elbow PVC 0.5"	Unit	2.185	-	152	2.033	2.880	5.855.040
3	F. Elbow PVC 0.5"	Unit	1.473	-	80	1.393	2.500	3.482.500
4	Double Nepple PVC 0.5"	Unit	182	-	80	102	10.000	1.020.000
5	Stop Krant 0.5"	Unit	1.035	-	20	1.015	20.000	20.300.000
6	Hand Krant 0.5"	Unit	1.388	-	-	1.388	20.000	27.760.000
7	Box Meter	Unit	1.058	-	-	1.058	40.000	42.320.000
8	Seal Tape	Unit	3.392	-	10	3.382	4.412	14.921.384
9	Clam Saddle 2" 1/2"	Unit	821	-	-	821	50.000	41.050.000
10	Clam Saddle 3" 1/2"	Unit	2.112	-	-	2.112	60.000	126.720.000
11	Clam Saddle 4" 1/2"	Unit	826	-	24	802	70.000	56.140.000
12	Clam Saddle 3" 3/4"	Unit	-	-	-	-	-	-
13	Clam Saddle 4" 3/4"	Unit	223	-	-	223	100.000	22.300.000
14	Katup Searah [Kuningan] 1/2"	Unit	33	-	-	33	55.000	1.815.000
15	Plug Krant [Kuningan] 1/2"	Unit	30	-	-	30	112.500	3.375.000

NO	BARANG / PERSEDIAAN	SATUAN	SALDO AWAL JANUARI 2023	MUTASI TAHUN 2023		SALDO AKHIR DESEMBER 2023 (SATUJAH)	HARGA	SALDO AKHIR DESEMBER 2023 (RP)
				PENERIMAAN	PENGELUARAN			
				Jumlah	Jumlah			
16	Double Nepple GIP 1/2"	Unit	777	-	-	777	5.260	4.475.520
17	Elbow GIP 1/2"	Unit	170	-	-	170	7.200	1.224.000
18	Lem Pipa [Odol]	Unit	-	-	-	-	-	-
19	Lem Pipa [Kaleng]	Unit	-	-	-	-	-	-
20	Tee GIP 1/2"	Unit	-	-	-	-	-	-
21	Flag [DOP]	Unit	67	-	-	67	1.150	77.050
22	F. Elbow PVC 1/2" x 3/4"	Unit	-	-	-	-	-	-
23	V. Socket PVC 1/2" x 3/4"	Unit	-	-	-	-	-	-
24	Tee PVC 1/2"	Unit	-	-	-	-	-	-
25	Gibouult Joint 3"	Unit	-	-	-	-	-	-
26	Baut 3/4 x 2 1/2	Set	-	80	80	-	10.000	-
27	Gasket 3 mm	Kg	-	8	8	-	30.000	-
28	Elbow 4" AW	Bh	-	1	1	-	86.000	-
29	Elbow 2" AW	Bh	-	4	4	-	22.000	-
30	Lem Pipa Kaleng Merek Isarplas	Kaleng	-	4	4	-	80.000	-
JUMLAH ASSESORIES SAMBUNGAN RUMAH			18.616	97	487	18.226	-	382.705.494
<b>6. SUKU CADANG LAINNYA ( BARANG BANTUAN PROVINSI )</b>								
1	Water Meter 1/2"	Unit	-	-	-	-	-	-
2	Clam Saddle 4" x 1/2"	Unit	223	-	-	223	70.000	15.610.000
3	Tee GIP 1/2"	Unit	-	-	-	-	-	-
4	Hand Krant 1/2"	Unit	-	-	-	-	-	-
5	Stop Krant 1/2"	Unit	-	-	-	-	-	-
6	Reducer GIP 3/4"x1/2"	Unit	-	-	-	-	-	-
7	Double Nepple GIP 1/2"	Unit	-	-	-	-	-	-
8	Elbow GIP 3/4" x 90	Unit	397	-	-	397	6.000	2.382.000
9	Elbow PVC 3/4 x 90	Unit	313	-	-	313	2.500	782.500
10	V. Socket PVC 3/4"	Unit	389	-	-	389	2.000	778.000
11	Dop GIP 1/2"	Unit	175	-	-	175	3.000	525.000
12	Seal Tape	Unit	-	-	-	-	-	-
13	Lem Pipa	Unit	-	-	-	-	-	-
14	Box Meter	Unit	-	-	-	-	-	-
15	Pipa PVC 3/4"	Batang	-	-	-	-	-	-
16	Pipa GIP 3/4"	Batang	-	-	-	-	-	-
17	Pipa GIP 1/2"	Batang	-	-	-	-	-	-
JUMLAH SUKU CADANG LAINNYA (BARANG			1.497	-	-	1.497	-	20.077.500
JUMLAH PERSEDIAAN - TAHUN 2023			22.670	11.738	11.735	22.673	-	763.646.494

**DAFTAR ASET TETAP DAN AKUMULASI DEPRESIASI  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) IE BEUSAREE RATA  
KOTA LOKSEUMAWE**

PER : 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	QTY	UNIT	TARIF	NILAI PEROLEHAN	AKUM. DEPRE. TAHUN 2022	BIAYA DEPRESIASI TAHUN 2022	AKUM. DEPRE. TAHUN 2022	NILAI BUKU TAHUN 2023
	<b>INSTALASI PENGOLAHAN AIR</b>									
1	Gate Valve 12" - Kitiz 300 CLS A-216	18-Mar-13	1	unit	10%	105.275.000	94.747.500	10.527.500	105.275.000	0
2	WN Flange 12" SA/A 105N RF 300E S 40 - MELAFAR	18-Mar-13	2	ea	10%	10.657.200	9.591.480	1.065.720	10.657.200	0
3	Gate Valve 2"	25-Jul-13	7	ea	10%	21.056.000	18.950.400	2.105.600	21.056.000	0
4	Gate Valve 4"	25-Jul-13	6	ea	10%	37.308.000	33.577.200	3.730.800	37.308.000	0
5	Gate Valve 6"	25-Jul-13	5	ea	10%	55.710.000	50.139.000	5.571.000	55.710.000	0
6	Gate Valve 8"	25-Jul-13	2	ea	10%	35.640.000	32.076.000	3.564.000	35.640.000	0
7	Gate Valve 12"	25-Jul-13	1	ea	10%	47.357.000	42.621.300	4.735.700	47.357.000	0
8	Gibout Joint 3"	24-Sep-13	1	ea	10%	550.000	485.000	55.000	550.000	0
9	Electrode Welding 1/8 IN.E-7018	6-Feb-14	1	lot	10%	2.200.000	1.760.000	220.000	1.960.000	220.000
10	Gasket Spiral 14 Wound 300 RF 4,5mm	6-Feb-14	2	ea	10%	900.000	720.000	90.000	810.000	90.000
11	Nut dia 1-1/8"x180L SBN A193-B7/A194-2H	6-Feb-14	16	ea	10%	4.800.000	3.840.000	480.000	4.320.000	480.000
12	REINFORCING PAD T-9mm THK 18"	6-Feb-14	1	ea	10%	2.500.000	2.000.000	250.000	2.250.000	250.000
13	Gibout Joint 3"	2-Jul-14	1	unit	10%	2.907.000	2.325.600	290.700	2.616.300	290.700
14	Gibout Joint 4"	2-Jul-14	1	unit	10%	972.000	777.600	97.200	874.800	97.200
15	Gibout Joint 6"	2-Jul-14	1	unit	10%	1.360.000	1.088.000	136.000	1.224.000	136.000
16	Gibout Joint 3"	4-Jul-14	3	ea	10%	969.000	775.200	96.900	872.100	96.900
17	Gibout Joint 3"	17-Jul-14	1	ea	10%	323.000	258.400	32.300	290.700	32.300
18	Gibout Joint 4"	25-Jul-14	2	ea	10%	972.000	777.600	97.200	874.800	97.200
19	Gibout Joint 6"	25-Jul-14	4	ea	10%	2.720.000	2.178.000	272.000	2.448.000	272.000
20	Gibout Joint 3"	25-Aug-14	1	ea	10%	323.000	258.400	32.300	290.700	32.300
21	Gibout Joint 4"	5-Sep-14	1	ea	10%	486.000	388.800	48.600	437.400	48.600
22	Gibout Joint 3"	10-Oct-14	4	ea	10%	1.292.000	1.033.000	129.200	1.162.800	129.200
23	Gibout Joint 4"	10-Oct-14	1	ea	10%	486.000	388.800	48.600	437.400	48.600
24	Contractor LCD32 MG Schneider	9-Jan-15	1	ea	10%	820.000	574.000	82.000	742.000	82.000
25	MCB QZC 100 A Merk Schneider	27-Jan-15	3	ea	10%	940.000	658.000	94.000	864.000	94.000
26	Gibout Joint 3"	27-Jan-15	2	ea	10%	969.000	775.200	96.900	872.100	96.900
27	Gibout Joint 4"	27-Jan-15	2	ea	10%	972.000	777.600	97.200	874.800	97.200
28	Gibout Joint 6"	27-Jan-15	2	ea	10%	1.360.000	1.088.000	136.000	1.224.000	136.000
29	Cut-Of Hitachi 14"	20-Feb-15	1	ea	10%	2.161.000	1.512.700	216.100	1.944.900	216.100
30	Gibout Joint 6"	31-Mar-15	2	ea	10%	1.360.000	952.000	136.000	1.224.000	136.000
31	Gibout Joint 6"	14-Apr-15	1	ea	10%	680.000	479.000	68.000	612.000	68.000
32	Gibout Joint 3"	1-Jun-15	1	ea	10%	323.000	226.100	32.300	253.800	32.300
33	Gibout Joint 4"	1-Jun-15	1	ea	10%	486.000	340.200	48.600	437.400	48.600
34	Gibout Joint 4"	20-Aug-15	2	ea	10%	940.000	658.000	94.000	864.000	94.000
35	Pembelian gibout joint 3"	17-Mar-16	1	ea	10%	575.000	345.000	57.500	517.500	57.500
36	Gibout Joint 6 Inch	5-Sep-16	2	ea	10%	1.790.000	1.068.000	179.000	1.619.000	179.000

NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	QTY	UNIT	TARIF	NILAI PEROLEHAN	AKUM. DEPRE. TAHUN 2022	BIAYA DEPRESIASI TAHUN 2022	AKUM. DEPRE. TAHUN 2023	NILAI BUKU TAHUN 2023
37	Gate Valve 4"	20-Sep-16	1	ea	10%	2.250.000	1.350.000	225.000	1.575.000	675.000
38	Gate Valve Ø4"	5-Aug-16	2	ea	10%	4.730.000	2.838.000	473.000	3.311.000	1.419.000
39	Gate Valve Ø4"	12-Aug-16	3	ea	10%	7.095.000	4.257.000	709.500	4.966.500	2.128.500
40	Gibout Joint 3"	5-Jan-17	2	ea	10%	550.000	275.000	55.000	330.000	220.000
41	Teo PVC RRJ Ø 3"	19-Jan-17	1	ea	10%	208.000	149.000	29.800	178.800	119.200
42	Gibout Joint 3"	19-Jan-17	1	ea	10%	275.000	137.500	27.500	165.000	110.000
43	Gibout Joint 3"	1-Mar-17	2	ea	10%	1.900.000	950.000	190.000	1.140.000	760.000
44	Gibout Joint 3"	1-Mar-17	1	ea	10%	600.000	300.000	60.000	360.000	240.000
45	Gibout Joint 3"	19-Jun-17	1	ea	10%	275.000	137.500	27.500	165.000	110.000
46	Gibout Joint 4"	19-Jun-17	1	ea	10%	400.000	200.000	40.000	240.000	160.000
47	Gibout Joint 6"	19-Jun-17	1	ea	10%	600.000	300.000	60.000	360.000	240.000
48	Gibout Joint 6"	19-Sep-17	1	ea	10%	600.000	300.000	60.000	360.000	240.000
49	Gibout Joint 3"	50-Gibout Joint 4"	4	ea	10%	1.100.000	550.000	110.000	660.000	440.000
50	Gibout Joint 4"	29-Dec-17	2	ea	10%	800.000	400.000	80.000	480.000	320.000
51	Gibout Joint 4"	26-Feb-18	2	ea	10%	900.000	450.000	90.000	450.000	300.000
52	Gibout joint 6"	22-Feb-19	1	ea	10%	950.000	372.083	95.000	467.083	312.917
53	Gibout joint 6"	31-Jan-19	2	ea	10%	1.300.000	539.167	130.000	297.917	182.083
54	Gibout joint 4"	17-May-19	1	ea	10%	650.000	232.917	65.000	297.917	182.083
55	Gibout joint 3"	21-Aug-19	1	ea	10%	950.000	316.667	95.000	411.667	273.333
56	Gibout joint 3"	13-Sep-19	1	ea	10%	475.000	154.375	47.500	201.875	127.125
<b>JUMLAH INSTALASI PENGOLAHAN AIR</b>							<b>376.627.200</b>	<b>323.975.788</b>	<b>37.682.720</b>	<b>15.168.992</b>
<b>INSTALASI TRANSMISI &amp; DISTRIBUSI</b>										
1	Pipa Diameter 6" Merek Finnlon	24-Jul-12	120	mtr	10%	23.466.000	23.466.000	0	23.466.000	0
2	Pipa Diameter 6" Merek Finnlon	24-Jul-12	180	mtr	10%	55.928.000	55.928.000	0	55.928.000	0
3	Pipa Diameter 4" Merek Finnlon	16-Aug-12	570	mtr	10%	52.269.000	52.269.000	0	52.269.000	0
4	Pipa Diameter 6" Merek Finnlon	18-Aug-12	1900	mtr	10%	35.280.000	35.280.000	0	35.280.000	0
5	Pipa PVC Diameter 2" Merek Finnlon	13-Sep-12	1500	mtr	10%	44.925.000	44.925.000	0	44.925.000	0
6	Pipa PVC Diameter 3"	13-Sep-12	330	mtr	10%	20.506.000	20.506.000	0	20.506.000	0
7	Test Hidrolis dan Peralatan	23-Oct-12	-	-	10%	81.009.000	81.009.000	0	81.009.000	0
8	Test Hidrolis 10%	11-Feb-13	-	-	10%	8.100.900	8.100.900	0	8.100.900	0
9	Pipa RRJ Fintlon 6"	15-Mar-13	19	btg	10%	18.715.000	18.715.000	1.871.500	17.150.000	1.140.000
10	Pipa RRJ Fintlon 4"	40	btg	10%	18.666.000	18.666.000	1.866.600	16.666.000	1.140.000	
11	Pipa RRJ Fintlon 3"	15-Mar-13	39	btg	10%	12.132.000	10.919.810	1.213.200	12.132.000	0
12	Pipa PVC dia.315 mm - RRJ	26-Mar-13	138	mtr	10%	121.854.000	109.668.600	12.185.400	121.854.000	0
13	Planning Piping System Kec. Blang Mengat	8-Apr-13	-	-	10%	49.494.500	44.545.000	4.949.450	49.494.500	0
14	Planning Piping System Kec. Muara Satu	7-May-13	-	-	10%	49.335.000	44.401.500	4.933.500	49.335.000	0
15	Penerbitan/Perbk Pipa Existing Kec.M Satu	22-May-13	-	-	10%	30.361.600	27.325.440	3.036.160	30.361.600	0
16	Planning Piping system Kec. Muara Dua	22-May-13	-	-	10%	49.445.000	44.500.000	4.944.500	49.445.000	0
17	Perencanaan Piping System Kec. Banda Sakti	25-Jul-13	-	-	10%	49.577.000	44.619.300	4.957.700	49.577.000	0
18	Pipa A53 BSNLS SCH40BE 12"	6-Feb-14	2	mtr	10%	14.400.000	11.520.000	1.440.000	12.960.000	1.440.000
19	Pipa HDPE 315 mm Derya	14-May-14	180	mtr	10%	196.200.000	156.960.000	19.620.000	176.580.000	19.620.000
20	Pipa Fintlon 6" AVV	8-Aug-14	1	btg	10%	1.440.000	1.152.000	144.000	1.296.000	144.000

NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	QTY	UNIT	TARIF	NILAI PEROLEHAN	AKUM. DEPRESIASI TAHUN 2022	AKUM. DEPRESIASI TAHUN 2023	NILAI BUKU TAHUN 2023
21	Elbow 45° LR SA/A234 WPB S40 - BKL	18-Mar-13	1	ea	10%	3.905.000	3.514.500	3.905.000	0
22	Elbow A234-WPB SMLS SCH40 BW BE 12" x 45	6-Feb-14	1	ea	10%	2.000.000	1.800.000	2.000.000	200.000
23	Dop PVC 3"	2-Jul-14			10%	195.000	156.000	19.500	175.500
24	Dop RRJ 3"	2-Jul-14			10%	182.000	145.600	18.200	163.800
25	Elbow 2"	2-Jul-14	1	ea	10%	19.500	15.600	1.950	17.550
26	Dop PVC 4"	4-Jul-14	1	ea	10%	250.000	200.000	25.000	225.000
27	Flange Sockt PVC 2"	17-Jul-14	2	ea	10%	6.000	4.800	600	5.400
28	Flange Sockt PVC 6"	8-Aug-14	1	ea	10%	195.000	156.000	19.500	175.500
29	Flange Sockt PVC 4"	19-Aug-14	1	ea	10%	14.000	11.200	1.400	12.600
30	Dop PVC 2" AW	25-Aug-14	4	ea	10%	12.000	9.600	1.200	10.800
31	Elbow 2" 45°AW	25-Aug-14	3	ea	10%	136.500	109.200	13.650	122.850
32	Elbow 2" AW	25-Aug-14	4	ea	10%	78.000	62.400	7.800	70.200
33	Elbow 3" AW	5-Sep-14			10%	31.200	24.960	3.120	28.080
34	Dop 2" AW	15-Sep-14			10%	9.000	7.200	900	8.100
35	Elbow 2" 45°TW	15-Sep-14			10%	91.000	72.800	9.100	81.900
36	Elbow 2" 90°TW	15-Sep-14			10%	39.000	31.200	3.900	35.100
37	Elbow PVC 8" AW	5-Jan-15	8	ea	10%	3.866.000	2.727.200	3.896.600	779.200
38	Clam Saddle 4x2"	12-Jan-15	1	ea	10%	110.500	77.350	11.050	98.400
39	Dop PVC 3"	12-Jan-15	1	ea	10%	59.000	41.300	5.900	47.200
40	Double Neuple GIP 3"	12-Jan-15	1	ea	10%	67.000	48.900	6.700	53.600
41	Elbow PVC (45) 3"	12-Jan-15	6	ea	10%	516.000	381.200	51.800	412.800
42	Elbow PVC (60) 3"	12-Jan-15	3	ea	10%	46.800	32.760	4.680	37.440
43	Reduser 2x1/2"	12-Jan-15	1	ea	10%	9.000	6.300	900	8.100
44	Tea PVC 3x3"	12-Jan-15	1	ea	10%	34.300	24.900	3.430	30.200
45	Tea PVC 4x3"	12-Jan-15	1	ea	10%	247.000	172.900	24.700	197.600
46	V. Socket PVC 2"	12-Jan-15	1	ea	10%	11.000	7.700	1.100	8.800
47	Dop Drat GIP 3"	14-Jan-15	1	ea	10%	46.000	32.200	4.600	36.800
48	Flug GIP 3"	14-Jan-15	1	ea	10%	7.000	4.900	700	6.300
49	Clam Saddle 3"	22-Jan-15	3	ea	10%	195.000	136.500	19.500	156.000
50	Clam Saddle 4"	22-Jan-15	4	ea	10%	338.000	226.600	33.800	270.400
51	Elbow PVC (45) 4"	27-Jan-15	6	ea	10%	480.000	336.000	48.000	384.000
52	Elbow PVC (60) 4"	27-Jan-15	6	ea	10%	516.000	361.200	51.600	412.800
53	Flange Sockt PVC 4"	27-Jan-15	6	ea	10%	516.000	361.200	51.600	412.800
54	Flange Sockt PVC 6"	27-Jan-15	2	ea	10%	360.000	273.000	36.000	294.000
55	Tea PVC 4x4"	27-Jan-15	3	ea	10%	312.000	218.400	31.200	249.600
56	Tea PVC 6x4"	27-Jan-15	1	ea	10%	432.000	302.400	43.200	345.600
57	PIPA PVC Ø 2"	5-Feb-15	2310	mtr	10%	68.145.000	47.701.500	6.814.500	54.516.000
58	PIPA PVC Ø 3"	5-Feb-15	1782	mtr	10%	124.740.000	87.318.000	12.474.000	98.792.000
59	Clam Saddle 6x2"	9-Feb-15	1	ea	10%	166.000	116.200	16.600	132.800
60	Dop PVC 2"	9-Feb-15	7	ea	10%	21.000	14.700	2.100	18.900
61	Dop PVC 3"	9-Feb-15	2	ea	10%	48.000	33.600	4.800	38.400
62	Elbow PVC 6"	9-Feb-15	8	ea	10%	1.576.000	1.103.200	157.600	1.260.800
63	Flange Sockt PVC 2"	9-Feb-15	2	ea	10%	74.000	51.800	7.400	59.200



NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	QTY	UNIT	TARIF	HILAI PEROLEHAN	AKUM. DEPRES. TAHUN 2022	AKUM. DEPRES. TAHUN 2023	HILAI BUKU TAHUN 2023
64	Tee PVC 2"	9-Feb-15	6	ea	10%	18.000	12.600	1.800	14.400
65	V. Socket 2"	9-Feb-15	1	ea	10%	11.000	7.700	1.100	8.800
66	Dop Besi Ø 2"	24-Feb-15	1	ea	10%	3.000	2.100	300	2.400
67	Double Nipple Ø 2"	24-Feb-15	1	ea	10%	7.000	4.900	700	5.600
68	Elbow Besi Ø 2"	24-Feb-15	2	ea	10%	18.000	12.600	1.800	14.400
69	Elbow PVC Ruckta Ø 2"	24-Feb-15	2	ea	10%	39.000	27.300	3.900	31.200
70	Pipa GIP Ø 2"	24-Feb-15	1	ea	10%	22.000	15.400	2.200	17.600
71	R. Socket Ø 2"	24-Feb-15	1	ea	10%	27.000	18.900	2.700	21.600
72	Elbow PVC 4"	26-Feb-15	2	ea	10%	680.000	476.000	68.000	544.000
73	Flange Socket PVC 3"	26-Feb-15	1	ea	10%	426.000	298.200	42.600	340.800
74	Flange Socket PVC 4"	26-Feb-15	4	ea	10%	1.704.000	1.198.800	170.400	1.369.200
75	Reduser Socket PVC 4x3"	26-Feb-15	1	ea	10%	305.000	213.500	30.500	244.000
76	V. Socket PVC 4"	26-Feb-15	1	ea	10%	170.000	119.000	17.000	136.000
77	Dop PVC 6"	20-Mar-15	1	ea	10%	67.000	46.900	6.700	53.600
78	Dop PVC 3" AW	26-Mar-15	1	ea	10%	20.000	14.000	2.000	16.000
79	Dop PVC 4" AW	26-Mar-15	1	ea	10%	40.000	28.000	4.000	32.000
80	Clam Saddle 3x2"	27-Mar-15	1	ea	10%	166.000	116.200	16.600	132.600
81	Dop PVC 2"	27-Mar-15	10	ea	10%	110.000	77.000	11.000	88.000
82	Dop PVC 3"	27-Mar-15	4	ea	10%	96.000	67.200	9.600	76.800
83	Double Nipple 4"	27-Mar-15	1	ea	10%	113.000	79.100	11.300	90.400
84	Elbow PVC (90) 2"	27-Mar-15	6	ea	10%	108.000	75.600	10.800	86.400
85	R. Socket PVC 4"	27-Mar-15	1	ea	10%	49.000	34.300	4.900	39.200
86	Reduser PVC 3x2"	27-Mar-15	4	ea	10%	96.000	67.200	9.600	76.800
87	Tee PVC 3x2"	27-Mar-15	4	ea	10%	156.000	109.200	15.600	124.600
88	Tee PVC 3x3"	27-Mar-15	7	ea	10%	343.000	240.100	34.300	274.400
89	Tee PVC 4x2"	27-Mar-15	3	ea	10%	777.000	543.900	77.700	621.600
90	Tee PVC 4x2"	27-Mar-15	10	ea	10%	1.460.000	1.026.000	146.000	1.184.000
91	V. Socket PVC 2"	31-Mar-15	1	ea	10%	117.000	81.900	11.700	93.600
92	Clam Saddle 4x2"	31-Mar-15	1	ea	10%	110.500	77.350	11.050	88.400
93	Loss Flange 4"	31-Mar-15	1	ea	10%	104.000	72.800	10.400	83.200
94	Pipa PVC RRJ 8"	7-Apr-15	5	big	10%	9.510.000	6.657.000	951.000	7.608.000
95	Air Leases 1"	14-Apr-15	1	ea	10%	680.000	476.350	68.050	544.400
96	Clam Saddle 4" x 2"	14-Apr-15	1	ea	10%	110.500	77.350	11.050	88.400
97	Clam Saddle 6" x 1"	14-Apr-15	1	ea	10%	115.000	80.500	11.500	92.000
98	Dop PVC 3"	14-Apr-15	1	ea	10%	24.000	16.800	2.400	19.200
99	Dop PVC 4"	14-Apr-15	4	ea	10%	198.000	137.200	19.800	156.500
100	Flange Loss 2"	14-Apr-15	1	ea	10%	95.000	66.500	9.500	75.500
101	R. Tee PVC 6x4" TW	14-Apr-15	1	ea	10%	432.000	302.400	43.200	345.600
102	Dop PVC 4"	20-Apr-15	2	ea	10%	500.000	350.000	50.000	400.000
103	Pipa PVC RRJ 8"	28-May-15	4	big	10%	7.608.000	5.325.600	760.800	6.046.800
104	Reduser PVC 4x2"	28-May-15	2	ea	10%	90.000	63.000	9.000	72.000
105	Air Release (Double) 2"	18-Aug-15	4	ea	10%	18.533.332	11.597.332	1.853.333	13.242.666
106	Clam Saddle 4x2"	18-Aug-15	2	ea	10%	203.234	142.264	20.323	162.587

NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	QTY	UNIT	TARIF	NILAI PEROLEHAN	AKUM. DEP. TAUN 2022	BIAYA DEPRESIASI TAUN 2022	AKUM. DEP. TAUN 2023	NILAI BUKU TAUN 2023
107	Elbow PVC 2"	18-Aug-15	4	ea	10%	675.132	472.592	67.513	540.106	135.026
108	Flange Sock PVC 2"	18-Aug-15	2	ea	10%	429.000	300.300	42.900	343.200	85.800
109	Reducer 4x2"	18-Aug-15	1	ea	10%	319.367	223.557	31.937	255.494	93.873
110	Double Nepple GIP 4"	20-Aug-15	1	ea	10%	117.000	81.900	11.700	93.600	23.400
111	Socket Drat Dalam 4"	20-Aug-15	1	ea	10%	14.000	9.900	1.400	11.200	2.800
112	V. Socket 3x4"	10-Sep-15	2	ea	10%	130.000	91.000	13.000	104.000	26.000
113	Dop PVC 3"	22-Sep-15	1	ea	10%	90.000	63.000	9.000	80.000	20.000
114	Elbow PVC 3"	22-Sep-15	1	ea	10%	90.000	63.000	9.000	80.000	20.000
115	Pipa Invlton PVC RRU 2"	5-Feb-16	1765	mtr	10%	68.635.000	41.301.000	6.863.500	48.184.500	20.650.500
116	Pipa Invlton PVC RRU 3"	5-Feb-16	1000	mtr	10%	89.200.000	53.520.000	8.920.000	62.440.000	28.790.000
117	Pipa Invlton PVC RRU 4"	5-Feb-16	250	mtr	10%	32.750.000	19.650.000	3.275.000	22.925.000	9.825.000
118	Air Valve 2"	14-Mar-16	4	ea	10%	18.160.000	10.896.000	1.816.000	12.112.000	5.448.000
119	Elbow 2"	14-Mar-16	4	ea	10%	628.000	376.800	62.800	439.600	188.400
120	Clam Sadie 4x2"	120	20.000	20.000	10%	20.000	20.000	20.000	140.000	60.000
121	Reducer Socket 4x2"	14-Mar-16	2	ea	10%	214.000	128.400	21.400	149.800	64.200
122	Water Meter 4"	14-Mar-16	1	ea	10%	14.072.000	8.443.200	1.407.200	9.850.400	4.221.600
123	Pipa 3"	11-Apr-16	30	big	10%	16.050.000	9.530.000	1.605.000	11.235.000	4.815.000
124	Pipa pvc s-12.5 RRU	9-May-16	157	big	10%	35.168.000	21.100.800	3.516.800	24.817.600	10.550.400
125	Pipa 3"	24-May-16	2	big	10%	1.068.000	634.800	105.800	740.600	317.400
126	Tee PVC RRU - 1"	15-Jun-16	1	ea	10%	400.000	240.000	40.000	260.000	120.000
127	Pipa GIP Ø 1"	2-Aug-16	16	ea	10%	5.966.080	3.339.648	556.608	3.896.256	1.669.824
128	Pipa GIP Ø 1"	5-Aug-16	34	big	10%	11.827.920	7.096.752	1.182.792	9.279.544	3.548.376
129	Elbow GIP Ø 2"	5-Aug-16	8	ea	10%	424.000	254.400	42.400	266.800	117.200
130	Tee PVC RRU Ø 2x2"	5-Aug-16	1	ea	10%	304.000	182.400	30.400	212.800	91.200
131	Tee PVC RRU Ø 3x2"	5-Aug-16	6	ea	10%	2.706.000	1.623.600	270.600	1.894.200	811.800
132	Tee PVC RRU Ø 4x3"	5-Aug-16	11	ea	10%	9.713.000	5.827.800	971.300	6.799.100	2.913.900
133	Tee PVC RRU Ø 4x4"	5-Aug-16	2	ea	10%	1.054.000	638.400	108.400	744.300	319.200
134	Dop PVC Ø 2"	5-Aug-16	11	ea	10%	1.991.000	1.194.600	199.100	1.393.700	597.300
135	Dop PVC Ø 3"	5-Aug-16	8	ea	10%	2.232.000	1.339.200	223.200	1.962.400	669.600
136	Dop PVC Ø 4"	5-Aug-16	5	ea	10%	1.795.000	1.077.000	179.500	1.256.500	538.500
137	Elbow GIP Ø 3"	5-Aug-16	10	ea	10%	1.570.000	942.000	157.000	1.099.000	471.000
138	Flange Socket Ø 4"	5-Aug-16	4	ea	10%	340.000	204.000	34.000	238.000	102.000
139	Tee PVC RRU Ø 6x4"	5-Aug-16	2	ea	10%	3.740.000	2.244.000	374.000	2.818.000	1.122.000
140	Pipa Infilinon Ø 2"	5-Aug-16	835	mtr	10%	34.235.000	20.541.000	3.423.500	23.984.500	10.270.500
141	Pipa Infilinon Ø 3"	5-Aug-16	1120	mtr	10%	104.160.000	62.668.000	10.416.000	72.912.000	31.248.000
142	Pipa Infilinon Ø 4"	5-Aug-16	108	mtr	10%	14.688.000	8.912.800	1.468.800	10.281.000	4.406.400
143	Tee PVC RRU Ø 6x4"	6-Aug-16	2	ea	10%	3.740.000	2.244.000	374.000	2.818.000	1.122.000
144	Pipa Infilinon PVC RRU Ø 2"	8-Aug-16	1326	mtr	10%	54.366.000	32.619.600	5.436.600	38.056.200	16.209.800
145	Pipa Infilinon PVC RRU Ø 3"	8-Aug-16	400	mtr	10%	37.200.000	22.320.000	3.720.000	26.040.000	11.160.000
146	Dop PVC Ø 2"	12-Aug-16	11	ea	10%	1.991.000	1.194.600	199.100	1.393.700	597.300
147	Dop PVC Ø 3"	12-Aug-16	8	ea	10%	2.232.000	1.339.200	223.200	1.962.400	669.600
148	Dop PVC Ø 4"	12-Aug-16	5	ea	10%	1.795.000	1.077.000	179.500	1.256.500	538.500
149	Elbow GIP Ø 2"	12-Aug-16	8	ea	10%	424.000	254.400	42.400	266.800	117.200

NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	QTY	UNIT	TARIF	NILAI PEROLEHAN	AKUM. DEPREE. BIAYA DEPRESIASI		NILAI BUKU	
							TAHUN 2022	AKUM. DEPREE. TAHUN 2022	TAHUN 2023	AKUM. DEPREE. TAHUN 2023
150	Elbow GIP Ø 3"	12-Aug-16	10	ea	10%	1.570.000	942.000	157.000	1.099.000	471.000
151	Flange Socket PVC Ø 4"	12-Aug-16	4	ea	10%	340.000	204.000	34.000	238.000	102.000
152	Tee PVC RRJ Ø 2"x2"	12-Aug-16	1	ea	10%	304.000	182.400	30.400	212.800	91.200
153	Tee PVC RRJ Ø 3x2"	12-Aug-16	6	ea	10%	2.706.000	1.623.600	270.600	1.894.200	811.800
154	Tee PVC RRJ Ø 3x3"	12-Aug-16	4	ea	10%	1.192.000	715.200	119.200	854.400	357.600
155	Tee PVC RRJ Ø 4x2"	12-Aug-16	10	ea	10%	8.880.000	5.298.000	883.000	6.181.000	2.549.000
156	Tee PVC RRJ Ø 4x2"	12-Aug-16	10	ea	10%	6.740.000	4.044.000	674.000	4.718.000	2.022.000
157	Tee PVC RRJ Ø 4x3"	12-Aug-16	11	ea	10%	7.414.000	4.448.400	741.400	5.189.800	2.224.200
158	Tee PVC RRJ Ø 4x4"	12-Aug-16	2	ea	10%	1.084.000	638.400	106.400	744.000	319.200
159	Pipa Infintion Ø 3"	12-Aug-16	42	mtr	10%	3.906.000	2.343.600	390.600	2.754.000	1.171.800
160	Pipa Infintion Ø 4"	12-Aug-16	288	mtr	10%	39.168.000	23.500.800	3.916.800	27.417.600	11.750.400
161	Pipa Infintion PVC RRJ Ø 2"	12-Aug-16	3000	mtr	10%	123.000.000	73.800.000	12.300.000	86.100.000	39.900.000
162	Reklas dari Pasang baru SR 2013	31-Dec-16	1		10%	216.751.740	216.751.740	38.125.290	252.877.030	108.375.870
163	Reklas dari Pasang baru SR 2014	31-Dec-16	1		10%	57.204.400	34.322.640	5.720.440	40.043.080	17.161.320
164	Reklas dari Pasang baru SR 2015	31-Dec-16	1		10%	634.995.030	380.739.018	63.456.503	444.195.521	190.269.509
165	Reklas dari Pasang baru SR 2016	31-Dec-16	1		10%	1.220.255.168	732.153.101	122.025.517	854.178.617	368.076.550
166	Clamp Saddle 6"	5-Oct-17	1	ea	10%	150.000	75.000	15.000	90.000	60.000
167	Water Meter - Barindo Kuningan 4"	11-Dec-18	1	ea	10%	26.912.550	10.765.020	2.691.255	13.456.275	5.456.275
168	Ceek Valve Flange - Kuningan SNI 6"	11-Dec-18	1	ea	10%	5.948.700	2.139.480	534.870	2.674.350	2.674.350
169	Elbow GIP SNI 4"	11-Dec-18	4	ea	10%	858.000	343.200	85.800	429.000	429.000
170	Flang Sock PVJ RRJ SNI 6"	11-Dec-18	4	ea	10%	1.875.300	750.120	187.530	937.650	937.650
171	Reducer PVC RRJ SNI 8 x 4"	11-Dec-18	1	ea	10%	347.100	138.840	34.710	173.560	173.560
172	Tee PVC RRJ SNI 6"	11-Dec-18	1	ea	10%	2.193.500	877.400	219.350	1.096.750	1.096.750
173	Tee GIP SNI 4"	11-Dec-18	1	ea	10%	1.820.000	728.000	182.000	910.000	910.000
174	Baut - Steel SNI 5/8 x 3"	11-Dec-18	57	ea	10%	280.000	104.000	26.000	130.000	130.000
175	Pipa Inviton PVC S-12,5 RRJ 6"	11-Dec-18	60	ea	10%	104.520.000	41.800.000	10.452.000	52.290.000	52.290.000
176	Pipa PVC RRJ Ø 6" - 5 Btg	31-Dec-18	5	ea	10%	7.800.000	3.120.000	780.000	3.900.000	3.900.000
177	Los Flange 2"	31-Jan-19	20	ea	10%	2.600.000	1.147.583	293.000	1.440.583	1.489.417
178	Pipa Infintion AW 3"	20-Sep-19	2	btg	10%	460.000	146.250	45.000	191.250	254.750
179	Flange sock 3" Rucika	20-Sep-19	2	ea	10%	150.000	48.750	15.000	63.750	96.250
180	Elbow 4" AW	20-Sep-19	4	ea	10%	300.000	97.500	30.000	127.500	172.500
181	Jaringan Pipa Transmisi Distribusi	30-Dec-20			10%	96.000.000	19.200.000	9.600.000	28.800.000	67.200.000
182	Jaringan Pipa Transmisi Distribusi	30-Dec-20			10%	122.000.000	24.400.000	12.200.000	38.600.000	85.400.000
183	Jaringan Pipa Transmisi Distribusi	30-Dec-20			10%	195.000.000	39.000.000	19.500.000	58.500.000	138.500.000
184	Jaringan Pipa Transmisi Distribusi	30-Dec-20			10%	131.000.000	26.200.000	13.100.000	39.300.000	91.700.000
185	Jaringan Pipa Transmisi Distribusi	2-Jan-21			10%	1.728.791.621	345.758.324	172.879.162	518.637.496	1.210.154.135
186	Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Muara Sakti	2-Jan-21			10%	1.084.509.420	216.901.684	108.450.842	325.352.538	759.156.894
187	Jaringan Pipa Distribusi Kecamatan Muara Dua	2-Jan-21			10%	1.813.071.178	362.614.236	181.307.118	54.192.121	1.299.149.825
	<b>JUMLAH TRANS &amp; DISTRIBUSI</b>					<b>9.550.120.932</b>	<b>3.953.960.051</b>	<b>924.671.993</b>	<b>4.378.332.044</b>	<b>4.681.798.387</b>
<b>VIII PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b>										
1	Sney (Automatic dan SNI)	17-Feb-15	1	unit	10%	12.000.000	8.400.000	1.200.000	9.600.000	2.400.000
2	Jack Hammer	11-Apr-16	1	unit	10%	11.115.000	6.969.000	1.111.500	7.780.500	3.334.500

NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	QTY	UNIT	TARIF	NILAI PEROLEHAN	AKUM. DEPRES. TAHUN 2022	AKUM. DEPRES. TAHUN 2023	NILAI BUKA TAHUN 2023
3	Cutting Road	11-Apr-16	1	unit	10%	32.940.000	19.784.000	3.294.000	23.058.000
4	Contactor LCD38	1-Jul-16	2	ea	10%	2.600.000	1.560.000	260.000	780.000
5	Contactor LCD38	5-Sep-16	3	ea	10%	4.050.000	2.430.000	405.000	2.635.000
6	Contractor LCD1 38 Schneider	20-Jun-17	3	ea	10%	4.050.000	2.025.000	405.000	2.430.000
7	Pompa Shimadzu Duit Jet Pump	25-Sep-17	1	unit	10%	1.600.000	800.000	160.000	940.000
8	Meteran Air 1"	10-Oct-17	1	unit	10%	1.500.000	750.000	150.000	900.000
9	Contractor LCD 38 M7	12-Dec-18	2	unit	10%	2.300.000	960.000	230.000	1.150.000
10	Contractor LCD 38 M7	31-Dec-18	2	unit	10%	2.600.000	1.040.000	260.000	1.300.000
11	Meter Jalan	10-Jan-20			10%	5.280.000	1.540.000	298.000	2.982.000
12	Tangki Air 2.000 Liter 2 buah	17-Feb-20			10%	5.000.000	1.416.667	500.000	3.083.333
13	Kaki Tangki HJ Kapasitas 5.000 Liter	17-Feb-20			10%	7.000.000	1.583.333	700.000	4.316.667
14	Kaki Tangki HJ Kapasitas 2.000 Liter	17-Mar-20			10%	5.700.000	1.615.000	570.000	2.185.000
15	Tangki Air 3.000 Liter 2 buah	17-Mar-20			10%	3.500.000	991.667	350.000	2.158.333
16	Peralatan Kantor	30-Dec-20			10%	45.360.000	9.076.000	4.538.000	13.814.000
17	Pompa sanyo dan panasonic	12-Apr-21	2		10%	1.150.000	124.583	115.000	239.583
18	Iresin pompa penyedot lumpur	15-Nov-21	1		10%	5.830.000	681.583	583.000	1.214.583
19	Water meter 1/2 in	2-Jan-21			10%	554.439.000	110.887.800	55.443.900	166.331.700
20	Jack Hammer	18-Jan-22			10%	3.400.000	340.000	340.000	880.000
	<b>JUMLAH PERALATAN &amp; PERLENGKAPAN</b>					<b>711.434.000</b>	<b>172.964.633</b>	<b>71.143.400</b>	<b>244.108.033</b>
									<b>487.325.987</b>
<b>IX</b>	<b>KENDARAAN</b>								
1	Toyota Avanza F-51-G M/T	24-Aug-12	1	unit	10%	174.150.000	174.150.000	0	174.150.000
2	Toyota Innova Luxury TG-40-V AT Lux	24-Aug-12	1	unit	10%	319.550.000	319.550.000	0	319.550.000
3	Kendaraan Reda Dua - Honda	11-Oct-12	4	unit	10%	69.308.000	69.308.000	0	69.308.000
4	Honda New Vario Techno 125 CBS	11-Oct-12	1	unit	10%	16.360.000	16.360.000	0	16.360.000
	<b>JUMLAH KENDARAAN</b>					<b>579.368.000</b>	<b>579.368.000</b>	<b>0</b>	<b>579.368.000</b>
<b>X</b>	<b>INVENTARIS KANTOR</b>								
1	Lemari Arsip Tempahan Bag Langganaan	25-Nov-11	1	unit	25%	10.362.100	10.362.100	0	10.362.100
2	Lemari Arsip Tempahan Bag Umum	25-Nov-11	1	unit	25%	7.060.000	7.060.000	0	7.060.000
3	Lemari Arsip Tempahan Bag Sekretariat	25-Nov-11	1	unit	25%	3.565.000	3.565.000	0	3.565.000
4	Lemari Buffet	25-Nov-11	1	unit	25%	4.440.000	4.440.000	0	4.440.000
5	Meja Biro Biasa Tempahan	25-Nov-11	1	unit	25%	5.802.000	5.802.000	0	5.802.000
6	Meja 1/2 Biro	25-Nov-11	5	unit	25%	11.921.000	11.921.000	0	11.921.000
7	Meja Komputer dan Kursi	25-Nov-11	1	unit	25%	2.400.500	2.400.500	0	2.400.500
8	Kursi Putar Sedang	25-Nov-11	2	unit	25%	2.176.000	2.176.000	0	2.176.000
9	Kursi "Futura"	25-Nov-11	3	unit	25%	777.000	777.000	0	777.000
10	Kursi Tamu	25-Nov-11	1	set	25%	6.667.000	6.667.000	0	6.667.000
11	Filing Kabinet	25-Nov-11	2	unit	25%	4.668.000	4.668.000	0	4.668.000
12	Telepon Kantor	29-Nov-11	1	unit	25%	1.305.000	1.305.000	0	1.305.000
13	Kalkas	30-Nov-11	1	unit	25%	2.367.000	2.367.000	0	2.367.000
14	2 Unit AC	2-Dec-11	2	unit	25%	7.866.200	7.866.200	0	7.866.200

NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	QTY	UNIT	TARIF	NILAI PEROLEHAN	AKUM. DEP. BUKU DEPRESIASI		NILAI BUKU TAHUN 2023
							TAHUN 2022	TAHUN 2023	
15	Komputer Rakitan dan Stabilizer	19-Dec-11	1	unit	25%	6.925.000	0	0	6.925.000
16	Laptop "Toshiba"	19-Dec-11	1	unit	25%	9.750.000	0	0	9.750.000
17	Printer A3	19-Dec-11	1	unit	25%	6.695.000	0	0	6.695.000
18	Laptop Core i5	6-Dec-11	3	unit	25%	44.503.500	0	0	44.503.500
19	PC Rakitan Core i-7	6-Dec-11	1	unit	25%	13.352.400	0	0	13.352.400
20	Printer "Cannon" MP258	6-Dec-11	1	unit	25%	1.660.100	0	0	1.660.100
21	Kursi "Futura"	3-Jul-05	1	unit	25%	260.000	0	0	260.000
22	Kursi Pular Sedang	3-Jul-05	3	unit	25%	3.294.000	0	0	3.294.000
23	Kursi Direksi	3-Jul-05	1	unit	25%	2.754.000	0	0	2.754.000
24	Kursi Hadap	3-Jul-05	2	unit	25%	1.464.000	0	0	1.464.000
25	Dispenser + kaki	3-Jul-05	1	unit	25%	750.000	0	0	750.000
26	Kursi Kabag	27-Apr-12	4	unit	25%	7.092.000	0	0	7.092.000
27	Cash Box	3-May-12	1	unit	25%	405.000	0	0	405.000
28	Meja 1/2 Biro Olimpic	4-May-12	2	unit	25%	1.480.000	0	0	1.480.000
29	AC 2PK	6-May-12	3	unit	25%	22.703.700	0	0	22.703.700
30	AC 1PK	6-May-12	2	unit	25%	7.868.200	0	0	7.868.200
31	TV LED 32"	6-May-12	2	unit	25%	14.994.400	0	0	14.994.400
32	HANDY CAM	6-May-12	2	unit	25%	9.908.700	0	0	9.908.700
33	Kamera Digital 12.1 MEGAPIXEL	6-May-12	4	unit	25%	17.734.000	0	0	17.734.000
34	Kamera 167 MP MEGAPIXEL	6-May-12	1	unit	25%	19.869.100	0	0	19.869.100
35	Pen Leaser	9-May-12	1	unit	25%	1.220.000	0	0	1.220.000
36	Meja Komputer	9-May-12	5	unit	25%	2.750.000	0	0	2.750.000
37	Neon Box	10-May-12	1	unit	25%	2.000.000	0	0	2.000.000
38	Komputer Rakitan	15-May-12	3	unit	25%	31.098.000	0	0	31.098.000
39	Stabilizer 15.000 VA	15-May-12	1	unit	25%	10.456.300	0	0	10.456.300
40	Printer Cannon 267	15-May-12	5	unit	25%	4.213.000	0	0	4.213.000
41	Printer HP LASERJET P2055DN	15-May-12	5	unit	25%	6.718.100	0	0	6.718.100
42	Printer HP OFFICE JET	15-May-12	1	unit	25%	5.840.500	0	0	5.840.500
43	Infocus OHPXGA1024 X 768	15-May-12	1	unit	25%	15.957.100	0	0	15.957.100
44	Lemari Anisip 2 Pintu	15-May-12	3	unit	25%	11.160.000	0	0	11.160.000
45	Kursi Staff "Chitose"	15-May-12	35	ea	25%	14.192.500	0	0	14.192.500
46	Kursi Tungku 4 Dudukdn	15-May-12	2	set	25%	3.461.000	0	0	3.461.000
47	Brankas "CHUBB"	15-May-12	2	unit	25%	25.219.000	0	0	25.219.000
48	Portable PA/Presentation System	5-Jul-12	1	unit	25%	7.405.000	0	0	7.405.000
49	Lemari Anisip 2 Pintu Tempahan	18-Jul-12	3	unit	25%	9.664.500	0	0	9.664.500
50	Meja 1/2 Biro Tempahan	18-Jul-12	8	unit	25%	16.264.000	0	0	16.264.000
51	Meja Biro Tempahan uk. 160 x 90 x 75 Cm	18-Jul-12	3	unit	25%	13.561.000	0	0	13.561.000
52	Meja Rapat Tempahan untuk 15 peserta	18-Jul-12	1	unit	25%	3.670.500	0	0	3.670.500
53	Brekret TV	19-Jul-12	2	unit	25%	700.000	0	0	700.000
54	Kalkulator Citizen 12 Digit	1-Aug-12	2	ea	25%	328.000	0	0	328.000
55	Server Hp Proliant ML350	25-Sep-12	1	unit	25%	32.142.000	0	0	32.142.000
56	Komputer Rakitan Core i5 -2320	25-Sep-12	3	unit	25%	31.041.000	0	0	31.041.000
57	UPS ICA ST1231C	25-Sep-12	1	unit	25%	11.625.000	0	0	11.625.000

NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	QTY	UNIT	TARIF	NILAI PEROLEHAN	AKUM. DEPRE. TAHUN 2022	BIAYA DEPRESIAS TAHUN 2022	AKUM. DEPRE. TAHUN 2023	NILAI BUKU TAHUN 2023
58	Hand Phone Nokia	25-Sep-12	5	unit	25%	7.335.000	0	7.335.000	0	7.335.000
59	Accessories Billing System	25-Sep-12	-	Isn	25%	5.361.000	0	5.361.000	0	5.361.000
60	Absen Sdlk Jari	28-Sep-12	1	unit	25%	2.970.000	0	2.970.000	0	2.970.000
61	Dispenser Normal dan Panas	17-Oct-12	1	unit	25%	135.000	0	135.000	0	135.000
62	Kaki Dispenser	17-Oct-12	1	unit	25%	135.000	0	135.000	0	135.000
63	Meja Pimping Power Fish	19-Oct-12	1	unit	25%	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000
64	Bad Pimping DHS	19-Oct-12	4	ea	25%	230.000	0	230.000	0	230.000
65	Brekret Puler	29-Oct-12	1	unit	25%	450.000	0	450.000	0	450.000
66	TV LG LED 32LS3110	31-Oct-12	2	unit	25%	8.060.000	0	8.060.000	0	8.060.000
67	Pengadaan program billing system	1-Nov-12	-	-	25%	198.982.000	0	198.982.000	0	198.982.000
68	Pengadaan Counter Kasir Lengkap Lemari	8-Nov-12	-	-	25%	46.450.000	0	46.450.000	0	46.450.000
69	Papan White Board Ukuran 244 x 122 Cm	28-Nov-12	1	unit	25%	750.000	0	750.000	0	750.000
70	Papan White Board Ukuran 60 x 90 cm	28-Nov-12	1	unit	25%	250.000	0	250.000	0	250.000
71	White Board A3	7-Dec-12	1	unit	25%	75.000	0	75.000	0	75.000
72	White Board 90 x 120 cm	7-Dec-12	1	unit	25%	350.000	0	350.000	0	350.000
73	Papan Tulis White Board Magnet 60x80Cm	19-Dec-12	1	unit	25%	250.000	0	250.000	0	250.000
74	Camera Merek Sony	29-Jan-13	2	unit	25%	2.800.000	0	2.800.000	0	2.800.000
75	WiFi Merek DLink - Bagian Teknik	28-Mar-13	1	unit	25%	250.000	0	250.000	0	250.000
76	Lukisan Kaligrafi Ayat kursi	27-May-13	1	unit	25%	160.000	0	160.000	0	160.000
77	Antena Parabola (Merek Venus)	28-Aug-13	1	unit	25%	920.000	0	920.000	0	920.000
78	Receiver Parabola merek Minrix	28-Aug-13	1	unit	25%	355.000	0	355.000	0	355.000
79	Motor Penggerak Parabola + Receiver Motor	28-Aug-13	1	unit	25%	410.000	0	410.000	0	410.000
80	Papan Tulis untuk keperluan WTP	10-Sep-13	1	unit	25%	233.000	0	233.000	0	233.000
81	Dispenser	16-Sep-13	1	unit	25%	150.000	0	150.000	0	150.000
82	Kerpet Buana Biru	18-Sep-13	1	unit	25%	217.500	0	217.500	0	217.500
83	Kipas angin 18" Merek panasonic	18-Sep-13	1	unit	25%	400.000	0	400.000	0	400.000
84	Printer Produksi - WTP	24-Sep-13	1	unit	25%	730.000	0	730.000	0	730.000
85	Box Panel Lengkap Isi + Biaya Pasang	29 Okt '13	1	set	25%	2.450.000	0	2.450.000	0	2.450.000
86	Kalkulator Casio 14 Digit	30-Oct-13	1	unit	25%	140.000	0	140.000	0	140.000
87	Kipas Angin	04 Nov 13	1	unit	25%	135.000	0	135.000	0	135.000
88	Kaki Dispenser	13-Nov-13	1	unit	25%	150.000	0	150.000	0	150.000
89	Lukisan	18-Dec-13	2	ea	25%	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
90	Kursi Vultura + sarung	31-Dec-13	1	unit	25%	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000
91	Meja Makan Bulat	31-Dec-13	1	unit	25%	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000
92	Meja Buah	31-Dec-13	1	unit	25%	150.000	0	150.000	0	150.000
93	Printer Cannon MP 237 - Adm dan Keuangan	18-Feb-13	1	unit	25%	720.000	0	720.000	0	720.000
94	Batu prasasti uk. 60x80 cm grafit hitam	31-Dec-13	1	unit	25%	3.570.000	0	3.570.000	0	3.570.000
95	Kerpet Buana Biru - Reklas ke Biaya	(217.500)								(217.500)
96	Printer Epson L210 - Ka. Hub. Pelanggaran	8-Apr-14	1	unit	25%	2.450.000	0	2.450.000	0	2.450.000
97	Printer Epson L210 - Ka. Hub. Pelanggaran	15-Apr-14	1	unit	25%	2.450.000	0	2.450.000	0	2.450.000
98	Mesin Absensi X302	19-May-14	1	unit	25%	3.080.000	0	3.080.000	0	3.080.000
99	Kipas Angin Yundal	1-Sep-14	1	unit	25%	480.000	0	480.000	0	480.000
100	Meja komputer	1-Sep-14	1	unit	25%	650.000	0	650.000	0	650.000

NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	QTY	UNIT	TARIF	NILAI PEROLEHAN	AKUM. DEP. BIAYA DEPRESIASI		NILAI BUKU TAHUN 2023
							TAHUN 2022	TAHUN 2023	
101	Printer Epson L210	30-Mar-15	1	unit	25%	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000
102	Perangkat Pabola + ongkos - Beluphat	23-Apr-15	1	set	25%	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000
103	Perangkat Pabola + ongkos pasang di WTP	23-Apr-15	1	set	25%	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000
104	Ups ICA 1200 YA Keperluan Direktur	24-Apr-15	1	unit	25%	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
105	Hp Bagian Lainngan	15-May-15	3	unit	25%	6.456.000	6.456.000	0	6.456.000
106	TV Toshiba 32 Inc Keperluan Produksi	15-May-15	1	unit	25%	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000
107	Printer bagian Tehnik	31-Jul-15	1	unit	25%	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000
108	Koreksi Reklas Bahan panel 2013	31-Dec-15	1	unit	25%	6.570.000	6.570.000	0	6.570.000
109	Komputer cover I5-5200, mem2 GB,HDD 500 GB	15-Jan-16	6	unit	25%	74.220.000	74.220.000	0	74.220.000
110	UPS ICA CE 1200VA	15-Jan-16	6	unit	25%	35.976.000	35.976.000	0	35.976.000
111	Printer EPSON L-220	15-Jan-16	6	unit	25%	17.520.000	17.520.000	0	17.520.000
112	Meja Komputer CD 120	15-Jan-16	6	unit	25%	4.277.700	4.277.700	0	4.277.700
113	AC Samsung AS09JRLAWKN 1 pk	15-Jan-16	7	unit	25%	29.400.700	29.400.700	0	29.400.700
114	Meja Meeting Petak Persegi 180x90x75 cm	15-Jan-16	7	unit	25%	1.703.000	1.703.000	0	1.703.000
115	Kursi Steel FUTURA	15-Jan-16	23	unit	25%	9.855.500	9.855.500	0	9.855.500
116	Meja Buai Expo 100x100x75 cm	15-Jan-16	1	unit	25%	1.198.000	1.198.000	0	1.198.000
117	Lemari Anrip Mustang Steel 2 pintu kaca	15-Jan-16	1	unit	25%	2.716.000	2.716.000	0	2.716.000
118	Monitor LG E1910S LED Square 19 Inc	15-Jan-16	1	unit	25%	2.104.900	2.104.900	0	2.104.900
119	Kursi Direktur Beigo sandaran tinggi	15-Jan-16	2	unit	25%	5.275.000	5.275.000	0	5.275.000
120	Filling Cabinet Mustang Steel 4 lacl	15-Jan-16	2	unit	25%	4.880.800	4.880.800	0	4.880.800
121	Kursi Kasir Hidrolik putar	15-Jan-16	2	unit	25%	3.104.000	3.104.000	0	3.104.000
122	Kursi Kabag Mustang sandaran tinggi	15-Jan-16	1	unit	25%	1.668.400	1.668.400	0	1.668.400
123	Dispenser Bagian Produksi dan pecah belah	22-Feb-16	1	ea	25%	345.200	345.200	0	345.200
124	CCTV Ruangn Bendahara	15-Jul-16	1	unit	25%	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000
125	Meja 1/2 Biro	31-Jan-16	4	unit	25%	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000
126	Monitor LED Sasung 23"	11-Jun-19	1	unit	25%	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
127	Monitor LED Sasung 19"	6-Dec-19	1	unit	25%	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
128	Printer	13-Apr-20	1	unit	25%	2.500.000	2.500.000	340.000	2.160.000
129	HP Samsung	25-Sep-20	1	unit	25%	7.600.000	7.600.000	250.000	7.350.000
130	Printer Epson L 3110	2-Oct-20	1	unit	25%	1.418.887	1.418.887	925.000	493.887
131	Laptop	2-Jan-21	1	unit	25%	3.960.000	3.960.000	1.900.000	2.060.000
132	Laptop	2-Jan-21	1	unit	25%	10.500.000	10.500.000	625.000	9.875.000
133	Printer	2-Jan-21	2	unit	25%	7.250.000	7.250.000	5.250.000	2.000.000
134	Webcam	2-Jan-21	1	unit	25%	4.600.000	4.600.000	2.300.000	2.300.000
135	Finger print	20-Apr-21	1	unit	25%	680.000	680.000	170.000	510.000
136	Laptop Asus	6-Nov-21	3	unit	25%	1.219.167	1.219.167	992.500	216.667
137	CCTV WTP (6ch)	31-Dec-21	6	ch	25%	33.000.000	9.900.000	8.250.000	14.850.000
138	CCTV Lanet Pembayaran (2ch)	31-Dec-21	2	ch	25%	8.275.530	2.068.883	2.068.883	4.137.755
139	CCTV Kantor pusat (4ch)	31-Dec-21	4	ch	25%	3.407.983	851.916	851.916	1.703.132
140	CCTV rumah dinas (2ch)	31-Dec-21	2	ch	25%	5.983.536	1.405.884	1.405.884	2.991.768
141	HP Samsung A13	1-Jan-22	1	ch	25%	917.088	917.088	1.834.175	1.834.175
142	Mesin Potong Rumpul	1-Jan-22	1	unit	25%	2.897.000	749.250	749.250	1.408.500
						1.540.000	385.000	385.000	770.000

NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN PEROLEHAN	QTY	UNIT	TARIF	NILAI PEROLEHAN	AKUM. DEP. TAHUN 2022	BIAYA DEPRESIASI TAHUN 2022	AKUM. DEP. TAHUN 2023	NILAI BUKU TAHUN 2023
143	Mesin Pompa	3-Feb-23	1		25%	1.000.000	0	229.167	229.167	770.833
144	Support Mesin Pompa Hisap	9-Feb-23	1		25%	1.065.000	0	381.563	381.563	1.283.438
145	Printer Epson L3210 Kasir	15-Mar-23	1		25%	2.400.000	0	500.000	500.000	1.900.000
146	Finger print (Kantor Puset)	15-Mar-23	1		25%	850.000	0	177.083	177.083	672.917
147	Finger print (WTP)	27-Oct-23	1		25%	850.000	0	35.417	35.417	814.583
148	Printer Epson L121 Bap. Teknik	31-Oct-23	1		25%	1.942.500	0	80.938	80.938	1.861.563
	<b>JUMLAH INVENTARIS KANTOR</b>					<b>1.193.511.179</b>	<b>1.110.487.120</b>	<b>32.169.686</b>	<b>1.142.656.806</b>	<b>50.854.373</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>					<b>12.421.261.311</b>	<b>6.140.465.592</b>	<b>1.065.667.800</b>	<b>7.206.123.392</b>	<b>6.215.137.919</b>